

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2020



PEMERINTAH KOTA SURABAYA



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 38 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pencapaian dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020 serta adanya perubahan kebijakan dan program prioritas Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
25. Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 8);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Agustus 2020

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

DIUNDANGKAN DI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19591017 199303 2 006

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 6
1.4. Maksud dan Tujuan	I - 7
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I - 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 20
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II - 50
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II - 150
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II - 161
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019	III - 1
3.1.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020	III - 11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 18
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III - 19
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 22
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III - 26
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	IV - 6

4.2.1	Isu Strategis	IV - 6
4.2.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV - 11
4.2.3	Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV - 16
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V - 1
5.1	Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2020.....	V - 1
5.2	Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2020.....	V - 50
BAB VI PENUTUP.....		VI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan di Kota Surabaya.....	II - 7
Tabel II.1a	Luasan Kawasan RTH.....	II - 8
Tabel II.2	Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 13
Tabel II.3	Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan.....	II - 14
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2019	II - 17
Tabel II.5	Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama.....	II - 18
Tabel II.6	Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019	II - 19
Tabel II.7	Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019	II - 20
Tabel II.8	Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 20
Tabel II.9	Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – 2019 (dalam Juta Rp)	II - 22
Tabel II.10	Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2019 (dalam Juta Rp)	II - 23
Tabel II.11	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)...	II - 25
Tabel II.12	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – Triwulan II 2020....	II - 28
Tabel II.13	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – Triwulan II 2020 (%)	II - 29
Tabel II.14	Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2017 – Triwulan II 2020	II - 31
Tabel II.15	PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 33

Tabel II.16 Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 34
Tabel II.17 Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya	II - 35
Tabel II.18 Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan Kota Surabaya	II - 35
Tabel II.19 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 36
Tabel II.20 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 37
Tabel II.21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2016 - Triwulan II 2020	II - 38
Tabel II.22 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki- Laki Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 39
Tabel II.23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 39
Tabel II.24 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 - Triwulan II 2020.....	II - 40
Tabel II.25 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 40
Tabel II.26 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016– Triwulan II 2020.....	II - 41
Tabel II.27 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 41
Tabel II.28 Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya Tahun 2017 – Triwulan II 2020	II - 42
Tabel II.29 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2017 – Triwulan II 2020	II - 43
Tabel II.30 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 46
Tabel II.31 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 –Triwulan II 2020	II - 46
Tabel II.32 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 – Triwulan II 2020.....	II - 48

Tabel II.33 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 49
Tabel II.34 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2019	II - 51
Tabel II.35 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2019	II - 53
Tabel II.36 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 55
Tabel II.37 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 56
Tabel II.38 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 58
Tabel II.39 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 59
Tabel II.40 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2019.....	II - 59
Tabel II.41 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 62
Tabel II.42 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019	II - 62
Tabel II.43 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019.....	II - 62
Tabel II.44 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2019...	II - 63
Tabel II.45 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 64
Tabel II.46 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2016 – Triwulan II 2020 ..	II - 66
Tabel II.47 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 66
Tabel II.48 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 66
Tabel II.49 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 67
Tabel II.50 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2016 - Triwulan II 2020	II - 68

Tabel II.51 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 69
Tabel II.52 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 69
Tabel II.53 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 70
Tabel II.54 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 70
Tabel II.55 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 72
Tabel II.56 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 73
Tabel II.57 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya	II - 74
Tabel II.58 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 76
Tabel II.59 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya	II - 77
Tabel II.60 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa	II - 77
Tabel II.61 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 80
Tabel II.62 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 81
Tabel II.63 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun 2016 –Triwulan II 2020.....	II - 82
Tabel II.64 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 83
Tabel II.65 Kejadian Kebakaran per Penyebab.....	II - 84
Tabel II.66 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 84
Tabel II.67 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 85
Tabel II.68 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 87
Tabel II.69 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 88

Tabel II.70 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 – Triwulan II 2020	II - 89
Tabel II.71 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 90
Tabel II.72 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir	II - 90
Tabel II.73 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 91
Tabel II.74 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016 –Triwulan II 2020	II - 92
Tabel II.75 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 93
Tabel II.76 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2017 – Triwulan II 2020	II - 94
Tabel II.77 KDRT Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 94
Tabel II.78 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 95
Tabel II.79 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 96
Tabel II.80 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 97
Tabel II.81 Pola Pangan Harapan Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 98
Tabel II.82 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2016 - Triwulan II 2020.....	II - 99
Tabel II.83 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 - Triwulan II 2020	II - 99
Tabel II.84 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2016 - Triwulan II 2020	II - 100
Tabel II.85 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 100
Tabel II.86 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 101

Tabel II.87 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 103
Tabel II.88 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya.....	II - 104
Tabel II.89 Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2016 - Triwulan II 2020.....	II - 106
Tabel II.90 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2014 - Triwulan II 2020.....	II - 106
Tabel II.91 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 108
Tabel II.92 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 108
Tabel II.93 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 109
Tabel II.94 Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 110
Tabel II.95 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 111
Tabel II.96 Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 112
Tabel II.97 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2016 - Triwulan II 2020.....	II - 113
Tabel II.98 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 114
Tabel II.99 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 114
Tabel II.100 Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 115
Tabel II.101 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 116
Tabel II.102 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 117
Tabel II.103 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 117

Tabel II.104 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 118
Tabel II.105 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 118
Tabel II.106 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 119
Tabel II.107 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2015 – Triwulan II 2020	II - 120
Tabel II.108 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 121
Tabel II.109 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 - Triwulan II 2020	II - 122
Tabel II.110 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 124
Tabel II.111 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 125
Tabel II.112 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 127
Tabel II.113 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 128
Tabel II.114 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 129
Tabel II.115 Partisipasi Reading Text Levelling Tahun 2016 - Triwulan II 2020	II - 129
Tabel II.116 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 130
Tabel II.117 Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 132
Tabel II.118 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 132
Tabel II.119 Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020...	II - 133

Tabel II.120 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 134
Tabel II.121 Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2015 – Triwulan II 2020.....	II - 136
Tabel II.122 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 139
Tabel II.123 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 139
Tabel II.124 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 140
Tabel II.125 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 141
Tabel II.126 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – Triwulan II 2020.....	II - 142
Tabel II.127 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2016 – Triwulan II 2020 ..	II - 142
Tabel II.128 Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 143
Tabel II.129 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 143
Tabel II.130 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 145
Tabel II.131 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 145
Tabel II.132 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 146
Tabel II.133 Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 146
Tabel II.134 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 147
Tabel II.135 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 148
Tabel II.136 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 148

Tabel II.137 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 149
Tabel II.138 MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2019	II - 150
Tabel II.139 MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2019....	II - 151
Tabel II.140 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 152
Tabel II.141 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 153
Tabel II.142 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2015 - 2017	II - 154
Tabel II.143 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 154
Tabel II.144 Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan...	II - 155
Tabel II.145 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2016 - Triwulan II 2020.....	II - 156
Tabel II.146 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 156
Tabel II.147 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 157
Tabel II.148 Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 158
Tabel II.149 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 158
Tabel II.150 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 159
Tabel II.151 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 159
Tabel II.152 Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 160
Tabel II.153 Penerangan Jalan Umum Tahun 2016 – Triwulan II 2020	II - 161
Tabel II.154 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 162

Tabel II.155 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2016 - 2018.....	II - 163
Tabel II.156 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 163
Tabel II.157 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020.....	II - 164
Tabel II.158 Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan dan Kinerja Hasil Program Tahun 2019	II - 165
Tabel II.159 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	II - 166
Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2018- 2019 (dalam juta)	III - 1
Tabel III.2 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 - 2019(dalam juta).....	III - 2
Tabel III.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 – 2019 (dalam persen)...	III - 3
Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2019 (dalam persen)	III - 5
Tabel III.5 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2018- 2019.....	III - 8
Tabel III.6 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya Tahun 2016-2017 dan Perkiraan Tahun 2018.....	III - 9
Tabel III.7 Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2018–2019	III - 10
Tabel III.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam persen)	III - 11
Tabel III.9 Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya Tahun 2013- 2017 dan Perkiraan 2018.....	III - 11
Tabel III.10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Juta)	III - 12
Tabel III.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 ADHK (dalam Persen).....	III - 13
Tabel III.12 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Persen)	III - 15

Tabel III.13 Inflasi Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Persen).....	III - 15
Tabel III.14 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020	III - 16
Tabel III.15 Ekspor – Impor Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam US\$)	III - 17
Tabel III.16 Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2019 dan 2020 (dalam persen).....	III - 18
Tabel III.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2020	III - 20
Tabel III.18 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Surabaya Tahun 2017-2020	III - 23
Tabel III.19 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2017 - 2020	III - 27
Tabel IV.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Surabaya ..	IV - 2
Tabel IV.2 Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur	IV - 7
Tabel IV.3 Penjabaran Isu Strategis Berdasarkan Urusan.....	IV - 8
Tabel IV.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Surabaya Tahun 2020.....	IV - 12
Tabel IV.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 dengan Sasaran Pembangunan Kota Surabaya	IV - 16
Tabel IV.6 Perubahan Target Sasaran dan Program Akibat Pandemi Covid-19	IV - 22
Tabel V.1 Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2020	V - 2
Tabel V.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020.....	V - 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Alur Penyusunan RKPD	I - 7
Gambar II.1 Grafik Curah Hujan Kota Surabaya	II - 2
Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya	II - 4
Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya.....	II - 5
Gambar II.4 Kondisi Intrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya	II - 9
Gambar II.5 Peta Sesar Kendeng	II - 11
Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara.....	II - 12
Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya.....	II - 12
Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya ...	II - 13
Gambar II.9 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia	II - 16
Gambar II.10 Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2015-2018.....	II - 30
Gambar II.11 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2019.....	II - 47
Gambar II.12 Kejadian Luar Biasa Kota Surabaya Tahun 2019.....	II - 64
Gambar II.13 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2018.....	II - 65
Gambar II.14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Per Kecamatan Tahun 2018	II - 67
Gambar II.15 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2018	II - 71
Gambar II.16 Persentase Atlet Berprestasi.....	II - 123
Gambar II.17 Perangkat <i>Smart Water Level</i>	II - 157
Gambar III.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2018– 2019 (dalam persen)	III - 5
Gambar III.2 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - Tahun 2019 (dalam persen).....	III - 6
Gambar III.3 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2018- 2019	III - 7
Gambar III.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya Tahun 2016-2017 dan Perkiraan Tahun 2018.....	III - 8
Gambar III.5 Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2018–2019	III - 9

Gambar III.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam persen)	III - 10
Gambar III.7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Persen).....	III - 14
Gambar III.8 Inflasi Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Persen).....	III - 15
Gambar III.9 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020	III - 16
Gambar III.10 Ekspor – Impor Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam US\$)	III - 17
Gambar III.11 Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2019 dan 2020 (dalam persen)	III - 18

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 38

TANGGAL : 10 Agustus 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait hal tersebut, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2020 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 345 yang terdiri atas :

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2019 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal semester tahun 2020, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor perekonomian dan keuangan. Sebagai upaya penanganan Covid-19 perlu dilakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat terutama dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan memprioritaskan anggaran untuk penanganan dampak penularan COVID-19. Dengan terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan daerah serta perlunya dilakukan penyesuaian belanja dan perubahan alokasi belanja untuk kebutuhan penanganan Covid-19 sesuai dengan amanat Permendagri 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD Perubahan merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan.

Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
23. Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 32 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 32).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

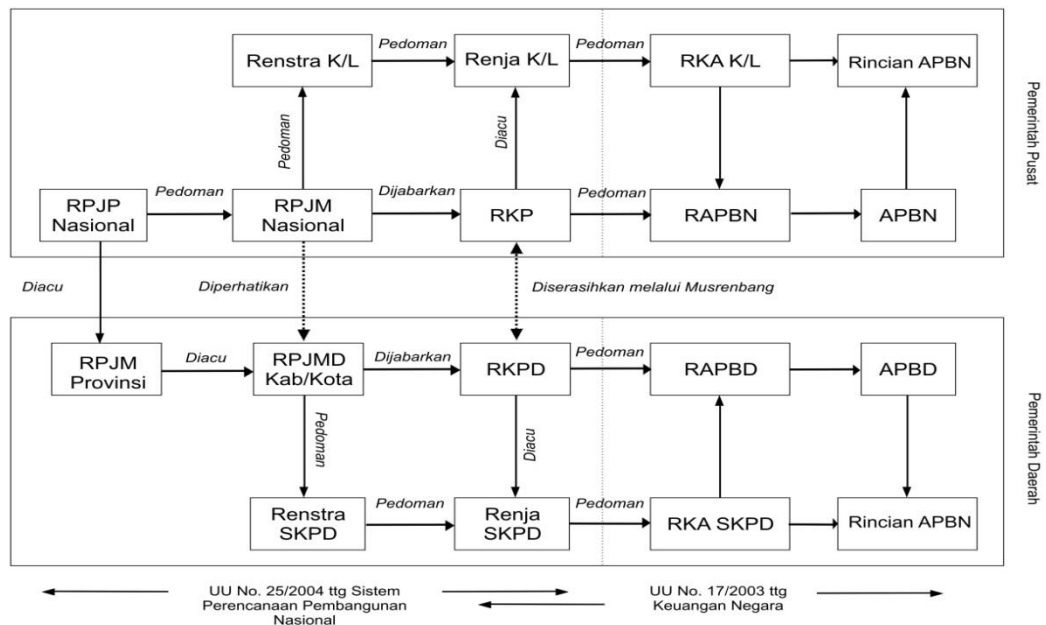
Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. RKPD menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kota.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2020 adalah untuk :

1. Sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 serta

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2020 antara DPRD Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020.

2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2020;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kota Surabaya ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN**
- II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020**
- III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
- IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
- V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
- VI. PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

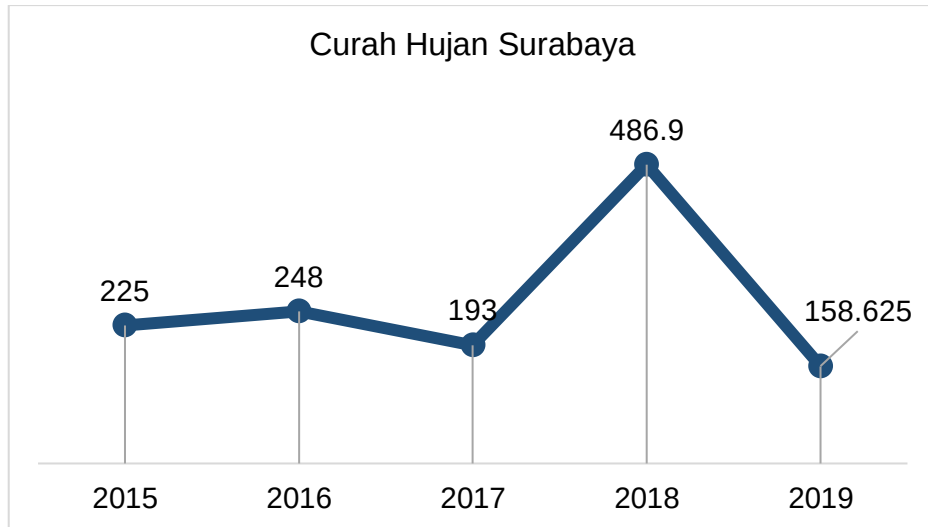
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C. Gambar II.1 menunjukkan grafik curah hujan Kota Surabaya pada 5 tahun terakhir.



Sumber : Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya

Gambar II.1 Grafik Curah Hujan Kota Surabaya

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal

Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;

4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

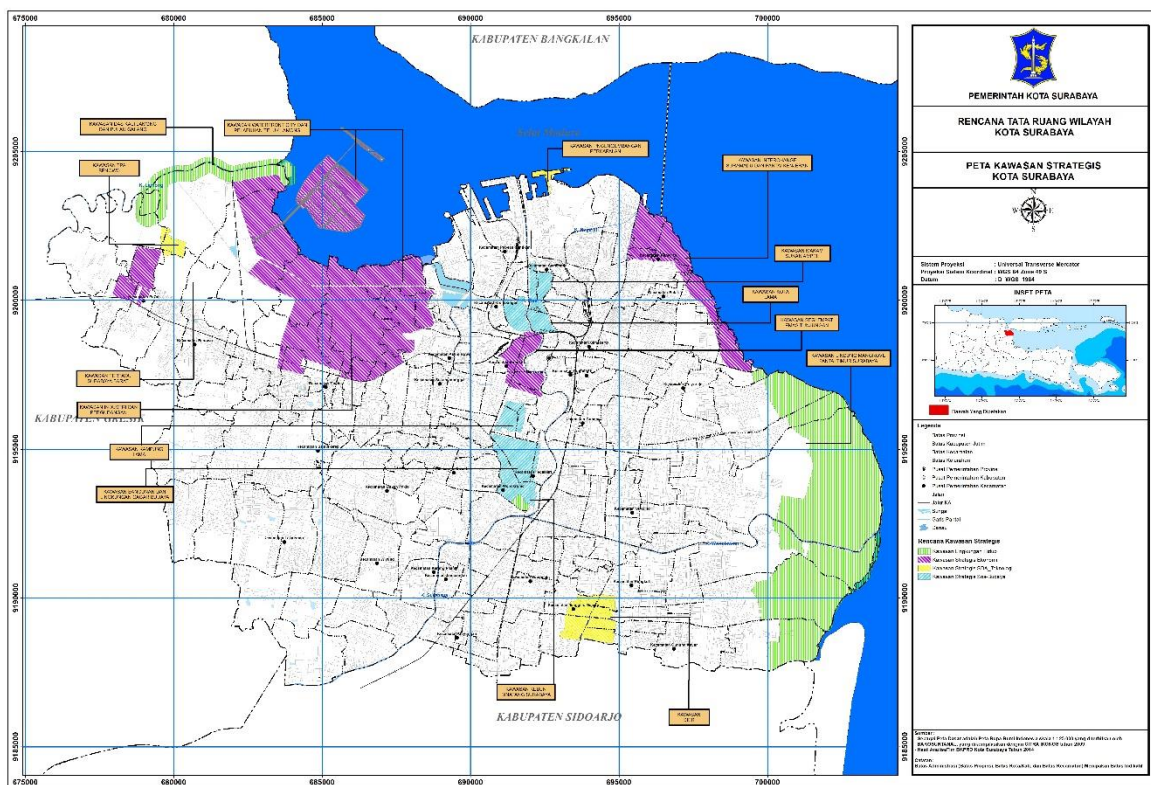
2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

TAHUN 2020



II - 4



Gambar II. 3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Beberapa kawasan strategis yang dimaksud diantaranya adalah:

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan

Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak menyumbang kontribusi PDRB pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 33,36% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdag. Besar&Eceran; Reparasi Mobil & Motor sebesar 26,53% dari total PDRB Kecamatan Bulak.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan mixed-use pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalakng Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II. 1
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Pabean Cantian	27
2	Krembangan	51
3	Genteng	65
4	Sawahan	9
5	Wonokromo	25
6	Gubeng	11
7	Tegalsari	30
8	Bubutan	26
9	Semampir	17
10	Tambaksari	7
11	Simokerto	8
12	Dukuh Pakis	1
13	Lakarsantri	2
14	Wonocolo	1
15	Gayungan	1

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
16	Bulak	1
Jumlah		282

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

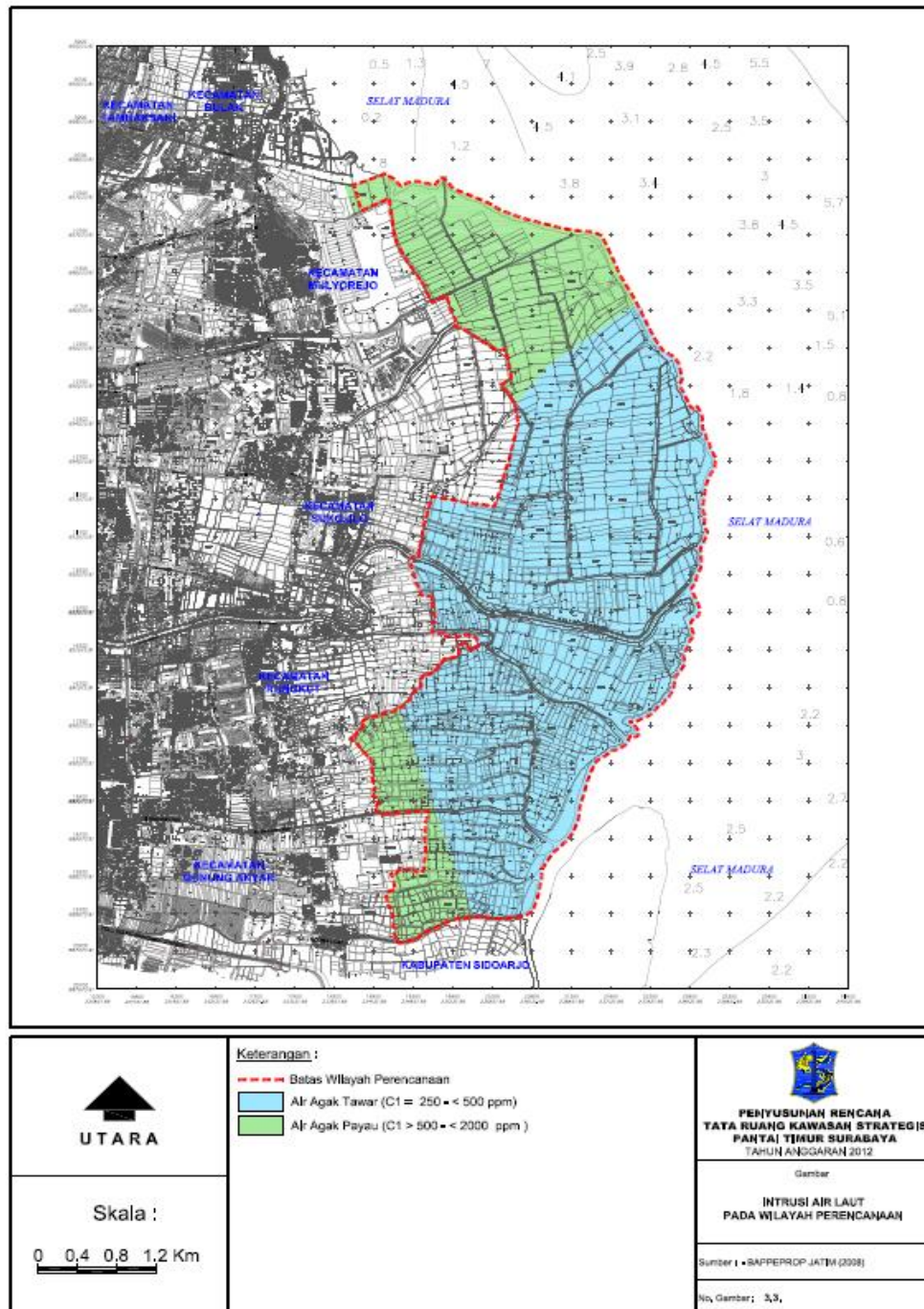
c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo dengan luas lahan 15,3 Ha yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
- Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada tabel II.1a Kondisi intrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.

Tabel II.1a Luasan Kawasan RTH

No	Jenis RTH	2015	2016	2017	2018	2019
1	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4203.67	4548.59	4548.59	4548.59	4570.33
2	RTH hutan kota	41.89	45.23	52.88	55.81	54.62
Total (Ha)		4245.56	4593.82	4601.47	4604.40	4624.95



Gambar II. 4
Kondisi Intrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/ sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi,

dan pendukung utilitas kota. Luasan kawasan tersebut ditampilkan pada tabel II.1a.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: “*Waste to Energy*”.

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.

2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman” dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.3



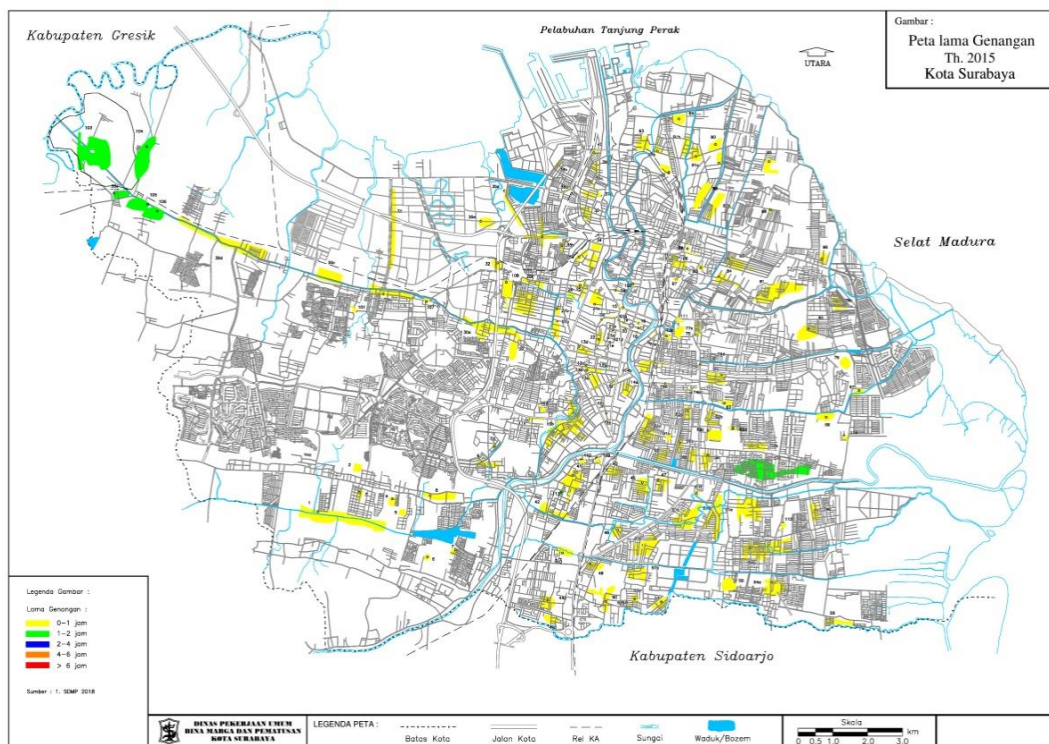
Gambar II. 5
Peta Sesar Kendeng

Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut:



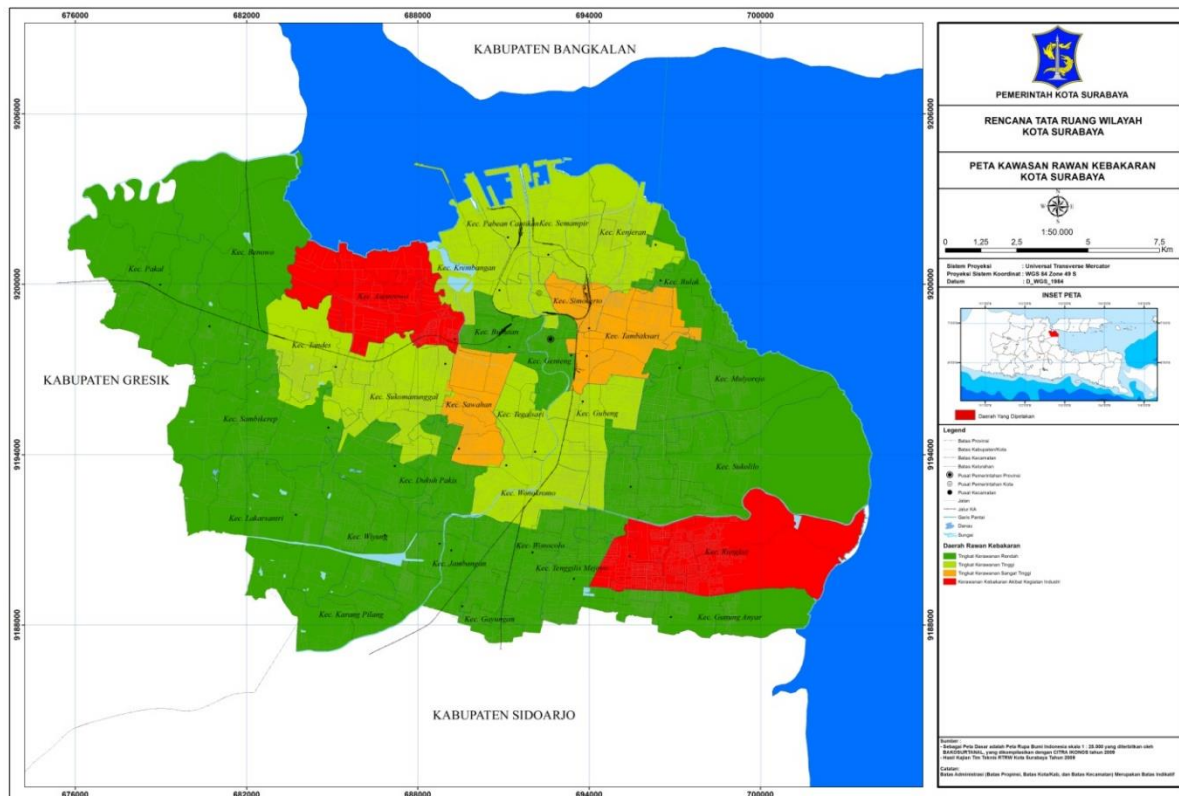
Gambar II. 6
Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara



Gambar II. 7
Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun

dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar II. 8
Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II. 2
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Banjir	10	1	0	0	1
2	Angin Puting Beliung / Angin Kencang	12	3	3	7	1
3	Kebakaran	300	589	496	515	225

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran, 2020

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2019 sebesar 3.159.481 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.3. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Tabel II.3 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Kenjeran. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel II. 3
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Asemrowo	15,3241	49.808	3.250	17	Pakal	19,0729	58.599	3.072
2	Benowo	25,106	68.351	2.722	18	Rungkut	22,7359	121.247	5.333
3	Bubutan	3,947	107.835	27.321	19	Sambikerep	16,7174	66.833	3.998
4	Bulak	5,6633	46.166	8.152	20	Sawahan	7,0668	216.414	30.624
5	Dukuh Pakis	10,9526	62.846	5.738	21	Semampir	8,7024	206.449	23.723
6	Gayungan	5,5139	47.827	8.674	22	Simokerto	2,7723	104.143	37.566
7	Genteng	14,1224	63.165	4.473	23	Sukolilo	28,7225	116.915	4.071
8	Gubeng	7,8009	143.874	18.443	24	Sukomanunggal	9,2935	108.264	11.649
9	Gunung Anyar	9,7686	60.505	6.194	25	Tambaksari	9,3023	239.272	25.722
10	Jambangan	4,5385	54.105	11.921	26	Tandes	9,7564	96.590	9.900
11	Karang Pilang	9,9754	77.557	7.775	27	Tegalsari	4,2905	108.097	25.194

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
12	Kenjeran	8,7314	179.198	20.523
13	Krembangan	8,7253	126.743	14.526
14	Lakarsantri	19,2742	61.907	3.212
15	Mulyorejo	12,7742	91.339	7.150
16	Pabean Cantian	5,5762	85.856	15.397

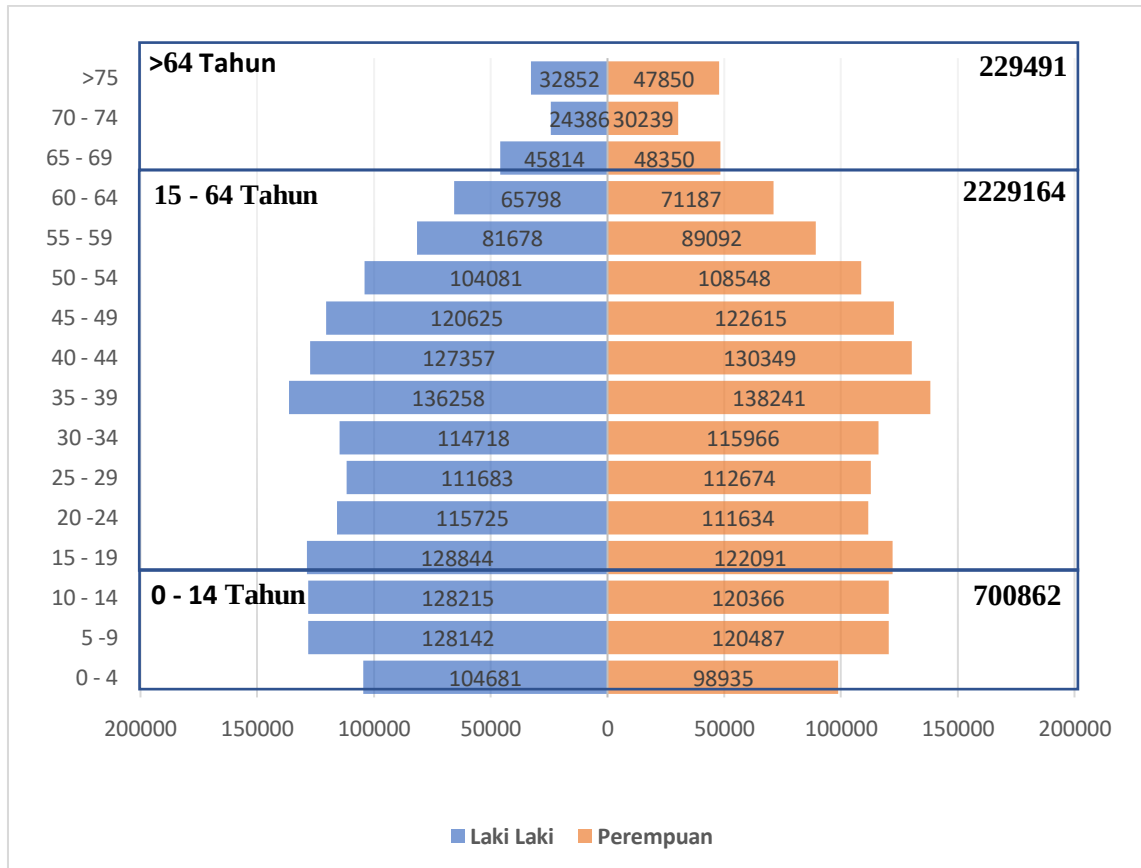
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
28	Tenggilis Mejoyo	5,8474	60.274	10.308
29	Wiyung	11,3889	74.024	6.500
30	Wonocolo	6,5355	85.284	13.049
31	Wonokromo	8,3176	169.994	20.438

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019, diolah

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.588.624 jiwa atau 50,28 persen penduduk perempuan dan 1.570.857 jiwa atau 49,72 persen penduduk laki-laki. Dari piramida penduduk seperti Gambar II.8 menunjukkan bahwa kelompok usia 35-39 tahun populasinya tertinggi dari kelompok usia lainnya. Jumlah penduduk dengan usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25-59 tahun sebesar 1.613.885 jiwa atau 51,08 persen dibanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5-24 tahun sebesar 975.504 jiwa atau 30,88 persen, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 366.476 atau 11,60 persen. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar II.8.

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020



Gambar II. 9

Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2019 yaitu usia 0-4 tahun sebanyak 203.616 jiwa, usia 5-9 tahun sebanyak 248.629 jiwa, usia 10-14 tahun sebanyak 248.581 jiwa dan usia 15-19 tahun sebanyak 250.935 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan angkatan kerja usia 15-64 tahun sebesar 2.229.128 jiwa dan usia bukan angkatan kerja 930.353 jiwa dengan rasio ketergantungan 41,73 persen.

Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada akhir tahun 2019 disajikan pada berikut ini.

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah
Tahun 2019

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	3.221	5.298	2.552	2.492
2	Benowo	4.347	7.174	3.500	3.543
3	Bubutan	6.057	10.099	5.138	5.101
4	Bulak	2.917	4.782	2.384	2.417
5	Dukuh Pakis	3.651	5.946	2.814	2.870
6	Gayungan	2.614	4.251	2.158	2.220
7	Genteng	3.336	5.513	2.798	2.960
8	Gubeng	7.694	12.790	6.507	6.519
9	Gunung Anyar	3.776	5.971	2.759	2.708
10	Jambangan	3.415	5.324	2.569	2.489
11	Karang Pilang	4.535	7.173	3.521	3.785
12	Kenjeran	11.846	19.049	9.082	9.344
13	Krembangan	7.330	11.872	5.759	6.023
14	Lakar Santri	3.831	6.322	3.006	3.127
15	Mulyorejo	5.138	8.390	4.030	4.155
16	Pabean Cantian	4.585	7.801	3.853	4.021
17	Pakal	3.649	6.022	3.060	3.066
18	Rungkut	7.538	11.523	5.437	5.572
19	Sambikerep	4.073	6.711	3.137	3.197
20	Sawahan	12.129	20.648	10.111	10.278
21	Semampir	12.857	20.911	9.874	10.268
22	Simokerto	5.901	9.570	4.597	4.829
23	Sukolilo	6.969	11.021	5.193	5.341
24	Sukomanunggal	6.459	10.460	4.887	4.980
25	Tambak Sari	13.703	22.541	10.787	11.325
26	Tandes	5.852	9.703	4.608	4.432
27	Tegalsari	5.887	9.827	4.821	4.949
28	Tenggiling Mejoyo	3.520	5.688	2.698	2.693
29	Wiyung	4.378	7.093	3.433	3.630
30	Wonocolo	4.870	7.926	3.841	3.888
31	Wonokromo	8.934	15.622	8.038	8.228
Jumlah		185.012	303.021	146.952	150.450

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada Tabel II. 4 di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada Tabel II.5.

Tabel II. 5
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

AGAMA	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1. Islam	85,04%	85,11%	85,35%	85,51%	85,57%
2. Katholik	4,00%	3,96%	3,94%	3,91%	3,90%
3. Kristen	9,14%	9,12%	8,98%	8,89%	8,85%
4. Hindu	0,28%	0,28%	0,26%	0,25%	0,25%
5. Budha	1,51%	1,50%	1,45%	1,42%	1,41%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pada triwulan II tahun 2020, Kota Surabaya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,57% sedangkan sebesar 14,43% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 101 jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 27,75 persen. Posisi kedua ditempati oleh belum/tidak bekerja sebesar 26,62 persen dan di posisi ketiga adalah mengurus rumah tangga sebesar 18,34 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada Tabel II. 6.

Tabel II. 6
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019

No	Pekerjaan	Jumlah	%	No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Belum Tidak Bekerja	840.953	26,62	46	Juru Masak	79	0,00
2	Mengurus Rumah Tangga	579.477	18,34	47	Promotor Acara	1	0,00
3	Pelajar Mahasiswa	518.005	16,40	48	Anggota DPR RI	8	0,00
4	Pensiunan	22.514	0,71	49	Anggota DPD	1	0,00
5	Pegawai Negeri Sipil	45.022	1,43	50	Anggota BPK	1	0,00
6	Tentara Nasional Indonesia	12.554	0,40	51	Presiden	-	-
7	Kepolisian RI	5.227	0,17	52	Wakil Presiden	-	-
8	Perdagangan	3.060	0,10	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	1	0,00
9	Petani Pekebun	3.397	0,11	54	Anggota Kabinet Kementerian	5	0,00
10	Peternak	32	0,00	55	Duta Besar	1	0,00
11	Nelayan Perikanan	1.148	0,04	56	Gubernur	1	0,00
12	Industri	524	0,02	57	Wakil Gubernur	-	-
13	Konstruksi	281	0,01	58	Bupati	-	-
14	Transportasi	282	0,01	59	Wakil Bupati	1	0,00
15	Karyawan Swasta	876.629	27,75	60	Walikota	1	0,00
16	Karyawan BUMN	5.891	0,19	61	Wakil Walikota	2	0,00
17	Karyawan BUMD	619	0,02	62	Anggota DPRD Provinsi	14	0,00
18	Karyawan Honorer	1.708	0,05	63	Anggota DPRD Kabupaten Kota	16	0,00
19	Buruh Harian Lepas	5.719	0,18	64	Dosen	6.135	0,19
20	Buruh Tani Perkebunan	365	0,01	65	Guru	24.440	0,77
21	Buruh Nelayan Perikanan	98	0,00	66	Pilot	18	0,00
22	Buruh Peternakan	18	0,00	67	Pengacara	210	0,01
23	Pembantu Rumah Tangga	700	0,02	68	Notaris	186	0,01
24	Tukang Cukur	41	0,00	69	Arsitek	118	0,00
25	Tukang Listrik	121	0,00	70	Akuntan	70	0,00
26	Tukang Batu	1.441	0,05	71	Konsultan	178	0,01
27	Tukang Kayu	288	0,01	72	Dokter	6.623	0,21
28	Tukang Sol Sepatu	64	0,00	73	Bidan	821	0,03
29	Tukang Las Pandai Besi	165	0,01	74	Perawat	2.729	0,09
30	Tukang Jahit	511	0,02	75	Apoteker	359	0,01
31	Tukang Gigi	6	0,00	76	Psikiater Psikolog	48	0,00
32	Penata Rias	71	0,00	77	Penyiar Televisi	8	0,00
33	Penata Busana	21	0,00	78	Penyiar Radio	16	0,00
34	Penata Rambut	63	0,00	79	Pelaut	335	0,01
35	Mekanik	391	0,01	80	Peneliti	37	0,00
36	Seniman	150	0,00	81	Sopir	1.974	0,06
37	Tabib	11	0,00	82	Pialang	10	0,00
38	Paraji	4	0,00	83	Paranormal	5	0,00
39	Perancang Busana	16	0,00	84	Pedagang	8.277	0,26
40	Penterjemah	21	0,00	85	Perangkat Desa	6	0,00
41	Imam Masjid	16	0,00	86	Kepala Desa	2	0,00
42	Pendeta	518	0,02	87	Biarawati	160	0,01
43	Pastor	29	0,00	88	Wiraswasta	173.323	5,49
44	Wartawan	220	0,01	89	Lainnya	4.255	0,13
45	Ustadz Mubaligh	77	0,00		Jumlah	3.158.943	100,00

Sumber : Data Penduduk WNI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II.7. Penduduk Kota Surabaya paling banyak (28,20 persen), merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 23,42 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD sebanyak 16,05 persen.

Tabel II. 7
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	740.033	23,42
2.	Belum Tamat SD/ sederajat	232.914	7,37
3.	SD/ sederajat	507.081	16,05
4.	SLTP/ sederajat	399.548	12,65
5.	SLTA/ sederajat	890.818	28,20
6.	D I / D II	20.637	0,65
7.	Akademi D III/ Sarjana Muda	40.396	1,28
8.	D IV/ S1	305.315	9,66
9.	S2/ S3	22.739	0,72
10.	LAIN-LAIN	-	0,00
JUMLAH		3.159.481	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kota Surabaya ditunjukkan pada Tabel II.8.

Tabel II. 8
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
IPM	80,38	81,07	81,74	82,22	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020

2.1.2.1.3 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi

menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp580.756.010,680.000,- yang meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp538.954.457.780.000,- Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang bervariasi namun masih lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2019 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp161.141.233.330.000,- atau meningkat sebesar 8.03% dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp149.167.327.310.000,-. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp109.245.937.200.000,- di tahun 2019 atau meningkat sebesar 7,95% dibanding tahun 2018 sebesar Rp101.196.564.520.000,- sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada tabel II.9.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB ADHK pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp387.340.042.930.000,- meningkat menjadi sebesar Rp410.969.893.880.000,- di tahun 2019. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2019 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp116.343.590.220.000,- diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp77.312.368.810.000,- serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp62.898.688.760.000,- seperti dapat dilihat pada tabel II.10 berikut.

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Tabel II. 9

**Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – 2019 (dalam Juta Rp)**

Kategori	Uraian	2017		2018		2019*		TW II 2020	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	883.177,33	0,18	913.363,56	0,17	928.398,16	0,16	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalian	30.638,64	0,01	32.568,38	0,01	33.531,33	0,01	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	92.745.070,08	18,81	101.196.564,52	18,78	109.245.937,20	18,81	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.263.680,02	0,46	2.311.134,20	0,43	2.362.300,29	0,41	N/A	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	740.173,38	0,15	771.856,00	0,14	791.147,83	0,14	N/A	N/A
F	Konstruksi	49.603.609,37	10,06	52.920.129,31	9,82	54.649.310,30	9,41	N/A	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	135.322.725,10	27,45	149.167.327,31	27,68	161.141.233,33	27,75	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	26.215.295,76	5,32	28.811.194,17	5,35	31.240.415,60	5,38	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78.971.933,92	16,02	87.056.324,46	16,15	95.537.038,24	16,45	N/A	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	26.571.784,77	5,39	28.390.748,22	5,27	30.770.585,80	5,30	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.631.465,09	5,20	28.140.646,05	5,22	29.413.339,89	5,06	N/A	N/A
L	Real Estate	12.495.064,18	2,53	13.775.255,11	2,56	14.947.568,30	2,57	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	12.098.851,21	2,45	13.571.273,11	2,52	14.930.184,77	2,57	N/A	N/A

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Kategori	Uraian	2017		2018		2019*		TW II 2020	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.768.287,70	1,37	7.345.115,74	1,36	8.154.990,77	1,40	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	11.958.097,23	2,43	12.897.475,91	2,39	14.007.607,77	2,41	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.730.513,94	0,76	4.053.612,67	0,75	4.443.228,45	0,77	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.995.936,81	1,42	7.599.869,06	1,41	8.159.192,66	1,40	N/A	N/A
Produk Domestik Regional Bruto		493.026.304,54	100,00	538.954.457,78	100,00	580.756.010,68	100,00	N/A	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Catatan : *) data sementara

Tabel II. 10

**Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2019 (dalam Juta Rp)**

Kategori	Uraian	2017		2018		2019*		TW II 2020	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	589.909,43	0,16	581.426,57	0,15	576.221,53	0,14	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalan	20.544,80	0,01	20.762,58	0,01	20.782,09	0,01	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	69.881.287,92	19,16	73.328.747,38	18,93	77.312.368,81	18,81	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.541.129,01	0,42	1.540.006,38	0,40	1.546.272,08	0,38	N/A	N/A

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Kategori	Uraian	2017		2018		2019*		TW II 2020	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	564.406,83	0,15	583.121,24	0,15	605.979,60	0,15	N/A	N/A
F	Konstruksi	36.208.179,04	9,93	38.480.421,60	9,93	40.576.452,62	9,87	N/A	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	103.301.112,79	28,32	109.870.324,37	28,37	116.343.590,22	28,31	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	17.707.950,22	4,86	19.046.861,58	4,92	20.497.977,43	4,99	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.192.882,21	14,86	58.419.739,39	15,08	62.898.688,76	15,30	N/A	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	23.974.911,33	6,57	25.613.455,86	6,61	27.531.903,71	6,70	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.685.808,04	4,85	18.541.116,14	4,79	19.187.832,54	4,67	N/A	N/A
L	Real Estate	9.610.228,83	2,63	10.165.858,67	2,62	10.784.959,46	2,62	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	8.278.199,91	2,27	8.867.969,79	2,29	9.474.538,92	2,31	N/A	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.597.265,29	1,26	4.697.025,94	1,21	4.867.861,44	1,18	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	8.531.781,66	2,34	9.064.164,83	2,34	9.668.100,19	2,35	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.804.625,21	0,77	3.023.591,50	0,78	3.254.593,89	0,79	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.224.596,95	1,43	5.495.449,09	1,42	5.821.770,58	1,42	N/A	N/A
Produk Domestik Regional Bruto		364.714.819,48	100,00	387.340.042,93	100,00	410.969.893,88	100,00	N/A	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Catatan : *) data sementara

Tabel II. 11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		TW II 2020	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,16	0,17	0,15	0,16	0,14	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	18,81	19,16	18,78	18,93	18,81	18,81	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,46	0,42	0,43	0,40	0,41	0,38	N/A	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,15	N/A	N/A
F	Konstruksi	10,06	9,93	9,82	9,93	9,41	9,87	N/A	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,45	28,32	27,68	28,37	27,75	28,31	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	5,32	4,86	5,35	4,92	5,38	4,99	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,02	14,86	16,15	15,08	16,45	15,30	N/A	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	5,39	6,57	5,27	6,61	5,30	6,70	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,20	4,85	5,22	4,79	5,06	4,67	N/A	N/A
L	Real Estate	2,53	2,63	2,56	2,62	2,57	2,62	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	2,45	2,27	2,52	2,29	2,57	2,31	N/A	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,37	1,26	1,36	1,21	1,40	1,18	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	2,43	2,34	2,39	2,34	2,41	2,35	N/A	N/A

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		TW II 2020	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,77	0,75	0,78	0,77	0,79	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,43	1,41	1,42	1,40	1,42	N/A	N/A
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Catatan : *) data sementara

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Disamping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2017-2019 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 27-28 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut menjadikan kategori industri pengolahan sebagai kategori lapangan usaha paling dominan kedua dengan nilai kontribusi 18-19 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 16-17 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau

maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.12. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha terkecuali lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori informasi dan komunikasi, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Tabel II. 12
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – Triwulan II 2020

Kategori	Uraian	2017	2018*	2019**	TW II 2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,35	-1,44	-0,90	N/A
B	Pertambangan dan Penggalan	2,58	1,06	0,09	N/A
C	Industri Pengolahan	4,95	4,93	5,43	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,75	-0,07	0,41	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,83	3,32	3,92	N/A
F	Konstruksi	6,92	6,28	5,45	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,01	6,36	5,89	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	6,87	7,56	7,62	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,64	7,80	7,67	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	6,93	6,83	7,49	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	4,84	3,49	N/A
L	Real Estate	5,08	5,78	6,09	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	6,66	7,12	6,84	N/A

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Kategori	Uraian	2017	2018*	2019**	TW II 2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,85	2,17	3,64	N/A
P	Jasa Pendidikan	5,95	6,24	6,66	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,87	7,81	7,64	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,89	5,18	5,94	N/A
PDRB		6,13	6,20	6,10	N/A
PDRB TANPA MIGAS		6,13	6,20	6,10	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Catatan : *) data sementara

**) data sangat sementara

Di tengah berlangsungnya pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga kestabilitasannya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih tumbuh positif. Beberapa permasalahan diindikasikan beresiko menghambat kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Dari sisi permintaan, peran konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi cenderung semakin terbatas. Kendati demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun, yakni pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional terangkum dalam tabel berikut.

Tabel II. 13
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016 – Triwulan II 2020(%)

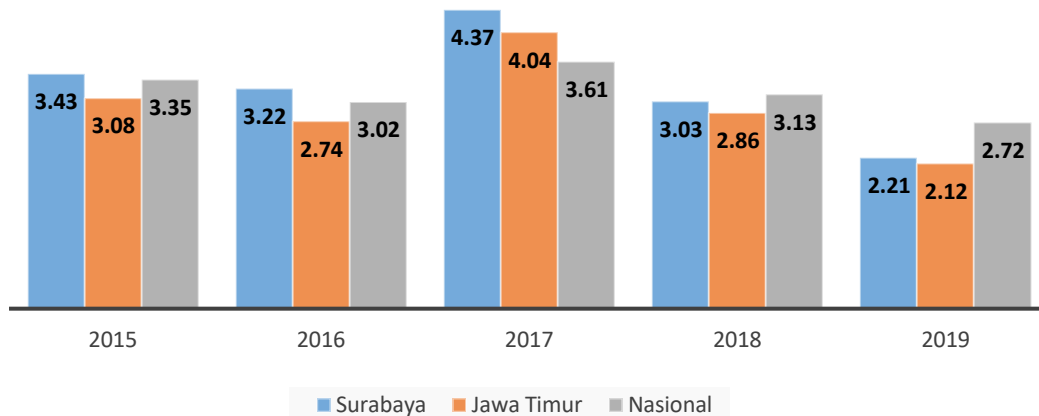
Pertumbuhan Ekonomi	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Surabaya	6,00	6,13	6,19	6,10	N/A
Jawa Timur	5,57	5,45	5,50	5,52	N/A
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

2.1.2.1.5 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2019 tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 2,21 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi Kota Surabaya Tahun 2018 sebesar 3,03 persen. Selaras dengan target yang ditetapkan, tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2019 juga

sejalan dengan target sasaran inflasi pemerintah tahun 2019 sebesar $3,5 \pm 1$ persen, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah.



Gambar II. 10
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2015-2018

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Berdasarkan data rilis BPS Kota Surabaya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 2,21 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Surabaya pada tahun sebelumnya sebesar 3,03 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum dalam grafik di atas. Meski rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional, namun pada periode tertentu nilai inflasi tersebut bisa tinggi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga tetap perlu dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Surabaya.

Inflasi Kota Surabaya yang rendah di tahun 2019 ini merupakan capaian keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas harga di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya selama ini terus berupaya menjaga stabilitas harga untuk mendorong konsumsi masyarakat tinggi melalui koordinasi intensif antar instansi terkait maupun pengawasan dan survei perkembangan harga di pasaran.

Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2019 antara lain: emas

perhiasan, sekolah dasar, sepeda motor, akademi/ perguruan tinggi, bawang merah, kontrak rumah, tarif kereta api, rokok kretek filter, mobil, dan bawang putih.

Berdasarkan komoditasnya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan dari berkontribusi tertinggi yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2019. Jika diamati berdasarkan kelompok pembentuknya, capaian inflasi Kota Surabaya tahun 2019 paling banyak berkontribusi oleh inflasi kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*). Selama ini tidak ada yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah manapun ketika menghadapi inflasi yang disebabkan dari kelompok *administered price* (inflasi akibat kebijakan Pemerintah Pusat). Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya mampu mengendalikan inflasi dari kelompok *volatile food* (bahan makanan) dengan menjaga pasokan dan pengawasan arus barang. Hal itu ditunjukkan oleh nilai inflasi yang lebih rendah baik dibanding perkembangan harga di tahun sebelumnya.

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat surabaya bukan produsen melainkan pasar. Berdasarkan pergerakan harga (harian) beberapa bahan pokok dapat dihitung tingkat fluktuasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II. 14
Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok
Tahun 2017 – Triwulan II 2020

Nama Bahan Pokok	Satu an	Tahun							
		2017		2018		2019		TW II 2020	
		Fluktu asi Harga	Tingka t Stabili sasi Harga (Target Fluktu asi 5%)	Fluktu asi Harga	Tingka t Stabili sasi Harga (Target Fluktu asi 5%)	Fluktu asi Harga	Tingka t Stabili sasi Harga (Target Fluktu asi 5%)	Fluktu asi Harga	Tingka t Stabili sasi Harga (Target Fluktu asi 5%)
BERAS									
Beras IR.64 Kualitas I	Kg	1,00%	179,02 %	2,34%	153,13 %	0,58%	188,36 %	N/A	N/A
Beras IR.64 Kualitas II	Kg	2,00%	167,04 %	4,55%	108,95 %	1,70%	165,92 %	N/A	N/A
Beras IR.64 Kualitas III	Kg	2,00%	168,60 %	2,81%	143,74 %	4,96%	100,84 %	N/A	N/A
GULA									
Gula Pasir Lokal Curah	Kg	5,00%	96,77%	2,79%	144,18 %	5,84%	83,19%	N/A	N/A
MINYAK GORENG									

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun							
		2017		2018		2019		TW II 2020	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilitas Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilitas Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilitas Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilitas Harga (Target Fluktuasi 5%)
Minyak Goreng Curah (Bening)	Kg	2,00%	156,66 %	4,15%	117,06 %	2,91%	141,72 %	N/A	N/A
DAGING									
Daging Sapi "Grade Atas"	Kg	2,00%	165,07 %	0,85%	183,08 %	0,97%	180,53 %	N/A	N/A
Daging Sapi "Grade Sedang"	Kg	0,00%	191,15 %	1,23%	175,35 %	0,83%	183,42 %	N/A	N/A
Daging Sapi "Grade Bawah"	Kg	1,00%	187,74 %	0,89%	182,11 %	1,08%	178,48 %	N/A	N/A
Daging Ayam Broiler	Kg	5,00%	96,64%	6,37%	72,57%	5,14%	97,24%	N/A	N/A
I K A N									
Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang)	Kg	4,00%	122,15 %	6,89%	62,13%	8,40%	32,08%	N/A	N/A
Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang)	Kg	11,00 %	- 15,82%	6,99%	60,20%	9,66%	6,80%	N/A	N/A
Udang Segar (Uk. Sedang)	Kg	4,00%	122,87 %	-	-	3,36%	132,86 %	N/A	N/A
Ikan Lele Segar (Ukuran Sedang)	Kg	1,00%	184,11 %	1,87%	162,67 %	1,12%	177,53 %	N/A	N/A
Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang)	Kg	3,00%	139,99 %	5,05%	98,92%	1,52%	169,52 %	N/A	N/A
Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan)	Kg	3,00%	144,14 %	1,13%	177,31 %	1,61%	- 122,59 %	N/A	N/A
TELUR									
Telur Ayam Broiler	Kg	1,00%	8,60%	6,97%	60,58%	5,72%	85,67%	N/A	N/A
Telur Ayam Kampung	Butir	6,00%	78,83%	3,38%	132,36 %	3,09%	138,20 %	N/A	N/A

Sumber: Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah dan Dinas Perdagangan, diolah Bappeko, 2019

2.1.2.1.6 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan

kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2016 - Triwulan II 2020.

Tabel II. 15
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	Triwulan II 2020
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Milyar Rp)	451.486,79	495.043,31	544.594,46	580.756,01	N/A
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	149,68	172,21	188,73	200,52	N/A
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Milyar Rp)	343.652,59	364.714,82	387.333,39	410.969,89	N/A
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	113,93	126,87	134,23	141,90	N/A
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	N/A

Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2020, diolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, PDRB per kapita Kota Surabaya ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.7 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 4 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang, namun pada tahun 2015 tingkat pemerataan pendapatan masuk dalam kategori tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya - upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Tabel II. 16
Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Gini Ratio	0,42	0,387	0,387	0,38	N/A

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

2.1.2.1.8 Indeks Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ukuran ketimpangan wilayah ini menggunakan metode *Williamson Index* yang menganalisa PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, dengan ukuran bila angka indeks mendekati 1 berarti semakin timpang dan bila angka indeks mendekati nol berarti semakin merata.

Tabel II. 17
Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya

Tahun	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Indeks Ketimpangan Wilayah (PDRB Tahun dasar 2010)	0,67	0,669	0,669	0,665	N/A

Sumber : Hasil Analisa Bappeko, 2020

Terjadinya perubahan tahun dasar dalam PDRB yaitu yang awalnya menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 maka terjadi perubahan besaran indeks Williamson dapat disajikan pada pada Tabel II.17. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kota Surabaya relatif tinggi dengan nilai indeks sekitar 0,6 namun mempunyai kecenderungan yang terus meningkat.

2.1.2.1.9 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan juga menjadi perhatian Bank Dunia yang kemudian membuat suatu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan tersebut. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan tersebut, Bank Dunia memfokuskan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk dengan pendapatan terendah.

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan tinggi jika persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk berpendapatan terendah kurang dari 12 %, sedang jika persentasenya berada antara 12 % hingga 17%, dan ketimpangan rendah jika persentase mencapai lebih dari 17%.

Tabel II. 18
Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan Kota Surabaya

Tahun	40 % terbawah	40 % menengah	20 % tertinggi
2012	21,38	32,01	46,61
2013	23,55	36,62	39,83
2014	19,74	31,64	48,62
2015	17,81	32,34	49,85
2016	17,96	33,80	48,24

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 diolah

Seperti disajikan pada Tabel II.18, pada tahun 2015 ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tergolong rendah, yaitu persentase pendapatan yang dikuasai oleh 40% penduduk termiskin mencapai lebih dari 17% dari total pendapatan penduduk. Persentase tersebut mencapai 17,81%.

2.1.2.1.10 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp474.365,- dan meningkat menjadi Rp530.178,- pada tahun 2018. Jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2017 sebanyak 154.710 jiwa menjadi 140.810 jiwa pada tahun 2018, sehingga persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,54%. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2019 meningkat menjadi Rp567.474, tetapi jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2018 sebanyak 140.810 menjadi 130.550 sehingga angka kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2019 turun menjadi 4,51 persen. .Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada **Error! Reference source not found.**

Tabel II. 19
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Angka Kemiskinan (persen)	5,63	5,39	4,54	4,51	N/A
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	438.283	474.365	530.178	567.474	N/A
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	161,01	154,71	140,81	130,55	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta

inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 2.361.908 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 2.408.552 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 2.157.098, pada tahun 2019 sebanyak 2.458.655 jiwa dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 20
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	2.361.908	2.408.552	2.157.098	2.458.655	N/A
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas	2.361.908	2.408.552	2.157.098	2.458.655	2.388.960
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Dari data pada **Error! Reference source not found.** di atas, penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM pada tahun 2016 jenjang SD/MI sebesar 92,38 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 90,93 persen. APM pada tahun 2017 jenjang SD/MI sebesar 100,54 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 75,09 persen. APM pada tahun 2018 jenjang SD/MI sebesar 95,71 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 83,80 persen. Sedangkan pada tahun 2019 APM jenjang SD/MI sebesar 96,33 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 83,90 persen Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel II.21 sebagai berikut:

Tabel II. 21
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	255.142	282.604	274.104	291.907	N/A
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	276.183	281.089	286.373	303.021	302.393
	APM SD/MI (persen)	92,38	100,54	95,71	96,33	N/A
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	128.810	108.231	118.636	123.398	147.458
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.653	144.127	141.554	146.952	N/A
	APM SMP/MTs (persen)	90,93	75,09	83,80	83,97	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 22
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen)	97,78	99,76	101,73%	94,34%	N/A
2.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen)	90,42	94,52	105,49%	100,04%	N/A

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2016 - Triwulan II 2020 disajikan pada Tabel II. 23 sebagai berikut:

Tabel II. 23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2016 –
Triwulan II 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	PAUD (KB,TK, PPT, TPA)					
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan PAUD	123.925	119.747	119.047	125.941	N/A
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	192.239	177.009	179.389	185.012	181.009
	APK PAUD (persen)	64,46	67,65	66,36	68,07	N/A
2.	SD/MI					
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	281.310	287.406	287.830	310.982	283.799
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	276.183	281.089	286.373	303.021	302.393
	APK SD/MI (persen)	101,86	102,25	100,50	102,63	N/A

3.	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	135.283	143.426	129.136	135.629	125.465
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.653	144.127	141.554	146.952	147.458
	APK SMP/MTs (persen)	95,50	99,51	91,22	92,29	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 disajikan pada Tabel II.24.

Tabel II. 24
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Rata-Rata Lama Sekolah	10,44	10,45	10,46	10,47	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 25
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Angka Harapan Lama Sekolah	13,99	14,41	14,78	14,79	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya di tahun 2019 berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA, yakni melebihi tingkat Diploma-3 (D3) namun masih belum mencapai Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1).

2.1.2.2.2 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 26.

Tabel II. 26
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016– Triwulan II 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Angka Harapan Hidup (persen)	73,87	73,88	73,98	74,13	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

AHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 73,88 tahun, pada tahun 2018 menjadi 73,98 tahun dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 74,13 tahun.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 0,16 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,15 persen, pada tahun 2018 menurun menjadi 0,14 dan pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 0,13 persen. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2016- 2019.

Tabel II. 27
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	280	278	254	242	101
2	Jumlah balita yang ditimbang	176.439	179.662	181.842	180.328	178.043
3	Persentase (persen)	0,16	0,15	0,14	0,13	0,06%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II. 28
Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya
Tahun 2017 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	16.627	15.274	15.060	10.684
2	Jumlah balita yang ditimbang	179.662	181.842	180.328	178.043
3	Persentase (persen)	9,25	8,39	8,35	6,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Tabel II. 29
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan)
Tahun 2017– Triwulan II 2020

No.	Kecamatan	2017			2018			2019			TW II 2020		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	0	3.633	0,00%	4	3.369	0,12%	3	3.228	0,09%	N/A	N/A	N/A
2	Kec. Benowo	4	4.506	0,09%	4	4.559	0,09%	4	4.392	0,09%	N/A	N/A	N/A
3	Kec. Bubutan	4	6.361	0,06%	3	5.989	0,05%	1	5.793	0,02%	N/A	N/A	N/A
4	Kec. Bulak	3	2.770	0,11%	4	2.839	0,14%	5	2.802	0,18%	N/A	N/A	N/A
5	Kec. Dukuh Pakis	5	3.436	0,15%	4	3.293	0,12%	3	3.148	0,10%	N/A	N/A	N/A
6	Kec. Gayungan	3	2.449	0,12%	2	2.338	0,09%	4	2.249	0,18%	N/A	N/A	N/A
7	Kec. Genteng	8	3.203	0,25%	11	3.257	0,34%	11	3.265	0,34%	N/A	N/A	N/A
8	Kec. Gubeng	2	7.164	0,03%	0	7.268	0,00%	0	7.592	0,00%	N/A	N/A	N/A
9	Kec. Gunung Anyar	2	3.321	0,06%	2	3.483	0,06%	0	4.087	0,00%	N/A	N/A	N/A
10	Kec. Jambangan	6	3.586	0,17%	3	3.587	0,08%	0	3.529	0,00%	N/A	N/A	N/A
11	Kec. Karang Pilang	2	4.155	0,05%	2	4.347	0,05%	5	4.372	0,11%	N/A	N/A	N/A
12	Kec. Kenjeran	18	11.251	0,16%	15	11.822	0,13%	15	14.034	0,11%	N/A	N/A	N/A
13	Kec. Krembangan	6	7.597	0,08%	2	7.987	0,03%	2	7.832	0,03%	N/A	N/A	N/A

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No.	Kecamatan	2017			2018			2019			TW II 2020		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
14	Kec. Lakarsantri	2	5.148	0,04%	9	3.670	0,25%	4	4.158	0,10%	N/A	N/A	N/A
15	Kec. Mulyorejo	2	5.373	0,04%	4	5.589	0,07%	0	5.616	0,00%	N/A	N/A	N/A
16	Kec. Pabean Cantian	3	4.425	0,07%	5	4.357	0,11%	2	4.249	0,05%	N/A	N/A	N/A
17	Kec. Pakal	44	4.576	0,96%	16	4.394	0,36%	36	4.093	0,88%	N/A	N/A	N/A
18	Kec. Rungkut	11	6.803	0,16%	8	7.304	0,11%	8	7.163	0,11%	N/A	N/A	N/A
19	Kec. Sambikerep	2	2.864	0,07%	5	4.229	0,12%	5	3.400	0,15%	N/A	N/A	N/A
20	Kec. Sawahan	16	12.390	0,13%	14	12.380	0,11%	15	12.064	0,12%	N/A	N/A	N/A
21	Kec. Semampir	22	11.651	0,19%	24	11.740	0,20%	21	11.680	0,18%	N/A	N/A	N/A
22	Kec. Simokerto	5	5.807	0,09%	9	5.694	0,16%	8	3.626	0,22%	N/A	N/A	N/A
23	Kec. Sukolilo	7	6.246	0,11%	2	6.540	0,03%	3	6.845	0,04%	N/A	N/A	N/A
24	Kec. Sukomanunggal	63	6.775	0,93%	60	6.657	0,90%	59	6.405	0,92%	N/A	N/A	N/A
25	Kec. Tambaksari	12	11.482	0,10%	18	12.229	0,15%	6	11.963	0,05%	N/A	N/A	N/A
26	Kec. Tandes	4	5.989	0,07%	4	6.108	0,07%	4	6.263	0,06%	N/A	N/A	N/A
27	Kec. Tegalsari	9	5.911	0,15%	7	5.884	0,12%	7	5.646	0,12%	N/A	N/A	N/A

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No.	Kecamatan	2017			2018			2019			TW II 2020		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	0	2.820	0,00%	0	3.022	0,00%	0	3.058	0,00%	N/A	N/A	N/A
29	Kec. Wiyung	1	4.364	0,02%	3	4.318	0,07%	3	4.316	0,07%	N/A	N/A	N/A
30	Kec. Wonocolo	5	5.037	0,10%	5	4.859	0,10%	4	4.925	0,08%	N/A	N/A	N/A
31	Kec. Wonokromo	7	8.569	0,08%	5	8.730	0,06%	4	8.535	0,05%	N/A	N/A	N/A
Total		278	179.662	0,15%	254	181.842	0,14%	242	180.328	0,13%	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada Tabel II. 30 dan Tabel II. 31 sebagai berikut:

Tabel II. 30
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	37	34	31	25	13
2	Kelahiran Hidup	43.164	42.822	42.474	42.145	41.814
3	AKI per 100.000 KH	85,72	79,40	72,99	59,32	31,09

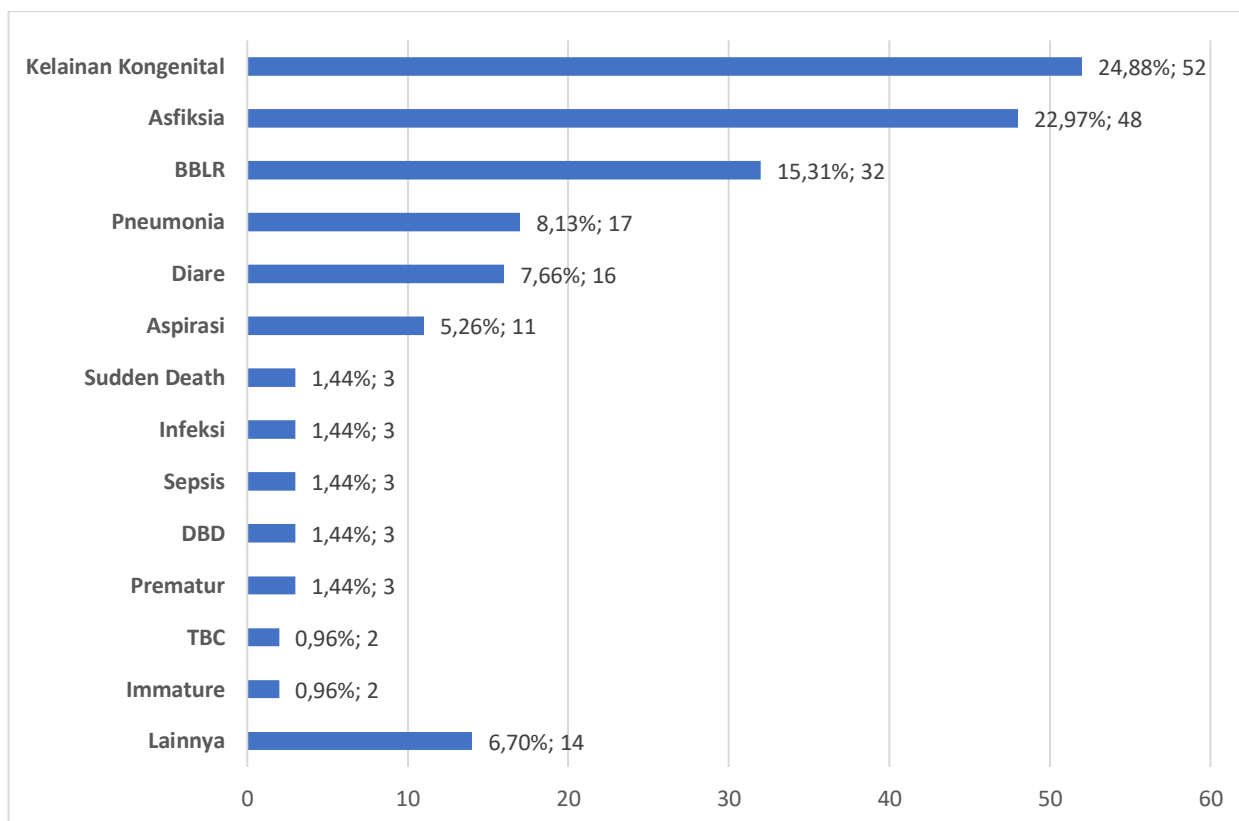
Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menurun dari tahun 2016 sebesar 85,72 menjadi 59,32 pada tahun 2019. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020, Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup sebesar 31,09. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 sebesar 6,39 menurun menjadi 5,01 pada tahun 2019. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup sebesar 1,77. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan kongenital, ketiganya menyumbang 63,16 persen dari 211 bayi yang meninggal di tahun 2019.

Tabel II. 31
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah bayi lahir meninggal	276	219	214	211	74
2	Kelahiran Hidup	43.164	42.822	42.474	42.145	41.814
3	AKB per 1.000 KH	6,39	5,11	5,04	5,01	1,77

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020



Gambar II. 11

Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019 diolah

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi di bawah target bahkan capaiannya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam

kurun waktu tahun 2017 dan 2018 mempunyai trend meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,12%. Adapun data tahun 2016 belum tersedia dikarenakan anggaran Sakernas Besar (Bulan Agustus) berdasarkan kebijakan pemerintah pusat digeser untuk kegiatan lain. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 sampai dan 2018 disajikan pada Tabel II. 32.

Tabel II. 32
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	89.479	93.096	130.459	N/A
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.468.094	1.520.041	2.222.469	N/A
3	Persen Pengangguran Terbuka	5,98%	6,12%	5,87%	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.468.094 menjadi 1.520.041 pada tahun 2018. Tahun 2019, jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.222.469. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan

kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.33.

Tabel II. 33
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Grup Kesenian	498	591	611	731*	771
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	43	42	42	42	42
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	4	4

*) Data per Juli 2020

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2016 sebanyak 498 grup kesenian, tahun 2017 meningkat menjadi 591 grup kesenian dan sampai dengan tahun 2018 meningkat menjadi 611 grup kesenian. dan sampai dengan tahun 2019 meningkat menjadi 731 grup kesenian. Sedangkan sampai dengan triwulan II 2020, jumlah grup kesenian meningkat menjadi 771 grup kesenian.

Jumlah cabang olahraga sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebanyak sebanyak 42 cabang olahraga, dan yang telah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional sebanyak 41 cabang olahraga. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan triwulan II tahun 2020, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 4 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo dan gedung indoor Surabaya *Sport Center* (SSC). Selain itu, terdapat pula fasilitas gedung untuk pembinaan cabang-cabang olahraga milik KONI Provinsi

Jawa Timur, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan milik perseorangan maupun badan usaha yang memperhatikan pengembangan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

2.1.3.1.1.a Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 telah disajikan di atas pada Tabel II. 23 dan APK per kecamatan dalam Tabel berikut:

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Tabel II. 34
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 3-6 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD	APK	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	3.221	1926	59,80%	5.298	4060	76,63%	2.552	1719	67,36%
Benowo	4.347	3636	83,64%	7.174	7464	104,04%	3.500	2892	82,63%
Bubutan	6.057	3602	59,47%	10.099	9735	96,40%	5.138	2083	40,54%
Bulak	2.917	1878	64,38%	4.782	6799	142,18%	2.384	2741	114,97%
Dukuh Pakis	3.651	2916	79,87%	5.946	6858	115,34%	2.814	3279	116,52%
Gayungan	2.614	1787	68,36%	4.251	6533	153,68%	2.158	2242	103,89%
Genteng	3.336	2686	80,52%	5.513	7048	127,84%	2.798	5825	208,18%
Gubeng	7.694	4941	64,22%	12.790	14532	113,62%	6.507	3785	58,17%
Gunung Anyar	3.776	3160	83,69%	5.971	5186	86,85%	2.759	1299	47,08%
Jambangan	3.415	2312	67,70%	5.324	5205	97,76%	2.569	4004	155,86%
Karangpilang	4.535	3480	76,74%	7.173	7225	100,72%	3.521	3683	104,60%
Kenjeran	11.846	6499	54,86%	19.049	19001	99,75%	9.082	7671	84,46%
Krembangan	7.330	4664	63,63%	11.872	13721	115,57%	5.759	8142	141,38%
Lakarsantri	3.831	3291	85,90%	6.322	8793	139,09%	3.006	4701	156,39%
Mulyorejo	5.138	5496	106,97%	8.390	10664	127,10%	4.030	5254	130,37%
Pabean Cantian	4.585	2104	45,89%	7.801	4636	59,43%	3.853	1770	45,94%
Pakal	3.649	3225	88,38%	6.022	7775	129,11%	3.060	2447	79,97%

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 3-6 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD	APK	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Rungkut	7.538	5385	71,44%	11.523	11793	102,34%	5.437	5428	99,83%
Sambikerep	4.073	2551	62,63%	6.711	6220	92,68%	3.137	3821	121,80%
Sawahan	12.129	6874	56,67%	20.648	17389	84,22%	10.111	3451	34,13%
Semampir	12.857	6105	47,48%	20.911	21550	103,06%	9.874	5170	52,36%
Simokerto	5.901	4267	72,31%	9.570	7408	77,41%	4.597	3529	76,77%
Sukolilo	6.969	5306	76,14%	11.021	13119	119,04%	5.193	7050	135,76%
Sukomanunggal	6.459	4977	77,06%	10.460	10810	103,35%	4.887	5452	111,56%
Tambaksari	13.703	8710	63,56%	22.541	19210	85,22%	10.787	5103	47,31%
Tandes	5.852	5232	89,41%	9.703	12252	126,27%	4.608	3364	73,00%
Tegalsari	5.887	3766	63,97%	9.827	10875	110,66%	4.821	2952	61,23%
Tenggilis Mejoyo	3.520	2943	83,61%	5.688	5926	104,18%	2.698	2965	109,90%
Wiyung	4.378	3393	77,50%	7.093	7293	102,82%	3.433	2692	78,42%
Wonocolo	4.870	3094	63,53%	7.926	8630	108,88%	3.841	4744	123,51%
Wonokromo	8.934	5732	64,16%	15.622	12573	80,48%	8.038	7060	87,83%
Jumlah	185.012	125.938	68,07%	303.021	310.982	102,63%	146.952	135.629	92,29%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019 diolah

2.1.3.1.1.b Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data perkembangan APM Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 telah disajikan di atas pada Tabel II. 34 dan APM per kecamatan pada Tabel II. 35.

Tabel II. 35
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan
Tahun 2019

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Asemrowo	5.298	3758	70,93%	2.552	1668	65,36%
Benowo	7.174	6989	97,42%	3.500	2674	76,40%
Bubutan	10.099	9123	90,34%	5.138	2057	40,04%
Bulak	4.782	6312	131,99%	2.384	2362	99,08%
Dukuh Pakis	5.946	6502	109,35%	2.814	3128	111,16%
Gayungan	4.251	6260	147,26%	2.158	2048	94,90%
Genteng	5.513	6647	120,57%	2.798	5509	196,89%
Gubeng	12.790	13883	108,55%	6.507	3624	55,69%
Gunung Anyar	5.971	4847	81,18%	2.759	1166	42,26%
Jambangan	5.324	5004	93,99%	2.569	3735	145,39%
Karangpilang	7.173	6908	96,31%	3.521	3381	96,02%
Kenjeran	19.049	17258	90,60%	9.082	7065	77,79%
Krembangan	11.872	13077	110,15%	5.759	7634	132,56%
Lakarsantri	6.322	8462	133,85%	3.006	4285	142,55%
Mulyorejo	8.390	10248	122,15%	4.030	4978	123,52%
Pabean Cantian	7.801	4366	55,97%	3.853	1617	41,97%
Pakal	6.022	7427	123,33%	3.060	2394	78,24%
Rungkut	11.523	11032	95,74%	5.437	4792	88,14%
Sambikerep	6.711	5974	89,02%	3.137	3559	113,45%
Sawahan	20.648	16192	78,42%	10.111	3272	32,36%
Semampir	20.911	19864	94,99%	9.874	4699	47,59%
Simokerto	9.570	6874	71,83%	4.597	3327	72,37%
Sukolilo	11.021	12479	113,23%	5.193	6394	123,13%
Sukomanunggal	10.460	10231	97,81%	4.887	5003	102,37%
Tambaksari	22.541	17725	78,63%	10.787	4793	44,43%
Tandes	9.703	11518	118,71%	4.608	3014	65,41%

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Tegalsari	9.827	10331	105,13%	4.821	2804	58,16%
Tenggilis Mejoyo	5.688	5567	97,87%	2.698	2718	100,74%
Wiyung	7.093	7016	98,91%	3.433	2586	75,33%
Wonocolo	7.926	8204	103,51%	3.841	4467	116,30%
Wonokromo	15.622	11892	76,12%	8.038	6569	81,72%
Jumlah	303.021	291.907	96,33%	146.952	123.398	83,97%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II. 34 dan Tabel II. 35 menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. APM dan APK seluruh jenjang sekolah di Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi namun secara garis besar mengalami peningkatan.

Dari data diatas terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

2.1.3.1.1.c Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

AL untuk jenjang SD/MI tahun 2016 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2019. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 sebesar 99,97 persen, dan meningkat pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menjadi 100 persen. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 36.

Tabel II. 36
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	SD/MI					
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	40.849	42.621	44.223	46.127	N/A
1.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6	40.849	42.621	44.223	46.127	46.159
	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100	N/A
2.	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	39.570	41.834	42.282	40.965	N/A
2.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9	39.580	41.834	42.282	40.965	39.880
	AL SMP/MTs (persen)	99,97	100	100	100	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Dari data pada AL untuk jenjang SD/MI tahun 2016 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2019. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 sebesar 99,97 persen, dan meningkat pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menjadi 100 persen. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 36.

menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir dinyatakan lulus.

2.1.3.1.1.d Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2016 APS di jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan triwulan II tahun 2020. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan triwulan II tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada Tabel II.37.

Tabel II. 37
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	SD/MI					
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI	281.310	282.408	287.830	309.427	283.799
	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0	0
2.	SMP/MTs					
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0	0

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs	135.283	130.505	129.136	134.215	125.465
	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

2.1.3.1.1.e Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Angka Melanjutkan SMP/MTs diukur dari perbandingan jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs/setara di Kota Surabaya terhadap siswa yang lulus ujian kelas 6 SD/MI/setara di Kota Surabaya, dan Angka Melanjutkan SMA/MA/SMK diukur dari perbandingan jumlah siswa baru kelas 10 SMA/MA/SMK di Kota Surabaya terhadap siswa yang lulus ujian kelas 9 SMP/MTs/setara di Kota Surabaya.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 95,03% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 105,51%. Penurunan juga terjadi pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2016 sebesar 116,54% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 96,68%. Pada tahun 2018, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 92,35% persen dan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK sebesar 100%. Pada tahun 2019, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 112,31% persen dan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK sebesar 99,69%. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 38
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	(AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs					
	Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMP/MTs	43.099	40.503	40.841	51.803	N/A
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Sebelumnya	40.849	42.621	44.223	46.167	N/A
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs (persen)	105,51	95,03	92,35	112,21	N/A
2	(AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK					
	Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMA/MA/SMK	46.116	40.445	42.282	40.837	N/A
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Tahun Sebelumnya	39.570	41.834	42.282	40.965	N/A
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK (persen)	116,54	96,68	100	99,69	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya siswa yang melanjutkan pendidikan di luar Kota Surabaya, salah satunya dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

2.1.3.1.1.f Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 disajikan pada Tabel II. 39.

Tabel II. 39
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	733	900	846	851	857
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	304.652	281.089	286.373	303.021	278.601
1.3.	Rasio	1 : 415	1 : 312	1 : 339	1 : 356	1:325
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	341	393	404	412	413
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	158.893	144.127	141.554	146.952	147.458
2.3	Rasio	1 : 465	1 : 367	1 : 350	1 : 357	1:357

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

*Sekolah negeri

Tabel II. 40
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Tahun 2019

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	8	9	17	5.298	1:312	3	4	7	2.552	1:365
Benowo	13	5	18	7.174	1:399	4	2	6	3.500	1:583
Bubutan	29	2	31	10.099	1:326	8	0	8	5.138	1:642
Bulak	13	6	19	4.782	1:252	5	1	6	2.384	1:397
Dukuh Pakis	24	1	25	5.946	1:238	11	1	12	2.814	1:235
Gayungan	14	1	15	4.251	1:283	6	1	7	2.158	1:308
Genteng	20	1	21	5.513	1:263	11	0	11	2.798	1:254
Gubeng	25	5	30	12.790	1:426	14	0	14	6.507	1:465
Gununganyar	13	1	14	5.971	1:427	8	1	9	2.759	1:307
Jambangan	7	5	12	5.324	1:444	7	1	8	2.569	1:321
Karangpilang	12	3	15	7.173	1:478	9	0	9	3.521	1:391
Kenjeran	23	20	43	19.049	1:443	14	9	23	9.082	1:395
Krembangan	31	7	38	11.872	1:312	17	1	18	5.759	1:320
Lakarsantri	21	5	26	6.322	1:243	10	2	12	3.006	1:251
Mulyorejo	25	0	25	8.390	1:336	16	0	16	4.030	1:252
Pabean Cantian	14	4	18	7.801	1:433	6	1	7	3.853	1:550
Pakal	15	6	21	6.022	1:287	7	3	10	3.060	1:306
Rungkut	24	5	29	11.523	1:397	9	2	11	5.437	1:494
Sambikerep	15	6	21	6.711	1:320	15	3	18	3.137	1:174

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Sawahan	45	0	45	20.648	1:459	14	1	15	10.111	1:674
Semampir	36	36	72	20.911	1:290	18	17	35	9.874	1:282
Simokerto	18	6	24	9.570	1:399	10	3	13	4.597	1:354
Sukolilo	32	1	33	11.021	1:334	17	1	18	5.193	1:289
Sukomanunggal	28	1	29	10.460	1:361	17	2	19	4.887	1:257
Tambaksari	40	10	50	22.541	1:451	20	4	24	10.787	1:449
Tandes	21	10	31	9.703	1:313	12	2	14	4.608	1:329
Tegalsari	30	2	32	9.827	1:307	12	0	12	4.821	1:402
Tenggilis Mejoyo	17	1	18	5.688	1:316	7	0	7	2.698	1:385
Wiyung	15	1	16	7.093	1:443	11	0	11	3.433	1:312
Wonocolo	19	2	21	7.926	1:377	9	1	10	3.841	1:384
Wonokromo	34	8	42	15.622	1:372	20	2	22	8.038	1:365

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Dari data pada Tabel II. 39 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah di jenjang SD semakin meningkat, sedangkan pada jenjang SMP mengalami penurunan di tahun 2019. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah seperti data pada Tabel II.40 pada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Karangpilang dengan nilai rasio sebesar 1:478, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:238. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Bubutan memiliki rasio tertinggi yaitu 1:642 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:174.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya

tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2019 terdapat 379 sekolah SMP yang telah terakreditasi, terdiri dari 241 sekolah yang terakreditasi A, 124 sekolah terakreditasi B dan terdapat 14 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/MI /Sederajat terdapat 815 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 524 sekolah yang terakreditasi A, 252 sekolah terakreditasi B dan 39 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2019 terdapat 233 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 71 lembaga kursus/pelatihan, dan sebanyak 162 lembaga kursus/pelatihan belum terdaftar.

Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2019 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 699 peserta, sebanyak 276 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 1.414 peserta, sebanyak 892 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 2.961 peserta, sebanyak 1.714 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus.

2.1.3.1.1.g Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan

akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II. 41

Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	SD/MI					
1.1	Guru	12.642	12.797	14.132	13.798	13.737
1.2	Murid	281.310	282.408	287.830	310.283	283.799
1.3	Rasio	1:22	1 : 22	1 : 21	1 : 19	1:20
2	SMP/MTs					
2.1	Guru	7.167	7.231	7524	6.887	6.428
2.2	Murid	135.283	128.471	129.136	134.215	125.465
2.3	Rasio	1:19	1:18	1 : 18	1 : 19	1:20

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 42

Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	12		11	1	-	255	32	-	311
SD	69	2	73	13	1	3.392	585	2	4.137
SMP	9	6	4	14	1	1.421	467	3	1.925
TOTAL	90	8	88	28	2	5.068	1.084	5	6.373

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II. 43

Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	1.011	57	136	57	5	4.094	137	1	5.498
SD	451	16	74	46	9	8.641	416	2	9.655

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
SMP	84	4	5	30	6	4.416	416	1	4.962
TOTAL	1.546	77	215	133	20	17.151	969	4	20.115

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II. 44
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2019

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	NON PNS	Jumlah	PNS	NON PNS	Jumlah	PNS	NON PNS	Jumlah
1	SD	3.736	2.961	6.697	4.143	9.655	13.798	407	6.693	7.100
2	SMP	1.835	1.865	3.700	1.925	4.962	6.887	90	3.097	3.187
Jumlah		5.234	5.571	4.826	10.397	6.068	14.617	20.685	497	9.790

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 7.100 guru SD/MI/setara dan 3.187 guru SMP/MTs/setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.1.3.1.2 Kesehatan

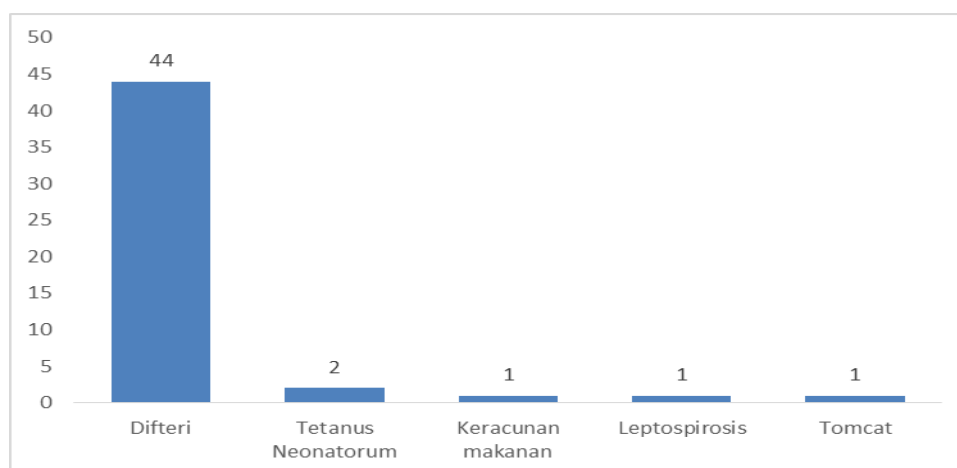
Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya melalui cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada Tabel II. 45.

Tabel II. 45
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	38	30	49	4	154
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	38	30	49	4	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020



Gambar II. 12
Kejadian Luar Biasa Kota Surabaya Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

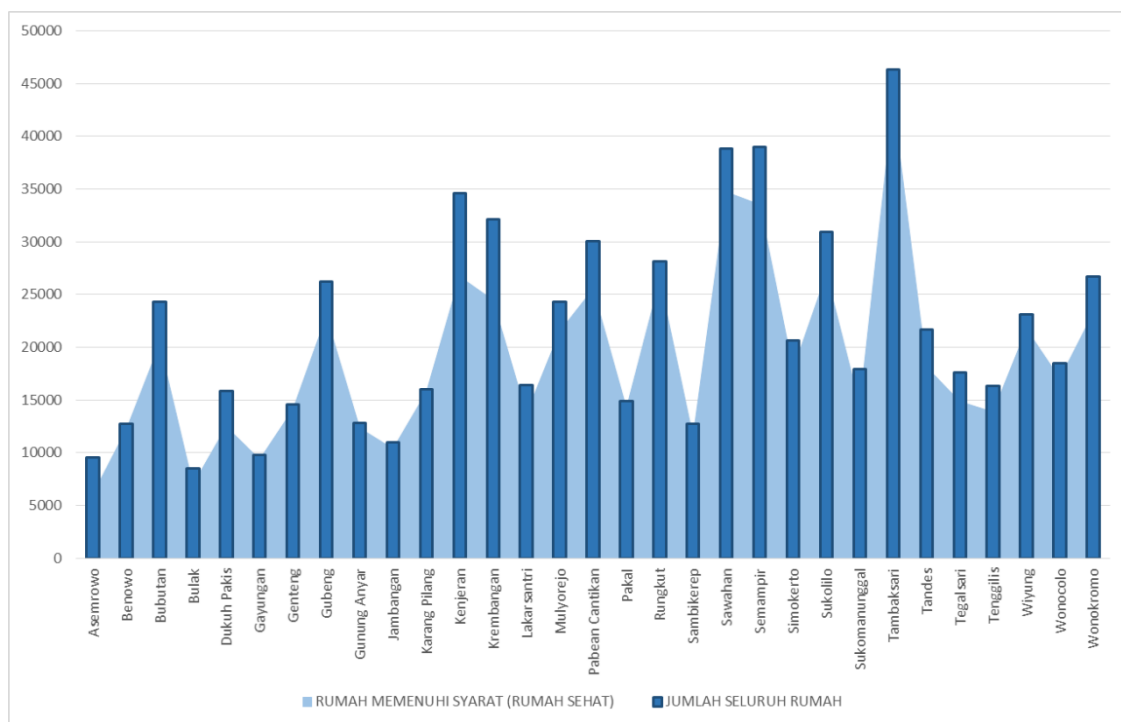
Kejadian Luar Biasa Tahun 2020 terbanyak adalah pandemic COVID-19 yang terjadi di 154 kelurahan. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi <20 jam.

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m²/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban,

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada Gambar II.12 dibawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.



Gambar II. 13
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2018, seluruh

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

kelurahan telah memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 47.

Tabel II. 46
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	154	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Tabel II. 47
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.548	42.502	42.791	42.783	21.104
2	Jumlah ibu nifas	45.322	44.963	44.598	44.252	43.904
3	Persentase (persen)	93,88%	94,65%	95,95%	96,68%	48,07%

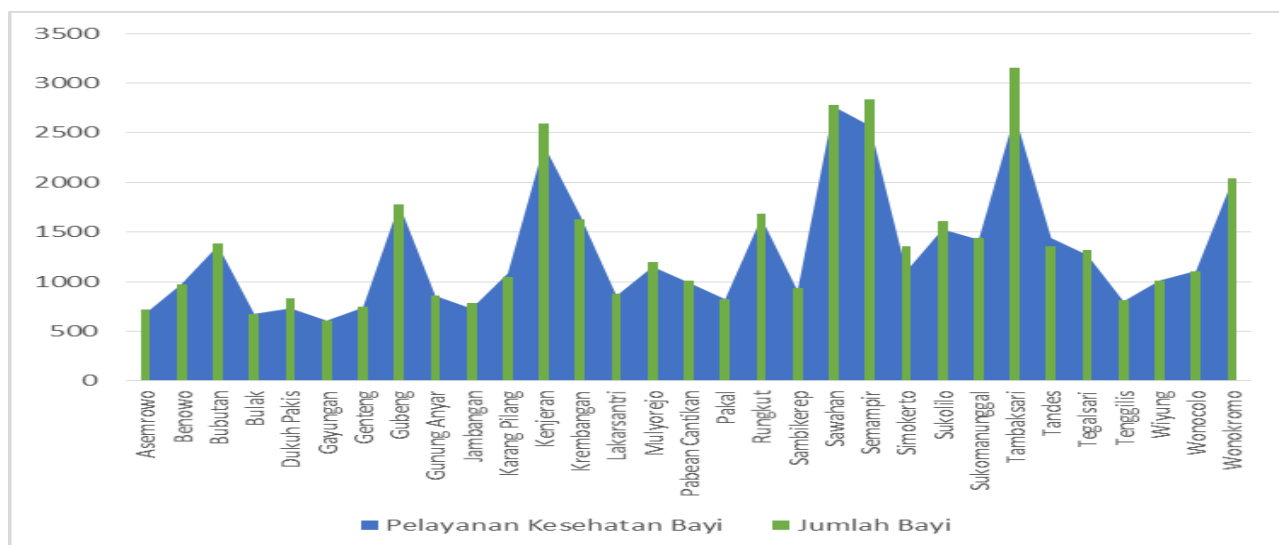
Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Tabel II. 48
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	40.086	40.668	41.070	40.813	20.245
2	Jumlah bayi	42.767	42.377	42.003	41.646	41.814
3	Persentase (persen)	93,73%	95,97%	97,78%	98,00%	48,42%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020



Gambar II. 14

Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Kecamatan Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar II.13 adalah di Kecamatan Tambaksari. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Gayungan.

Tabel II. 49

**Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2016 – Triwulan II 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	280	278	254	242	101
2	Jumlah balita gizi buruk	280	278	254	242	101
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2016 jumlah Posyandu balita sebanyak 2.824 posyandu, pada tahun 2017 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita diwilayahnya

masing-masing, dan di triwulan II 2020 jumlah posyandu balita sebanyak 2.776. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam Tabel II. 50.

Tabel II. 50
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah posyandu	2.824	2.797	2.797	2.776	2776
2	Jumlah balita	215.713	219.367	211.564	209.706	178.043
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	13,09	12,75	13,25	13,37	15,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2020

Dari data Tabel II. 50 diatas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1000 penduduk berkisar angka 12-15. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2017, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 21 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 59 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan triwulan II tahun 2020 sejumlah 3.157.109 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 50.112 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskemas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya belum mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2016 sampai dengan triwulan II tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel II.51.

Tabel II. 51
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	296	241	352	286	325
3	Jumlah pustu	59	59	59	59	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II.52.

Tabel II. 52
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Penduduk	3016368	3074883	3094732	3159481	3157109
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	3	4	3	4	7
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	4	4	4	4	4
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7	7
5	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2	2
6	Rumah Sakit Swasta	43	42	43	43	42
Jumlah Rumah Sakit		59	59	59	59	62
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		0,0178	0,0179	0,0191	0,0187	0,062

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2016, jumlah dokter di kota Surabaya sebanyak 7.358 orang, dengan rasio sebesar 2,22 dokter per 1.000 penduduk atau 22,2 dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2017, jumlah dokter sebanyak 5.195 orang, dengan rasio 1,55 per 1000 penduduk. Pada tahun 2018, jumlah dokter sebanyak 4.295 orang, dengan rasio 1,38 per 1000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah dokter sebanyak 2.093 orang, dengan rasio 0,66 per 1000 penduduk. Sedangkan pada triwulan II tahun

2020, jumlah dokter sebanyak 2.066 orang, dengan rasio 0,65 per 1000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota Surabaya masih belum mencukupi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 53

Tabel II. 53
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	3.157.109
2	Jumlah dokter	7.358	5195	4295	2093	2066
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	2,22	1,55	1,38	0,66	0,65

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2020

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada Tabel II.54.

Tabel II. 54
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

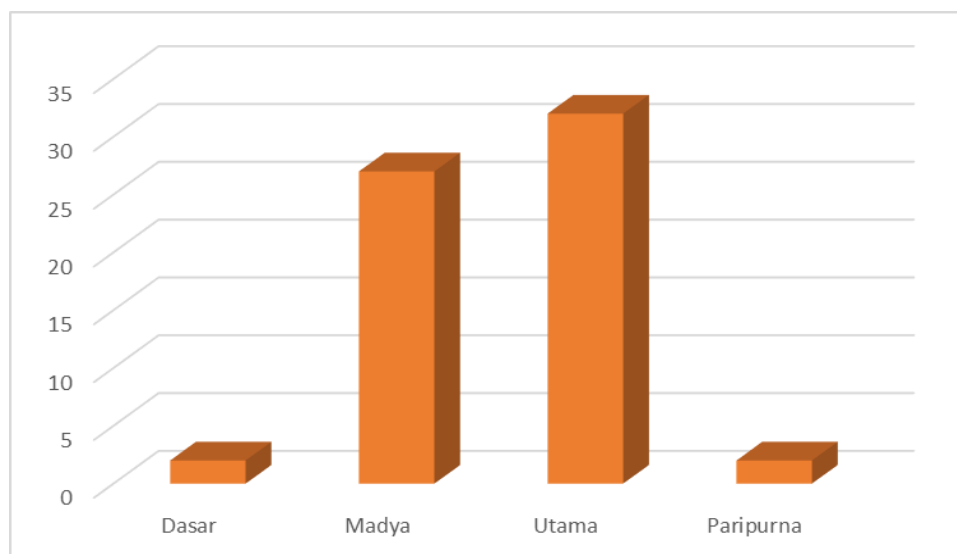
Instansi	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
RSUD Bhakti Dharma Husada	78,91	78,73	86,41	86,43	N/A
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	77,02	81,12	87,72	88,80	N/A

Sumber : Bagian Organisasi, 2020

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 terdapat 16 puskesmas telah dilakukan akreditasi diantaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih,

Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Dukuh Kupang. Pada tahun 2017, terdapat 44 puskesmas yang dilaksanakan akreditasi, dan sisanya di tahun 2018. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2019 telah dilaksanakan penilaian akreditasi di semua puskesmas. Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna.

Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II. 15
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2018
Sumber: Dinas Kesehatan, 2019 diolah

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.a Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2017, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,51; di mana jalan Kota

Surabaya sepanjang 1.689.290 meter melayani jumlah penduduk sebesar 3.342.627 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2016, panjang jalan dalam kondisi baik 1.662,99 km, dengan prosentase 98,61%. Pada tahun 2017, panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 1.667,78 km dari panjang jalan 1.689,29 km, dengan persentase 98,73%. Pada Tahun 2018, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.678,86 km dari panjang jalan 1.692,53 km, dengan persentase 99,19%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pada Tabel II.55.

Tabel II. 55
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.662,99	1.667,78	1.678,86	1.683,11	N/A
Panjang Jalan (Km)	1.686,38	1.689,29	1.692,53	1.694,38	N/A
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	98,61%	98,73%	99,19%	99,33%	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2020

2.1.3.1.3.b Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya

perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.56.

Tabel II. 56
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Rumah Tinggal	7.196	7.638	4.923	5.723	2.600
2	Non Rumah Tinggal	1.762	1.717	1.773	1.944	843
3	Reklame	2.450	1.576	1.148	454	289
Total		11.408	10.931	7.844	8.121	3.732

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2020

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah izin mendirikan bangunan yang

diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang didalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Gambar II.11 terlampir). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada Tabel II.57.

Tabel II. 57
Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	PRIORITAS II
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	PRIORITAS III
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada Tabel II. 58 berikut:

Tabel II. 58
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	749	1.629	1.648	1.090	246

Sumber: Dinas Sosial, 2020

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan-tau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk

melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 59
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya

Tahun	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah Pemohon Rusun	801	1.287	1.588	1.190	892

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2020

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 79 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15 lokasi dan pada 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi dan pada tahun 2019, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 96 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 19 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 60
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun th. 1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec. Simokerto	18	10	± 41. 044	Dibangun th. 1993/1994 (APBN)

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan Sari	Kel Penjaringan Sari Kec. Rungkut	18	3	± 32.350	Dibangun th. 1995 (APBN)
			21	6		Dibangun th. 2004 (APBN)
			24	2		Dibangun th. 2009 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 5.466	Dibangun th. 2004 (APBN)
			21	4		Dibangun th. 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845	Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun t. 2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21	4	± 28.810	Dibangun th. 2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel dr Soetomo Kec Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	1	± 2.977,3	Dibangun 2011-2012 (APBN)

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
12.	TPI/PPI Romokalisari (1-3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13.	Siwalankerto	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14.	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
15.	Gununganyar	Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar	36	1	± 9.438	Dibangun 2014 (APBN)
			24	1	± 4.282	Dibangun 2019 (APBN)
16.	Dukuh Menanggal	Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan	24	2	± 14.388	Dibangun 2017 (APBN)
17	Keputih	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo	36	4	±258.140	Dibangun 2016 (APBN)
			36	2		Dibangun 2017 (APBN)
			36	2		Dibangun 2018 (APBN)
18	Pondok Benowo	Babat Jerawat, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	24	1	± 4.129	Dibangun 2019 (APBN)
19	Indrapura 135	Pabean Cantian	24	1	± 5.466	Dibangun 2019 (APBN)
Total				96		

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

2.1.3.1.5.a Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 61
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	648	663	677	781	785
2	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	3.157.109
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,14	2,15	2,18	2,47	2,49

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2016, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sejumlah 47.067, keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100% dari 47.067 obyek yang ditangani. Pada tahun 2017, sebanyak 41.111 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2018, jumlah pelanggaran menurun menjadi 24.095 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Pada tahun 2019, jumlah pelanggaran menurun menjadi 16.382 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Pada triwulan II tahun 2020, jumlah pelanggaran sebanyak 5.607 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada Tabel II.62.

Tabel II. 62
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	47.067	41.111	24.095	16.382	5.607

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

2	Jumlah pelanggaran K3	47.067	41.111	24.095	16.382	5.607
3	% penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Surabaya pada tahun 2016, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 82 personil Linmas. Pada tahun 2017, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 63 personil Linmas, dan pada tahun 2018, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 64-65 personil Linmas. Pada tahun 2019, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 65 personil Linmas. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 62 personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel II. 63.

Tabel II. 63
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Linmas	24.859	19.372	20.033	20.641	19.467
2	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	3.157.109
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	82,41	63,00	64,73	65,33	61,66

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2020

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan, serta meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis. Pada tahun 2017 terdapat 10 kejadian anarkis dari 226 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2018, hanya ada 11 kejadian anarkis dari 236 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk tahun 2019, hanya ada 13 kejadian anarkis dari 227 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pada triwulan II tahun 2020, ada 3 kejadian anarkis dari 75 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.5.b Penanganan Bencana Kebakaran

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel II. 64 berikut.

Tabel II. 64
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	57	64	74	86	86
2	Jumlah Penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	3.157.109
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	93%	93%	93%	94%	94%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2020

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II. 65
Kejadian Kebakaran per Penyebab

No	Penyebab	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Hubungan Listrik	142	114	107	75	91
2	Api Terbuka	125	239	301	186	78
3	Api Mekanis	3	0	4	0	0
4	Dalam Penyelidikan	30	234	70	254	55
5	Tidak Ada Keterangan	0	2	14	0	1
Total		300	589	496	515	225

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2019

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2017, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada Tabel II.66.

Tabel II. 66
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) $\leq$ 15 Menit	300	589	496	515	225
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	300	589	496	515	225

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, 2020

Sepanjang tahun 2016, jumlah kejadian kebakaran yaitu 300 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 300 kejadian. Pada tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran yaitu 534 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 534 kejadian. Pada tahun 2018, jumlah kejadian kebakaran yaitu 496 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 496 kejadian. Pada tahun 2019, jumlah kejadian kebakaran yaitu 515 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 515 kejadian. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020, jumlah kejadian kebakaran yaitu 225 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 225 kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas.

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan waktu respon yang telah ditentukan.

Tabel II. 67
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	20	20	21	21	21
2	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481	3.157.109

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2020

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

- a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.

- b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.5.c Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan

badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2016 –2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 68
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Ormas Aktif	51	32	25	21	12
2	Jumlah Ormas Terdaftar	167	167	167	167	167

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2020

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan akhir tahun 2019, kegiatan pembinaan terhadap ormas terhadap 21 lembaga.

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

2.1.3.1.5.d PMKS yang Ditangani

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanaan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel II. 69
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2016– Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah PMKS yang ada	50.222	47.633	58.129	77.808	73.136
2	Jumlah PMKS yang ditangani	30.468	28.643	36.098	46.765	44.062
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	60,67	60,13	62,09	60,10	60,25

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2020

Jumlah PMKS sampai dengan triwulan II tahun 2020 menurun dari 77.808 orang menjadi 73.126 orang dengan persentase PMKS yang ditangani sebanyak 60,25 persen. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PMKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanaan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat hingga tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar 1.520.041 pada tahun 2018 menjadi 1.556.846 pada tahun 2019. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 digeser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 70
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2017– Triwulan II 2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.495.837	1.520.041	1.566.846	
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.254.188	2.269.293	2.283.861	2.388.960
3	Rasio angkatan kerja	0,66	0,67	0,69	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, Agustus 2020

2.1.3.2.1.a Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah

pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 71
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	275	280	226	235	147
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Rasio sengketa	2,15	2,19	1,77	0,02	0,01

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2019

Jumlah sengketa pekerja pengusaha pada tahun 2016 sebanyak 275, meningkat pada tahun 2017 menjadi 280 sengketa. Sengketa pada tahun 2017 tersebut dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi. Jumlah sengketa kembali menurun menjadi sebesar 226 pada tahun 2018 sebagai dampak dari upaya pemeliharaan hubungan industrial yang baik. Tahun 2019 kembali naik menjadi 235 sengketa dengan kasus yang sama dengan tahun 2017 yaitu terjadinya PHK. Sedangkan sampai dengan TW II tahun 2020 jumlah sengketa sebanyak 147

2.1.3.2.1.b Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 72
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2018
1	Tidak/belum pernah sekolah	14.001
2	Tidak/belum tamat SD	
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	6.264
5	SMA	28.608

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2018
6	SMK	22.724
7	Diploma I/II/III/Akademi	3.012
8	Universitas	18.487

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Melalui adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pencari kerja yang difasilitasi sebesar 7.502 orang dan 3.803 orang diantaranya berhasil ditempatkan, sedangkan pada 2017 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.035 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 4.305 orang. Pada tahun 2018, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.288 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 5.805 orang. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 9.235 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 6.065 orang. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel II.73.

Tabel II. 73
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	3.803	4.305	5.805	6.065	2.087
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	7.502	8.035	8.288	9.235	3.009

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2020

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Diharapkan kegiatan fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan

keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

2.1.3.2.1.c Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada Tabel II.74.

Tabel II. 74
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	ZTW II 2020
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	5.174	5.215	6.689	7.801	7.801
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen)	40,48	40,80	52,33	61,03	61,03

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2020

Pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 5.174 perusahaan atau 40,48% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 5.215 perusahaan atau 40,80% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 6.689 perusahaan atau 52,33% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 7.801 perusahaan atau 61,03 persen dari total perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya sampai dengan triwulan II tahun 2020, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 7.801 perusahaan atau 61,03 persen dari total perusahaan yang terdaftar

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2.1.3.2.2.a Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.159 orang. Adapun pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.125 orang dan di tahun 2018, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 8.003 orang sebagai PNS dan 13.362 orang sebagai tenaga kontrak yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.75.

Tabel II. 75
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Pekerja Perempuan	-	583.772	587.684	617.965	N/A
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	10.159	12.125	21.365	24.476	N/A
3	Persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota	-	2,07	3,63	3,96	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Diklat dan Bagian Administrasi Pembangunan, 2020

Dari data pada Tabel II. 75 di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.2.b Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2017, sebesar 583.772 orang atau 95,23% dari jumlah angkatan kerja perempuan dan meningkat di 2018 menjadi sebesar 587.684 orang. Pada tahun 2019, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan juga meningkat menjadi 617.965 orang atau 94,05% dari jumlah angkatan kerja perempuan. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada Tabel II.76.

Tabel II. 76
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya
Tahun 2017- Triwulan II 2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	612.988	617.096	657.039	N/A
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	583.772	587.684	617.965	N/A
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	95,23	95,23	94,05	N/A

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2019

2.1.3.2.2.c Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada Tabel II. 77 di bawah ini.

Tabel II. 77
KDRT Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Rumah Tangga	-	-	-	-	-
2	Jumlah KDRT	77	26	37	10	6
3	Rasio KDRT	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2020

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada Tabel II.77. di atas jumlah KDRT menurun dari tahun 2016-2017 namun mengalami peningkatan di tahun 2018. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel II. 78.

Tabel II. 78
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak DariTindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	263	138	123	342	20
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	263	138	123	342	20
3	Persen penyelesaian pengaduan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2020

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan

Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman).

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2014, terdapat 3 kecamatan yang responsif gender. Kemudian pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 6 kecamatan yang responsif gender dan 15 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2016, terdapat 11 kecamatan yang responsif gender dan 30 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2017, terdapat 15 kecamatan yang responsif gender dan 50 kelurahan ramah anak, dan sampai dengan tahun 2018, terdapat 19 kecamatan yang responsif gender dan 81 kelurahan ramah anak.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender maka Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 79
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	93,65	93,66	93,67***	N/A

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

*** Angka Sangat Sementara, Bappeko, diolah

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Pada Tabel II.80. menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya meningkat sejak tahun 2016 yaitu pada tahun 2016 sebesar 145,01 kg/kapita/th dan pada tahun 2017 menjadi 167,946 kg/kapita/th, dan pada tahun 2018 sebesar 521,49 kg/kapita/th. selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 310,95 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun.

Tabel II. 80
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	479.602.970	561.380.280	1.613.871.200	982.443.190	N/A
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	3.157.109
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	145,01	167,946	521,49	310,95	N/A

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tingkat konsumsi beras masyarakat di Kota Surabaya pada tahun 2018 rata-rata sebesar 101,54 kg/kapita/th, sehingga apabila dibandingkan dengan data ketersediaan pangan sebesar 521,49 kg/kapita/th maka ketersediaan pangan kota Surabaya tahun 2018 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Surabaya.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan Tabel II. 81 dapat disampaikan bahwa Pola pangan harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2018 mencapai 96,76. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 95,5 maka capaian kinerjanya mencapai 101,32%. Namun, pada tahun 2019 PPH masyarakat kota Surabaya menurun menjadi 96,1, hal ini dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan kota Surabaya dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein.

Tabel II. 81
Pola Pangan Harapan Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Pola Pangan Harapan	95,28	95,62	96,76	96,1	96,25

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2020

2.1.3.2.4 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada Tabel II. 82 dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2015, masih 48,84 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota yang telah bersertifikat, sedangkan sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Pada tahun 2016, sebanyak 744 aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat dan pada tahun 2017 sebesar 16,56 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Pada tahun 2018, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,27 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pada tahun 2019, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,36 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Selanjutnya pada triwulan II tahun 2020, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

39,47 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pengamanan administrasi berupa pencatatan / inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Tabel II. 82
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah bersertifikat	744	1076	1317	1323	1344
Total aset pemerintah	1567**	6497	6497	6497	3405
Presentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	47,48%	16,56%	20,27%	20,36%	39,47%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, 2020

***) Total aset 2017-2018 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya
Total aset 2020 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT

Tabel II. 83
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	29	24	30	30	15
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	6	2	2	6	1
3.	Persen Kasus yang Diselesaikan	20,68%	8,33%	6,67%	20%	6,67%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2020

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi

pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya dalam satuan m³/hari yaitu pada tahun 2016 sebanyak 9.710,61 m³/hari, pada tahun 2017 sebanyak 10.674,63 m³/hari, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 7.143,36 m³/hari, sebagaimana rekap data pada Tabel II. 84.

Tabel II. 84
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA
Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Volume Produksi Sampah (m ³ /hari)	9.710,61	10.674,63	7.143,36	2.954,28	2.954,25
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m ³ /hari)	5.237,7	5.539,15	5.501,12	2.954,28	2.954,25
3	Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)	53,94%	51,89%	77,01%	100%	100%

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2020

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel II.85.

Tabel II. 85
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481	3.157.109
2	Jumlah TPS (unit)	187	187	183	245	182

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2020

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 mencapai 21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,46 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2017 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,75 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.275,27 Ha. Pada tahun 2018 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93 Ha. Pada tahun 2019 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,91 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.329,82 Ha. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,99 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha.. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 86
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2016 – Triwulan II 2020

NO.	JENIS RTH PUBLIK	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	RTH makam	283.53	283.53	283.53	283.53	283.53
2	RTH lapangan dan stadion	350.34	355.35	355.86	359.86	360.58
3	RTH telaga/waduk/boezem	191.86	191.86	192.08	196.29	198.23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	204.61	205.50	205.50	205.50	205.50
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4548.59	4548.59	4548.59	4570.33	4570.33
6	RTH hutan	45.23	55.81	55.81	57.55	66.03

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

NO.	JENIS RTH PUBLIK	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1643.55	1646.10	1646.10	1656.08	1656.08
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		7,267.72	7,286.74	7,287.48	7,345.82	7,356.96
Luas Kota Surabaya		33,451.00	33,451.00	33,451.00	33,451.00	33,451.00
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		21.73	21.78	21.79	21.96	21.99

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2020

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih belum dimanfaatkan atau berfungsi secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi / peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai stakeholder.

Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2016 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 75 kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Pada tahun 2017, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 54 kasus, dan sebanyak 54 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2018, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 66 kasus, dan sebanyak 66 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2019, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 59 kasus, dan sebanyak 59 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 29 kasus, dan sebanyak 29 kasus dapat ditangani.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang disajikan pada Tabel II.87.

Tabel II. 87
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada	75	54	66	59	29
2	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang Diselesaikan Pemerintah Kota	75	54	66	59	29
3	Persentase Permasalahan Lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, mall, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penataan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perijinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi

yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian bersama dan sistem kontrol bersama.

Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator.

Tabel II. 88
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya

Indeks	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Indeks Pencemaran Air (IPA)	54,9	57,5	57,62	57,68	52,80
Indeks Pencemaran Udara (IPU)	89,57	90,26	90,26	90,30	90,18
Indeks Ruang Terbuka Hijau (ITH)	42,38	42,38	42,44	42,45	N/A
Indeks Persampahan	69,27	74,96	74,98	75,09	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2020

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir

angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

Tabel II. 89
Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2016-Triwulan II 2020

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah PJU LED	Unit	2.747	8.127	13.499	19.589	87
<i>Solar cell</i> di Sekolah Adiwiyata	Unit	18	22	22	22	N/A
<i>Solar cell</i> di gedung pemerintah	Lokasi	3	7	7	7	N/A
Kincir Angin	Unit	8	8	8	8	N/A
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	26	21	18	18	N/A
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	0	9	24	59	N/A

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, 2020

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 90
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2014 – Triwulan II 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2014	2.160.362	2.026.310
2015	2.218.411	2.066.693

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2016	2.267.213	2.057.533
2017	2.313.440	2.040.526
2018	2.348.598	2.020.291
2019	2.355.489	2.108.476
TW II 2020	2.363.670	2.116.444

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2019

Dari data pada Tabel II. 90 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

2.1.3.2.7.a Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2016 sebesar 40.349 atau sebesar 7,96 persen dari jumlah PUS 504.416. Di tahun 2017, Jumlah akseptor KB sebesar 66.425 atau sebesar 12,97 persen dari jumlah PUS 512.066. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, jumlah akseptor KB sebesar 67.972 atau sebesar 13,23 persen dari jumlah PUS sebesar 513.412. Pada tahun 2019, jumlah akseptor KB meningkat sebesar 426.024 atau 80,94 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya pasangan usia subur dan meningkatnya orang peduli KB. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel II. 91.

Tabel II. 91

Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	506.416	512.066	513.412	526.329	520.176
2	Jumlah Akseptor KB	40.349	66.425	67.972	426.024	418.956
3	Rasio Akseptor KB (persen)	7,96	12,97	13,23	80,94	80,54

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2020

2.1.3.2.7.b Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel II.92.

Tabel II. 92

Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	506.416	512.066	513.412	526.329	520.176
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	415.241	414.571	412.170	426.024	418.956
3	Cakupan Peserta KB Aktif	81,99	80,96	80,28	80,94	80,54

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2020

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2016 terdapat 506.416 PUS, tahun 2017 terdapat 512.066 PUS, pada tahun 2018 terdapat 513.412 PUS dan pada tahun 2019, terdapat 526.329 PUS. Sampai dengan triwulan II tahun 2020 terdapat 520.176 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 418.956.

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.93.

Tabel II. 93
***Total Fertility Rate* (TFR) Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Total Fertility Rate (TFR)	1,78***	1,79***	1,73***	1,73	N/A

Sumber : Bappeko, 2019 diolah

***angka sangat sementara

Catatan : Tahun 2019 merupakan data olahan Susenas

2.1.3.2.7.c Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2017, sebanyak 724 BKB, 209 BKR, dan 42 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2018,

terdapat 1000 BKB, 232 BKR, dan 97 BKL yang aktif melakukan kegiatan, dan sampai dengan 2019, terdapat 1000 BKB, 233 BKR dan 100 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.7.d Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga. Selain itu, kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang memproduksi. Pada tahun 2017, dari 1017 PMKS yang dilatih, 695 orang atau sebesar 68,34% di antaranya memproduksi. Sedangkan dari 695 orang yang telah memproduksi sebanyak 508 orang atau sebesar 73,09 % yang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta. Sedangkan di tahun 2018, dari 464 orang yang dibina, 335 orang diantaranya telah memproduksi dan sebanyak 277 orang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta atau sebesar 82,68%. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II. 94.

Tabel II. 94
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	1.824	695	464	190	N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II. 94 diatas. Kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki 4 terminal yang melayani angkutan umum dengan jenis bis dan angkutan kota (angkot) yang terdiri dari Terminal Purabaya, Terminal Tambak Oso Wilangun, Terminal Joyoboyo dan Terminal Bratang dengan fluktuasi jumlah angkutan darat di Kota Surabaya pada tahun 2016 sejumlah 10.202. Sampai dengan tahun 2017, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 8.444 kendaraan. Sampai dengan tahun 2018, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 8.001 kendaraan. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 7.349 kendaraan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi.

Tabel II. 95
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2015	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Terminal Bis	4	4	4	4	4
2	Jumlah Angkutan Darat	10.202	8.444	8.001	7.349	N/A

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian ijin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian ijin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II. 96
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481	3.157.109
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan	7.017	3.699	3.341	2435	1211
3	Rasio Izin Trayek	0,0021	0,0011	0,0011	0.00077	0,00038

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

Pada tahun 2016, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 7.017 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.307.300 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0023. Sementara tahun 2017, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.699 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.342.627 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0011. Untuk tahun 2018, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.341 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.094.732 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0011. Pada tahun 2019, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.435 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.159.481 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00077. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 1.211 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.157.109 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00038.

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR. yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung, khususnya bagi angkutan penumpang dan angkutan barang. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

tahun 2016 sebanyak 123.830 kendaraan, sementara sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 131.256 kendaraan. Pada tahun 2018, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 150.494 kendaraan. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 149.446 kendaraan. Sedangkan pada TW II tahun 2020, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 74.440 kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II. 97
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	37.575	39.610	46.989	47.605	1872
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	97.377	99.983	155.450	157.768	N/A
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	133.463	148.528	158.619	158.249	74.440
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	123.830	131.256	150.494	149.446	71.22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

Demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana sampai dengan tahun 2016 mencapai 12.775 unit, dan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 13.974 unit, serta sampai dengan tahun 2018 berjumlah 16.337 unit. Sampai dengan tahun 2019, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.915 unit, sedangkan sampai dengan triwulan II tahun 2020 pemasangan rambu mencapai 17.178 unit. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II. 98
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	12.775	13.974	16.337	16.915	17.178

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2020

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap SKPD. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan. Pada tahun 2017 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 88 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 997 unit. Pada tahun 2018 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 29 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 1.542 unit. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.653 unit. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya memiliki 2.753 unit HT. Selain menggunakan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II. 99
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Menara (Tower) (unit)	88	88	29	0	0
Alat Komunikasi (HT)	802	997	1.542	2.653	2.753

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Tabel II. 100
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu bentuk pendayagunaan ini adalah dengan menggunakan aplikasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan. Sedangkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 terdapat 10 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perijinan yang terbangun. Dan sampai dengan triwulan II tahun 2020 terdapat 63 sistem informasi pelayanan perizinan dan 18 sistem informasi pelayanan non perizinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 101
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	6	10	10	10	63
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	7	5	5	5	18

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.a Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2016 jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya sebanyak 261.799 orang, pada tahun 2017 jumlah anggota koperasi juga meningkat menjadi 262.153 orang, serta ditahun 2018 jumlah anggota koperasi mencapai 266.396 Orang. Pada tahun 2019 jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 271.267 orang. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020 jumlah anggota koperasi sebanyak 68.897 orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada Tabel II.102.

Tabel II. 102
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah anggota koperasi	261.799	262.153	266.396	271.267	68.897

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.726 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.461 koperasi. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.747 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.484 koperasi, pada tahun 2018 jumlah koperasi meningkat menjadi 1.750 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.487 koperasi. Pada tahun 2019 jumlah koperasi kembali meningkat sebanyak 1.784 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.521 koperasi. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020 jumlah koperasi kembali meningkat sebanyak 1.805 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.540 koperasi. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel II. 103 berikut.

Tabel II. 103
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah koperasi	1.726	1.747	1.750	1.784	1.805
2	Jumlah koperasi aktif	1.461	1.484	1.487	1.521	1.540
3	Persen koperasi aktif	84,65	84,95	84,97	85,26	85,32

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

Pada tahun 2016 jumlah volume usaha koperasi adalah sebesar 1,657 milyar dari 1.463 koperasi, pada tahun 2017, volume usaha koperasi meningkat menjadi 1,797 milyar dari 1.484 koperasi, di tahun 2018 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2,092 milyar dari 1.487 koperasi, dan pada tahun 2019 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2,128 milyar dari 1.521 koperasi. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020, volume usaha koperasi sebesar 844,16 milyar dari 1.540

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

koperasi. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada Tabel II.104.

Tabel II. 104
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif
di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah Koperasi Aktif	1.463	1.484	1.487	1.521	1.540
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.657	1.797	2.092	2.128	844,16
Rasio	1,13	1,21	1,41	1,4	0,55

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

2.1.3.2.10.b Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Sampai dengan triwulan II tahun 2020 jumlah UMKM tercatat sebanyak 26.854 di mana sebanyak 22.924 merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 105
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah seluruh UMKM	26.854	26.854	26.854	26.854	26.854
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	22.924	22.924	22.924	22.924	22.924
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.11.a PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 106 di bawah ini.

Tabel II. 106
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah Proyek PMDN	16	10	13	296	296
Jumlah Proyek PMA	43	34	109	249	249
Total	20	59	44	545	545

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Penanaman Modal Kota Surabaya menunjukkan bahwa nilai investasi di Kota Surabaya pada tahun 2016 sebanyak 59 investasi dan pada tahun 2017 tercatat sejumlah 44 investasi. Tahun 2018 tercatat ada 22 investasi, sedangkan tahun 2019 terdapat 203 investasi yang masuk ke kota Surabaya. Tahun 2017 realisasi investasi di Kota Surabaya sejumlah 44 PMA dan PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.3.972,13 Milyar, pada tahun 2018 sebanyak 22 investasi dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp.4.740,23 Milyar sedangkan untuk tahun 2019 sebanyak 203 investasi dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 19.219,90. Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibanding dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2016

realisasi investasi PMA sebanyak 43 investasi dan PMDN sebanyak 16 investasi, pada tahun 2017 realisasi PMA sebanyak 34 investasi dan PMDN sebanyak 10 investasi. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi investasi PMA sebanyak 9 investasi dan PMDN sebanyak 13 investasi. Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 107 di bawah ini.

Tabel II. 107
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2015 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Persetujuan					
1.1	Jumlah Proyek	109	82	136	155	N/A
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	2.371,45	4.964,37	10.379,22	5.689,61	N/A
	(USD Juta)	351,62	-	774,57	379,90	N/A
2	Realisasi					
2.1	Jumlah Proyek	59	44	122	545	N/A
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	3.797,87	3.972,13	4.854,57	19.219,90	N/A
	(USD Juta)	209,65	166,45	362,28	1.281,32	N/A

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel II. 108 di bawah ini.

Tabel II. 108
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah PMA/PMDN	59	44	122	6081	5789
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	6.897	10.627	10.607	123.705	N/A
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	116,90	241,52	86,94	20,34	N/A

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 6.897 orang dari 59 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 116,90. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.627 orang dari 44 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 241,52. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.607 orang dari 122 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 86,94. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 123.705 orang dari 6081 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 20,34.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR,

Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya telah membangun sebanyak 428 lapangan olahraga. Pada tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 393 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Pada tahun 2018, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 479 lapangan olahraga. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 630 lapangan olahraga. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II. 109.

Tabel II. 109
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

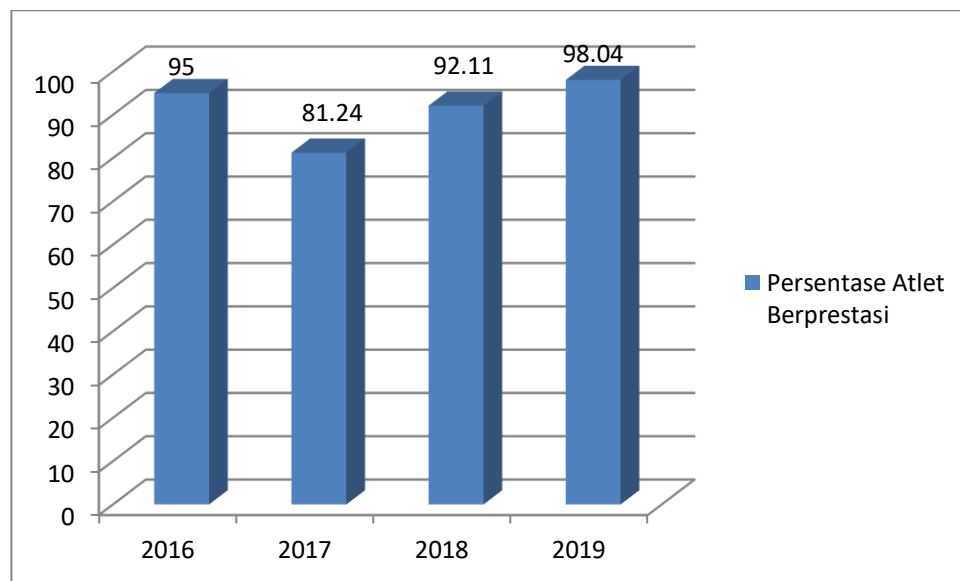
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah lapangan olahraga	428	393	479	630	665
2	Jumlah penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481	3.157.109
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 7.727	1 : 8.505	1 : 6461	1 : 5015	1:4.747

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Kepemudaan & Olahraga, 2019

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk mewujudkan pemerataan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlit olahraga secara khusus.

Pada tahun 2016, nilai persentasi atlit yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95%, dari 847 orang atlit olahraga yang dibina sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional, nasional maupun internasional. Sementara pada tahun 2017, nilai persentase atlit yang berprestasi mencapai 81,24% terdapat 581 orang atlit yang dibina dan sejumlah 472 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sampai dengan tahun 2018, nilai persentase atlit yang berprestasi mencapai 92,11% terdapat 2307 orang atlit yang dibina dan sejumlah 2125 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, nilai persentase atlit yang berprestasi mencapai 98,04% terdapat 2,852 orang atlit yang dibina dan sejumlah 2,796 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional.



Gambar II. 16
Persentase Atlet Berprestasi

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitannya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja.

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah

pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2016 terdapat sejumlah 389 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara sampai dengan tahun 2017 terdapat sejumlah 787 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2018 terdapat sejumlah 1.244 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan sampai dengan tahun 2019 terdapat sejumlah 1.732 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2.1.3.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Informasi Data Pokok Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

Tabel II. 110
Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Dokumen	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	PDRB Kota Surabaya	Ada	-	Ada	Ada	N/A
2.	PDRB Kecamatan	Ada	-	Ada	Ada	N/A
3.	Informasi Data Pokok Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada	N/A
3.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	N/A

Sumber : Bappeko Surabaya, 2019

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di SKPD masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing SKPD, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat &

Keluarga Berencana terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dsb.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada PRJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

2.1.3.2.14 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.14.a Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel II. 111 di bawah ini.

Tabel II. 111
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	887	445	984	805	105

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

tahun 2016 festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 887 festival, dan pada tahun 2017 sebanyak 445 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Sedangkan di 2018, jumlah festival seni dan budaya meningkat menjadi sebanyak 984 kali. Namun, pada tahun 2019 menurun menjadi 805 festival karena beberapa festival melakukan kolaborasi dalam satu festival yang lebih besar. Dan pada triwulan II tahun 2020 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 105 kali. .

2.1.3.2.14.b Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

2.1.3.2.14.c Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada tahun 2019, ada penambahan Bangunan Cagar Budaya sebanyak 4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya pada tahun 2019 menjadi 277 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Sedangkan sampai dengan triwulan II tahun 2020 terdapat penambahan 5 cagar budaya menjadi 282 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II. 112
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	273	273	273	277	282
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	273	273	273	277	282
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

2.1.3.2.15 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata; menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM; menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM; menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota; melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebaran informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, banner, billboard, media

cetak dan elektronik; melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan; melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Selain Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota, terdapat perpustakaan milik non pemerintah Kota yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 2.203 layanan baca yang telah dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel II. 113.

Tabel II. 113
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2	2	2	N/A
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	61	61	61	61	N/A
3	Total	63	63	63	63	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Perpustakaan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung layanan baca sebanyak 729.877 orang. Pada tahun 2018, jumlah ini meningkat menjadi 1.762.516 pengunjung dan seluruhnya meminjam buku. Jumlah pengunjung terus meningkat pada tahun 2019. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Jumlah kunjungan perpustakaan milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II.114.

Tabel II. 114
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Kunjungan layanan baca per bulan (kali)	4.762.438	5.496.517	6.061.413	6.715.104	N/A

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Mengacu kepada sasaran pembangunan pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, meningkatkan kualitas pembangunan manusia dilakukan salah satunya dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Dan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan minat dan budaya baca melalui program 15 menit membaca di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, kegiatan Tantangan Membaca Surabaya, kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

Selanjutnya perlu diukur peningkatkan kemampuan literasi terutama pada siswa sekolah, yang diukur melalui tes *reading text leveling*. Tes *reading text leveling* bertujuan untuk mengukur kemampuan membaca siswa sesuai dengan level standar usia siswa. Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 51.085 siswa atau sebesar 58,59% dari target 289.166 siswa di tahun 2021 telah mengikuti tes reading text levelling. Dan dari 51.085 siswa yang mengikuti tes di tahun 2018, seluruh siswa kemampuan membacanya sesuai dengan *reading text levelling*.

Tabel II. 115
Partisipasi Reading Text Levelling Tahun 2016- Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah siswa mengikuti <i>reading text levelling</i>	3.041	59.438	55.871	51.085	N/A
Jumlah siswa yang kemampuan membacanya sesuai dengan <i>reading text levelling</i>	2.219	59.438	55.871	51.085	N/A
Persentase (%)	72,97	100	100	100	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

2.1.3.2.16 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapny dapat dilihat pada Tabel II. 116

Tabel II. 116
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib
Sistem Tata Kearsipan Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri	224	684	899	641	597
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	24	154	284	432	513
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	10,71%	22,51%	43,89%	67,39%	85,93%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Pada tahun 2017 sebanyak 154 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 284 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Pada tahun 2019, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 432 lembaga. Sedangkan pada triwulan II tahun 2020, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 513 lembaga

Peningkatan yang signifikan didukung oleh adanya pendampingan dan pembinaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu juga didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan. Pada tahun 2019, dilakukan pembinaan sistem kearsipan kepada 130 lembaga, antara lain 7 Perangkat Daerah, 5 Kecamatan, 28 Kelurahan; serta pelatihan/Bintek/Inhouse training kepada 90 SDN di kota Surabaya.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2017, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 473 arsip. Dan di tahun 2018, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 876 arsip. Pada tahun 2019, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 352 arsip. Dengan demikian, persentase arsip diakuisi sebesar 50,78% terhadap target 1.725 arsip diakuisi.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.2 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 118 dan Tabel II.119.

Tabel II. 117
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Total Nilai Tambah PDRB	452.345.242,07	495.043.304,5	547.769.497,0	580.756.010,0	N/A
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan	721.552,58	786.764,6	814.659,3	828.597	N/A
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB	0,16%	0,16%	0,15%	0,14%	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2019

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 0,16% atau sebesar Rp. 786.764,6 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp. 495.043.304,5 juta rupiah. Di tahun 2018, kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 0,15% atau sebesar Rp.814.659,3 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp.547.769.497,0 juta rupiah.

Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil yaitu pada kisaran 0,15-0,16%. Kontribusi sub kategori perikanan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,15%, hal tersebut dikarenakan peningkatan nilai tambah PDRB lebih besar daripada peningkatan nilai tambah sub kategori perikanan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 118
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perikanan Laut	10.578,30	8.416,60	8.151,50	7.165,30	N/A
2.	Perikanan Tambak	6.915,03	6.798,68	6.956,58	7.249,88	N/A
3.	Perairan umum	93,38	94	91,80	114,90	N/A

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.	Kolam	1.116,48	1.133,33	1.104,94	1.014,17	N/A
5.	Jaring Apung	144,82	134,22	138	125,97	N/A
Jumlah		14.954,15	18.849,44	16.576,83	15.670,22	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Pada Tabel II. 118, terlihat bahwa jumlah produksi perikanan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 15.670,22 ton. Penurunan jumlah produksi terjadi pada jenis usaha perikanan laut, kolam dan jaring apung. Menurunnya produksi perikanan laut karena sumber daya ikan semakin berkurang serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sedangkan kenaikan terjadi pada jumlah produksi perikanan tambak dan perairan umum, hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan teknologi tepat guna dan fasilitasi penyediaan sarana produksi dalam budidaya perikanan.

Untuk tingkat konsumsi ikan kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 47,35 kg/kapita/th atau tercapai sebesar 93,48% dari yang ditargetkan nasional yaitu 50,65 kg/kapita/th. Adapun upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di Surabaya melalui memasyarakatkan gemar makan ikan, sosialisasi/penyuluhan, dan pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Kota Surabaya disajikan pada tabel II.119 berikut.

Tabel II. 119
Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	40,33	43,23	45,85	47,35	N/A
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	43,88	47,12	50,65	54,00	N/A
3	Persentase Konsumsi Ikan (persen)	91,91	91,74	90,52	87,69	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

2.1.3.3.3 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke

Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada pada tahun 2017 kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 24.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.569.130 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 22.713.892 wisatawan. Pada tahun 2018, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 29.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.728.194 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 27.575.125 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 28.827.160 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.901.671 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 26.925.489 wisatawan. Berikut Tabel II. 120 mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Tabel II. 120
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	772.058	1.569.130	1.728.194	1.901.671	7.241
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	20.580.728	22.713.892	27.575.125	26.925.489	1.526.085
Jumlah		21.352.786	24.283.022	29.283.022	28.827.160	1.533.326

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Dengan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke surabaya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek

wisata di surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada Tabel II. 120 hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20 obyek wisata yang ada di kota Surabaya, belum memperhitungkan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, mall, maupun obyek wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan, dsb. Dari data table tersebut dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata pada tahun 2016 sebanyak 5.622.177 orang. Sedangkan tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 5.811.227 orang. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 7.215.914 orang dan pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 6.524.456 orang. Pada tahun 2019 obyek wisata yang paling banyak pengunjungnya adalah Kebun Binatang Surabaya.

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Tabel II. 121
Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2015 – Triwulan II 2020

Uraian	2016		2017		2018		2019		Triwulan II 2020	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
THP Kenjeran	747.950	13,30	511.227	8,79	490.353	6,79	460.552	7,06	102,162	8,08
Kenjeran Park	549.144	9,77	950.195	16,35	725.790	10,06	772.336	11,84	0,00	0,00
Taman Prestasi	41.925	0,75	55.156	0,95	98.085	1,36	103.998	1,59	0,00	0,00
Taman Hiburan Rakyat	18.725	0,33	11.115	0,19	9.696	0,13	872	0,01	0,00	0,00
Taman Remaja Surabaya	157.470	2,80	71.043	1,22	147.554	2,04	0	0,00	0,00	0,00
Monumen Tugu Pahlawan	246.400	4,38	264.501	4,55	324.290	4,49	328.588	5,04	71.355	5,64
Kawasan Wisata Religi Ampel	1.513.076	26,91	1.845.913	31,76	2.502.546	34,68	1.439.185	22,06	505.578	39,98
Masjid Al-Akbar	75.123	1,34	89.299	1,54	63.966	0,89	62.253	0,95	0,00	0,00
Masjid Cheng Ho	20.918	0,37	17.200	0,29	19.643	0,27	18.507	0,28	2.091	0,17

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Uraian	2016		2017		2018		2019		Triwulan II 2020	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
Kebun Binatang	1.157.643	20,59	1.220.669	21,01	1.996.738	27,67	2.412.604	36,98	439.918	34,79
Monumen Kapal Selam	333.122	5,93	219.654	3,78	265.783	3,68	310.111	4,75	65.233	5,16
Monumen Jalesveva Jayamahe	-	-	-	-				0,00	0,00	0,00
Loka Jala Srana	48.247	0,86	35.222	0,61	36.816	0,51	25.132	0,39	0,00	0,00
Rumah wafat WR. Soepratman	804	0,01	1.244	0,02	6.425	0,09	12.900	0,20	2.122	0,17
Makam DR. Soetomo	5.101	0,09	18.755	0,32	8.029	0,11	12.695	0,19	2.795	0,22
Patung Djoko Dolog	5.399	0,10	1.170	0,02	1.438	0,02	970	0,01	307	0,22
Balai Pemuda	252.299	4,49	176.792	3,04	213.020	2,95	313.616	4,81	37.231	2,94
House Of Sampoerna	212.100	3,77	165.200	2,84	186.447	2,58	171.600	2,63	35.800	2,83
Ciputra Water Park	227.704	4,05	147.457	2,54	110.477	1,53	69.826	1,07	0,00	0,00
Museum Kesehatan	9.027	0,16	9.395	0,16	8.818	0,12	8.711	0,13	0,00	0,00

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Uraian	2016		2017		2018		2019		Triwulan II 2020	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata	5.622.177	100	5.811.227	100	7.215.914	100	6.524.456	100	1.264.592	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

2.1.3.3.4 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya. Sebagaimana Tabel II. 122 sampai dengan Tabel II. 123 berikut:

Tabel II. 122
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Total Nilai Tambah PDRB	452.345.24 2,07	495.043.3 04,5	547.769.4 97,0	580.756.0 10,0	N/A
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian	98.797,92	96.412,8	98.825,4	99.803	N/A
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2020

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,02%, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan kota Surabaya serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

Tabel II. 123
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	11.799,80	10.568,57	10.130,64	9.685,21	N/A
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	2.289	2.017	1.844	1.750	N/A

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

3.	Produktivitas (ton/ha)	5,16	5,24	5,44	5,53	N/A
----	------------------------	------	------	------	------	-----

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Pada Tabel II. 124 disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di kota Surabaya pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,4% dari tahun 2018 atau menurun dari 10.130,64 ton menjadi 9.685,21 ton. Penurunan jumlah produksi tersebut dikarenakan adanya penurunan luas areal penanaman karena adanya sengketa lahan seperti yang terjadi di Kecamatan Gayungan atau pengalihan lahan/areal yang sebelumnya ditanami padi, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah/perusahaan/pengembang selaku pemilik lahan menjadi penggunaan lainnya atau menjadi kawasan pembangunan infrastruktur seperti akses jalan umum dan rumah sakit diantaranya di Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Benowo dan Kecamatan Gunung Anyar. Namun, produktivitas mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 5,53 ton/ha, hal ini dikarenakan adanya pembinaan terhadap petani melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan, serta fasilitasi penyediaan sarana prasarana produksi.

Tabel II. 124

**Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	11.799,80	10.568,57	10.130,64	9.685,21	811,44
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	519,2	503,05	400,49	109,54	210,65
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	406,9	174,11	471	528,10	N/A
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	757,2	773,60	352,24	718,40	83,7
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	4.466,57	26,80	3.182,5	2.083,50	105,44

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2020

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2019 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu lombok dan sayur, sedangkan jagung, padi

dan buah mengalami penurunan. Produksi padi, jagung dan buah mengalami penurunan antara lain disebabkan berkurangnya luas areal penanaman karena pengurukan lahan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan rumah sakit diantaranya di Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Benowo dan Kecamatan Gununganyar dan atau pemanfaatan areal untuk penggunaan lainnya seperti di Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Gayungan serta alih komoditi ke tanaman sayur. Sedangkan jumlah produksi lombok mengalami kenaikan karena petani beralih komoditi yang nilai jualnya pada saat itu sedang tinggi. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana Tabel II. 124.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 125

Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Jenis Pasar Modern	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Supermarket	61	61	67	63	N/A
2	Minimarket	566	566	593	601	N/A
3	Departement Store	9	9	12	12	N/A
4	Mall/Plaza	33	33	34	34	N/A
Total		603	669	669	728	N/A

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2019

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II. 126
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2017 – Triwulan II 2020

No	Tahun			
	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)			-
2	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)			
3	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)		
4	Pasar Penjaringansari		Pasar Penjaringansari (lanjutan)	
5	Pasar Keputih			
6	Pasar Dukuh Menanggal			
7	Pasar Jambangan			
8		Pasar Kapasari		
9		Pasar Kutisari	Pasar Kutisari (lanjutan)	
10			Pasar Burung Dolly	
11			Pasar Loak Gembong (rehab)	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2020

Tabel II. 127
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Cabang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Selatan	17	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28	28
Total	67	67	67	67	67

Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, 2020

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan izin usaha perdagangan sebagaimana pada Tabel II. 128 berikut.

Tabel II. 128
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Jenis Perusahaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Perdagangan	12.849	12.791	13.887	9.336	N/A
2	Industri	275	330	185	139	N/A
T o t a l		14.975	13.124	13.121	9.475	N/A

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2019

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

Aktivitas perdagangan di kota surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor yang tercermin dari table II. 129

Tabel II. 129
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Nilai Ekspor (US \$)	17.901.405.669	18.268.869.178	18.156.429.939	18.120.064.879	N/A
Nilai Impor (US \$)	15.632.269.630	16.956.900.232	18.892.345.434	17.368.048.068	N/A
Nilai Ekspor Bersih (US \$)	2.269.136.039	1.311.968.946	-735.915.495	752.016.811	N/A

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeko Surabaya, 2019

Berdasarkan perkembangannya, neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2016 dan tahun 2017 tercatat surplus sebesar US \$2.269.136.039 dan US \$1.311.968.946 dan pada tahun 2018, defisit menjadi -446.839.735. Hal tersebut didorong oleh permintaan eksternal, yaitu sebesar US \$19.165.996.010 dan impor sebesar US \$19.612.835.745. Permintaan eksternal turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti China, Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, terjaganya kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya mempengaruhi terhadap net ekspor Kota Surabaya selama tahun 2018.

2.1.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar

2.1.3.4.2 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2016, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 130
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Jenis Dokumen	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2015 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 60 program, tahun 2016 sebanyak 79 program dan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 102 program. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Tabel II. 131
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	79	102	102	102	177
2	Jumlah Program RKPD	79	102	102	102	177
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2020

Tabel II. 132
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	94,94%	91,18%	98,04%	99,02%	99,02%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, 2020

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2019 mencapai 93,75% sehingga dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat berjalan secara optimal.

Tabel II. 133
Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	89,29	87,29	90,19	95,95	24,60

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2020

2.1.3.4.3 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

2.1.3.4.3.a Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel II. 134.

Tabel II. 134

Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2016– Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	N/A
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	63,08	68,86	72,47	73,47	N/A

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai 63,08 atau tingkat akuntabilitas kinerjanya B. Pada tahun 2017, penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017 meningkat yaitu 68,86 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Pada tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan yaitu 72,47 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Sedangkan pada tahun 2019, penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Kota Surabaya kembali meningkat dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB (73,47). Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada 329 jenis pelayanan, sebanyak 267 jenis pelayanan atau 81,16% telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II. 135**Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 – Triwulan II 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	329	329	329	329
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	267	267	267	267	267
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP	81,16%	81,16%	81,16%	81,16%	81,16%

Sumber : Bagian Organisasi, 2020

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus mensinkronkan produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan pada Tabel II. 136.

Tabel II. 136**Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2016 – Triwulan II 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Jumlah rancangan produk hukum	73	79	89	75	30
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	73	79	89	75	30
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum, 2020

2.1.3.4.3.b Pelayanan Publik

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 137 berikut.

Tabel II. 137**Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	N/A
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	82,67	76,30	83,74	82,43	N/A

Sumber: Bagian Organisasi, 2019

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2019 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2019 dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kategori Baik, UPTSA Surabaya Pusat dan UPTSA Surabaya Timur masuk kategori Baik, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan 61 Puskesmas masuk kategori Baik, serta 2 Puskesmas masuk kategori Sangat Baik. Penilaian untuk 31 kecamatan, dengan hasil 15 kecamatan masuk kategori Baik dan 3 kecamatan masuk kategori Sangat Baik, sedangkan 13 kecamatan masuk kategori cukup. Sedangkan 14 kelurahan masuk kategori Sangat Baik dan 77 kelurahan masuk kategori Baik, sisanya masuk dalam kategori Cukup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak Unit Pelayanan yang belum mencapai kategori Sangat Baik, dan kondisi tersebut secara umum menurun dari tahun 2018 di mana sebanyak 118 Unit Pelayanan masuk dalam Kategori Sangat Baik.

2.1.3.4.3.c Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan

meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2019 terdapat 141 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 120 MoU atau 85,11% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 15 MoU dan 12 MoU diantaranya memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dari keseluruhan 119 MoU (non perdagangan) kerjasama antar daerah, pihak ketiga, dan luar negeri tahun 2019, 114 MoU diantaranya telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2019, dari 2 MoU kerjasama yang memuat sektor perdagangan, semuanya terealisasi dan telah ditindaklanjuti.

Tabel II. 138
MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga
Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2019	120
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan tahun 2019	141
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2019	85,11%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2019

Tabel II. 139
MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti tahun 2019	12
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri keseluruhan tahun 2019	15
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2019	80%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2019

2.1.3.4.3.d Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur sebagaimana ditunjukkan pada tabel II. 140 mengalami fluktuasi. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi sanksi.

Tabel II. 140
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur
Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Hukuman Disiplin Ringan						
1	Teguran Lisan	-	1	2	0	1
2	Teguran Tertulis	2	10	1	0	3
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	2	3	2	2	N/A
	Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	4	14	5	2	N/A
Hukuman Disiplin Sedang						
1	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun	2	1	1	0	N/A
2	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun	1	0	2	2	2
3	Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun	1	3	0	0	N/A
	Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	4	4	3	2	N/A
Hukuman Disiplin Berat						
1	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	7	9	4	12	2
2	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	0	1	1	0	N/A
3	Pembebasan Dari Jabatan	8	4	2	4	4
4	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	5	3	3	7	N/A
5	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil	1	1	0	0	N/A
6	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS	-	1	0	0	N/A
	Jumlah Hukuman Disiplin Berat	21	19	10	23	N/A
Hukuman Disiplin						
1	Pemberhentian Sementara (PP. No. 11 Tahun 2017)	3	2	1	3	N/A
2	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS	0	0	3	2	N/A
3	Pencabutan Pemberhentian Sementara	0	0	0	0	N/A
4	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri	0	0	0	0	N/A
5	Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi Anggota Parpol	0	0	0	0	N/A
6	Rehabilitasi	0	0	0	0	N/A
	Jumlah	3	2	4	5	N/A
TOTAL HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN		32	39	22	32	12

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2020

2.1.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel II. 141 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II. 141
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1.	Jumlah pejabat struktural	1.638	1.577	1.577	1580	1530
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.135	1.134	1.255	1174	1096
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	69,29%	71,91%	78,24%	74,30%	71,63%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 142
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	persen	Non Makanan	persen		
2015	581.474	33,75	1.141.526	66,25	1.722.999	100
2016	727.886	39,94	1.094.588	60,06	1.822.474	100
2017	758.750	39,88	1.143.770	60,12	1.902.520	100

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat.

Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut:

Tabel II. 143
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Angkatan Kerja (orang)	-	1.495.837	1.520.041	2.222.469	N/A
PDRB (Juta Rp)	451.486.791,00	503.824.868,16	547.769.496,96	580.756.010,68	N/A
Produktivitas (Juta per orang)	-	336,81	360,36	261,31	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2019

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota Surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II. 144**Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan**

Uraian		2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Nilai PDRB ADHB						
Transportasi dan Pergudangan		16.569.183,7	17.707.950,2	19.276.049,9	20.497.980	N/A
1	Angkutan Rel	92.201,6	100.269,3	107.866,6	209.079,4	N/A
2	Angkutan Darat	4.245.058,0	4.660.509,3	5.050.404,3	4.880.569,0	N/A
3	Angkutan Laut	2.474.710,6	2.617.501,4	2.913.643,7	3.089.045,6	N/A
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	59.816,2	61.096,3	61.125,1	69.693,1	N/A
5	Angkutan Udara	-	-	-	-	N/A
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	9.697.397,3	10.268.574,0	11.143.010,3	12.249.592,8	N/A
Laju Pertumbuhan						
Transportasi dan Pergudangan		4,89	6,87	7,56	7,62	N/A
1	Angkutan Rel	9,60	8,75	7,58	93,83	N/A
2	Angkutan Darat	8,06	9,79	8,37	-3,36	N/A
3	Angkutan Laut	4,12	5,77	11,31	6,02	N/A
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1,27	2,14	0,05	14,02	N/A
5	Angkutan Udara	-	-	-	-	N/A
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	3,73	5,89	8,52	9,93	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2020

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**2.1.4.2.2 Penataan Ruang**

Pada tahun 2016, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II. 145
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	N/A
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	N/A
Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27	N/A

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2019

Tabel II. 146
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	N/A
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	N/A
Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88	N/A

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2019

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2016 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II. 147

Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	N/A
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	N/A
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100	N/A

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2019

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan cukup tajam. Data jumlah kendaraan hanya bisa didapatkan dari perhitungan jumlah kendaraan (kepemilikan) oleh BPKAD Provinsi Jatim (melalui perhitungan pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya), sehingga Kota/Kabupaten tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut. Namun, melihat perkembangan jumlah kendaraan di Kota Surabaya yang semakin tahun semakin meningkat, diperlukan upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Tabel II. 148
Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Panjang Jalan (m)	1.686.380,5	1.689.289,1	1.678.857,7	1.694.376,1	N/A
Jumlah Kendaraan	-	-	-	-	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya mengalami penurunan. Pada tahun 2016, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar 52,98 menit dan pada tahun 2017, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 25,03 menit. Pada tahun 2018, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,43 menit. Sedangkan pada tahun 2019, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,01 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 149
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	52,98	25,03	22,43	22,01	N/A

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016, rata-rata tinggi genangan sebesar 16,27 cm. Pada tahun 2017, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 13,37 cm. Pada tahun 2018, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 12,49 cm. Sedangkan pada tahun 2019, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 9,20 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 150
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	16,40	13,37	12,49	9,20	N/A

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

Berdasarkan Tabel II. 151 dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 1.257 ha dan pada tahun 2017, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 765,12 ha. Pada tahun 2018, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 697,79 ha. Sedangkan pada tahun 2019, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 688,96 ha sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel II. 151
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Luas Wilayah Genangan (ha)	1.257	765,12	697,79	688,96	N/A

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2020

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut (Gambar II.10). Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrengan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan

sarana prasarana pematuan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.



Perangkat



Sensor dan Tiang Penyangga



Display Matrix

Gambar II. 17
Perangkat *Smart Water Level*

2.1.4.2.5 Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan prosentase cakupan layanan air bersih seperti pada Tabel II. 152 di bawah ini.

Tabel II. 152
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih	3.127.782	3.137.496	3.306.059	3.148.413	N/A
2	Jumlah Penduduk*	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	N/A
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	103,69	102,04	106,82	99,65	N/A

Sumber : PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2019

Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya sebesar hingga tahun 2016 telah mencapai 103,69 persen. Begitupun pula di tahun 2017 dan tahun 2018, dimana capaiannya telah mencapai diatas 100%. Walaupun telah mencapai target diatas 100 persen, namun pelayanan tetap terus dioptimalkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

2.1.4.2.6 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2015, jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang sebanyak 79.404. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang pada tahun 2017 bertambah sebanyak 5.380 titik. Pada tahun 2018, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang bertambah 5.372 titik, sedangkan pada tahun 2019 Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang bertambah 6.090 titik. Dengan demikian sampai dengan tahun 2019 jumlah titik PJU sebanyak 101.539 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II. 153

Penerangan Jalan Umum Tahun 2016 – Triwulan II 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
Jumlah PJU terpasang (Titik)	5.293	5.380	5.372	6.090	87

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2020

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening

PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Tabel II. 154 berikut.

Tabel II. 154
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Bidang Politik	48	35	67	78	13
2	Ekonomi	126	84	64	68	13
3	Sosial Budaya	165	107	105	81	49
4	Jumlah unjuk rasa	339	226	236	227	75

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2020

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, namun di 2018 mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2019 kembali menurun. Pada triwulan II tahun 2020 jumlah unjuk rasa sebesar 75 kejadian. Hal ini menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada Tabel II. 155 dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2016, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT). Pada tahun 2018, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Tabel II. 155
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	1	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	0	0	1
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0

Sumber :Bagian Hukum, 2019

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.2 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana Tabel II. 156.

Tabel II. 156
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah lulusan D4/S1	325.755	328.211	303.549	305.315	303.410
2	Jumlah lulusan S2	21.579	22.091	21.010	21.363	21.179
3	Jumlah lulusan S3	1.279	1.315	1.353	1.376	1405
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	348.613	351.617	325.912	328.054	325.994
5	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	3.157.109
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,116	0,114	0,105	0,104	0,103

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.1.4.4.3 Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II. 157

Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	TW II 2020
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	717.636	713.916	672.334	700.826	758.968
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	220.340	232.830	216.158	229.491	237.633
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	937.976	946.746	888.492	930.317	996.601
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.369.324	2.395.881	2.206.240	2,229,164	2.200.254
6	Rasio ketergantungan	0,396	0,395	0,402	0,417	0,453

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada tahun 2019 antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun sebesar 22,18 persen dan usia lebih dari 64 tahun sebesar 7,26 persen. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 70,55%). Sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,417 yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019 dan realisasi tahun ke empat RPJMD 2016-2021 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta dari laporan

pertanggungjawaban APBD Akhir Tahun Anggaran 2019, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2019 menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2019, secara umum disajikan pada Tabel II.158 berikut.

Tabel II. 158
Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
dan Kinerja Hasil Program Tahun 2019

No.	Jenis Pencapaian Indikator Kinerja	Program (indikator kinerja hasil)		Kegiatan (indikator kinerja keluaran)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Realisasi indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang direncanakan (capaian kurang dari 100%)	16	6,72%	251	0,46%
2	Realisasi indikator kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan (capaian 100% - 110%)	105	44,12%	787	64,14%
3	Realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang direncanakan (capaian lebih dari 110%)	117	49,16%	189	15,40%
Total		238	100%	1227	100%

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Semester I tahun 2020, dijelaskan pada Tabel II.159 tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2020 sebagaimana berikut.

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Tabel II.159
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1	Urusan Pemerintahan																	
	1.1	Wajib																	
	1.1.1	Pelayanan Dasar																	
	1.1.1.01	Pendidikan																	
1	1.1.1.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan			129,030,170		N/A		139,161,087		24,672,156		17.73%		24,672,156		19.12%		
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A	87.10%		100,00 %		86.25%		91.78%		106.41%		91.78%		105.37%		-	
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B	89.66%		100,00 %		89.27%		89.80%		100.59%		89.80%		100.16%		-	
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C	91.37%		100,00 %		91.24%		100%		109.60%		100%		109.45%		-	
			Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan	74.50%		N/A		72.25%		41.85%		57.92%		41.85%		56.17%		-	
			Persentase ketuntasan pendidikan PAUD	79.75%		N/A		78.50%		100%		127.39%		100%		125.39%		-	
			Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/pr ovinsi/nasional/inte rnasional	0.20%		N/A		0.15%		0.03%		20.24%		0.03%		15.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	2%		N/A		1.70%		0.94%		55.08%		0.94%		47.00%		-	
			Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	4.50%		N/A		4%		2.18%		54.58%		2.18%		48.44%		-	
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	46.12%		N/A		45.71%		42.98%		94.02%		42.98%		93.19%		-	
	1.1.1.01.01.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu					13000 orang	53,130,262	13000 orang	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.01.0002	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga					2 kali	967,169	0 kali	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesenitaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan					31 lembaga	5,218,627	31 lembaga	749,584	100.00%	14.36%	100.00%	14.36%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.01.0004	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM					234 lembaga	815,214	234 lembaga	60,620	100.00%	7.44%	100.00%	7.44%			Dinas Pendidikan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.01.01.0005	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan					12 kali	1,766,848	0 kali	64,528	0.00%	3.65%	0.00%	3.65%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.01.0006	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini					1368 lembaga	5,494,814	1357 lembaga	1,052,664	99.20%	19.16%	99.20%	19.16%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.01.0007	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					12010 orang	37,966,895	8947 orang	8,635,040	74.50%	22.74%	74.50%	22.74%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.01.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan					18 kali	3,542,420	18 kali	178,056	100.00%	5.03%	100.00%	5.03%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.01.0009	Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat					3 kali	29,110,495	0 kali	13,931,664	0.00%	47.86%	0.00%	47.86%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.01.0010	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan					2 lembaga	118,800	0 lembaga	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.01.0011	Pengadaan Sarana Belajar PKBM yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah PKBM yang mendapatkan peningkatan sarana					4 lembaga	802,729	0 lembaga	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.01.0012	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana					2 lembaga	226,814	0 lembaga	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Pendidikan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
2	1.1.1.01.02	Program Pengembangan Sekolah Dasar			317,789,833		N/A		308,134,437		61,939,025		20.10%		61,939,025		19.49%		
			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%		133,84 %		100%		93.85%		93.85%		93.85%		93.85%		-	
			Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	93.19%		92,66 %		92.01%		95.92%		104.25%		95.92%		102.93%		-	
			Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0.15%		N/A		0.12%		0.08%		64.01%		0.08%		53.33%		-	
	1.1.1.01.02.0001	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan					302 lembaga	122,796,255	0 lembaga	13,144	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD					90799 orang	2,395,908	45724 orang	676,524	50.36%	28.24%	50.36%	28.24%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.02.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan					302 lembaga	151,384,817	301 lembaga	56,623,931	99.67%	37.40%	99.67%	37.40%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.02.0004	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan					73 lembaga	15,134,930	55 lembaga	2,646,715	75.34%	17.49%	75.34%	17.49%			Dinas Pendidikan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.01.02.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar					259 lembaga	552,027	145 lembaga	57,862	55.98%	10.48%	55.98%	10.48%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.02.0006	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar					658 lembaga	725,932	0 lembaga	59,556	0.00%	8.20%	0.00%	8.20%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.02.0007	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar					302 lembaga	10,613,905	13 lembaga	1,791,500	4.30%	16.88%	4.30%	16.88%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.02.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar					5 kali	1,470,306	1 kali	69,792	20.00%	4.75%	20.00%	4.75%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.02.0009	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan					17 lembaga	3,060,357	0 lembaga	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Pendidikan	
3	1.1.1.01.03	Program Pengembangan Sekolah Menengah			160,437,825		N/A		149,265,860		26,744,491		17.92%		26,744,491		16.67%		
			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100%		112,23 %		100%		85.10%		85.10%		85.10%		85.10%		-	
			Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	96.04%		93,95 %		95.73%		95.11%		99.36%		95.11%		99.03%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	0.30%		N/A		0.14%		0.14%		97.54%		0.14%		46.67%		-	
	1.1.1.01.03.0001	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan					63 lembaga	61,324,155	0 lembaga	15,944	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah					40993 orang	909,287	39056 orang	274,181	95.27%	30.15%	95.27%	30.15%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.03.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan					63 lembaga	65,012,121	63 lembaga	18,754,131	100.00%	28.85%	100.00%	28.85%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.03.0004	Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan					37 lembaga	7,127,931	37 lembaga	1,913,240	100.00%	26.84%	100.00%	26.84%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.03.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah					294 lembaga	434,243	307 lembaga	84,164	104.42%	19.38%	104.42%	19.38%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.03.0006	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah					245 lembaga	568,003	0 lembaga	19,544	0.00%	3.44%	0.00%	3.44%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.03.0007	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah					63 lembaga	10,386,130	35 lembaga	5,570,260	55.56%	53.63%	55.56%	53.63%			Dinas Pendidikan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.01.03.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Prestasi Jenjang Sekolah Menengah					1 kali	1,739,825	0 kali	113,027	0.00%	6.50%	0.00%	6.50%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.03.0009	Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan					6 lembaga	1,764,164	0 lembaga	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Pendidikan	
4	1.1.1.01.04	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan			120,360,715		N/A		129,781,833		47,181,586		36.35%		47,181,586		39.20%		
			Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik	100%		85,41 %		88.94%		93.70%		105.35%		93.70%		93.70%		-	
	1.1.1.01.04.0001	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi					29 bangunan	87,821,204	38 bangunan	30,937,443	131.03%	35.23%	131.03%	35.23%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.01.04.0002	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara					160 bangunan	40,245,994	215 bangunan	15,536,173	134.38%	38.60%	134.38%	38.60%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.01.04.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun					27 dokumen	1,714,635	13 dokumen	707,970	48.15%	41.29%	48.15%	41.29%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
5	1.1.1.01.05	Program Peningkatan Manajemen Sekolah			89,382,953		N/A		85,467,427		42,616,477		49.86%		42,616,477		47.68%		
			Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	83.18%		N/A		81.86%		78.30%		95.65%		78.30%		94.13%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	88.88%		N/A		87.38%		73.61%		84.24%		73.61%		82.82%		-	
	1.1.1.01.05.0001	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan					2 kali	1,749,081	1 kali	581,689	50.00%	33.26%	50.00%	33.26%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.05.0002	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah					2567 lembaga	821,658	0 lembaga	180,142	0.00%	21.92%	0.00%	21.92%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.05.0003	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan					365 lembaga	82,896,688	367 lembaga	41,854,646	100.55%	50.49%	100.55%	50.49%			Dinas Pendidikan	
6	1.1.1.01.06	Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan			147,755,972		N/A		151,134,716		32,637,282		21.59%		32,637,282		22.09%		
			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%		100,00 %		100%		99.88%		99.88%		99.88%		99.88%		-	
			Persentase guru SD yang kompeten	100%		N/A		100%		85.57%		85.57%		85.57%		85.57%		-	
			Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	100%		100,00 %		100%		95.52%		95.52%		95.52%		95.52%		-	
			Persentase guru SMP yang kompeten	100%		N/A		100%		80.83%		80.83%		80.83%		80.83%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100%		100,00 %		100%		98.84%		98.84%		98.84%		98.84%		-	
			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	85%		N/A		85%		99.17%		116.67%		99.17%		116.67%		-	
			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	90%		N/A		90%		52.39%		58.21%		52.39%		58.21%		-	
			Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten	100%		100,00 %		100%		91.16%		91.16%		91.16%		91.16%		-	
	1.1.1.01.06.0001	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan					1 kali	955,915	0 kali	35,212	0.00%	3.68%	0.00%	3.68%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.06.0002	Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan					2031 orang	5,732,512	2114 orang	213,443	104.09%	3.72%	104.09%	3.72%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.06.0003	Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan					957 lembaga	142,658,978	896 lembaga	32,248,909	93.63%	22.61%	93.63%	22.61%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.01.06.0004	Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan					2 dokumen	1,787,311	0 dokumen	139,718	0.00%	7.82%	0.00%	7.82%			Dinas Pendidikan	
	1.1.1.02	Kesehatan																	
7	1.1.1.02.01	Program Jaminan Kesehatan			179,544,916		N/A		206,403,504		130,916,719		63.43%		130,916,719		72.92%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%		100,00 %		100%		94.34%		94.34%		94.34%		94.34%		-	
	1.1.1.02.01.0001	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan					366751 orang	198,750,642	710231 orang	123,263,899	193.65%	62.02%	193.65%	62.02%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.01.0002	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan					182210 orang	7,652,862	182210 orang	7,652,820	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			Dinas Kesehatan	
8	1.1.1.02.02	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu			23,887,162		N/A		17,480,111		3,264,878		18.68%		3,264,878		13.67%		
			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.02.02.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan					90 jenis	15,215,758	17 jenis	3,134,368	18.89%	20.60%	18.89%	20.60%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.02.0002	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan					17 jenis	2,264,353	5 jenis	130,510	29.41%	5.76%	29.41%	5.76%			Dinas Kesehatan	
9	1.1.1.02.03	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada			32,174,873		N/A		34,174,799		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.02.03.0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan					2 jenis	34,174,799	2 jenis	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			RSUD Bhakti Dharma Husada	
10	1.1.1.02.04	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie			71,000,000		N/A		71,000,000		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohammad Soewandhie	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.02.04.0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan					2 jenis	71,000,000	2 jenis	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
11	1.1.1.02.05	Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			37,346,448		N/A		21,636,914		6,317,850		29.20%		6,317,850		16.92%		
			Cakupan kunjungan ibu hamil K4	99.01%		99,67 %		99%		44.27%		44.71%		44.27%		44.71%		-	
			Cakupan kunjungan neonatal lengkap	100%		101,73 %		100%		48.42%		48.42%		48.42%		48.42%		-	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	97.74%		100,18 %		97.72%		48.07%		49.19%		48.07%		49.18%		-	
			Prevalensi balita gizi buruk	0.10%		N/A		0.11%		0.13%		78%		0.13%		130.00%		-	
			Prevalensi balita gizi kurang	8.23%		8,22 %		8.24%		8.22%		100.28%		8.22%		99.88%		-	
			Prevalensi balita stunting	8.89%		N/A		8.90%		3.78%		157.49%		3.78%		42.52%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.02.05.0001	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan					691 kunjungan	3,433,898	119 kunjungan	82,586	17.22%	2.41%	17.22%	2.41%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.05.0002	Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga					64 Lembaga	13,357,355	64 Lembaga	4,159,954	100.00%	31.14%	100.00%	31.14%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.05.0003	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi					366 orang	4,845,661	91 orang	2,075,311	24.86%	42.83%	24.86%	42.83%			Dinas Kesehatan	
12	1.1.1.02.06	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			32,505,318		N/A		31,180,205		16,140,807		51.77%		16,140,807		49.66%		
			Cakupan imunisasi dasar lengkap	97.80%		98,06 %		97.79%		43.76%		44.74%		43.76%		44.74%		-	
			Cakupan keluhan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Cakupan keluhan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.02.06.0001	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular					154 lembaga	27,705,945	154 lembaga	14,505,767	100.00%	52.36%	100.00%	52.36%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.06.0002	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular					154 lembaga	2,795,245	155 lembaga	1,448,057	100.65%	51.80%	100.65%	51.80%			Dinas Kesehatan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.02.06.0003	Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi					63 lembaga	679,015	63 lembaga	186,983	100.00%	27.54%	100.00%	27.54%			Dinas Kesehatan	
13	1.1.1.02.07	Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat			71,680,219		N/A		68,408,170		3,675,392		5.37%		3,675,392		5.13%		
			Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase rumah sehat	86.44%		86,73 %		86.42%		86.73%		100.36%		86.73%		100.34%		-	
			Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	84.90%		91,94 %		84.88%		91.94%		108.32%		91.94%		108.29%		-	
	1.1.1.02.07.0001	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					64 lembaga	31,163,575	64 lembaga	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.07.0002	Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat					63 lembaga	22,707,243	63 lembaga	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.07.0003	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan					63 lembaga	10,318,391	63 lembaga	2,291,229	100.00%	22.21%	100.00%	22.21%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.07.0004	Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga					63 lembaga	4,218,961	63 lembaga	1,384,163	100.00%	32.81%	100.00%	32.81%			Dinas Kesehatan	
14	1.1.1.02.08	Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada			16,307,536		N/A		16,542,686		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar	80%		N/A		80%		112.77%		140.96%		112.77%		140.96%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	60%		N/A		60%		17.96%		29.94%		17.96%		29.93%		-	
	1.1.1.02.08.0001	Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan					75 kali	15,926,857	31 kali	0	41.33%	0.00%	41.33%	0.00%			RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.1.1.02.08.0002	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan					115 kali	615,829	53 kali	0	46.09%	0.00%	46.09%	0.00%			RSUD Bhakti Dharma Husada	
15	1.1.1.02.09	Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie			28,790,199		N/A		33,261,214		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	52%		N/A		50%		85.23%		170.47%		85.23%		163.90%		-	
	1.1.1.02.09.0001	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan					4 jenis	476,124	1 jenis	0	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.1.1.02.09.0002	Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja					200 orang	32,785,090	66 orang	0	33.00%	0.00%	33.00%	0.00%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
16	1.1.1.02.10	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan			323,723,718		N/A		299,438,933		1,142,170		0.38%		1,142,170		0.35%		
			Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik	100%		N/A		88.17%		95.38%		108.18%		95.38%		95.38%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.02.10.0001	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi					10 bangunan	128,608,083	3 bangunan	1,127,530	30.00%	0.88%	30.00%	0.88%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.02.10.0002	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah bangunan gedung RSUD beserta peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun Jamak / Multiyears)					1 bangunan	170,125,115	0 bangunan	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.02.10.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan					12 Dokumen	705,735	0 Dokumen	14,640	0.00%	2.07%	0.00%	2.07%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
17	1.1.1.02.11	Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji			1,824,693		N/A		1,779,352		140,880		7.92%		140,880		7.72%		
			Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	98.07%		100,00 %		98.06%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	1.1.1.02.11.0001	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Yang Diperiksa					5442 sampel	1,779,352	0 sampel	140,880	0.00%	7.92%	0.00%	7.92%			Dinas Kesehatan	
18	1.1.1.02.12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada			5,215,067		N/A		5,182,689		0		0.00%		0		0.00%		
			Average Length of Stay (AVLOS)	4 hari		N/A		4 hari		3.3 hari		117.55%		3.3 hari		82.50%		-	
			Bed Turn Over Ratio (BTO)	45 kali		N/A		45 kali		22.85 kali		50.77%		22.85 kali		50.78%		-	
			Turn Over Interval (TOI)	3 hari		N/A		3 hari		3.61 hari		79.61%		3.61 hari		120.33%		-	
	1.1.1.02.12.0001	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan					11751 orang	3,126,010	4030 orang	0	34.29%	0.00%	34.29%	0.00%			RSUD Bhakti Dharma Husada	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.02.12.0002	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik					2218 orang	2,056,679	1483 orang	0	66.86%	0.00%	66.86%	0.00%			RSUD Bhakti Dharma Husada	
19	1.1.1.02.13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie			8,194,632		N/A		8,267,473		0		0.00%		0		0.00%		
			Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	1%		N/A		1.10%		0.30%		172.32%		0.30%		30.00%		-	
			Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi	1%		N/A		1.25%		0.17%		186.49%		0.17%		17.00%		-	
	1.1.1.02.13.0001	Pelayanan Gizi Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit					28340 orang	7,044,511	10217 orang	0	36.05%	0.00%	36.05%	0.00%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.1.1.02.13.0002	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan					180 kali	498,806	109 kali	0	60.56%	0.00%	60.56%	0.00%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.1.1.02.13.0003	Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan					155 kali	724,156	68 kali	0	43.87%	0.00%	43.87%	0.00%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
20	1.1.1.02.14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan			22,526,004		N/A		23,623,302		7,634,207		32.32%		7,634,207		33.89%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	83.75%		84,43 %		83.70%		54.92%		65.61%		54.92%		65.58%		-	
	1.1.1.02.14.0001	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan					1 jenis	3,190,000	0 jenis	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.14.0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah sistem manajemen kesehatan yang dikembangkan					1 aplikasi	570,093	0 aplikasi	193,322	0.00%	33.91%	0.00%	33.91%			Dinas Kesehatan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.02.14.0003	Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya					63 Lembaga	19,863,209	63 Lembaga	7,440,885	100.00%	37.46%	100.00%	37.46%			Dinas Kesehatan	
21	1.1.1.02.15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie			186,795,136		N/A		184,159,308		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	96.40%		96,53 %		96.25%		97.17%		100.96%		97.17%		100.80%		-	
	1.1.1.02.15.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara					3 jenis	182,974,618	4 jenis	0	133.33%	0.00%	133.33%	0.00%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.1.1.02.15.0002	Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan					1 jenis	1,184,690	1 jenis	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
22	1.1.1.02.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada			14,139,573		N/A		42,166,778		24,176		0.06%		24,176		0.17%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90%		103,33 %		90%		99.76%		110.85%		99.76%		110.84%		-	
	1.1.1.02.16.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/kedokteran					3 jenis	38,637,469	2 jenis	0	66.67%	0.00%	66.67%	0.00%			RSUD Bhakti Dharma Husada	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.02.16.0002	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial					1 jenis	3,529,309	0 jenis	24,176	0.00%	0.69%	0.00%	0.69%			RSUD Bhakti Dharma Husada	
23	1.1.1.02.17	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			90,084,344		61,798,419		90,050,677		35,686,859		39.63%		35,686,859		39.61%		
			Persentase puskesmas yang terakreditasi	100%		N/A		85.71%		100%		116.67%		100%		100.00%		-	
			Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie			107.27%		-								107.27%			
			Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada			105.37%		-								105.37%			
			Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin			115.45%		-								115.45%			
			Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin			114.56%		-								114.56%			
	1.1.1.02.17.0001	Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi					40 lembaga	1,067,297	0 lembaga	570	0.00%	0.05%	0.00%	0.05%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.17.0002	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer					64 lembaga	86,520,944	64 lembaga	34,948,062	100.00%	40.39%	100.00%	40.39%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.17.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi Rujukan					134 lembaga	437,404	32 lembaga	155,846	23.88%	35.63%	23.88%	35.63%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.17.0004	Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani					900 lokasi	1,388,741	379 lokasi	437,996	42.11%	31.54%	42.11%	31.54%			Dinas Kesehatan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.02.17.0005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional					64 lembaga	636,291	18 lembaga	144,386	28.13%	22.69%	28.13%	22.69%			Dinas Kesehatan	
24	1.1.1.02.18	Program Sumber Daya Kesehatan			35,582,411		N/A		39,775,593		1,488,636		3.74%		1,488,636		4.18%		
			Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standard	100%		N/A		98.84%		100%		101.17%		100%		100.00%		-	
			Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	98.18%		98,52 %		98.17%		109.20%		111.23%		109.20%		111.22%		-	
	1.1.1.02.18.0001	Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan					5 dokumen	259,235	2 dokumen	49,505	40.00%	19.10%	40.00%	19.10%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.18.0002	Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan					27 kali	13,035,003	9 kali	965,840	33.33%	7.41%	33.33%	7.41%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.18.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan					46 jenis	21,285,760	6 jenis	473,291	13.04%	2.22%	13.04%	2.22%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.18.0004	Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan					4 item	3,602,763	0 item	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.18.0005	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan					1 Jenis	689,853	0 Jenis	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.02.18.0006	Pengadaan bahan habis pakai penanggulangan TBC (DAK bidang kesehatan)	Jumlah bahan habis pakai penanggulangan TBC					3 Item	297,361	0 Item	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Kesehatan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.02.18.0007	Pengadaan Alat Kesehatan penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan					3 item	605,619	0 item	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Kesehatan	
	1.1.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
25	1.1.1.03.01	Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur			1,375,505		N/A		1,255,241		427,748		34.08%		427,748		31.10%		
			Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi syarat	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.03.01.0001	Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang infrastruktur					180 rekomendasi	1,255,241	95 rekomendasi	427,748	52.78%	34.08%	52.78%	34.08%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
26	1.1.1.03.02	Program Penataan Ruang			18,468,950		N/A		16,106,963		0		0.00%		0		0.00%		
			Indeks Pelayanan Tata Ruang	95%		N/A		94%		94.94%		101%		94.94%		99.94%		-	
	1.1.1.03.02.0001	Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota					2 dokumen	2,315,564	0 dokumen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.03.02.0002	Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan					12250 Persil	10,015,790	6329 Persil	0	51.67%	0.00%	51.67%	0.00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.03.02.0003	Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat					2 dokumen	2,781,481	0 dokumen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.03.02.0004	Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun					9 Dokumen	994,128	0 Dokumen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
27	1.1.1.03.03	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan			348,082,962		482,772,508		391,718,457		28,361,720		7.24%		28,361,720		8.15%		
			Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	15.48%		13,91 %		12.90%		16.03%		124.29%		16.03%		103.55%		-	
			Persentase jaringan jalan yang terbangun	0.71%		N/A		0.68%		0.22%		31.63%		0.22%		30.99%		-	
			Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	34.36%		25,16 %		28.64%		0.88%		3.09%		0.88%		2.56%		-	
			Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu			125%		-								125.00%			
			Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)			134.82%		-								134.82%			
			Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)			109.81%		-								109.81%			
			Persentase jalan yang terbangun (%)			104.69%		-								104.69%			
	1.1.1.03.03.0001	Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum					2 dokumen	356,094	0 dokumen	17,936	0.00%	5.04%	0.00%	5.04%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.03.03.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak					220 unit	18,984,477	94 unit	7,389,699	42.73%	38.92%	42.73%	38.92%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.03.0003	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)					1 lokasi	10,838,357	0 lokasi	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.03.0004	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun					24 lokasi	285,062,618	4 lokasi	1,849,656	16.67%	0.65%	16.67%	0.65%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.03.0005	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun					1 lokasi	31,312,000	0 lokasi	5,734,358	0.00%	18.31%	0.00%	18.31%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.03.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi					1222 lokasi	45,164,911	1727 lokasi	13,370,071	141.33%	29.60%	141.33%	29.60%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
28	1.1.1.03.04	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi			270,349,994		N/A		276,917,279		109,875,659		39.68%		109,875,659		40.64%		
			Persentase titik pemasangan PJU hemat energi	85.90%		187,06 %		83.39%		107.99%		129.50%		107.99%		125.72%		-	
	1.1.1.03.04.0001	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang					4600 titik	138,356,657	87 titik	51,076,904	1.89%	36.92%	1.89%	36.92%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.1.03.04.0002	Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan					6674 rekening	120,219,604	6996.16666667 rekening	56,016,052	104.83%	46.59%	104.83%	46.59%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.1.03.04.0003	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang dipelihara					73680 titik	18,341,019	85847 titik	2,782,704	116.51%	15.17%	116.51%	15.17%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
29	1.1.1.03.05	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota			484,024,179		N/A		493,843,675		177,227,327		35.89%		177,227,327		36.62%		
			Lama genangan	22.1 menit		22,01 menit		22.3 menit		0 menit		200%		0 menit		0.00%		-	
			Luas genangan	500 hektar		688,96 ha		600 hektar		0 hektar		200%		0 hektar		0.00%		-	
			Tinggi genangan	12.1 cm		9,20 cm		12.3 cm		0 cm		200%		0 cm		0.00%		-	
	1.1.1.03.05.0001	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak					56 unit	31,274,990	56 unit	9,027,662	100.00%	28.87%	100.00%	28.87%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.05.0002	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan					25 lokasi	224,162,522	0 lokasi	26,982,400	0.00%	12.04%	0.00%	12.04%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.05.0003	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan					2 lokasi	122,980,781	0 lokasi	87,176,988	0.00%	70.89%	0.00%	70.89%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.05.0004	Pemeliharaan/Reha bilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Reha bilitasi Saluran Drainase dan Boezem					1025 lokasi	115,425,382	360 lokasi	54,040,277	35.12%	46.82%	35.12%	46.82%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
30	1.1.1.03.06	Program Pengendalian Bidang Bangunan			3,764,447		N/A		3,670,083		1,632,141		44.47%		1,632,141		43.36%		
			Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	60.79%		57,57 %		58.81%		58.26%		99.07%		58.26%		95.84%		-	
			Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.03.06.0001	Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan					6517 data	1,258,955	3618 data	517,395	55.52%	41.10%	55.52%	41.10%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.03.06.0002	Pengawasan Bangunan	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan					240 lokasi	1,945,678	168 lokasi	841,773	70.00%	43.26%	70.00%	43.26%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.03.06.0003	Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun					4 dokumen	465,450	0 dokumen	272,972	0.00%	58.65%	0.00%	58.65%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
31	1.1.1.03.07	Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan			19,250,740		N/A		19,209,826		1,687,677		8.79%		1,687,677		8.77%		
			Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.03.07.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan					12 dokumen	11,271,864	0 dokumen	242,855	0.00%	2.15%	0.00%	2.15%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.07.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun					1 dokumen	1,711,292	0 dokumen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.07.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun					35 dokumen	6,226,670	17 dokumen	1,444,822	48.57%	23.20%	48.57%	23.20%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
32	1.1.1.03.08	Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan			24,212,720		N/A		20,038,369		3,381,889		16.88%		3,381,889		13.97%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang tepat waktu	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.03.08.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Reha b Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Reh ab Saluran Drainase/Gorong- gorong					20 dokumen	8,758,192	1 dokumen	331,431	5.00%	3.78%	5.00%	3.78%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.08.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Reh ab Saluran Drainase/Gorong- gorong					2 dokumen	4,386,659	0 dokumen	1,096,665	0.00%	25.00%	0.00%	25.00%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.03.08.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun					50 dokumen	6,893,518	27 dokumen	1,953,793	54.00%	28.34%	54.00%	28.34%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
33	1.1.1.03.09	Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas			1,625,094		N/A		1,496,664		416,093		27.80%		416,093		25.60%		
			Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.03.09.0001	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan					10 izin	1,496,664	18 izin	416,093	180.00%	27.80%	180.00%	27.80%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	1.1.1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
34	1.1.1.04.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan			5,012,375		N/A		4,249,487		1,791,434		42.16%		1,791,434		35.74%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan	75%		N/A		70%		89.80%		128.28%		89.80%		119.73%		-	
	1.1.1.04.01.0001	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses					6517 berkas	4,054,807	3638 berkas	1,762,362	55.82%	43.46%	55.82%	43.46%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.04.01.0002	Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses					50 berkas	194,680	38 berkas	29,072	76.00%	14.93%	76.00%	14.93%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
35	1.1.1.04.02	Program Pelayanan Perizinan Konstruksi			393,761		N/A		340,016		105,392		31.00%		105,392		26.77%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi	93%		N/A		90%		100%		111.11%		100%		107.53%		-	
	1.1.1.04.02.0001	Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan					700 berkas	340,016	376 berkas	105,392	53.71%	31.00%	53.71%	31.00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
36	1.1.1.04.03	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung			138,753,763		N/A		262,958,522		54,814,097		20.85%		54,814,097		39.50%		
			Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	100%		N/A		90.59%		113.10%		124.85%		113.10%		113.10%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.04.03.0001	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab					1 bangunan	63,168,460	0 bangunan	17,246,354	0.00%	27.30%	0.00%	27.30%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.04.03.0002	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang prasarananya dibangun/direhabilitasi					45 Bangunan	167,942,361	46 Bangunan	24,636,201	102.22%	14.67%	102.22%	14.67%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.04.03.0003	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara					300 bangunan	29,339,117	205 bangunan	12,060,200	68.33%	41.11%	68.33%	41.11%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.04.03.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah					39 Dokumen	2,508,585	16 Dokumen	871,342	41.03%	34.73%	41.03%	34.73%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
37	1.1.1.04.04	Program Pengelolaan Rusunawa			30,170,492		N/A		27,662,557		8,389,050		30.33%		8,389,050		27.81%		
			Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.04.04.0001	Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola					3981 lokasi	7,730,570	3977 lokasi	695,241	99.90%	8.99%	99.90%	8.99%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
	1.1.1.04.04.0002	Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola					105 blok	19,931,987	101 blok	7,693,810	96.19%	38.60%	96.19%	38.60%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
38	1.1.1.04.05	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			186,904,456		N/A		183,305,446		32,818,806		17.90%		32,818,806		17.56%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya	73.80%		95,16 %		67.65%		98.15%		145.09%		98.15%		132.99%		-	
			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	50.83%		37,63 %		47%		38.73%		82.40%		38.73%		76.20%		-	
	1.1.1.04.05.0001	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan					39 lokasi	59,900,108	13 lokasi	9,784,974	33.33%	16.34%	33.33%	16.34%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.04.05.0002	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun					2 Lokasi	683,463	0 Lokasi	15,963	0.00%	2.34%	0.00%	2.34%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.04.05.0003	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah yang dibangun					7 bangunan	92,140,598	1 bangunan	13,263,724	14.29%	14.40%	14.29%	14.40%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.04.05.0004	Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi					200 Lokasi	21,392,833	126 Lokasi	7,878,564	63.00%	36.83%	63.00%	36.83%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.04.05.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman					99 dokumen	6,989,107	22 dokumen	1,617,275	22.22%	23.14%	22.22%	23.14%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.1.1.04.05.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun					15 dokumen	2,199,338	1 dokumen	258,306	6.67%	11.74%	6.67%	11.74%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																	
39	1.1.1.05.01	Program Kesatuan Bangsa			1,967,613		N/A		3,476,459		51,592		1.48%		51,592		2.62%		
			Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%		N/A		70%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	1.1.1.05.01.0001	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan					1250 orang	1,460,382	0 orang	19,092	0.00%	1.31%	0.00%	1.31%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	1.1.1.05.01.0002	Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan					31 lembaga	359,389	0 lembaga	32,500	0.00%	9.04%	0.00%	9.04%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	1.1.1.05.01.0003	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama					72 kali	1,656,689	16 kali	0	22.22%	0.00%	22.22%	0.00%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
40	1.1.1.05.02	Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum			3,621,829		N/A		4,022,612		1,838,072		45.69%		1,838,072		50.75%		
			Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.05.02.0001	Kerjasama pengendalian keamanan kota	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota					194 kali	3,057,105	81 kali	1,665,824	41.75%	54.49%	41.75%	54.49%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.05.02.0002	Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Ketenteraman Kota	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota					67 kali	965,507	11 kali	172,248	16.42%	17.84%	16.42%	17.84%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
41	1.1.1.05.03	Program Penanggulangan Bencana Alam			5,047,197		N/A		4,581,968		1,551,175		33.85%		1,551,175		30.73%		
			Persentase penanggulangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.05.03.0001	Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan					8 jenis	379,788	5 jenis	79,805	62.50%	21.01%	62.50%	21.01%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
	1.1.1.05.03.0002	Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana	Jenis kejadian yang manajemen tanggap bencananya dikembangkan					10 Jenis	2,855,760	43 Jenis	1,105,463	430.00%	38.71%	430.00%	38.71%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
	1.1.1.05.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana					100%	1,346,421	100%	365,908	100.00%	27.18%	100.00%	27.18%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
42	1.1.1.05.04	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran			42,764,462		N/A		40,788,271		16,188,094		39.69%		16,188,094		37.85%		
			Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	50.5		45.89 kejadian		51		18.05		164.60%		18.05		35.74%		-	
			Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.05.04.0001	Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya					756 orang	36,817,072	756 orang	15,616,671	100.00%	42.42%	100.00%	42.42%			Dinas Pemadam Kebakaran	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.05.04.0002	Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan					180 kali	1,698,335	107 kali	316,475	59.44%	18.63%	59.44%	18.63%			Dinas Pemadam Kebakaran	
	1.1.1.05.04.0003	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dan peran serta masyarakat					60 kali	2,272,864	7 kali	254,948	11.67%	11.22%	11.67%	11.22%			Dinas Pemadam Kebakaran	
43	1.1.1.05.05	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam			2,427,256		N/A		2,147,906		360,574		16.79%		360,574		14.86%		
			Persentase kelurahan tangguh bencana	100%		100,00 %		88%		100%		113.64%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.05.05.0001	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana					1650 orang	1,608,090	232 orang	335,540	14.06%	20.87%	14.06%	20.87%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
	1.1.1.05.05.0002	Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana					500 orang	539,815	40 orang	25,035	8.00%	4.64%	8.00%	4.64%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
44	1.1.1.05.06	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi			1,770,441		N/A		1,746,891		581,188		33.27%		581,188		32.83%		
			Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilapork an dan ditindaklanjuti	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.05.06.0001	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi					480 kali	1,746,891	165 kali	581,188	34.38%	33.27%	34.38%	33.27%			Satuan Polisi Pamong Praja	
45	1.1.1.05.07	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah			1,585,927		N/A		3,190,406		1,001,676		31.40%		1,001,676		63.16%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.05.07.0001	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah					192 Kali	2,076,476	92 Kali	668,157	47.92%	32.18%	47.92%	32.18%			Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.1.1.05.07.0002	Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah penindakan pelanggaran Perda					84 Kali	1,113,930	33 Kali	333,518	39.29%	29.94%	39.29%	29.94%			Satuan Polisi Pamong Praja	
46	1.1.1.05.08	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial			35,951,348		N/A		33,728,812		14,791,101		43.85%		14,791,101		41.14%		
			Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.05.08.0001	Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					1368 kali	28,860,394	712 kali	13,362,161	52.05%	46.30%	52.05%	46.30%			Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.1.1.05.08.0002	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial					1368 Kali	4,868,418	794 Kali	1,428,940	58.04%	29.35%	58.04%	29.35%			Satuan Polisi Pamong Praja	
47	1.1.1.05.09	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja			1,424,940		N/A		1,976,804		501,535		25.37%		501,535		35.20%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase aparaturnya yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	100%		N/A		100%		99.87%		99.87%		99.87%		99.87%		-	
	1.1.1.05.09.0001	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP					96 kali	505,127	240 kali	90,022	250.00%	17.82%	250.00%	17.82%			Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.1.1.05.09.0002	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa					132 Kali	1,471,678	32 Kali	411,512	24.24%	27.96%	24.24%	27.96%			Satuan Polisi Pamong Praja	
48	1.1.1.05.10	Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat			40,698,109		N/A		38,691,589		16,902,909		43.69%		16,902,909		41.53%		
			Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	77.72%		N/A		76.85%		74.51%		96.95%		74.51%		95.87%		-	
	1.1.1.05.10.0001	Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat					100 orang	334,182	0 orang	21,816	0.00%	6.53%	0.00%	6.53%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
	1.1.1.05.10.0002	Pembinaan Potensi Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat					81 kali	1,083,232	12 kali	73,414	14.81%	6.78%	14.81%	6.78%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
	1.1.1.05.10.0003	Pengendalian Perlindungan Masyarakat	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat					793 orang	37,274,175	1153 orang	16,807,679	145.40%	45.09%	145.40%	45.09%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
49	1.1.1.05.11	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran			21,604,153		N/A		16,540,069		5,597,227		33.84%		5,597,227		25.91%		
			Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	83%		N/A		80%		95.35%		119.18%		95.35%		114.88%		-	
	1.1.1.05.11.0001	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara					210 unit	5,640,844	197 unit	3,076,386	93.81%	54.54%	93.81%	54.54%			Dinas Pemadam Kebakaran	
	1.1.1.05.11.0002	Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan yang pemeriksaan					264 bangunan	1,035,399	116 bangunan	204,208	43.94%	19.72%	43.94%	19.72%			Dinas Pemadam Kebakaran	
	1.1.1.05.11.0003	Perencanaan dan Pengadaan/pemban- gunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun					947 unit	9,863,825	306 unit	2,316,633	32.31%	23.49%	32.31%	23.49%			Dinas Pemadam Kebakaran	
	1.1.1.06	Sosial																	
50	1.1.1.06.01	Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah			5,356,954		N/A		4,838,316		1,448,308		29.93%		1,448,308		27.04%		
			Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	50%		N/A		50%		26.49%		52.98%		26.49%		52.98%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.06.01.0001	Fasilitasi Pemakaman	Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitasi Pemakaman					960 Orang	932,429	0 Orang	14,508	0.00%	1.56%	0.00%	1.56%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.01.0002	Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan					24 Kali	1,245,855	10 Kali	328,934	41.67%	26.40%	41.67%	26.40%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.01.0003	Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis	Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan					4416 Kali	2,660,031	2814 Kali	1,104,866	63.72%	41.54%	63.72%	41.54%			Dinas Sosial	
51	1.1.1.06.02	Program Partisipasi Keagamaan			15,161,323		N/A		15,479,710		5,850,477		37.79%		5,850,477		38.59%		
			Persentase lembaga/organisasi /kelompok keagamaan yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	100%		N/A		100%		60%		60%		60%		60.00%		-	
	1.1.1.06.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan					102 kali	15,479,710	26 kali	5,850,477	25.49%	37.79%	25.49%	37.79%			Dinas Sosial	
52	1.1.1.06.03	Program Partisipasi Kepahlawanan			8,360,730		N/A		7,888,825		1,998,150		25.33%		1,998,150		23.90%		
			Persentase lembaga/organisasi /kelompok keahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan keahlawanan	100%		N/A		100%		80%		80%		80%		80.00%		-	
	1.1.1.06.03.0001	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial keahlawanan	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial keahlawanan					62 kali	6,315,369	12 kali	1,391,933	19.35%	22.04%	19.35%	22.04%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.03.0002	Pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara					7 lokasi	1,573,456	7 lokasi	606,217	100.00%	38.53%	100.00%	38.53%			Dinas Sosial	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
53	1.1.1.06.04	Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial			194,790,086		N/A		34,995,437		12,347,996		35.28%		12,347,996		6.34%		
			Persentase pemulangan PMKS	35%		N/A		30%		17.98%		59.95%		17.98%		51.37%		-	
			Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100%		N/A		100%		66.28%		66.28%		66.28%		66.28%		-	
	1.1.1.06.04.0001	Pembinaan dan Pemulangan PMKS	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan					1420 orang	2,525,743	214 orang	565,131	15.07%	22.37%	15.07%	22.37%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.04.0002	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi					12 Kali	988,989	5194 Kali	344,970	43283.33%	34.88%	#####	34.88%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.04.0003	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi					12 Kali	1,100,276	18399 Kali	358,176	#####	32.55%	#####	32.55%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.04.0004	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi					12 Kali	1,127,246	6359 Kali	367,183	52991.67%	32.57%	#####	32.57%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.04.0005	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat					93 orang	1,403,314	91 orang	544,719	97.85%	38.82%	97.85%	38.82%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.04.0006	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha					150 orang	5,204,924	157 orang	1,818,299	104.67%	34.93%	104.67%	34.93%			Dinas Sosial	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.1.06.04.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri					45 orang	2,342,286	34 orang	974,511	75.56%	41.61%	75.56%	41.61%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.04.0008	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih					1100 orang	17,299,544	1125 orang	6,301,882	102.27%	36.43%	102.27%	36.43%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.04.0009	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan					65 orang	2,332,116	53 orang	985,726	81.54%	42.27%	81.54%	42.27%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.04.0010	Peningkatan peran serta lanjut usia	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia					34 kali	670,999	7 kali	87,400	20.59%	13.03%	20.59%	13.03%			Dinas Sosial	
54	1.1.1.06.05	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			989,815		N/A		875,851		122,192		13.95%		122,192		12.34%		
			Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	62%		65,51 %		60%		46.56%		77.59%		46.56%		75.10%		-	
	1.1.1.06.05.0001	Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan					17 lembaga	189,329	0 lembaga	12,300	0.00%	6.50%	0.00%	6.50%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.05.0002	Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah kegiatan PSKS yang dibina					45 kali	686,521	6 kali	109,892	13.33%	16.01%	13.33%	16.01%			Dinas Sosial	
55	1.1.1.06.06	Program Pengendalian Layanan Sosial			3,735,560		N/A		2,266,492		939,241		41.44%		939,241		25.14%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase data kesejahteraan sosial yang memanfaatkan	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.1.06.06.0001	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi					4 kali	750,787	2 kali	253,263	50.00%	33.73%	50.00%	33.73%			Dinas Sosial	
	1.1.1.06.06.0002	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS					154 Kelurahan	1,515,705	0 Kelurahan	685,979	0.00%	45.26%	0.00%	45.26%			Dinas Sosial	
56	1.1.1.06.07	Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni			14,471,016		N/A		36,751,191		8,729,956		23.75%		8,729,956		60.33%		
			Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	100%		123,76 %		85%		0.60%		0.71%		0.60%		0.60%		-	
	1.1.1.06.07.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki					1000 Unit	36,751,191	6 Unit	8,729,956	0.60%	23.75%	0.60%	23.75%			Dinas Sosial	
	1.1.2	Non Pelayanan Dasar																	
	1.1.2.01	Tenaga Kerja																	
57	1.1.2.01.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan			153,433		N/A		204,582		42,416		20.73%		42,416		27.64%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan	80%		N/A		78%		100%		128.21%		100%		125.00%		-	
	1.1.2.01.01.0001	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses					1000 berkas	204,582	330 berkas	42,416	33.00%	20.73%	33.00%	20.73%			Dinas Tenaga Kerja	
58	1.1.2.01.02	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja			2,972,131		2,370,414		2,739,024		885,232		32.32%		885,232		29.78%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7.77%		8,32 %		7.77%		7.66%		98.57%		7.66%		98.58%		-	
			Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama			114.55%		-								114.55%			
	1.1.2.01.02.0001	Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial					300 orang	742,474	60 orang	255,095	20.00%	34.36%	20.00%	34.36%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)					110 Kasus	395,526	54 Kasus	74,037	49.09%	18.72%	49.09%	18.72%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.02.0003	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja					300 lembaga	448,243	79 lembaga	130,677	26.33%	29.15%	26.33%	29.15%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.02.0004	Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun					1 dokumen	1,152,780	0 dokumen	425,422	0.00%	36.90%	0.00%	36.90%			Dinas Tenaga Kerja	
59	1.1.2.01.03	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			3,182,082		3,942,926		3,051,939		1,241,616		40.68%		1,241,616		39.02%		
			Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5.20%		5,10 %		5.10%		-76.98%		-1509.41%		-76.98%		#####		-	
			Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri			104.64%		-								104.64%			
			Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan			101.93%		-								101.93%			

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.01.03.0001	Bimtek bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek					60 lembaga	141,067	0 lembaga	14,772	0.00%	10.47%	0.00%	10.47%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.03.0003	Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja					1050 orang	282,703	210 orang	55,994	20.00%	19.81%	20.00%	19.81%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.03.0004	Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha					50 orang	143,702	0 orang	18,816	0.00%	13.09%	0.00%	13.09%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.03.0005	Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja					500 orang	108,611	200 orang	24,737	40.00%	22.78%	40.00%	22.78%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.03.0006	Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja bagi Wirausaha Baru	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja					150 orang	879,220	150 orang	658,072	100.00%	74.85%	100.00%	74.85%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.03.0007	Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Jumlah even job fair yang diselenggarakan					7 kali	1,346,799	2 kali	450,408	28.57%	33.44%	28.57%	33.44%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.03.0008	Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri					150 orang	149,837	0 orang	18,816	0.00%	12.56%	0.00%	12.56%			Dinas Tenaga Kerja	
60	1.1.2.01.04	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja			12,034,543		N/A		11,533,473		1,226,056		10.63%		1,226,056		10.19%		
			Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	77%		86,87 %		75%		0%		0%		0%		0.00%		-	
			Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90%		98,16 %		85%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	1.1.2.01.04.0002	Fasilitasi Magang bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang					120 orang	558,256	9 orang	56,026	7.50%	10.04%	7.50%	10.04%			Dinas Tenaga Kerja	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.01.04.0003	Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi					604 orang	2,932,943	0 orang	902,967	0.00%	30.79%	0.00%	30.79%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.04.0004	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja					976 orang	7,810,141	16 orang	239,883	1.64%	3.07%	1.64%	3.07%			Dinas Tenaga Kerja	
	1.1.2.01.04.0005	Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun					1 dokumen	232,134	0 dokumen	27,180	0.00%	11.71%	0.00%	11.71%			Dinas Tenaga Kerja	
61	1.1.2.10.01	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal			1,610,379		N/A		1,382,363		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42%		N/A		40%		40.16%		100.40%		40.16%		95.62%		-	
	1.1.2.10.01.0001	Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi					3500 perusahaan	944,393	500 perusahaan	0	14.29%	0.00%	14.29%	0.00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.10.01.0003	Pengelolaan Data Investasi	Jumlah data investasi yang dikelola					41751 data	437,970	21295 data	0	51.00%	0.00%	51.00%	0.00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
62	1.1.2.10.02	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi			1,334,701		3,237,238		1,255,232		147,222		11.73%		147,222		11.03%		
			Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24%		27,89 %		20%		-15%		-75.02%		-15%		-62.50%		-	
			Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi			370.93%		-								370.93%			
			Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi			174.30%		-								174.30%			

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.10.02.0001	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal					4 dokumen	637,547	0 dokumen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.10.02.0002	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan					3 kali	617,685	0 kali	147,222	0.00%	23.83%	0.00%	23.83%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
63	1.1.2.10.03	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal			5,886,274		N/A		5,621,298		2,133,073		37.95%		2,133,073		36.24%		
			Persentase industri/perusaha an yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75%		N/A		72%		100%		138.89%		100%		133.33%		-	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%		N/A		78%		99.76%		127.90%		99.76%		124.70%		-	
	1.1.2.10.03.0004	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan					2 kali	16,386	1 kali	7,876	50.00%	48.07%	50.00%	48.07%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.10.03.0005	Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi					11000 pelaku usaha	826,019	4422 pelaku usaha	201,395	40.20%	24.38%	40.20%	24.38%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.10.03.0006	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan					60000 berkas	4,743,892	43383 berkas	1,906,132	72.31%	40.18%	72.31%	40.18%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.10.03.0007	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau					2 kali	11,704	1 kali	6,222	50.00%	53.16%	50.00%	53.16%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.10.03.0008	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan					4 kali	23,297	3 kali	11,449	75.00%	49.14%	75.00%	49.14%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
64	1.1.2.11.01	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			80,323,733		N/A		73,174,694		8,150,262		11.14%		8,150,262		10.15%		
			Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	154 keluraha n		137,00 keluraha n		142 kelurahan		140 kelurahan		98.59%		140 keluraha n		90.91%		-	
	1.1.2.11.01.0001	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi					11 unit	9,409,375	12 unit	3,364,557	109.09%	35.76%	109.09%	35.76%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.01.0002	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan					57 unit	52,966,192	16 unit	3,745,766	28.07%	7.07%	28.07%	7.07%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.01.0003	Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan					6 jenis	580,826	0 jenis	16,012	0.00%	2.76%	0.00%	2.76%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.01.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun					58 dokumen	2,726,506	52 dokumen	698,618	89.66%	25.62%	89.66%	25.62%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.01.0005	Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki					133 unit	7,491,794	47 unit	325,309	35.34%	4.34%	35.34%	4.34%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
65	1.1.2.11.02	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			15,294,904		N/A		13,851,895		880,116		6.35%		880,116		5.75%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Akumulasi prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1690 medali		N/A		1660 medali		2854 medali		171.93%		2854 medali		168.88%		-	
	1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi					41 kali	8,132,358	1 kali	210,801	2.44%	2.59%	2.44%	2.59%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.02.0002	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional					14 kali	1,050,455	1 kali	168,256	7.14%	16.02%	7.14%	16.02%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.02.0003	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak					26 kali	1,302,018	4 kali	328,134	15.38%	25.20%	15.38%	25.20%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.02.0004	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan					10 kali	2,148,750	1 kali	155,454	10.00%	7.23%	10.00%	7.23%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.02.0005	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan					29 kali	1,218,314	0 kali	17,472	0.00%	1.43%	0.00%	1.43%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
66	1.1.2.11.03	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			3,629,885		N/A		3,558,822		548,044		15.40%		548,044		15.10%		
			Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	35%		N/A		15%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	1.1.2.11.03.0001	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja					4565 peserta	1,389,814	770 peserta	179,402	16.87%	12.91%	16.87%	12.91%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.11.03.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan					30 kali	2,169,008	7 kali	368,642	23.33%	17.00%	23.33%	17.00%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
67	1.1.2.11.04	Program Peningkatan Prestasi Pemuda			2,422,961		N/A		2,312,510		284,722		12.31%		284,722		11.75%		
			Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	12%		7,40 %		10%		6.82%		68.18%		6.82%		56.83%		-	
			Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	30%		15,70 %		15%		1%		6.67%		1%		3.33%		-	
	1.1.2.11.04.0001	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif					670 orang	1,026,934	14 orang	61,844	2.09%	6.02%	2.09%	6.02%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.04.0002	Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan					1050 Orang	1,285,576	250 Orang	222,878	23.81%	17.34%	23.81%	17.34%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
68	1.1.2.12.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal			5,964,878		N/A		7,079,555		513,990		7.26%		513,990		8.62%		
			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	100%		223,53 %		95%		205.88%		216.72%		205.88%		205.88%		-	
			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	59%		80,12 %		58.50%		72.89%		124.60%		72.89%		123.54%		-	
	1.1.2.12.01.0001	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah					512 kali	6,449,282	101 kali	412,350	19.73%	6.39%	19.73%	6.39%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.12.01.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal					3 kali	395,937	0 kali	15,617	0.00%	3.94%	0.00%	3.94%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.1.2.12.01.0003	Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring					14 lokasi	234,336	4 lokasi	86,023	28.57%	36.71%	28.57%	36.71%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
69	1.1.2.12.02	Program Perlindungan Budaya Lokal			2,147,635		N/A		2,025,225		531,387		26.24%		531,387		24.74%		
			Persentase cagar budaya yang terpelihara	91.69%		91.70 %		91.60%		100%		109.17%		100%		109.06%		-	
	1.1.2.12.02.0001	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian					250 lokasi	1,349,023	137 lokasi	503,795	54.80%	37.35%	54.80%	37.35%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.1.2.12.02.0002	Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah					9 kali	676,202	0 kali	27,592	0.00%	4.08%	0.00%	4.08%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
70	1.1.2.13.01	Program Pembinaan Layanan Baca			910,018		N/A		841,610		271,760		32.29%		271,760		29.86%		
			Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	51.60%		23,61 %		46.60%		49.04%		105.24%		49.04%		95.04%		-	
	1.1.2.13.01.0001	Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan					500 lembaga	841,610	570 lembaga	271,760	114.00%	32.29%	114.00%	32.29%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
71	1.1.2.13.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan			23,355,657		N/A		24,033,383		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	10%		N/A		8%		-33.59%		-419.87%		-33.59%		-335.90%		-	
			Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%		10,99 %		10%		-89.11%		-891.09%		-89.11%		-891.10%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.13.02.0001	Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola					1494 lokasi	23,445,837	1494 lokasi	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	1.1.2.13.02.0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca					239 kali	587,546	23 kali	0	9.62%	0.00%	9.62%	0.00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
72	1.1.2.13.03	Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat			3,771,713		N/A		2,631,999		234,352		8.90%		234,352		6.21%		
			Persentase penambahan koleksi buku	100%		88,43 %		94.41%		88.43%		93.66%		88.43%		88.43%		-	
	1.1.2.13.03.0001	Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat					8084 Buku	2,631,999	0 Buku	234,352	0.00%	8.90%	0.00%	8.90%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
73	1.1.2.14.01	Program Pembinaan Penataan Kearsipan			484,142		N/A		475,118		123,344		25.96%		123,344		25.48%		
			Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	100%		67,39 %		79.90%		85.93%		107.55%		85.93%		85.93%		-	
	1.1.2.14.01.0001	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan					130 lembaga	475,118	40 lembaga	123,344	30.77%	25.96%	30.77%	25.96%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
74	1.1.2.14.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan			345,814		N/A		330,890		93,084		28.13%		93,084		26.92%		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	81.5		N/A		81		84.3		104.07%		84.3		103.44%		-	
	1.1.2.14.02.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan					40 kali	330,890	23 kali	93,084	57.50%	28.13%	57.50%	28.13%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
75	1.1.2.14.03	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			3,525,345		N/A		3,203,618		1,112,963		34.74%		1,112,963		31.57%		
			Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi	100%		N/A		85.19%		100%		117.38%		100%		100.00%		-	
			Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	100%		20,41 %		80%		111.54%		139.42%		111.54%		111.54%		-	
	1.1.2.14.03.0001	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan					52 kali	2,127,185	35 kali	862,819	67.31%	40.56%	67.31%	40.56%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	1.1.2.14.03.0002	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan					15 item	1,076,433	2 item	250,144	13.33%	23.24%	13.33%	23.24%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
76	1.1.2.15.01	Program Pemasaran Produk Usaha Mikro			9,726,220		N/A		9,288,729		2,939,512		31.65%		2,939,512		30.22%		
			Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran produk	100%		85,00 %		90%		100%		111.11%		100%		100.00%		-	
	1.1.2.15.01.0001	Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro	Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro					330 Orang	3,989,372	306 Orang	769,537	92.73%	19.29%	92.73%	19.29%			Dinas Perdagangan	
	1.1.2.15.01.0003	Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro	Jumlah sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola					12 lokasi	4,990,321	12 lokasi	2,045,988	100.00%	41.00%	100.00%	41.00%			Dinas Perdagangan	
	1.1.2.15.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan					11 Jenis	309,037	7 Jenis	123,986	63.64%	40.12%	63.64%	40.12%			Dinas Perdagangan	
77	1.1.2.15.02	Program Pengembangan Produk Usaha Mikro			1,213,759		N/A		1,259,211		287,836		22.86%		287,836		23.71%		
			Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	40%		39,07 %		35.11%		35.60%		101.41%		35.60%		89.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.15.02.0002	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan					708 orang	1,259,211	589 orang	287,836	83.19%	22.86%	83.19%	22.86%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
78	1.1.2.15.03	Program Pengembangan Sentra Usaha			7,734,338		N/A		7,789,286		2,385,707		30.63%		2,385,707		30.85%		
			Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	63%		N/A		58%		8.33%		14.37%		8.33%		13.22%		-	
	1.1.2.15.03.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang difasilitasi					60 sentra usaha	4,297,490	20 sentra usaha	1,600,312	33.33%	37.24%	33.33%	37.24%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	1.1.2.15.03.0003	Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan					49 sentra usaha	3,491,796	277 sentra usaha	785,396	565.31%	22.49%	565.31%	22.49%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
79	1.1.2.15.04	Program Pengembangan Usaha Koperasi			1,547,135		N/A		1,077,299		174,392		16.19%		174,392		11.27%		
			Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	80%		78,04 %		79%		43.24%		54.74%		43.24%		54.05%		-	
	1.1.2.15.04.0001	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis					175 koperasi	659,941	0 koperasi	174,392	0.00%	26.43%	0.00%	26.43%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	1.1.2.15.04.0003	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM					178 Orang	417,358	0 Orang	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
80	1.1.2.15.05	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi			2,456,381		1,582,396		2,085,433		649,079		31.12%		649,079		26.42%		
			Persentase koperasi berklasifikasi AAB	72.95%		69,48 %		69.95%		34.18%		48.87%		34.18%		46.85%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase koperasi berklasifikasi AAB			104.88%		-								104.88%			
	1.1.2.15.05.0001	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi					50 kelompok	661,770	32 kelompok	146,869	64.00%	22.19%	64.00%	22.19%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	1.1.2.15.05.0002	Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan					629 koperasi	1,167,216	331 koperasi	469,964	52.62%	40.26%	52.62%	40.26%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	1.1.2.15.05.0003	Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya					35 koperasi	256,447	0 koperasi	32,246	0.00%	12.57%	0.00%	12.57%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
81	1.1.2.15.06	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro			671,894		N/A		530,099		144,530		27.26%		144,530		21.51%		
			Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	8.50%		9.86 %		8.31%		9.37%		112.75%		9.37%		110.24%		-	
	1.1.2.15.06.0001	Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan					179 orang/kelompok	530,099	81 orang/kelompok	144,530	45.25%	27.26%	45.25%	27.26%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
82	1.1.2.16.01	Program Pengelolaan Data Statistik Daerah			285,287		N/A		291,870		0		0.00%		0		0.00%		
			Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	100%		N/A		100%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	1.1.2.16.01.0001	Penyusunan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun					1 dokumen	291,870	0 dokumen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
83	1.1.2.02.01	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan			2,801,368		N/A		2,310,110		568,171		24.59%		568,171		20.28%		
			Persentase kelurahan yang responsif gender	41.56%		N/A		20.13%		0%		0%		0%		0.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.2.02.01.0001	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan					29 kali	1,073,000	13 kali	295,285	44.83%	27.52%	44.83%	27.52%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.02.01.0002	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender					289 lembaga	890,453	72 lembaga	214,063	24.91%	24.04%	24.91%	24.04%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.02.01.0003	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun					2 dokumen	346,657	0 dokumen	58,822	0.00%	16.97%	0.00%	16.97%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
84	1.1.2.02.02	Program Perlindungan Perempuan dan Anak			4,703,257		N/A		4,348,636		1,362,748		31.34%		1,362,748		28.97%		
			Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	74.98%		75.43 %		73.84%		0%		0%		0%		0.00%		-	
			Persentase kelurahan ramah anak	100%		N/A		84.42%		68.18%		80.77%		68.18%		68.18%		-	
			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%		100,00 %		100%		60%		60%		60%		60.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.02.02.0001	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building					926 orang	426,202	420 orang	193,887	45.36%	45.49%	45.36%	45.49%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak					431 lembaga	1,039,113	279 lembaga	298,011	64.73%	28.68%	64.73%	28.68%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.02.02.0003	Pembinaan Pengembangan Kampunge Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibangun					154 kampung	694,388	0 kampung	16,140	0.00%	2.32%	0.00%	2.32%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.02.02.0004	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak					200 kasus	818,531	65 kasus	318,795	32.50%	38.95%	32.50%	38.95%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.02.02.0005	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan					2 lembaga	1,370,401	2 lembaga	535,915	100.00%	39.11%	100.00%	39.11%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.03	Pangan																	
85	1.1.2.03.01	Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan			725,723		N/A		732,449		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal) komoditas pangan	63.60%		N/A		36.40%		90.91%		249.75%		90.91%		142.94%		-	
	1.1.2.03.01.0001	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring					15 laporan	732,449	6 laporan	0	40.00%	0.00%	40.00%	0.00%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
86	1.1.2.03.02	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan			2,928,285		N/A		2,669,273		762,481		28.57%		762,481		26.04%		
			Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	1		N/A		1		1.25		125.30%		1.25		125.00%		-	
			Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	89.75%		89,52 %		89.50%		96.35%		107.65%		96.35%		107.35%		-	
			Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95%		96,10		95%		96.10%		101.16%		96.10%		101.16%		-	
	1.1.2.03.02.0001	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar	Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa					2060 sampel	1,196,452	1151 sampel	346,148	55.87%	28.93%	55.87%	28.93%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1.1.2.03.02.0002	Pengelolaan Sentra Olahan Pangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Yang Dilaksanakan					11 kali	974,697	9 kali	340,325	81.82%	34.92%	81.82%	34.92%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1.1.2.03.02.0003	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan					28 kali	498,124	9 kali	76,008	32.14%	15.26%	32.14%	15.26%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1.1.2.04	Pertanahan																	
87	1.1.2.04.01	Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan			4,444,387		N/A		4,237,496		806,155		19.02%		806,155		18.14%		
			Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.2.04.01.0001	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani					12 Kasus	1,381,143	6 Kasus	0	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
	1.1.2.04.01.0002	Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani					18 obyek	1,391,233	9 obyek	440,725	50.00%	31.68%	50.00%	31.68%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.04.01.0003	Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya					8 kali	1,465,119	2 kali	365,430	25.00%	24.94%	25.00%	24.94%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
88	1.1.2.04.02	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum			268,279,468		N/A		277,822,534		191,025,703		68.76%		191,025,703		71.20%		
			Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	17.07 hektar		20,55 Ha		15.77 hektar		22.34 hektar		141.64%		22.34 hektar		130.87%		-	
	1.1.2.04.02.0001	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur					6 lokasi	277,822,534	11 lokasi	191,025,703	183.33%	68.76%	183.33%	68.76%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
89	1.1.2.04.03	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum			354,067,362		N/A		302,702,598		31,157,158		10.29%		31,157,158		8.80%		
			Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	48.05 hektar		39,21 Ha		44.9 hektar		49.24 hektar		109.67%		49.24 hektar		102.48%		-	
	1.1.2.04.03.0001	Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan					4 dokumen	5,017,532	0 dokumen	706,794	0.00%	14.09%	0.00%	14.09%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.04.03.0002	Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan					4 lokasi	297,685,067	1 lokasi	30,450,364	25.00%	10.23%	25.00%	10.23%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
90	1.1.2.04.04	Program Pengamanan Aset			9,593,122		N/A		8,813,850		1,567,879		17.79%		1,567,879		16.34%		
			Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	39.74%		19,01 %		36.80%		37.56%		102.07%		37.56%		94.51%		-	
			Persentase tanah aset yang tersertifikasi	45.29%		20,32 %		43.08%		44.70%		103.76%		44.70%		98.70%		-	
	1.1.2.04.04.0001	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan					100 bidang	4,896,263	44 bidang	725,852	44.00%	14.82%	44.00%	14.82%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
	1.1.2.04.04.0002	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya					4 dokumen	1,179,182	0 dokumen	192,535	0.00%	16.33%	0.00%	16.33%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
	1.1.2.04.04.0003	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan					75 dokumen	2,738,405	21 dokumen	649,492	28.00%	23.72%	28.00%	23.72%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
91	1.1.2.04.05	Program Pengamanan Aset Infrastruktur			2,324,071		N/A		1,480,047		354,994		23.99%		354,994		15.27%		
			Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya yang diamankan	3.50%		N/A		2.50%		0.47%		18.79%		0.47%		13.43%		-	
	1.1.2.04.05.0001	Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan					40 bidang	1,480,047	20 bidang	354,994	50.00%	23.99%	50.00%	23.99%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
92	1.1.2.04.06	Program Pengelolaan Aset Tanah			6,261,669		N/A		5,845,946		2,007,400		34.34%		2,007,400		32.06%		
			Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	100%		131,19 %		81.30%		78.74%		96.85%		78.74%		78.74%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.04.06.0001	Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya					7000 izin	2,421,478	3638 izin	915,077	51.97%	37.79%	51.97%	37.79%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
	1.1.2.04.06.0002	Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan					1 dokumen	1,984,608	0 dokumen	649,392	0.00%	32.72%	0.00%	32.72%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
	1.1.2.04.06.0003	Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan					8000 lokasi	1,439,859	4348 lokasi	442,932	54.35%	30.76%	54.35%	30.76%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
	1.1.2.05	Lingkungan Hidup																	
93	1.1.2.05.01	Program Kebersihan			218,878,114		N/A		195,327,854		81,199,770		41.57%		81,199,770		37.10%		
			Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	85.95%		97,33 %		84.86%		97.33%		114.69%		97.33%		113.24%		-	
	1.1.2.05.01.0001	Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan					104 Kegiatan	3,853,801	44 Kegiatan	759,851	42.31%	19.72%	42.31%	19.72%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.2.05.01.0002	Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian					364 lokasi	96,443,756	364 lokasi	43,272,068	100.00%	44.87%	100.00%	44.87%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.2.05.01.0003	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran					450 lokasi	19,334,368	563 lokasi	8,766,609	125.11%	45.34%	125.11%	45.34%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.2.05.01.0004	Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah					267 lokasi	75,695,928	267 lokasi	28,401,242	100.00%	37.52%	100.00%	37.52%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
94	1.1.2.05.02	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup			2,632,368		N/A		2,468,745		177,117		7.17%		177,117		6.73%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	80%		N/A		78%		76.56%		98.15%		76.56%		95.70%		-	
	1.1.2.05.02.0001	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan					100 izin	423,280	66 izin	177,117	66.00%	41.84%	66.00%	41.84%			Dinas Lingkungan Hidup	
	1.1.2.05.02.0002	Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan					2000 berkas	1,489,272	1400 berkas	0	70.00%	0.00%	70.00%	0.00%			Dinas Lingkungan Hidup	
	1.1.2.05.02.0003	Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi					100 izin	556,193	73 izin	0	73.00%	0.00%	73.00%	0.00%			Dinas Lingkungan Hidup	
95	1.1.2.05.03	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri			3,972,065		N/A		3,975,709		427,040		10.74%		427,040		10.75%		
			Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	10.93%		25,52 %		8.75%		25.52%		291.64%		25.52%		233.49%		-	
	1.1.2.05.03.0001	Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan					3 kali	3,975,709	1 kali	427,040	33.33%	10.74%	33.33%	10.74%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
96	1.1.2.05.04	Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga			1,961,056		N/A		3,308,709		575,430		17.39%		575,430		29.34%		
			Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	85%		N/A		80%		14%		17.50%		14%		16.47%		-	
	1.1.2.05.04.0001	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban					600 Unit	3,308,709	84 Unit	575,430	14.00%	17.39%	14.00%	17.39%			Dinas Lingkungan Hidup	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
97	1.1.2.05.05	Program Pengelolaan Air Limbah Kota			27,077,093		N/A		23,984,785		5,604,501		23.37%		5,604,501		20.70%		
			Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.2.05.05.0001	Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah	Jumlah IPAL yang dipelihara dan bertfungsi baik					96 lokasi	7,443,205	48 lokasi	789,133	50.00%	10.60%	50.00%	10.60%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.2.05.05.0002	Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSA/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSA/TP S 3R yang dikelola					34 lokasi	16,541,580	34 lokasi	4,815,368	100.00%	29.11%	100.00%	29.11%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
98	1.1.2.05.06	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya			25,649,272		N/A		23,788,990		4,849,930		20.39%		4,849,930		18.91%		
			Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan diawasi	60.19%		N/A		54.76%		17.42%		31.82%		17.42%		28.94%		-	
	1.1.2.05.06.0001	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Raya	Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan dipelihara					12 lokasi	23,788,990	12 lokasi	4,849,930	100.00%	20.39%	100.00%	20.39%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
99	1.1.2.05.07	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau			89,598,539		N/A		88,677,153		31,731,316		35.78%		31,731,316		35.41%		
			Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	10.24%		N/A		8.68%		6.18%		71.21%		6.18%		60.35%		-	
	1.1.2.05.07.0001	Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara					425 lokasi	58,811,198	425 lokasi	19,150,216	100.00%	32.56%	100.00%	32.56%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.05.07.0002	Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi					15 lokasi	10,552,719	18 lokasi	4,642,604	120.00%	43.99%	120.00%	43.99%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.2.05.07.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota	Jumlah taman yang dipelihara					39 lokasi	19,313,237	39 lokasi	7,938,496	100.00%	41.10%	100.00%	41.10%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
100	1.1.2.05.08	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah			2,690,977		N/A		100,026,354		211,874		0.21%		211,874		7.87%		
			Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik	38.46%		N/A		30.77%		14.71%		47.79%		14.71%		38.25%		-	
	1.1.2.05.08.0001	Penanganan Limbah B3	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan					1 Kegiatan	100,026,354	0 Kegiatan	211,874	0.00%	0.21%	0.00%	0.21%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
101	1.1.2.05.09	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan			3,735,333		N/A		3,901,439		1,356,543		34.77%		1,356,543		36.32%		
			Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	95%		72,50 %		80%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	1.1.2.05.09.0001	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah					96 lokasi	422,434	88 lokasi	183,711	91.67%	43.49%	91.67%	43.49%			Dinas Lingkungan Hidup	
	1.1.2.05.09.0002	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak					365 data	914,967	182 data	228,200	49.86%	24.94%	49.86%	24.94%			Dinas Lingkungan Hidup	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.05.09.0003	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat sebanyak					778 data	583,605	398 data	190,481	51.16%	32.64%	51.16%	32.64%			Dinas Lingkungan Hidup	
	1.1.2.05.09.0004	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani					50 obyek	566,374	25 obyek	168,694	50.00%	29.78%	50.00%	29.78%			Dinas Lingkungan Hidup	
	1.1.2.05.09.0005	Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya					254 lembaga	957,671	40 lembaga	391,687	15.75%	40.90%	15.75%	40.90%			Dinas Lingkungan Hidup	
	1.1.2.05.09.0006	Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa					224 sampel	456,387	119 sampel	193,769	53.13%	42.46%	53.13%	42.46%			Dinas Lingkungan Hidup	
102	1.1.2.05.10	Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup			3,363,331		N/A		3,754,490		1,188,958		31.67%		1,188,958		35.35%		
			Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	75%		N/A		70%		95.27%		136.10%		95.27%		127.03%		-	
	1.1.2.05.10.0001	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day					113 kali	1,465,661	28 kali	436,668	24.78%	29.79%	24.78%	29.79%			Dinas Lingkungan Hidup	
	1.1.2.05.10.0002	Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan					12 kali	1,013,253	3 kali	420,589	25.00%	41.51%	25.00%	41.51%			Dinas Lingkungan Hidup	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.05.10.0003	Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun					5 dokumen	1,275,575	1 dokumen	331,702	20.00%	26.00%	20.00%	26.00%			Dinas Lingkungan Hidup	
103	1.1.2.05.11	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			217,422,270		N/A		185,172,874		74,290,700		40.12%		74,290,700		34.17%		
			Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	38.46%		25,93 %		30.77%		44.44%		144.44%		44.44%		115.55%		-	
	1.1.2.05.11.0002	Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola					21 unit	9,469,698	7 unit	1,824,134	33.33%	19.26%	33.33%	19.26%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.2.05.11.0003	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan					1688 unit	26,906,970	1528 unit	4,489,489	90.52%	16.69%	90.52%	16.69%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.2.05.11.0004	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar					1 rekening	122,737,825	1 rekening	60,736,635	100.00%	49.48%	100.00%	49.48%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.2.05.11.0005	Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola					183 lokasi	8,930,685	252 lokasi	1,734,934	137.70%	19.43%	137.70%	19.43%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.2.05.11.0006	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara					14 lokasi	17,127,695	14 lokasi	5,505,508	100.00%	32.14%	100.00%	32.14%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	1.1.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
104	1.1.2.06.01	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil			1,060,857		N/A		1,940,819		762,129		39.27%		762,129		71.84%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Cakupan penerbitan akte kelahiran	99.94%		100,00 %		99.75%		100%		100.25%		100%		100.06%		-	
			Cakupan penerbitan akte kematian	89.51%		100,00 %		88%		100%		113.64%		100%		111.72%		-	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	100%		100,00 %		100%		90.91%		90.91%		90.91%		90.91%		-	
			Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	1.1.2.06.01.0001	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani					104682 berkas	1,361,167	37360 berkas	584,636	35.69%	42.95%	35.69%	42.95%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.06.01.0002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani					3250 berkas	579,652	1907 berkas	177,493	58.68%	30.62%	58.68%	30.62%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
105	1.1.2.06.02	Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk			7,688,089		N/A		12,317,553		5,418,345		43.99%		5,418,345		70.48%		
			Cakupan penerbitan KTP	95%		N/A		92%		73.28%		79.66%		73.28%		77.14%		-	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.06.02.0001	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan					200000 berkas	9,373,661	352000 berkas	4,207,291	176.00%	44.88%	176.00%	44.88%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.06.02.0002	Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani					398986 berkas	2,149,691	339954 berkas	930,640	85.20%	43.29%	85.20%	43.29%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.06.02.0003	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah berkas permohonan pindah datang dan pendataan penduduk Non Permanen					40930 berkas	794,201	14381 berkas	280,414	35.14%	35.31%	35.14%	35.31%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
106	1.1.2.06.03	Program Pemanfaatan Data Kependudukan			1,271,026		N/A		1,052,324		218,683		20.78%		218,683		17.21%		
			Persentase peningkatan inovasi pelayanan	66.66%		N/A		33.33%		100%		300.03%		100%		150.02%		-	
			Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan	20%		N/A		10%		100%		1000%		100%		500.00%		-	
	1.1.2.06.03.0001	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan					2 kali	416,155	1 kali	111,779	50.00%	26.86%	50.00%	26.86%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.06.03.0002	Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil					6 dokumen	636,169	0 dokumen	106,905	0.00%	16.80%	0.00%	16.80%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
107	1.1.2.06.04	Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan			1,924,479		N/A		1,788,339		607,930		33.99%		607,930		31.59%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	90%		N/A		85%		31.22%		36.73%		31.22%		34.69%		-	
	1.1.2.06.04.0001	Pemutakhiran Data Kependudukan	data kependudukan yang di mutakhirkan					146684 data	532,952	71187 data	177,137	48.53%	33.24%	48.53%	33.24%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.06.04.0002	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara					8 sistem	1,255,387	8 sistem	430,793	100.00%	34.32%	100.00%	34.32%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.12	Penanaman Modal																	
108	1.1.2.10.01	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal			1,610,379		N/A		1,382,363		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42%		N/A		40%		40.16%		100.40%		40.16%		95.62%		-	
	1.1.2.10.01.0001	Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi					3500 perusahaan	944,393	500 perusahaan	0	14.29%	0.00%	14.29%	0.00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.10.01.0003	Pengelolaan Data Investasi	Jumlah data investasi yang dikelola					41751 data	437,970	21295 data	0	51.00%	0.00%	51.00%	0.00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
109	1.1.2.10.02	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi			1,334,701		3,237,238		1,255,232		147,222		11.73%		147,222		11.03%		
			Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24%		27,89 %		20%		-15%		-75.02%		-15%		-62.50%		-	
			Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi			370.93%		-								370.93%			

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi			174.30%		-								174.30%			
	1.1.2.10.02.0001	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal					4 dokumen	637,547	0 dokumen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.10.02.0002	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan					3 kali	617,685	0 kali	147,222	0.00%	23.83%	0.00%	23.83%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
110	1.1.2.10.03	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal			5,886,274		N/A		5,621,298		2,133,073		37.95%		2,133,073		36.24%		
			Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75%		N/A		72%		100%		138.89%		100%		133.33%		-	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%		N/A		78%		99.76%		127.90%		99.76%		124.70%		-	
	1.1.2.10.03.0004	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan					2 kali	16,386	1 kali	7,876	50.00%	48.07%	50.00%	48.07%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.10.03.0005	Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi					11000 pelaku usaha	826,019	4422 pelaku usaha	201,395	40.20%	24.38%	40.20%	24.38%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.10.03.0006	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan					60000 berkas	4,743,892	43383 berkas	1,906,132	72.31%	40.18%	72.31%	40.18%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.10.03.0007	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau					2 kali	11,704	1 kali	6,222	50.00%	53.16%	50.00%	53.16%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.10.03.0008	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan					4 kali	23,297	3 kali	11,449	75.00%	49.14%	75.00%	49.14%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga																	
111	1.1.2.11.01	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			80,323,733		N/A		73,174,694		8,150,262		11.14%		8,150,262		10.15%		
			Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	154 keluraha n		137,00 keluraha n		142 kelurahan		140 kelurahan		98.59%		140 keluraha n		90.91%		-	
	1.1.2.11.01.0001	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi					11 unit	9,409,375	12 unit	3,364,557	109.09%	35.76%	109.09%	35.76%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.01.0002	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan					57 unit	52,966,192	16 unit	3,745,766	28.07%	7.07%	28.07%	7.07%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.01.0003	Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan					6 jenis	580,826	0 jenis	16,012	0.00%	2.76%	0.00%	2.76%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.01.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun					58 dokumen	2,726,506	52 dokumen	698,618	89.66%	25.62%	89.66%	25.62%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.01.0005	Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki					133 unit	7,491,794	47 unit	325,309	35.34%	4.34%	35.34%	4.34%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
112	1.1.2.11.02	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			15,294,904		N/A		13,851,895		880,116		6.35%		880,116		5.75%		
			Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1690 medali		N/A		1660 medali		2854 medali		171.93%		2854 medali		168.88%		-	
	1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi					41 kali	8,132,358	1 kali	210,801	2.44%	2.59%	2.44%	2.59%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.02.0002	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional					14 kali	1,050,455	1 kali	168,256	7.14%	16.02%	7.14%	16.02%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.02.0003	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak					26 kali	1,302,018	4 kali	328,134	15.38%	25.20%	15.38%	25.20%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.02.0004	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan					10 kali	2,148,750	1 kali	155,454	10.00%	7.23%	10.00%	7.23%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.02.0005	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan					29 kali	1,218,314	0 kali	17,472	0.00%	1.43%	0.00%	1.43%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
113	1.1.2.11.03	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			3,629,885		N/A		3,558,822		548,044		15.40%		548,044		15.10%		
			Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	35%		N/A		15%		0%		0%		0%		0.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.11.03.0001	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja					4565 peserta	1,389,814	770 peserta	179,402	16.87%	12.91%	16.87%	12.91%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.03.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan					30 kali	2,169,008	7 kali	368,642	23.33%	17.00%	23.33%	17.00%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
114	1.1.2.11.04	Program Peningkatan Prestasi Pemuda			2,422,961		N/A		2,312,510		284,722		12.31%		284,722		11.75%		
			Persentase individu/keompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	12%		7,40 %		10%		6.82%		68.18%		6.82%		56.83%		-	
			Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	30%		15,70 %		15%		1%		6.67%		1%		3.33%		-	
	1.1.2.11.04.0001	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif					670 orang	1,026,934	14 orang	61,844	2.09%	6.02%	2.09%	6.02%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.11.04.0002	Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan					1050 Orang	1,285,576	250 Orang	222,878	23.81%	17.34%	23.81%	17.34%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.1.2.16	Kebudayaan																	
115	1.1.2.12.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal			5,964,878		N/A		7,079,555		513,990		7.26%		513,990		8.62%		
			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	100%		223,53 %		95%		205.88%		216.72%		205.88%		205.88%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	59%		80,12 %		58.50%		72.89%		124.60%		72.89%		123.54%		-	
	1.1.2.12.01.0001	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah					512 kali	6,449,282	101 kali	412,350	19.73%	6.39%	19.73%	6.39%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.1.2.12.01.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal					3 kali	395,937	0 kali	15,617	0.00%	3.94%	0.00%	3.94%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.1.2.12.01.0003	Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring					14 lokasi	234,336	4 lokasi	86,023	28.57%	36.71%	28.57%	36.71%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
116	1.1.2.12.02	Program Perlindungan Budaya Lokal			2,147,635		N/A		2,025,225		531,387		26.24%		531,387		24.74%		
			Persentase cagar budaya yang terpelihara	91.69%		91,70 %		91.60%		100%		109.17%		100%		109.06%		-	
	1.1.2.12.02.0001	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian					250 lokasi	1,349,023	137 lokasi	503,795	54.80%	37.35%	54.80%	37.35%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.1.2.12.02.0002	Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah					9 kali	676,202	0 kali	27,592	0.00%	4.08%	0.00%	4.08%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.1.2.10	Komunikasi dan Informatika serta Persandian																	
117	1.1.2.09.01	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			28,039,717		N/A		32,743,759		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	58.37%		39,01 %		53.85%		51.13%		94.95%		51.13%		87.60%		-	
	1.1.2.09.01.0001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan					396 lokasi	29,839,501	396 lokasi	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.09.01.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi yang dilaksanakan					72 lokasi	739,042	0 lokasi	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.09.01.0003	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun					15 aplikasi	811,100	3 aplikasi	0	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.09.01.0004	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan					150 Aplikasi	1,354,116	150 Aplikasi	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
118	1.1.2.09.02	Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik			6,880,174		N/A		6,529,668		689,396		10.56%		689,396		10.02%		
			Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	32414 kunjungan		33.284,77 kunjungan		32000 kunjungan		34587 kunjungan		108.08%		34587 kunjungan		106.70%		-	
	1.1.2.09.02.0001	Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani					3000 berkas	1,092,562	2572 berkas	0	85.73%	0.00%	85.73%	0.00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.09.02.0002	Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola					19 Saluran	830,591	19 Saluran	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.09.02.0003	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial					11 kali	1,408,546	6 kali	0	54.55%	0.00%	54.55%	0.00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.09.02.0004	Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun					5 dokumen	682,604	0 dokumen	130,474	0.00%	19.11%	0.00%	19.11%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.09.02.0005	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah					4 Jenis	2,515,364	3 Jenis	558,922	75.00%	22.22%	75.00%	22.22%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
119	1.1.2.09.03	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			42,246,639		75,317,360		35,268,727		6,995,010		19.83%		6,995,010		16.56%		
			Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik			100%		-								100.00%			
			Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK			100.92%		-								100.92%			
	1.1.2.09.03.0001	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian Perkotaan yang dikelola					1289 unit	2,329,393	703 unit	0	54.54%	0.00%	54.54%	0.00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.09.03.0002	Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK					136 lokasi	17,748,853	0 lokasi	50,536	0.00%	0.28%	0.00%	0.28%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.09.03.0003	Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK					4 Jenis	9,017,079	0 Jenis	4,745,052	0.00%	52.62%	0.00%	52.62%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.09.03.0004	Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani					100 persen	3,479,774	100 persen	1,981,555	100.00%	56.94%	100.00%	56.94%			Dinas Komunikasi dan Informatika	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.09.03.0005	Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola					2 Lokasi	2,693,628	2 Lokasi	217,867	100.00%	8.09%	100.00%	8.09%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																	
120	1.1.2.15.01	Program Pemasaran Produk Usaha Mikro			9,726,220		N/A		9,288,729		2,939,512		31.65%		2,939,512		30.22%		
			Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran produk	100%		85,00 %		90%		100%		111.11%		100%		100.00%		-	
	1.1.2.15.01.0001	Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro	Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro					330 Orang	3,989,372	306 Orang	769,537	92.73%	19.29%	92.73%	19.29%			Dinas Perdagangan	
	1.1.2.15.01.0003	Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro	Jumlah sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola					12 lokasi	4,990,321	12 lokasi	2,045,988	100.00%	41.00%	100.00%	41.00%			Dinas Perdagangan	
	1.1.2.15.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan					11 Jenis	309,037	7 Jenis	123,986	63.64%	40.12%	63.64%	40.12%			Dinas Perdagangan	
121	1.1.2.15.02	Program Pengembangan Produk Usaha Mikro			1,213,759		N/A		1,259,211		287,836		22.86%		287,836		23.71%		
			Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	40%		39,07 %		35.11%		35.60%		101.41%		35.60%		89.00%		-	
	1.1.2.15.02.0002	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan					708 orang	1,259,211	589 orang	287,836	83.19%	22.86%	83.19%	22.86%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
122	1.1.2.15.03	Program Pengembangan Sentra Usaha			7,734,338		N/A		7,789,286		2,385,707		30.63%		2,385,707		30.85%		
			Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	63%		N/A		58%		8.33%		14.37%		8.33%		13.22%		-	
	1.1.2.15.03.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang difasilitasi					60 sentra usaha	4,297,490	20 sentra usaha	1,600,312	33.33%	37.24%	33.33%	37.24%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.15.03.0003	Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan					49 sentra usaha	3,491,796	277 sentra usaha	785,396	565.31%	22.49%	565.31%	22.49%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
123	1.1.2.15.04	Program Pengembangan Usaha Koperasi			1,547,135		N/A		1,077,299		174,392		16.19%		174,392		11.27%		
			Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	80%		78,04 %		79%		43.24%		54.74%		43.24%		54.05%		-	
	1.1.2.15.04.0001	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis					175 koperasi	659,941	0 koperasi	174,392	0.00%	26.43%	0.00%	26.43%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	1.1.2.15.04.0003	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM					178 Orang	417,358	0 Orang	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
124	1.1.2.15.05	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi			2,456,381		1,582,396		2,085,433		649,079		31.12%		649,079		26.42%		
			Persentase koperasi berklasifikasi AAB	72.95%		69,48 %		69.95%		34.18%		48.87%		34.18%		46.85%		-	
			Persentase koperasi berklasifikasi AAB			104.88%		-								104.88%			
	1.1.2.15.05.0001	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi					50 kelompok	661,770	32 kelompok	146,869	64.00%	22.19%	64.00%	22.19%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	1.1.2.15.05.0002	Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan					629 koperasi	1,167,216	331 koperasi	469,964	52.62%	40.26%	52.62%	40.26%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	1.1.2.15.05.0003	Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya					35 koperasi	256,447	0 koperasi	32,246	0.00%	12.57%	0.00%	12.57%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
125	1.1.2.15.06	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro			671,894		N/A		530,099		144,530		27.26%		144,530		21.51%		
			Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	8.50%		9.86 %		8.31%		9.37%		112.75%		9.37%		110.24%		-	
	1.1.2.15.06.0001	Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan					179 orang/kelompok	530,099	81 orang/kelompok	144,530	45.25%	27.26%	45.25%	27.26%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	1.1.2.14	Statistik																	
126	1.1.2.16.01	Program Pengelolaan Data Statistik Daerah			285,287		N/A		291,870		0		0.00%		0		0.00%		
			Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	100%		N/A		100%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	1.1.2.16.01.0001	Penyusunan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun					1 dokumen	291,870	0 dokumen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1.1.2.17	Perpustakaan																	
127	1.1.2.13.01	Program Pembinaan Layanan Baca			910,018		N/A		841,610		271,760		32.29%		271,760		29.86%		
			Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	51.60%		23,61 %		46.60%		49.04%		105.24%		49.04%		95.04%		-	
	1.1.2.13.01.0001	Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan					500 lembaga	841,610	570 lembaga	271,760	114.00%	32.29%	114.00%	32.29%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
128	1.1.2.13.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan			23,355,657		N/A		24,033,383		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	10%		N/A		8%		-33.59%		-419.87%		-33.59%		-335.90%		-	
			Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%		10,99 %		10%		-89.11%		-891.09%		-89.11%		-891.10%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.13.02.0001	Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola					1494 lokasi	23,445,837	1494 lokasi	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	1.1.2.13.02.0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca					239 kali	587,546	23 kali	0	9.62%	0.00%	9.62%	0.00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
129	1.1.2.13.03	Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat			3,771,713		N/A		2,631,999		234,352		8.90%		234,352		6.21%		
			Persentase penambahan koleksi buku	100%		88,43 %		94.41%		88.43%		93.66%		88.43%		88.43%		-	
	1.1.2.13.03.0001	Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat					8084 Buku	2,631,999	0 Buku	234,352	0.00%	8.90%	0.00%	8.90%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	1.1.2.18	Kearsipan																	
130	1.1.2.14.01	Program Pembinaan Penataan Kearsipan			484,142		N/A		475,118		123,344		25.96%		123,344		25.48%		
			Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	100%		67,39 %		79.90%		85.93%		107.55%		85.93%		85.93%		-	
	1.1.2.14.01.0001	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan					130 lembaga	475,118	40 lembaga	123,344	30.77%	25.96%	30.77%	25.96%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
131	1.1.2.14.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan			345,814		N/A		330,890		93,084		28.13%		93,084		26.92%		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	81.5		N/A		81		84.3		104.07%		84.3		103.44%		-	
	1.1.2.14.02.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan					40 kali	330,890	23 kali	93,084	57.50%	28.13%	57.50%	28.13%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
132	1.1.2.14.03	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			3,525,345		N/A		3,203,618		1,112,963		34.74%		1,112,963		31.57%		
			Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi	100%		N/A		85.19%		100%		117.38%		100%		100.00%		-	
			Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	100%		20,41 %		80%		111.54%		139.42%		111.54%		111.54%		-	
	1.1.2.14.03.0001	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan					52 kali	2,127,185	35 kali	862,819	67.31%	40.56%	67.31%	40.56%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	1.1.2.14.03.0002	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan					15 item	1,076,433	2 item	250,144	13.33%	23.24%	13.33%	23.24%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	1.1.2.09	Perhubungan																	
133	1.1.2.08.01	Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan			2,988,829		N/A		6,234,527		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan	80%		N/A		78%		100%		128.21%		100%		125.00%		-	
	1.1.2.08.01.0001	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan					3 Jenis	6,234,527	2 Jenis	0	66.67%	0.00%	66.67%	0.00%			Dinas Perhubungan	
134	1.1.2.08.02	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi			51,371,900		N/A		70,827,793		816,457		1.15%		816,457		1.59%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik	100%		100,00 %		100%		0%		0%		0%		0,00%		-	
	1.1.2.08.02.0001	Pembangunan Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun					1 bangunan	30,027,463	0 bangunan	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.02.0002	Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara					36 lokasi	6,096,648	0 lokasi	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.02.0003	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan					14 Lokasi	30,750,937	15 Lokasi	0	107.14%	0,00%	107.14%	0,00%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.02.0004	Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi					8 Paket	3,952,745	1 Paket	816,457	12.50%	20.66%	12.50%	20.66%			Dinas Perhubungan	
135	1.1.2.08.03	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			25,404,415		N/A		23,266,400		3,543,310		15.23%		3,543,310		13.95%		
			Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	94%		92,15 %		93%		95.68%		102.88%		95.68%		101.79%		-	
	1.1.2.08.03.0001	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR dilokasi pengujian kendaraan Bermotor					149069 unit	7,714,378	74664 unit	3,543,310	50.09%	45.93%	50.09%	45.93%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.03.0002	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan					365 Kali	10,831,194	182 Kali	0	49.86%	0,00%	49.86%	0,00%			Dinas Perhubungan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.08.03.0003	Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan					7 Jenis	3,586,361	9 Jenis	0	128.57%	0.00%	128.57%	0.00%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.03.0004	Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan					48 kali	1,134,467	24 kali	0	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%			Dinas Perhubungan	
136	1.1.2.08.04	Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan			35,237,371		N/A		59,668,281		15,134,999		25.37%		15,134,999		42.95%		
			Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	40%		N/A		40%		60.59%		151.47%		60.59%		151.48%		-	
			Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	90.3 menit		100,12 menit		95.05 menit		100.03 menit		94.76%		100.03 menit		110.78%		-	
	1.1.2.08.04.0001	Pengelolaan Transportasi Umum	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan					20 Unit	19,526,059	120 Unit	9,272,525	600.00%	47.49%	600.00%	47.49%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.04.0002	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor					5 Kali	6,750,518	2 Kali	1,463,713	40.00%	21.68%	40.00%	21.68%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.04.0003	Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang					2 kali	794,133	0 kali	38,984	0.00%	4.91%	0.00%	4.91%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.04.0004	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan					8 unit	1,225,469	8 unit	441,185	100.00%	36.00%	100.00%	36.00%			Dinas Perhubungan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.08.04.0005	Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan					365 kali	28,781,141	394 kali	3,396,515	107.95%	11.80%	107.95%	11.80%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.04.0006	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan					10 Dokumen	2,590,962	4 Dokumen	522,076	40.00%	20.15%	40.00%	20.15%			Dinas Perhubungan	
137	1.1.2.08.05	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			79,061,393		N/A		82,023,291		20,963,479		25.56%		20,963,479		26.52%		
			Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	40 kilometer per jam		33,41 km/jam		39 kilometer per jam		39.63 kilometer per jam		101.62%		39.63 kilometer per jam		99.08%		-	
			Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%		18,68 %		2%		53.38%		2668.92%		53.38%		#####		-	
	1.1.2.08.05.0001	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara					5 Jenis	31,944,565	5 Jenis	8,585,843	100.00%	26.88%	100.00%	26.88%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.05.0002	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan					1200 unit	20,300,797	1012 unit	2,915,429	84.33%	14.36%	84.33%	14.36%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.05.0003	Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun					13 dokumen	3,569,982	1 dokumen	479,523	7.69%	13.43%	7.69%	13.43%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.05.0004	Penyelenggaraan Perparkiran	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan					1821 Lokasi	25,694,473	1823 Lokasi	8,982,684	100.11%	34.96%	100.11%	34.96%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08.05.0005	Pemasangan Alat Keselamatan Jalan (DAK)	Jenis alat keselamatan jalan yang diadakan dalam satu tahun					1 jenis	513,475	0 jenis	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Perhubungan	
	1.1.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
138	1.1.2.07.01	Program Keluarga Berencana			8,030,137		7,400,586		8,493,808		1,209,697		14.24%		1,209,697		15.06%		
			Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19.22%		19,11 %		19.47%		19.46%		100.06%		19.46%		101.25%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase peserta KB aktif	80.95%		80,94 %		80.89%		80.54%		99.57%		80.54%		99.49%		-	
			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2.78%		N/A		2.99%		2.41%		119.32%		2.41%		86.69%		-	
			Persentase peserta KB baru	97.94%		96,28 %		97.92%		2.79%		2.85%		2.79%		2.85%		-	
			Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)			105.40%		-								105.40%			
			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi			194.32%		-								194.32%			
			Persentase peserta KB aktif			101.69%		-								101.69%			
			Persentase peserta KB baru			116.35%		-								116.35%			
	1.1.2.07.01.0001	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	Jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)					31 lembaga	4,051,322	59 lembaga	397,504	190.32%	9.81%	190.32%	9.81%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.07.01.0002	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana					2028 orang	1,949,694	1566 orang	531,506	77.22%	27.26%	77.22%	27.26%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.07.01.0003	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB					650 orang	1,405,444	142 orang	272,887	21.85%	19.42%	21.85%	19.42%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.07.01.0004	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana					80 Paket	1,046,972	900 Paket	7,800	1125.00%	0.75%	#####	0.75%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.07.01.0006	Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan					4 unit	40,375	0 unit	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
139	1.1.2.07.02	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga			4,490,483		N/A		4,138,377		1,207,610		29.18%		1,207,610		26.89%		
			Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	10.33%		N/A		19.67%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	1.1.2.07.02.0001	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri					100 orang	1,083,640	0 orang	309,262	0.00%	28.54%	0.00%	28.54%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.07.02.0002	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi					15 lembaga	977,460	0 lembaga	171,108	0.00%	17.51%	0.00%	17.51%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.07.02.0003	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera					1240 orang	623,950	0 orang	199,774	0.00%	32.02%	0.00%	32.02%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.1.2.07.02.0004	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi					1350 orang	377,139	978 orang	185,270	72.44%	49.13%	72.44%	49.13%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.07.02.0005	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan					1 bangunan	304,396	1 bangunan	90,916	100.00%	29.87%	100.00%	29.87%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.1.2.07.02.0006	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan					2 lembaga	771,793	2 lembaga	251,280	100.00%	32.56%	100.00%	32.56%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.2	Pilihan																	
	1.2.2	Non Pelayanan Dasar																	
	1.2.2.02	Energi dan Sumber Daya Mineral																	
140	1.2.2.02.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif			364,334		N/A		307,458		0		0.00%		0		0.00%		
			Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	13 lingkungan		14,00 lingkungan		11 lingkungan		34 lingkungan		309.09%		34 lingkungan		261.54%		-	
	1.2.2.02.01.0001	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif					3 Lingkungan	307,458	3 Lingkungan	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
141	1.2.2.02.02	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota			2,562,086		N/A		2,429,533		0		0.00%		0		0.00%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan di gedung milik pemerintah kota	49 unit		67,00 unit		45 unit		40 unit		88.89%		40 unit		81.63%		-	
	1.2.2.02.02.0001	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan					7 unit	2,125,023	0 unit	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	1.2.2.02.02.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun					4 dokumen	304,510	0 dokumen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
142	1.2.2.02.03	Program Upaya Konservasi Energi			559,604		525,830		551,476		0		0.00%		0		0.00%		
			Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	164 kegiatan dan/atau usaha		147,00 kegiatan dan /atau usaha		154 kegiatan dan/atau usaha		103 kegiatan dan/atau usaha		66.88%		103 kegiatan dan/atau usaha		62.80%		-	
			Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi			102.08%		-								102.08%			
	1.2.2.02.03.0001	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi					120 lembaga	551,476	0 lembaga	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Dinas Lingkungan Hidup	
	1.2.2.02	Pariwisata																	
143	1.2.2.01.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata			727,578		N/A		633,557		205,204		32.39%		205,204		28.20%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata	65%		N/A		60%		100%		166.67%		100%		153.85%		-	
	1.2.2.01.01.0001	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses					400 berkas	331,072	253 berkas	118,160	63.25%	35.69%	63.25%	35.69%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.01.0002	Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses					169 berkas	302,485	75 berkas	87,044	44.38%	28.78%	44.38%	28.78%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
144	1.2.2.01.02	Program Pemasaran Pariwisata			6,310,966		8,356,569		6,710,076		1,449,100		21.60%		1,449,100		22.96%		
			Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	52.27%		64,57 %		50.01%		9.74%		19.48%		9.74%		18.63%		-	
			Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan			135.25%		-								135.25%			
	1.2.2.01.02.0001	Fasilitasi promosi wisata	Jumlah fasilitasi promosi wisata					246 kali	3,122,157	43 kali	735,780	17.48%	23.57%	17.48%	23.57%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.02.0002	Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel					93 kali	1,145,623	22 kali	243,877	23.66%	21.29%	23.66%	21.29%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.02.0003	Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda					41 kali	1,423,167	7 kali	385,592	17.07%	27.09%	17.07%	27.09%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.02.0004	Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti					66 kali	1,019,129	10 kali	83,851	15.15%	8.23%	15.15%	8.23%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
145	1.2.2.01.03	Program Pengembangan Destinasi Wisata			6,913,683		N/A		8,671,949		1,571,994		18.13%		1,571,994		22.74%		
			Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	76.92%		71.43 %		69.23%		78.57%		113.49%		78.57%		102.15%		-	
	1.2.2.01.03.0001	Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan di Destinasi Wisata	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi					770 kali	620,051	78 kali	46,496	10.13%	7.50%	10.13%	7.50%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.03.0002	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan					3 kali	306,474	1 kali	82,320	33.33%	26.86%	33.33%	26.86%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.03.0003	Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang					3 lokasi	2,354,241	3 lokasi	456,270	100.00%	19.38%	100.00%	19.38%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.03.0004	Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang					2 lokasi	2,138,284	4 lokasi	661,509	200.00%	30.94%	200.00%	30.94%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.03.0005	Peningkatan Destinasi Wisata	Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata					6 kali	1,856,094	0 kali	67,203	0.00%	3.62%	0.00%	3.62%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.03.0006	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)	Jumlah museum yang dipelihara					6 lokasi	700,000	14 lokasi	219,921	233.33%	31.42%	233.33%	31.42%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.03.0007	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisataaan (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisataaan					280 orang	696,804	45 orang	38,276	16.07%	5.49%	16.07%	5.49%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
146	1.2.2.01.04	Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata			720,758		N/A		583,678		150,739		25.83%		150,739		20.91%		
			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	100%		140,00 %		80%		0%		0%		0%		0.00%		-	
			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	100%		N/A		80%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	1.2.2.01.04.0001	Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata					12 kali	432,990	3 kali	128,741	25.00%	29.73%	25.00%	29.73%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01.04.0002	Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi					6 lokasi	150,688	9 lokasi	21,998	150.00%	14.60%	150.00%	14.60%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	1.2.2.01	Kelautan dan Perikanan																	
147	1.2.2.04.01	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan			465,098		N/A		435,308		91,485		21.02%		91,485		19.67%		
			Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%		50,00 %		65%		50%		76.92%		50%		62.50%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.2.2.04.01.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan					30 kali	435,308	6 kali	91,485	20.00%	21.02%	20.00%	21.02%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
148	1.2.2.04.02	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan			5,170,806		4,818,125		4,914,652		1,393,253		28.35%		1,393,253		26.94%		
			Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16%		14,29 %		15%		14.29%		95.24%		14.29%		89.31%		-	
			Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan			102.04%		-								102.04%			
	1.2.2.04.02.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dipelihara dan diadakan					534 unit	1,502,385	2 unit	359,379	0.37%	23.92%	0.37%	23.92%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1.2.2.04.02.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipelihara dan diadakan					172 unit	2,948,120	1 unit	928,585	0.58%	31.50%	0.58%	31.50%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1.2.2.04.02.0003	Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kawasan pesisir					12 laporan	464,147	5 laporan	105,290	41.67%	22.68%	41.67%	22.68%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1.2.2.06	Perdagangan																	
149	1.2.2.03.01	Program Distribusi Perdagangan			3,031,780		N/A		2,782,546		791,322		28.44%		791,322		26.10%		
			Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan	17 kali		N/A		17 kali		15 kali		88.24%		15 kali		88.24%		-	
			Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	31 kali per kejadian		39,00 kali/kejadian		31 kali per kejadian		0 kali per kejadian		0%		0 kali per kejadian		0.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	85%		81,97 %		80%		28.42%		35.53%		28.42%		33.44%		-	
	1.2.2.03.01.0001	Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Jumlah gudang yang dimonitor					250 lokasi	477,509	121 lokasi	149,188	48.40%	31.24%	48.40%	31.24%			Dinas Perdagangan	
	1.2.2.03.01.0002	Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina					31 Kelompok	797,862	186 Kelompok	297,374	600.00%	37.27%	600.00%	37.27%			Dinas Perdagangan	
	1.2.2.03.01.0003	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan					142 kali	1,507,175	183 kali	344,759	128.87%	22.87%	128.87%	22.87%			Dinas Perdagangan	
150	1.2.2.03.02	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan			1,663,156		N/A		1,732,085		601,932		34.75%		601,932		36.19%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan	80%		N/A		78%		52.38%		67.16%		52.38%		65.48%		-	
	1.2.2.03.02.0001	Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan					400 berkas	653,784	152 berkas	181,502	38.00%	27.76%	38.00%	27.76%			Dinas Perdagangan	
	1.2.2.03.02.0002	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya					1552 Lembaga	1,078,300	797 Lembaga	420,431	51.35%	38.99%	51.35%	38.99%			Dinas Perdagangan	
151	1.2.2.03.03	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			3,409,564		3,740,501		2,904,659		663,886		22.86%		663,886		19.47%		
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	90%		100,00 %		85%		0%		0%		0%		0.00%		-	
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti			125%		-								125.00%			

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.2.2.03.03.0001	Operasional UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan					16 Jenis	1,163,871	10 Jenis	215,708	62.50%	18.53%	62.50%	18.53%			Dinas Perdagangan	
	1.2.2.03.03.0002	Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang dilayani					23855 unit	1,305,990	11501 unit	298,061	48.21%	22.82%	48.21%	22.82%			Dinas Perdagangan	
	1.2.2.03.03.0003	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang diawasi					4500 unit	434,799	2499 unit	150,117	55.53%	34.53%	55.53%	34.53%			Dinas Perdagangan	
	1.2.2.03	Pertanian																	
152	1.2.2.05.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian			218,596		N/A		295,847		79,384		26.83%		79,384		36.32%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pertanian	80%		N/A		78%		100%		128.21%		100%		125.00%		-	
	1.2.2.05.01.0001	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses					255 berkas	295,847	116 berkas	79,384	45.49%	26.83%	45.49%	26.83%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
153	1.2.2.05.02	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak			1,163,947		N/A		1,013,745		347,013		34.23%		347,013		29.81%		
			Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	88.50%		91,19 %		88%		64.10%		72.85%		64.10%		72.43%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	1.2.2.05.02.0001	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis					1562 kali	1,013,745	612 kali	347,013	39.18%	34.23%	39.18%	34.23%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
154	1.2.2.05.03	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan			806,672		653,199		787,661		243,458		30.91%		243,458		30.18%		
			Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%		51,92 %		65%		87.74%		134.99%		87.74%		109.68%		-	
			Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya			103.85%		-								103.85%			
	1.2.2.05.03.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan					8 kali	350,556	0 kali	72,250	0.00%	20.61%	0.00%	20.61%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1.2.2.05.03.0002	Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan					6 jenis	437,105	5 jenis	171,208	83.33%	39.17%	83.33%	39.17%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
155	1.2.2.05.04	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			6,523,542		2,348,824		4,686,200		1,808,221		38.59%		1,808,221		27.72%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%		52,18 %		65%		52.18%		80.28%		52.18%		65.23%		-	
			Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya			104.36%		-								104.36%			
	1.2.2.05.04.0001	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura					300 orang	438,508	200 orang	126,431	66.67%	28.83%	66.67%	28.83%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1.2.2.05.04.0002	Pembibitan	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan					13 jenis	3,150,036	5 jenis	1,424,367	38.46%	45.22%	38.46%	45.22%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1.2.2.05.04.0003	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian					125 orang	1,097,655	25 orang	257,423	20.00%	23.45%	20.00%	23.45%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
156	1.2.2.05.05	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan			908,008		N/A		827,688		63,118		7.63%		63,118		6.95%		
			Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	67.60%		97,11 %		67.50%		27.35%		40.52%		27.35%		40.46%		-	
	1.2.2.05.05.0001	Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan					72 kali	827,688	29 kali	63,118	40.28%	7.63%	40.28%	7.63%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
157	1.2.2.05.06	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			2,640,439		1,328,572		2,756,295		553,339		20.08%		553,339		20.96%		
			Persentase pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	17%		19,78 %		16%		18.76%		117.22%		18.76%		110.35%		-	
			Persentase pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi			141.27%		-								141.27%			
	1.2.2.05.06.0001	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan					485 orang	1,200,801	0 orang	39,294	0.00%	3.27%	0.00%	3.27%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	1.2.2.05.06.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disediakan dan dipelihara					5 Jenis	1,555,494	2 Jenis	514,045	40.00%	33.05%	40.00%	33.05%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2	Penunjang Urusan Pemerintahan																	
	2.1	Fungsi Manajemen																	
	2.1.2	Non Pelayanan Dasar																	
	2.1.2.01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan																	
158	2.1.2.04.01	Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan			1,466,168		N/A		1,448,212		0		0.00%		0		0.00%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	100%		97,19 %		99%		79.25%		80.06%		79.25%		79.25%		-	
	2.1.2.04.01.0001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah					72 PD	869,944	0 PD	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.1.2.04.01.0002	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi					4 dokumen	578,267	1 dokumen	0	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%			Badan Perencanaan Pembangunan	
159	2.1.2.04.02	Program Pengembangan Data dan Informasi			1,443,668		N/A		1,427,446		640,077		44.84%		640,077		44.34%		
			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.1.2.04.02.0001	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola					17 data urusan	1,427,446	0 data urusan	640,077	0.00%	44.84%	0.00%	44.84%			Badan Perencanaan Pembangunan	
160	2.1.2.04.03	Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			5,088,738		N/A		4,168,479		1,099,969		26.39%		1,099,969		21.62%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		N/A		100%		45.49%		45.49%		45.49%		45.49%		-	
	2.1.2.04.03.0001	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	36,764	2 dokumen	0	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.04.03.0002	Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun					5 dokumen	772,574	3 dokumen	508,515	60.00%	65.82%	60.00%	65.82%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
	2.1.2.04.03.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	236,919	2 dokumen	37,752	16.67%	15.93%	16.67%	15.93%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.1.2.04.03.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	920,898	2 dokumen	135,829	16.67%	14.75%	16.67%	14.75%			Bagian Umum Dan Protokol	
	2.1.2.04.03.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	195,795	2 dokumen	45,458	16.67%	23.22%	16.67%	23.22%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.1.2.04.03.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	210,811	2 dokumen	50,572	16.67%	23.99%	16.67%	23.99%			Dinas Kesehatan	
	2.1.2.04.03.0007	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	381,256	2 dokumen	154,724	16.67%	40.58%	16.67%	40.58%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	2.1.2.04.03.0008	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	305,397	2 dokumen	37,245	16.67%	12.20%	16.67%	12.20%			Dinas Pendidikan	
	2.1.2.04.03.0009	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	275,159	2 dokumen	49,261	16.67%	17.90%	16.67%	17.90%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.04.03.0010	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	306,312	2 dokumen	57,739	16.67%	18.85%	16.67%	18.85%			Inspektorat	
	2.1.2.04.03.0011	Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu					2 dokumen	388,012	1 dokumen	22,874	50.00%	5.90%	50.00%	5.90%			Inspektorat	
	2.1.2.04.03.0012	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	25,000	2 dokumen	0	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%			RSUD Bhakti Dharma Husada	
	2.1.2.04.03.0013	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 dokumen	113,581	2 dokumen	0	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
161	2.1.2.04.04	Program Perencanaan Kota			2,160,881		N/A		1,998,564		510,901		25.56%		510,901		23.64%		
			Persentase penyusunan rencana induk sektoral	100%		84,62 %		92.86%		92.31%		99.41%		92.31%		92.31%		-	
	2.1.2.04.04.0001	Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase					1 dokumen	1,110,558	0 dokumen	216,099	0.00%	19.46%	0.00%	19.46%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.1.2.04.04.0002	Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan					1 dokumen	888,006	0 dokumen	294,802	0.00%	33.20%	0.00%	33.20%			Badan Perencanaan Pembangunan	
162	2.1.2.04.05	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1,405,610		24,160,015		1,418,704		519,850		36.64%		519,850		36.98%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas			133.33%		-								133.33%			
			Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas			133.33%		-								133.33%			
			Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparat pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas			133.33%		-								133.33%			
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral			100%		-								100.00%			
	2.1.2.04.05.0001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun					9 dokumen	1,418,704	3 dokumen	519,850	33.33%	36.64%	33.33%	36.64%			Badan Perencanaan Pembangunan	
163	2.1.2.04.06	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			2,455,628		N/A		2,513,619		766,972		30.51%		766,972		31.23%		
			Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	85%		100,00 %		80%		100%		125%		100%		117.65%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.04.06.0001	Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun					6 dokumen	734,862	1 dokumen	120,816	16.67%	16.44%	16.67%	16.44%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.1.2.04.06.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian yang disusun					2 dokumen	524,774	1 dokumen	213,877	50.00%	40.76%	50.00%	40.76%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.1.2.04.06.0003	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun					2 dokumen	587,173	1 dokumen	190,902	50.00%	32.51%	50.00%	32.51%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.1.2.04.06.0004	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun					2 dokumen	666,810	0 dokumen	241,377	0.00%	36.20%	0.00%	36.20%			Badan Perencanaan Pembangunan	
164	2.1.2.04.07	Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah			1,880,697		N/A		1,815,706		626,454		34.50%		626,454		33.31%		
			Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan	85%		100,00 %		80%		100%		125%		100%		117.65%		-	
	2.1.2.04.07.0001	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota					1 dokumen	988,186	1 dokumen	461,455	100.00%	46.70%	100.00%	46.70%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.1.2.04.07.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakarya, dan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakarya, dan Permukiman dan Lingkungan Hidup					1 dokumen	827,520	0 dokumen	164,999	0.00%	19.94%	0.00%	19.94%			Badan Perencanaan Pembangunan	
165	2.1.2.04.08	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan			1,920,031		N/A		1,807,930		650,400		35.97%		650,400		33.87%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	85%		100,00 %		80%		100%		125%		100%		117.65%		-	
	2.1.2.04.08.0001	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi					12 kali	643,816	6 kali	269,660	50.00%	41.88%	50.00%	41.88%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.1.2.04.08.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat					1 dokumen	543,833	0 dokumen	197,384	0.00%	36.30%	0.00%	36.30%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.1.2.04.08.0003	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun					2 dokumen	620,281	1 dokumen	183,356	50.00%	29.56%	50.00%	29.56%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.1.2.02	Keuangan																	
166	2.1.2.02.01	Program Penagihan Pajak Daerah			4,673,777		N/A		3,216,279		1,619,518		50.35%		1,619,518		34.65%		
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	85%		N/A		84.50%		48.84%		57.80%		48.84%		57.46%		-	
	2.1.2.02.01.0001	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani					7201 berkas	798,577	3978 berkas	476,838	55.24%	59.71%	55.24%	59.71%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.02.01.0002	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani					11224 berkas	618,184	4328 berkas	283,587	38.56%	45.87%	38.56%	45.87%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
	2.1.2.02.01.0003	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani					196762 berkas	1,799,517	182045 berkas	859,094	92.52%	47.74%	92.52%	47.74%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
167	2.1.2.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			4,141,317		6,497,663		3,526,819		1,064,387		30.18%		1,064,387		25.70%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawab an keuangan	90%		N/A		90%		100%		111.11%		100%		111.11%		-	
			Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan			125%		-								125.00%			
	2.1.2.02.02.0001	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani					72000 berkas	2,230,269	43102 berkas	505,490	59.86%	22.66%	59.86%	22.66%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
	2.1.2.02.02.0002	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola					245 dokumen	318,907	121 dokumen	178,409	49.39%	55.94%	49.39%	55.94%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.02.02.0003	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD yang disusun					22 dokumen	977,644	12 dokumen	380,489	54.55%	38.92%	54.55%	38.92%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
168	2.1.2.02.03	Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah			24,133,807		N/A		18,899,077		8,717,023		46.12%		8,717,023		36.12%		
			Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan	85%		N/A		84%		99.17%		118.06%		99.17%		116.67%		-	
	2.1.2.02.03.0001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					34900 objek pajak	3,841,689	23657 objek pajak	1,922,531	67.79%	50.04%	67.79%	50.04%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
	2.1.2.02.03.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					6555 objek pajak	6,046,041	5957.6666666 667 objek pajak	2,858,187	90.89%	47.27%	90.89%	47.27%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
	2.1.2.02.03.0003	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					695022 objek pajak	9,011,348	698186 objek pajak	3,936,305	100.46%	43.68%	100.46%	43.68%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
169	2.1.2.02.04	Program Perencanaan Anggaran Daerah			1,461,556		N/A		1,376,617		366,693		26.64%		366,693		25.09%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	75%		N/A		75%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	2.1.2.02.04.0001	Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah					4 dokumen	279,042	2 dokumen	97,770	50.00%	35.04%	50.00%	35.04%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
	2.1.2.02.04.0002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun					4 dokumen	313,020	2 dokumen	80,302	50.00%	25.65%	50.00%	25.65%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.02.04.0003	Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun					5 Laporan	784,555	1 Laporan	188,621	20.00%	24.04%	20.00%	24.04%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
	2.1.2.03	Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah																	
170	2.1.2.01.01	Program Fasilitas Informasi dan Protokol DPRD			83,608,376		N/A		97,729,065		20,698,197		21.18%		20,698,197		24.76%		
			Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.1.2.01.01.0001	Fasilitasi Reses DPRD	Jumlah Fasilitas Reses					3 kali	13,479,901	98 kali	0	3266.67%	0.00%	#####	0.00%			Sekretariat DPRD	
	2.1.2.01.01.0002	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD					185 kali	61,520,111	87 kali	13,644,355	47.03%	22.18%	47.03%	22.18%			Sekretariat DPRD	
	2.1.2.01.01.0003	Penerimaan Studi Banding	Jumlah studi banding yang difasilitasi					240 kali	3,543,492	66 kali	504,071	27.50%	14.23%	27.50%	14.23%			Sekretariat DPRD	
	2.1.2.01.01.0004	Pengendalian Keamanan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan					264 kali	1,337,269	122 kali	344,622	46.21%	25.77%	46.21%	25.77%			Sekretariat DPRD	
	2.1.2.01.01.0005	Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD					5 media	17,848,291	7 media	6,205,149	140.00%	34.77%	140.00%	34.77%			Sekretariat DPRD	
171	2.1.2.01.02	Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan			471,152,353		N/A		631,316,396		62,155,944		9.85%		62,155,944		13.19%		
			Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100%		N/A		100%		0%		0%		0%		0.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0001	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Asem Rowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,842,426	1 Lembaga	845,727	14.29%	22.01%	14.29%	22.01%			Kec. Asemrowo	
	2.1.2.01.02.0002	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	2,655,133	1 Lembaga	435,113	25.00%	16.39%	25.00%	16.39%			Kec. Asemrowo	
	2.1.2.01.02.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	2,930,883	3 Lembaga	366,445	50.00%	12.50%	50.00%	12.50%			Kec. Asemrowo	
	2.1.2.01.02.0004	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,173,887	1 Lembaga	610,257	11.11%	14.62%	11.11%	14.62%			Kec. Benowo	
	2.1.2.01.02.0005	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Romokalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	1,603,504	1 Lembaga	249,199	33.33%	15.54%	33.33%	15.54%			Kec. Benowo	
	2.1.2.01.02.0006	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sememi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,040,791	1 Lembaga	744,322	14.29%	24.48%	14.29%	24.48%			Kec. Benowo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0007	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	1,856,689	3 Lembaga	339,584	75.00%	18.29%	75.00%	18.29%			Kec. Benowo	
	2.1.2.01.02.0008	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	1,781,576	6 Lembaga	300,838	100.00%	16.89%	100.00%	16.89%			Kec. Bubutan	
	2.1.2.01.02.0009	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bubutan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,049,576	1 Lembaga	731,703	11.11%	18.07%	11.11%	18.07%			Kec. Bubutan	
	2.1.2.01.02.0010	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	4,441,517	1 Lembaga	895,125	9.09%	20.15%	9.09%	20.15%			Kec. Bubutan	
	2.1.2.01.02.0011	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jepara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	4,574,122	1 Lembaga	774,400	12.50%	16.93%	12.50%	16.93%			Kec. Bubutan	
	2.1.2.01.02.0012	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembok Duku	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	5,089,985	3 Lembaga	1,058,807	25.00%	20.80%	25.00%	20.80%			Kec. Bubutan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0013	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	4,818,171	1 Lembaga	567,725	14.29%	11.78%	14.29%	11.78%			Kec. Bulak	
	2.1.2.01.02.0014	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	4,562,785	1 Lembaga	513,639	33.33%	11.26%	33.33%	11.26%			Kec. Bulak	
	2.1.2.01.02.0015	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	5,221,926	2 Lembaga	588,367	66.67%	11.27%	66.67%	11.27%			Kec. Bulak	
	2.1.2.01.02.0016	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	5,608,972	2 Lembaga	505,136	28.57%	9.01%	28.57%	9.01%			Kec. Bulak	
	2.1.2.01.02.0017	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	3,220,069	1 Lembaga	203,287	16.67%	6.31%	16.67%	6.31%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.1.2.01.02.0018	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2,960,377	1 Lembaga	369,918	20.00%	12.50%	20.00%	12.50%			Kec. Dukuh Pakis	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0019	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	2,554,293	6 Lembaga	374,302	100.00%	14.65%	100.00%	14.65%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.1.2.01.02.0020	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,422,856	1 Lembaga	330,701	14.29%	9.66%	14.29%	9.66%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.1.2.01.02.0021	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,290,384	41 Lembaga	253,812	455.56%	5.92%	455.56%	5.92%			Kec. Gayungan	
	2.1.2.01.02.0022	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	3,640,097	9 Lembaga	414,544	225.00%	11.39%	225.00%	11.39%			Kec. Gayungan	
	2.1.2.01.02.0023	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketintang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	3,652,368	1 Lembaga	281,323	12.50%	7.70%	12.50%	7.70%			Kec. Gayungan	
	2.1.2.01.02.0024	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	2,087,049	1 Lembaga	219,038	16.67%	10.50%	16.67%	10.50%			Kec. Gayungan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0025	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	2,102,930	5 Lembaga	656,020	125.00%	31.20%	125.00%	31.20%			Kec. Genteng	
	2.1.2.01.02.0026	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	4,214,818	11 Lembaga	263,056	100.00%	6.24%	100.00%	6.24%			Kec. Genteng	
	2.1.2.01.02.0027	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	5,470,368	11 Lembaga	741,772	91.67%	13.56%	91.67%	13.56%			Kec. Genteng	
	2.1.2.01.02.0028	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketabang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	5,104,789	7 Lembaga	379,952	87.50%	7.44%	87.50%	7.44%			Kec. Genteng	
	2.1.2.01.02.0029	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peneleh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					15 Lembaga	4,727,350	18 Lembaga	684,410	120.00%	14.48%	120.00%	14.48%			Kec. Genteng	
	2.1.2.01.02.0030	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airlangga	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	5,883,473	2 Lembaga	389,924	25.00%	6.63%	25.00%	6.63%			Kec. Gubeng	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0031	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baratajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	4,380,775	1 Lembaga	509,903	12.50%	11.64%	12.50%	11.64%			Kec. Gubeng	
	2.1.2.01.02.0032	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gubeng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	2,435,027	1 Lembaga	475,413	33.33%	19.52%	33.33%	19.52%			Kec. Gubeng	
	2.1.2.01.02.0033	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	4,877,055	1 Lembaga	458,001	9.09%	9.39%	9.09%	9.39%			Kec. Gubeng	
	2.1.2.01.02.0034	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	4,693,376	1 Lembaga	488,201	8.33%	10.40%	8.33%	10.40%			Kec. Gubeng	
	2.1.2.01.02.0035	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	3,606,836	1 Lembaga	0	12.50%	0.00%	12.50%	0.00%			Kec. Gubeng	
	2.1.2.01.02.0036	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	3,530,819	17 Lembaga	624,569	212.50%	17.69%	212.50%	17.69%			Kec. Gunung Anyar	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0037	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	3,320,890	9 Lembaga	271,536	112.50%	8.18%	112.50%	8.18%			Kec. Gunung Anyar	
	2.1.2.01.02.0038	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	1,937,886	1 Lembaga	360,643	25.00%	18.61%	25.00%	18.61%			Kec. Gunung Anyar	
	2.1.2.01.02.0039	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	2,973,996	1 Lembaga	0	11.11%	0.00%	11.11%	0.00%			Kec. Gunung Anyar	
	2.1.2.01.02.0040	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	2,999,504	1 Lembaga	0	14.29%	0.00%	14.29%	0.00%			Kec. Jambangan	
	2.1.2.01.02.0041	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	4,590,666	14 Lembaga	306,799	116.67%	6.68%	116.67%	6.68%			Kec. Jambangan	
	2.1.2.01.02.0042	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	2,416,672	5 Lembaga	527,098	166.67%	21.81%	166.67%	21.81%			Kec. Jambangan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0043	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	2,169,708	8 Lembaga	0	200.00%	0.00%	200.00%	0.00%			Kec. Jambangan	
	2.1.2.01.02.0044	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Pilang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	2,126,312	1 Lembaga	0	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%			Kec. Karangpilang	
	2.1.2.01.02.0045	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebron	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	5,121,915	1 Lembaga	327,031	8.33%	6.38%	8.33%	6.38%			Kec. Karangpilang	
	2.1.2.01.02.0046	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedurus	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	3,453,452	1 Lembaga	478,291	9.09%	13.85%	9.09%	13.85%			Kec. Karangpilang	
	2.1.2.01.02.0047	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Waru Gunung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	1,988,300	1 Lembaga	0	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%			Kec. Karangpilang	
	2.1.2.01.02.0048	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	4,292,388	1 Lembaga	760,617	12.50%	17.72%	12.50%	17.72%			Kec. Kenjeran	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0049	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					2 Lembaga	3,665,799	3 Lembaga	823,030	150.00%	22.45%	150.00%	22.45%			Kec. Kenjeran	
	2.1.2.01.02.0050	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2,520,566	2 Lembaga	519,273	40.00%	20.60%	40.00%	20.60%			Kec. Kenjeran	
	2.1.2.01.02.0051	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	6,174,231	1 Lembaga	1,169,986	10.00%	18.95%	10.00%	18.95%			Kec. Kenjeran	
	2.1.2.01.02.0052	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dupak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	3,424,996	1 Lembaga	899,882	20.00%	26.27%	20.00%	26.27%			Kec. Krembangan	
	2.1.2.01.02.0053	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemayoran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	5,223,512	1 Lembaga	772,260	12.50%	14.78%	12.50%	14.78%			Kec. Krembangan	
	2.1.2.01.02.0054	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 Lembaga	6,046,784	2 Lembaga	0	15.38%	0.00%	15.38%	0.00%			Kec. Krembangan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0055	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	3,973,332	1 Lembaga	0	12.50%	0.00%	12.50%	0.00%			Kec. Krembangan	
	2.1.2.01.02.0056	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Barat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,654,633	1 Lembaga	224,258	14.29%	6.14%	14.29%	6.14%			Kec. Krembangan	
	2.1.2.01.02.0057	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkingan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2,355,680	9 Lembaga	387,318	180.00%	16.44%	180.00%	16.44%			Kec. Lakarsantri	
	2.1.2.01.02.0058	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jeruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	2,176,889	3 Lembaga	729,757	100.00%	33.52%	100.00%	33.52%			Kec. Lakarsantri	
	2.1.2.01.02.0059	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakarsantri	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	2,548,155	1 Lembaga	0	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%			Kec. Lakarsantri	
	2.1.2.01.02.0060	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,866,207	4 Lembaga	671,934	57.14%	17.38%	57.14%	17.38%			Kec. Lakarsantri	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0061	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2,785,388	3 Lembaga	0	60.00%	0.00%	60.00%	0.00%			Kec. Lakarsantri	
	2.1.2.01.02.0062	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumurwelut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					3 Lembaga	1,948,751	4 Lembaga	323,647	133.33%	16.61%	133.33%	16.61%			Kec. Lakarsantri	
	2.1.2.01.02.0063	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	3,849,723	8 Lembaga	0	80.00%	0.00%	80.00%	0.00%			Kec. Mulyorejo	
	2.1.2.01.02.0064	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalijudan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	5,791,251	1 Lembaga	334,651	10.00%	5.78%	10.00%	5.78%			Kec. Mulyorejo	
	2.1.2.01.02.0065	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	3,787,612	2 Lembaga	0	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%			Kec. Mulyorejo	
	2.1.2.01.02.0066	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	1,914,524	2 Lembaga	247,836	50.00%	12.95%	50.00%	12.95%			Kec. Mulyorejo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0067	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 Lembaga	5,711,066	1 Lembaga	0	7.69%	0.00%	7.69%	0.00%			Kec. Mulyorejo	
	2.1.2.01.02.0068	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	4,098,862	1 Lembaga	318,661	9.09%	7.77%	9.09%	7.77%			Kec. Mulyorejo	
	2.1.2.01.02.0069	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	4,176,412	10 Lembaga	366,089	100.00%	8.77%	100.00%	8.77%			Kec. Pabean Cantian	
	2.1.2.01.02.0070	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	5,047,587	10 Lembaga	1,184,667	100.00%	23.47%	100.00%	23.47%			Kec. Pabean Cantian	
	2.1.2.01.02.0071	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyamplungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	6,979,204	2 Lembaga	418,482	25.00%	6.00%	25.00%	6.00%			Kec. Pabean Cantian	
	2.1.2.01.02.0072	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,226,661	1 Lembaga	462,608	11.11%	10.94%	11.11%	10.94%			Kec. Pabean Cantian	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0073	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	3,727,799	2 Lembaga	486,900	20.00%	13.06%	20.00%	13.06%			Kec. Pabean Cantian	
	2.1.2.01.02.0074	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	4,733,250	1 Lembaga	522,002	10.00%	11.03%	10.00%	11.03%			Kec. Pakal	
	2.1.2.01.02.0075	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2,835,869	1 Lembaga	435,889	20.00%	15.37%	20.00%	15.37%			Kec. Pakal	
	2.1.2.01.02.0076	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	2,656,057	1 Lembaga	399,515	16.67%	15.04%	16.67%	15.04%			Kec. Pakal	
	2.1.2.01.02.0077	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	3,663,305	1 Lembaga	0	12.50%	0.00%	12.50%	0.00%			Kec. Pakal	
	2.1.2.01.02.0078	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirungkut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 Lembaga	6,861,211	1 Lembaga	457,366	7.69%	6.67%	7.69%	6.67%			Kec. Rungkut	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0079	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	4,113,540	2 Lembaga	479,522	20.00%	11.66%	20.00%	11.66%			Kec. Rungkut	
	2.1.2.01.02.0080	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					15 Lembaga	6,494,996	1 Lembaga	482,241	6.67%	7.42%	6.67%	7.42%			Kec. Rungkut	
	2.1.2.01.02.0081	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penjaringan Sari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					15 Lembaga	4,965,833	1 Lembaga	0	6.67%	0.00%	6.67%	0.00%			Kec. Rungkut	
	2.1.2.01.02.0082	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	3,909,353	1 Lembaga	416,303	8.33%	10.65%	8.33%	10.65%			Kec. Rungkut	
	2.1.2.01.02.0083	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	4,955,526	1 Lembaga	0	9.09%	0.00%	9.09%	0.00%			Kec. Rungkut	
	2.1.2.01.02.0084	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bringin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	2,018,528	2 Lembaga	262,805	50.00%	13.02%	50.00%	13.02%			Kec. Sambikerep	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0085	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	6,847,325	1 Lembaga	0	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%			Kec. Sambikerep	
	2.1.2.01.02.0086	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Made	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	4,300,052	1 Lembaga	332,942	14.29%	7.74%	14.29%	7.74%			Kec. Sambikerep	
	2.1.2.01.02.0087	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambikerep	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	5,743,688	1 Lembaga	0	14.29%	0.00%	14.29%	0.00%			Kec. Sambikerep	
	2.1.2.01.02.0088	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyu Urip	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,644,405	9 Lembaga	1,250,445	100.00%	26.92%	100.00%	26.92%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.02.0089	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,586,267	7 Lembaga	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.02.0090	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	4,411,591	10 Lembaga	828,228	83.33%	18.77%	83.33%	18.77%			Kec. Sawahan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0091	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petemon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					18 Lembaga	7,206,112	24 Lembaga	0	133.33%	0.00%	133.33%	0.00%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.02.0092	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Jaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	6,099,561	15 Lembaga	1,108,570	107.14%	18.17%	107.14%	18.17%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.02.0093	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	4,120,565	11 Lembaga	666,870	110.00%	16.18%	110.00%	16.18%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.02.0094	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					17 Lembaga	7,045,704	16 Lembaga	582,701	94.12%	8.27%	94.12%	8.27%			Kec. Semampir	
	2.1.2.01.02.0095	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	4,644,574	22 Lembaga	984,244	200.00%	21.19%	200.00%	21.19%			Kec. Semampir	
	2.1.2.01.02.0096	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	6,699,220	12 Lembaga	985,861	109.09%	14.72%	109.09%	14.72%			Kec. Semampir	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0097	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	5,991,977	14 Lembaga	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Kec. Semampir	
	2.1.2.01.02.0098	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					16 Lembaga	7,523,021	16 Lembaga	1,218,432	100.00%	16.20%	100.00%	16.20%			Kec. Semampir	
	2.1.2.01.02.0099	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	3,909,204	1 Lembaga	623,752	10.00%	15.96%	10.00%	15.96%			Kec. Simokerto	
	2.1.2.01.02.0100	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,782,835	2 Lembaga	1,104,492	28.57%	29.20%	28.57%	29.20%			Kec. Simokerto	
	2.1.2.01.02.0101	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	5,781,898	1 Lembaga	618,784	7.14%	10.70%	7.14%	10.70%			Kec. Simokerto	
	2.1.2.01.02.0102	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simolawang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	4,424,565	1 Lembaga	1,183,015	10.00%	26.74%	10.00%	26.74%			Kec. Simokerto	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0103	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	4,369,731	1 Lembaga	602,244	9.09%	13.78%	9.09%	13.78%			Kec. Simokerto	
	2.1.2.01.02.0104	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gebang Putih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,052,322	1 Lembaga	353,885	14.29%	11.59%	14.29%	11.59%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.02.0105	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	3,682,544	1 Lembaga	0	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.02.0106	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,375,762	2 Lembaga	631,923	22.22%	14.44%	22.22%	14.44%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.02.0107	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,509,051	1 Lembaga	0	11.11%	0.00%	11.11%	0.00%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.02.0108	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	2,973,093	1 Lembaga	429,480	11.11%	14.45%	11.11%	14.45%			Kec. Sukolilo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0109	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,091,704	1 Lembaga	367,856	11.11%	8.99%	11.11%	8.99%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.02.0110	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 Lembaga	4,727,736	1 Lembaga	260,234	7.69%	5.50%	7.69%	5.50%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.02.0111	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Gede	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	1,879,462	2 Lembaga	184,532	50.00%	9.82%	50.00%	9.82%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.02.0112	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,680,429	1 Lembaga	364,093	14.29%	9.89%	14.29%	9.89%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.02.0113	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	5,259,181	2 Lembaga	649,016	20.00%	12.34%	20.00%	12.34%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.02.0114	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	2,501,961	1 Lembaga	172,714	25.00%	6.90%	25.00%	6.90%			Kec. Sukomanunggal	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0115	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2,688,199	1 Lembaga	527,902	20.00%	19.64%	20.00%	19.64%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.02.0116	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	2,344,232	1 Lembaga	384,843	25.00%	16.42%	25.00%	16.42%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.02.0117	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2,616,094	5 Lembaga	264,336	100.00%	10.10%	100.00%	10.10%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.02.0118	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gading	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	5,132,727	1 Lembaga	0	9.09%	0.00%	9.09%	0.00%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.02.0119	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,547,660	9 Lembaga	996,503	100.00%	21.91%	100.00%	21.91%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.02.0120	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkeling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	5,648,299	3 Lembaga	621,124	27.27%	11.00%	27.27%	11.00%			Kec. Tambaksari	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0121	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkembang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	5,485,871	1 Lembaga	0	9.09%	0.00%	9.09%	0.00%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.02.0122	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ploso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	5,854,908	1 Lembaga	0	9.09%	0.00%	9.09%	0.00%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.02.0123	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rangkah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	3,739,052	3 Lembaga	0	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.02.0124	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaksari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	5,256,987	1 Lembaga	1,267,978	11.11%	24.12%	11.11%	24.12%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.02.0125	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balongsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,019,253	1 Lembaga	352,747	14.29%	11.68%	14.29%	11.68%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.02.0126	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					4 Lembaga	2,265,438	1 Lembaga	375,666	25.00%	16.58%	25.00%	16.58%			Kec. Tandes	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0127	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Poh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,156,705	2 Lembaga	486,230	22.22%	11.70%	22.22%	11.70%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.02.0128	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	5,791,571	4 Lembaga	682,811	28.57%	11.79%	28.57%	11.79%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.02.0129	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	3,160,494	1 Lembaga	365,522	16.67%	11.57%	16.67%	11.57%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.02.0130	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tandes	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,010,988	1 Lembaga	0	11.11%	0.00%	11.11%	0.00%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.02.0131	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					14 Lembaga	6,588,069	16 Lembaga	0	114.29%	0.00%	114.29%	0.00%			Kec. Tegalsari	
	2.1.2.01.02.0132	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungdoro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	5,740,631	10 Lembaga	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			Kec. Tegalsari	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0133	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	3,547,427	7 Lembaga	0	116.67%	0.00%	116.67%	0.00%			Kec. Tegalsari	
	2.1.2.01.02.0134	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	4,573,720	7 Lembaga	875,048	116.67%	19.13%	116.67%	19.13%			Kec. Tegalsari	
	2.1.2.01.02.0135	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	5,314,960	11 Lembaga	709,256	100.00%	13.34%	100.00%	13.34%			Kec. Tegalsari	
	2.1.2.01.02.0136	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendangsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2,566,295	1 Lembaga	585,503	20.00%	22.82%	20.00%	22.82%			Kec. Tenggilis Mejoyo	
	2.1.2.01.02.0137	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	2,616,209	1 Lembaga	333,984	16.67%	12.77%	16.67%	12.77%			Kec. Tenggilis Mejoyo	
	2.1.2.01.02.0138	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	3,413,964	2 Lembaga	0	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%			Kec. Tenggilis Mejoyo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0139	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	3,224,209	1 Lembaga	0	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%			Kec. Tenggilis Mejoyo	
	2.1.2.01.02.0140	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	4,700,916	2 Lembaga	742,777	25.00%	15.80%	25.00%	15.80%			Kec. Wiyung	
	2.1.2.01.02.0141	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	3,170,388	1 Lembaga	0	11.11%	0.00%	11.11%	0.00%			Kec. Wiyung	
	2.1.2.01.02.0142	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2,702,980	1 Lembaga	0	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%			Kec. Wiyung	
	2.1.2.01.02.0143	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiyung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	4,540,258	1 Lembaga	0	9.09%	0.00%	9.09%	0.00%			Kec. Wiyung	
	2.1.2.01.02.0144	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 Lembaga	5,200,227	30 Lembaga	0	230.77%	0.00%	230.77%	0.00%			Kec. Wonocolo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0145	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	5,292,538	69 Lembaga	0	766.67%	0.00%	766.67%	0.00%			Kec. Wonocolo	
	2.1.2.01.02.0146	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					10 Lembaga	3,611,674	28 Lembaga	0	280.00%	0.00%	280.00%	0.00%			Kec. Wonocolo	
	2.1.2.01.02.0147	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosemo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	3,741,617	42 Lembaga	0	700.00%	0.00%	700.00%	0.00%			Kec. Wonocolo	
	2.1.2.01.02.0148	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3,220,799	1 Lembaga	0	14.29%	0.00%	14.29%	0.00%			Kec. Wonocolo	
	2.1.2.01.02.0149	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Darmo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	3,308,763	10 Lembaga	0	90.91%	0.00%	90.91%	0.00%			Kec. Wonokromo	
	2.1.2.01.02.0150	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	5,302,961	1 Lembaga	777,296	9.09%	14.66%	9.09%	14.66%			Kec. Wonokromo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.02.0151	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2,538,724	1 Lembaga	582,216	20.00%	22.93%	20.00%	22.93%			Kec. Wonokromo	
	2.1.2.01.02.0152	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	6,906,671	1 Lembaga	0	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%			Kec. Wonokromo	
	2.1.2.01.02.0153	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawunggaling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					12 Lembaga	5,571,470	1 Lembaga	0	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%			Kec. Wonokromo	
	2.1.2.01.02.0154	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokromo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4,955,068	1 Lembaga	1,246,464	11.11%	25.16%	11.11%	25.16%			Kec. Wonokromo	
172	2.1.2.01.03	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat			67,363,471		N/A		85,564,783		38,417,980		44.90%		38,417,980		57.03%		
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100%		N/A		100%		40.19%		40.19%		40.19%		40.19%		-	
	2.1.2.01.03.0001	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					139 Lembaga	1,195,871	139 Lembaga	524,976	100.00%	43.90%	100.00%	43.90%			Kec. Asemrowo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.03.0002	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	126,157	16 Kali	19,248	33.33%	15.26%	33.33%	15.26%			Kec. Asemrowo	
	2.1.2.01.03.0003	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					183 Lembaga	1,412,549	184 Lembaga	674,938	100.55%	47.78%	100.55%	47.78%			Kec. Benowo	
	2.1.2.01.03.0004	Pengembangan Kampung Edukasi (Jamur, Angrek dan Hidroponik)	Pengembangan Kampung Edukasi					3 kali	75,037	0 kali	10,744	0.00%	14.32%	0.00%	14.32%			Kec. Benowo	
	2.1.2.01.03.0005	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	172,537	24 Kali	13,624	50.00%	7.90%	50.00%	7.90%			Kec. Benowo	
	2.1.2.01.03.0006	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					414 Lembaga	3,079,344	426 Lembaga	1,452,533	102.90%	47.17%	102.90%	47.17%			Kec. Bubutan	
	2.1.2.01.03.0007	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	60,860	20 Kali	11,856	41.67%	19.48%	41.67%	19.48%			Kec. Bubutan	
	2.1.2.01.03.0008	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					157 Lembaga	1,355,692	159 Lembaga	585,953	101.27%	43.22%	101.27%	43.22%			Kec. Bulak	
	2.1.2.01.03.0009	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	122,140	24 Kali	25,148	50.00%	20.59%	50.00%	20.59%			Kec. Bulak	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.03.0010	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					195 Lembaga	1,625,601	199 Lembaga	722,614	102.05%	44.45%	102.05%	44.45%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.1.2.01.03.0011	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	131,239	16 Kali	24,600	33.33%	18.74%	33.33%	18.74%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.1.2.01.03.0012	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					197 Lembaga	1,599,290	197 Lembaga	715,577	100.00%	44.74%	100.00%	44.74%			Kec. Gayungan	
	2.1.2.01.03.0013	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	129,580	24 Kali	24,664	50.00%	19.03%	50.00%	19.03%			Kec. Gayungan	
	2.1.2.01.03.0014	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					364 Lembaga	2,749,169	365 Lembaga	1,088,490	100.27%	39.59%	100.27%	39.59%			Kec. Genteng	
	2.1.2.01.03.0015	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	74,179	18 Kali	13,528	37.50%	18.24%	37.50%	18.24%			Kec. Genteng	
	2.1.2.01.03.0016	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					488 Lembaga	3,554,076	481 Lembaga	1,682,608	98.57%	47.34%	98.57%	47.34%			Kec. Gubeng	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.03.0017	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	135,447	24 Kali	25,680	50.00%	18.96%	50.00%	18.96%			Kec. Gubeng	
	2.1.2.01.03.0018	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					215 Lembaga	1,683,606	217 Lembaga	771,837	100.93%	45.84%	100.93%	45.84%			Kec. Gunung Anyar	
	2.1.2.01.03.0019	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	175,385	26 Kali	33,072	54.17%	18.86%	54.17%	18.86%			Kec. Gunung Anyar	
	2.1.2.01.03.0020	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					168 Lembaga	1,393,544	173 Lembaga	623,878	102.98%	44.77%	102.98%	44.77%			Kec. Jambangan	
	2.1.2.01.03.0021	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	69,980	28 Kali	13,692	58.33%	19.57%	58.33%	19.57%			Kec. Jambangan	
	2.1.2.01.03.0022	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					220 Lembaga	1,777,264	220 Lembaga	801,773	100.00%	45.11%	100.00%	45.11%			Kec. Karangpilang	
	2.1.2.01.03.0023	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	129,580	16 Kali	24,328	33.33%	18.77%	33.33%	18.77%			Kec. Karangpilang	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.03.0024	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					456 Lembaga	3,401,971	460 Lembaga	1,605,700	100.88%	47.20%	100.88%	47.20%			Kec. Kenjeran	
	2.1.2.01.03.0025	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	165,743	16 Kali	29,988	33.33%	18.09%	33.33%	18.09%			Kec. Kenjeran	
	2.1.2.01.03.0026	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					430 Lembaga	3,206,548	430 Lembaga	1,517,893	100.00%	47.34%	100.00%	47.34%			Kec. Krembangan	
	2.1.2.01.03.0027	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	161,362	16 Kali	29,940	33.33%	18.55%	33.33%	18.55%			Kec. Krembangan	
	2.1.2.01.03.0028	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					199 Lembaga	1,622,199	200 Lembaga	729,972	100.50%	45.00%	100.50%	45.00%			Kec. Lakarsantri	
	2.1.2.01.03.0029	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	169,353	24 Kali	24,688	50.00%	14.58%	50.00%	14.58%			Kec. Lakarsantri	
	2.1.2.01.03.0030	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					347 Lembaga	2,673,233	348 Lembaga	1,241,779	100.29%	46.45%	100.29%	46.45%			Kec. Mulyorejo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.03.0031	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	137,490	16 Kali	25,684	33.33%	18.68%	33.33%	18.68%			Kec. Mulyorejo	
	2.1.2.01.03.0032	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					377 Lembaga	2,836,011	377 Lembaga	1,330,286	100.00%	46.91%	100.00%	46.91%			Kec. Pabean Cantian	
	2.1.2.01.03.0033	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	132,934	24 Kali	27,332	50.00%	20.56%	50.00%	20.56%			Kec. Pabean Cantian	
	2.1.2.01.03.0034	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					226 Lembaga	1,804,702	226 Lembaga	819,863	100.00%	45.43%	100.00%	45.43%			Kec. Pakal	
	2.1.2.01.03.0035	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	121,939	20 Kali	26,784	41.67%	21.97%	41.67%	21.97%			Kec. Pakal	
	2.1.2.01.03.0036	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					488 Lembaga	3,646,650	488 Lembaga	1,729,984	100.00%	47.44%	100.00%	47.44%			Kec. Rungkut	
	2.1.2.01.03.0037	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	166,404	24 Kali	32,704	50.00%	19.65%	50.00%	19.65%			Kec. Rungkut	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.03.0038	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					250 Lembaga	1,980,189	261 Lembaga	931,804	104.40%	47.06%	104.40%	47.06%			Kec. Sambikerep	
	2.1.2.01.03.0039	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	133,429	24 Kali	27,968	50.00%	20.96%	50.00%	20.96%			Kec. Sambikerep	
	2.1.2.01.03.0040	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					627 Lembaga	4,835,350	627 Lembaga	2,232,661	100.00%	46.17%	100.00%	46.17%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.03.0041	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	138,721	12 Kali	25,696	25.00%	18.52%	25.00%	18.52%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.03.0042	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					636 Lembaga	4,640,968	636 Lembaga	2,221,749	100.00%	47.87%	100.00%	47.87%			Kec. Semampir	
	2.1.2.01.03.0043	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	131,428	24 Kali	24,680	50.00%	18.78%	50.00%	18.78%			Kec. Semampir	
	2.1.2.01.03.0044	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					356 Lembaga	2,679,758	356 Lembaga	1,261,614	100.00%	47.08%	100.00%	47.08%			Kec. Simokerto	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.03.0045	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	72,093	12 Kali	11,928	25.00%	16.55%	25.00%	16.55%			Kec. Simokerto	
	2.1.2.01.03.0046	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					439 Lembaga	3,397,717	440 Lembaga	1,571,133	100.23%	46.24%	100.23%	46.24%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.03.0047	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	135,536	30 Kali	27,302	62.50%	20.14%	62.50%	20.14%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.03.0048	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					323 Lembaga	2,425,328	324 Lembaga	1,137,953	100.31%	46.92%	100.31%	46.92%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.03.0049	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	126,966	16 Kali	24,204	33.33%	19.06%	33.33%	19.06%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.03.0050	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					749 Lembaga	5,452,257	749 Lembaga	2,612,987	100.00%	47.92%	100.00%	47.92%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.03.0051	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	137,745	10 Kali	25,868	20.83%	18.78%	20.83%	18.78%			Kec. Tambaksari	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.03.0052	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					371 Lembaga	2,890,449	371 Lembaga	1,341,488	100.00%	46.41%	100.00%	46.41%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.03.0053	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	133,423	12 Kali	25,064	25.00%	18.79%	25.00%	18.79%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.03.0054	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					366 Lembaga	2,817,935	370 Lembaga	1,295,700	101.09%	45.98%	101.09%	45.98%			Kec. Tegalsari	
	2.1.2.01.03.0055	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	59,188	14 Kali	11,588	29.17%	19.58%	29.17%	19.58%			Kec. Tegalsari	
	2.1.2.01.03.0056	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					176 Lembaga	1,464,150	185 Lembaga	661,980	105.11%	45.21%	105.11%	45.21%			Kec. Tenggilis Mejorjo	
	2.1.2.01.03.0057	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	157,333	16 Kali	23,604	33.33%	15.00%	33.33%	15.00%			Kec. Tenggilis Mejorjo	
	2.1.2.01.03.0058	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					210 Lembaga	1,837,347	211 Lembaga	791,633	100.48%	43.09%	100.48%	43.09%			Kec. Wiyung	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.03.0059	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	131,973	16 Kali	24,464	33.33%	18.54%	33.33%	18.54%			Kec. Wiyung	
	2.1.2.01.03.0060	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					278 Lembaga	2,152,904	281 Lembaga	1,003,224	101.08%	46.60%	101.08%	46.60%			Kec. Wonocolo	
	2.1.2.01.03.0061	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	132,142	24 Kali	24,992	50.00%	18.91%	50.00%	18.91%			Kec. Wonocolo	
	2.1.2.01.03.0062	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					574 Lembaga	4,291,160	571 Lembaga	1,992,972	99.48%	46.44%	99.48%	46.44%			Kec. Wonokromo	
	2.1.2.01.03.0063	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	134,634	24 Kali	25,764	50.00%	19.14%	50.00%	19.14%			Kec. Wonokromo	
173	2.1.2.01.04	Program Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD			3,716,522		N/A		3,908,387		524,096		13.41%		524,096		14.10%		
			Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.1.2.01.04.0001	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD					38 kali	3,908,387	11 kali	524,096	28.95%	13.41%	28.95%	13.41%			Sekretariat DPRD	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
174	2.1.2.01.05	Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat			17,396,696		N/A		7,149,389		1,256,126		17.57%		1,256,126		7.22%		
			Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100%		N/A		100%		65.21%		65.21%		65.21%		65.21%		-	
			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%		100,60 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.1.2.01.05.0001	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	217,831	31 Kali	35,016	26.72%	16.07%	26.72%	16.07%			Kec. Asemrowo	
	2.1.2.01.05.0004	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	241,105	24 Kali	47,360	20.69%	19.64%	20.69%	19.64%			Kec. Benowo	
	2.1.2.01.05.0007	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	240,898	53 Kali	41,998	45.69%	17.43%	45.69%	17.43%			Kec. Bubutan	
	2.1.2.01.05.0010	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	228,500	45 Kali	43,536	38.79%	19.05%	38.79%	19.05%			Kec. Bulak	
	2.1.2.01.05.0013	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	236,740	20 Kali	31,930	17.24%	13.49%	17.24%	13.49%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.1.2.01.05.0016	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	284,960	38 Kali	65,506	32.76%	22.99%	32.76%	22.99%			Kec. Gayungan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.05.0019	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	224,558	9 Kali	26,370	7.76%	11.74%	7.76%	11.74%			Kec. Genteng	
	2.1.2.01.05.0022	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	218,067	9 Kali	33,340	7.76%	15.29%	7.76%	15.29%			Kec. Gubeng	
	2.1.2.01.05.0025	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	253,100	56 Kali	48,142	48.28%	19.02%	48.28%	19.02%			Kec. Gunung Anyar	
	2.1.2.01.05.0028	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	200,240	56 Kali	39,020	48.28%	19.49%	48.28%	19.49%			Kec. Jambangan	
	2.1.2.01.05.0031	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	201,140	16 Kali	33,282	13.79%	16.55%	13.79%	16.55%			Kec. Karangpilang	
	2.1.2.01.05.0034	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	267,479	36 Kali	44,754	31.03%	16.73%	31.03%	16.73%			Kec. Kenjeran	
	2.1.2.01.05.0037	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	236,562	24 Kali	41,382	20.69%	17.49%	20.69%	17.49%			Kec. Krembangan	
	2.1.2.01.05.0040	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	258,836	56 Kali	37,046	48.28%	14.31%	48.28%	14.31%			Kec. Lakarsantri	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.05.0043	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	220,110	24 Kali	31,724	20.69%	14.41%	20.69%	14.41%			Kec. Mulyorejo	
	2.1.2.01.05.0046	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	247,697	57 Kali	43,666	49.14%	17.63%	49.14%	17.63%			Kec. Pabean Cantian	
	2.1.2.01.05.0049	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	189,599	33 Kali	31,370	28.45%	16.55%	28.45%	16.55%			Kec. Pakal	
	2.1.2.01.05.0052	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	251,544	47 Kali	51,388	40.52%	20.43%	40.52%	20.43%			Kec. Rungkut	
	2.1.2.01.05.0055	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	241,341	38 Kali	40,712	32.76%	16.87%	32.76%	16.87%			Kec. Sambikerep	
	2.1.2.01.05.0058	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	269,881	29 Kali	44,532	25.00%	16.50%	25.00%	16.50%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.05.0061	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	181,128	36 Kali	33,072	31.03%	18.26%	31.03%	18.26%			Kec. Semampir	
	2.1.2.01.05.0064	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	206,401	60 Kali	36,050	51.72%	17.47%	51.72%	17.47%			Kec. Simokerto	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.05.0067	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	259,056	36 Kali	51,680	31.03%	19.95%	31.03%	19.95%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.05.0070	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	213,306	30 Kali	17,604	25.86%	8.25%	25.86%	8.25%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.05.0073	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	236,045	30 Kali	48,472	25.86%	20.54%	25.86%	20.54%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.05.0076	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	248,683	35 Kali	53,136	30.17%	21.37%	30.17%	21.37%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.05.0079	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	207,408	24 Kali	30,318	20.69%	14.62%	20.69%	14.62%			Kec. Tegalsari	
	2.1.2.01.05.0082	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	195,896	7 Kali	32,588	6.03%	16.64%	6.03%	16.64%			Kec. Tenggilis Mejoyo	
	2.1.2.01.05.0085	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	199,633	20 Kali	31,956	17.24%	16.01%	17.24%	16.01%			Kec. Wiyung	
	2.1.2.01.05.0088	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	214,362	59 Kali	52,928	50.86%	24.69%	50.86%	24.69%			Kec. Wonocolo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.05.0091	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	257,284	58 Kali	56,248	50.00%	21.86%	50.00%	21.86%			Kec. Wonokromo	
175	2.1.2.01.06	Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah			23,284,768		N/A		19,199,722		4,177,219		21.76%		4,177,219		17.94%		
			Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100%		N/A		100%		63.19%		63.19%		63.19%		63.19%		-	
	2.1.2.01.06.0001	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	375,642	180 kali	85,163	50.00%	22.67%	50.00%	22.67%			Kec. Asemrowo	
	2.1.2.01.06.0002	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	76,771	20 Kali	14,904	33.33%	19.41%	33.33%	19.41%			Kec. Asemrowo	
	2.1.2.01.06.0004	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	69,421	4 lembaga	12,984	100.00%	18.70%	100.00%	18.70%			Kec. Asemrowo	
	2.1.2.01.06.0005	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	360,427	180 kali	104,740	50.00%	29.06%	50.00%	29.06%			Kec. Benowo	
	2.1.2.01.06.0006	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	83,829	20 Kali	14,804	33.33%	17.66%	33.33%	17.66%			Kec. Benowo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0008	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	70,297	4 lembaga	14,178	100.00%	20.17%	100.00%	20.17%			Kec. Benowo	
	2.1.2.01.06.0009	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	436,108	183 kali	105,588	50.83%	24.21%	50.83%	24.21%			Kec. Bubutan	
	2.1.2.01.06.0010	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	64,460	30 Kali	12,756	50.00%	19.79%	50.00%	19.79%			Kec. Bubutan	
	2.1.2.01.06.0012	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	54,440	4 lembaga	12,876	100.00%	23.65%	100.00%	23.65%			Kec. Bubutan	
	2.1.2.01.06.0013	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	645,509	183 kali	128,386	50.83%	19.89%	50.83%	19.89%			Kec. Bulak	
	2.1.2.01.06.0014	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	92,860	30 Kali	19,568	50.00%	21.07%	50.00%	21.07%			Kec. Bulak	
	2.1.2.01.06.0016	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan .					4 Lembaga	82,720	4 Lembaga	15,248	100.00%	18.43%	100.00%	18.43%			Kec. Bulak	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0017	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	361,925	179 kali	92,450	49.72%	25.54%	49.72%	25.54%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.1.2.01.06.0018	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	81,064	24 Kali	15,632	40.00%	19.28%	40.00%	19.28%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.1.2.01.06.0020	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	72,454	4 lembaga	13,682	100.00%	18.88%	100.00%	18.88%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.1.2.01.06.0021	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	464,789	180 kali	105,500	50.00%	22.70%	50.00%	22.70%			Kec. Gayungan	
	2.1.2.01.06.0022	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	74,020	20 kali	15,636	33.33%	21.12%	33.33%	21.12%			Kec. Gayungan	
	2.1.2.01.06.0024	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	65,260	4 lembaga	15,036	100.00%	23.04%	100.00%	23.04%			Kec. Gayungan	
	2.1.2.01.06.0025	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	513,218	180 kali	123,037	50.00%	23.97%	50.00%	23.97%			Kec. Genteng	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0026	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	77,779	22 Kali	14,428	36.67%	18.55%	36.67%	18.55%			Kec. Genteng	
	2.1.2.01.06.0028	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	70,399	4 lembaga	11,428	100.00%	16.23%	100.00%	16.23%			Kec. Genteng	
	2.1.2.01.06.0029	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	473,560	180 kali	110,927	50.00%	23.42%	50.00%	23.42%			Kec. Gubeng	
	2.1.2.01.06.0030	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	80,308	30 Kali	15,684	50.00%	19.53%	50.00%	19.53%			Kec. Gubeng	
	2.1.2.01.06.0032	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	68,278	4 lembaga	13,284	100.00%	19.46%	100.00%	19.46%			Kec. Gubeng	
	2.1.2.01.06.0033	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	373,624	204 kali	83,611	50.00%	22.38%	50.00%	22.38%			Kec. Gunung Anyar	
	2.1.2.01.06.0034	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	80,222	20 Kali	11,400	33.33%	14.21%	33.33%	14.21%			Kec. Gunung Anyar	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0036	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	69,542	4 lembaga	11,670	100.00%	16.78%	100.00%	16.78%			Kec. Gunung Anyar	
	2.1.2.01.06.0037	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	429,269	181 kali	99,966	50.28%	23.29%	50.28%	23.29%			Kec. Jambangan	
	2.1.2.01.06.0038	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	72,860	20 Kali	13,212	33.33%	18.13%	33.33%	18.13%			Kec. Jambangan	
	2.1.2.01.06.0040	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	63,500	4 lembaga	15,852	100.00%	24.96%	100.00%	24.96%			Kec. Jambangan	
	2.1.2.01.06.0041	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	520,439	139 kali	117,949	38.61%	22.66%	38.61%	22.66%			Kec. Karangpilang	
	2.1.2.01.06.0042	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	80,140	24 Kali	16,344	40.00%	20.39%	40.00%	20.39%			Kec. Karangpilang	
	2.1.2.01.06.0044	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	71,170	4 lembaga	13,374	100.00%	18.79%	100.00%	18.79%			Kec. Karangpilang	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0045	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	476,981	180 kali	110,998	50.00%	23.27%	50.00%	23.27%			Kec. Kenjeran	
	2.1.2.01.06.0046	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	81,570	20 Kali	15,644	33.33%	19.18%	33.33%	19.18%			Kec. Kenjeran	
	2.1.2.01.06.0048	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	71,760	4 lembaga	16,634	100.00%	23.18%	100.00%	23.18%			Kec. Kenjeran	
	2.1.2.01.06.0049	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	327,672	180 kali	85,572	50.00%	26.12%	50.00%	26.12%			Kec. Krembangan	
	2.1.2.01.06.0050	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 kali	82,785	20 kali	16,288	33.33%	19.68%	33.33%	19.68%			Kec. Krembangan	
	2.1.2.01.06.0052	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan					4 lembaga	72,705	4 lembaga	13,288	100.00%	18.28%	100.00%	18.28%			Kec. Krembangan	
	2.1.2.01.06.0053	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	334,068	180 kali	74,239	50.00%	22.22%	50.00%	22.22%			Kec. Lakarsantri	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0054	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	88,122	40 Kali	14,028	66.67%	15.92%	66.67%	15.92%			Kec. Lakarsantri	
	2.1.2.01.06.0056	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	72,642	4 lembaga	14,808	100.00%	20.38%	100.00%	20.38%			Kec. Lakarsantri	
	2.1.2.01.06.0057	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	548,898	182 kali	107,283	44.61%	19.55%	44.61%	19.55%			Kec. Mulyorejo	
	2.1.2.01.06.0058	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	119,206	20 Kali	22,708	33.33%	19.05%	33.33%	19.05%			Kec. Mulyorejo	
	2.1.2.01.06.0060	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	103,606	4 lembaga	23,308	100.00%	22.50%	100.00%	22.50%			Kec. Mulyorejo	
	2.1.2.01.06.0061	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	289,142	182 kali	79,029	50.56%	27.33%	50.56%	27.33%			Kec. Pabean Cantian	
	2.1.2.01.06.0062	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	100,192	30 Kali	19,296	50.00%	19.26%	50.00%	19.26%			Kec. Pabean Cantian	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0064	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	91,252	4 lembaga	17,796	100.00%	19.50%	100.00%	19.50%			Kec. Pabean Cantian	
	2.1.2.01.06.0065	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	436,546	180 kali	88,761	50.00%	20.33%	50.00%	20.33%			Kec. Pakal	
	2.1.2.01.06.0066	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	96,430	20 Kali	18,716	33.33%	19.41%	33.33%	19.41%			Kec. Pakal	
	2.1.2.01.06.0068	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	88,270	4 lembaga	16,616	100.00%	18.82%	100.00%	18.82%			Kec. Pakal	
	2.1.2.01.06.0069	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	464,199	204 kali	110,410	50.00%	23.79%	50.00%	23.79%			Kec. Rungkut	
	2.1.2.01.06.0070	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	127,014	30 Kali	21,808	50.00%	17.17%	50.00%	17.17%			Kec. Rungkut	
	2.1.2.01.06.0072	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	118,194	4 lembaga	18,418	100.00%	15.58%	100.00%	15.58%			Kec. Rungkut	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0073	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	449,028	180 kali	96,811	50.00%	21.56%	50.00%	21.56%			Kec. Sambikerep	
	2.1.2.01.06.0074	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	99,259	20 Kali	22,900	33.33%	23.07%	33.33%	23.07%			Kec. Sambikerep	
	2.1.2.01.06.0076	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	91,579	4 lembaga	21,460	100.00%	23.43%	100.00%	23.43%			Kec. Sambikerep	
	2.1.2.01.06.0077	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	419,847	180 kali	97,294	50.00%	23.17%	50.00%	23.17%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.06.0078	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	88,334	20 Kali	17,040	33.33%	19.29%	33.33%	19.29%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.06.0080	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	79,184	4 lembaga	19,230	100.00%	24.29%	100.00%	24.29%			Kec. Sawahan	
	2.1.2.01.06.0081	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	539,117	182 kali	125,015	50.56%	23.19%	50.56%	23.19%			Kec. Semampir	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0082	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	82,708	30 Kali	16,000	50.00%	19.35%	50.00%	19.35%			Kec. Semampir	
	2.1.2.01.06.0084	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	76,648	4 lembaga	14,500	100.00%	18.92%	100.00%	18.92%			Kec. Semampir	
	2.1.2.01.06.0085	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	470,439	156 kali	104,654	43.33%	22.25%	43.33%	22.25%			Kec. Simokerto	
	2.1.2.01.06.0086	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	75,693	30 Kali	12,828	50.00%	16.95%	50.00%	16.95%			Kec. Simokerto	
	2.1.2.01.06.0088	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	66,273	4 lembaga	12,828	100.00%	19.36%	100.00%	19.36%			Kec. Simokerto	
	2.1.2.01.06.0089	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	462,206	204 kali	101,231	50.00%	21.90%	50.00%	21.90%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.06.0090	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	87,056	15 Kali	17,584	25.00%	20.20%	25.00%	20.20%			Kec. Sukolilo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0092	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	73,706	4 lembaga	14,224	100.00%	19.30%	100.00%	19.30%			Kec. Sukolilo	
	2.1.2.01.06.0093	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	568,464	180 kali	116,496	50.00%	20.49%	50.00%	20.49%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.06.0094	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	81,342	20 Kali	15,052	33.33%	18.50%	33.33%	18.50%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.06.0096	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	66,222	4 lembaga	11,812	100.00%	17.84%	100.00%	17.84%			Kec. Sukomanunggal	
	2.1.2.01.06.0097	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	463,834	182 kali	108,599	50.56%	23.41%	50.56%	23.41%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.06.0098	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	108,825	28 Kali	19,948	46.67%	18.33%	46.67%	18.33%			Kec. Tambaksari	
	2.1.2.01.06.0100	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	93,795	4 lembaga	14,548	100.00%	15.51%	100.00%	15.51%			Kec. Tambaksari	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0101	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	443,402	177 kali	103,021	49.17%	23.23%	49.17%	23.23%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.06.0102	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	85,423	30 Kali	17,500	50.00%	20.49%	50.00%	20.49%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.06.0104	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	73,063	4 lembaga	14,230	100.00%	19.48%	100.00%	19.48%			Kec. Tandes	
	2.1.2.01.06.0105	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	473,597	176 kali	106,758	48.89%	22.54%	48.89%	22.54%			Kec. Tegalsari	
	2.1.2.01.06.0106	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	62,788	12 Kali	11,588	20.00%	18.46%	20.00%	18.46%			Kec. Tegalsari	
	2.1.2.01.06.0108	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	53,368	4 lembaga	10,988	100.00%	20.59%	100.00%	20.59%			Kec. Tegalsari	
	2.1.2.01.06.0109	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	468,828	180 kali	92,548	50.00%	19.74%	50.00%	19.74%			Kec. Tenggilis Mejoyo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0110	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	94,001	16 Kali	11,888	26.67%	12.65%	26.67%	12.65%			Kec. Tenggilis Mejoyo	
	2.1.2.01.06.0112	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	84,461	4 lembaga	11,588	100.00%	13.72%	100.00%	13.72%			Kec. Tenggilis Mejoyo	
	2.1.2.01.06.0113	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	347,964	178 kali	94,291	49.44%	27.10%	49.44%	27.10%			Kec. Wiyung	
	2.1.2.01.06.0114	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	98,246	30 Kali	18,664	50.00%	19.00%	50.00%	19.00%			Kec. Wiyung	
	2.1.2.01.06.0116	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	90,086	4 lembaga	16,564	100.00%	18.39%	100.00%	18.39%			Kec. Wiyung	
	2.1.2.01.06.0117	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	506,120	181 kali	96,448	50.28%	19.06%	50.28%	19.06%			Kec. Wonocolo	
	2.1.2.01.06.0118	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifi kasi dan Validasi Data Sarana					60 Kali	83,103	28 Kali	16,068	46.67%	19.34%	46.67%	19.34%			Kec. Wonocolo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.06.0120	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Wonocolo					4 Lembaga	73,083	4 Lembaga	13,068	100.00%	17.88%	100.00%	17.88%			Kec. Wonocolo	
	2.1.2.01.06.0121	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	690,174	181 kali	152,841	50.28%	22.15%	50.28%	22.15%			Kec. Wonokromo	
	2.1.2.01.06.0122	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	86,088	30 Kali	17,104	50.00%	19.87%	50.00%	19.87%			Kec. Wonokromo	
	2.1.2.01.06.0124	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	74,808	4 lembaga	15,064	100.00%	20.14%	100.00%	20.14%			Kec. Wonokromo	
176	2.1.2.01.07	Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD			7,897,835		N/A		9,178,415		939,269		10.23%		939,269		11.89%		
			Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.1.2.01.07.0001	Pembahasan dan Penyusunan Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas					6 dokumen	4,244,776	0 dokumen	237,179	0.00%	5.59%	0.00%	5.59%			Sekretariat DPRD	
	2.1.2.01.07.0002	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan					930 kali	2,774,429	374 kali	514,895	40.22%	18.56%	40.22%	18.56%			Sekretariat DPRD	
	2.1.2.01.07.0003	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan					45 kali	2,159,210	5 kali	187,196	11.11%	8.67%	11.11%	8.67%			Sekretariat DPRD	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
177	2.1.2.01.08	Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD			1,179,293		N/A		1,266,647		437,063		34.51%		437,063		37.06%		
			Persentase BUMD yang berhasil dibina	78%		N/A		67%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	2.1.2.01.08.0001	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi					9 BUMD	1,266,647	0 BUMD	437,063	0.00%	34.51%	0.00%	34.51%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	
178	2.1.2.01.09	Program Penataan Daerah Otonom			5,108,645		72,095,112		6,514,523		1,400,120		21.49%		1,400,120		27.41%		
			Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%		100,00 %		100%		0%		0%		0%		0.00%		-	
			Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	100%		N/A		85.65%		84.38%		98.51%		84.38%		84.38%		-	
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	64.52%		N/A		45.16%		6.45%		14.29%		6.45%		10.00%		-	
			Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	60%		N/A		60%		100%		166.67%		100%		166.67%		-	
			Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan			113.48%		-								113.48%			
			Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update			100%		-								100.00%			
	2.1.2.01.09.0001	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					2 dokumen	761,847	1 dokumen	218,663	50.00%	28.70%	50.00%	28.70%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.09.0002	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan					1 kali	1,830,681	1 kali	252,814	100.00%	13.81%	100.00%	13.81%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
	2.1.2.01.09.0003	Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Kota Surabaya	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota Surabaya					720 kali	436,550	176 kali	119,833	24.44%	27.45%	24.44%	27.45%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
	2.1.2.01.09.0004	Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan					115 objek	424,259	0 objek	84,733	0.00%	19.97%	0.00%	19.97%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
	2.1.2.01.09.0005	Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan					16 kali	1,577,229	1 kali	429,424	6.25%	27.23%	6.25%	27.23%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
	2.1.2.01.09.0006	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan					185 lembaga	564,613	185 lembaga	155,246	100.00%	27.50%	100.00%	27.50%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
	2.1.2.01.09.0007	Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan					1 dokumen	919,344	0 dokumen	139,406	0.00%	15.16%	0.00%	15.16%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
179	2.1.2.01.10	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			2,343,228		2,731,161		2,333,782		620,961		26.61%		620,961		26.50%		
			Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis	100%		N/A		74.29%		0%		0%		0%		0.00%		-	
			Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan keterhubungan antar proses	100%		N/A		50%		0%		0%		0%		0.00%		-	
			Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu pelayanannya kategori baik	70%		N/A		70%		0%		0%		0%		0.00%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan			100%		-								100.00%			
			Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi			125.29%		-								125.29%			
			Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD			100%		-								100.00%			
			Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun			100%		-								100.00%			
	2.1.2.01.10.0001	Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring					254 lembaga	277,096	0 lembaga	103,908	0.00%	37.50%	0.00%	37.50%			Bagian Organisasi	
	2.1.2.01.10.0002	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar Kompetensi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun					1 dokumen	430,957	0 dokumen	169,515	0.00%	39.33%	0.00%	39.33%			Bagian Organisasi	
	2.1.2.01.10.0003	Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun					1 dokumen	337,675	0 dokumen	85,227	0.00%	25.24%	0.00%	25.24%			Bagian Organisasi	
	2.1.2.01.10.0004	Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi					155 POS	555,817	0 POS	245,159	0.00%	44.11%	0.00%	44.11%			Bagian Organisasi	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.10.0005	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat					254 lembaga	732,237	0 lembaga	17,152	0.00%	2.34%	0.00%	2.34%			Bagian Organisasi	
180	2.1.2.01.11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			5,613,658		5,757,981		5,578,157		1,832,873		32.86%		1,832,873		32.65%		
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		104,29 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase Produk hukum yang disebarluaskan			100%		-								100.00%			
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti			100%		-								100.00%			
			Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi			100%		-								100.00%			
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan			104,29%		-								104,29%			
	2.1.2.01.11.0001	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah					12 dokumen	290,311	6 dokumen	58,612	50.00%	20.19%	50.00%	20.19%			Bagian Hukum	
	2.1.2.01.11.0002	Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani					65 permasalahan hukum	2,706,815	27 permasalahan hukum	854,942	41.54%	31.58%	41.54%	31.58%			Bagian Hukum	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.11.0003	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun					70 rancangan produk hukum	1,393,665	35 rancangan produk hukum	544,546	50.00%	39.07%	50.00%	39.07%			Bagian Hukum	
	2.1.2.01.11.0004	Publikasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi					70 produk hukum	1,187,365	31 produk hukum	374,773	44.29%	31.56%	44.29%	31.56%			Bagian Hukum	
181	2.1.2.01.12	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			14,568,228		14,138,886		16,854,676		5,692,990		33.78%		5,692,990		39.08%		
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar			100%		-								100.00%			
	2.1.2.01.12.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					100%	16,854,676	100%	5,692,990	100.00%	33.78%	100.00%	33.78%			Bagian Umum Dan Protokol	
182	2.1.2.01.13	Program Pengelolaan Bangunan Gedung			19,155,141		N/A		15,539,695		5,465,421		35.17%		5,465,421		28.53%		
			Persentase bangunan gedung yang dipelihara	100%		103,06 %		100%		66.67%		66.67%		66.67%		66.67%		-	
	2.1.2.01.13.0001	Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola					24 lokasi	15,539,695	24 lokasi	5,465,421	100.00%	35.17%	100.00%	35.17%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
183	2.1.2.01.14	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat			1,221,316		N/A		1,364,986		219,560		16.09%		219,560		17.98%		
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%		N/A		100%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	2.1.2.01.14.0001	Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun					2 dokumen	634,788	0 dokumen	55,776	0.00%	8.79%	0.00%	8.79%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
	2.1.2.01.14.0002	Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang ketahanan masyarakat yang disusun					1 dokumen	328,884	0 dokumen	86,792	0.00%	26.39%	0.00%	26.39%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
	2.1.2.01.14.0003	Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun					1 dokumen	401,314	0 dokumen	76,992	0.00%	19.18%	0.00%	19.18%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
184	2.1.2.01.15	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan			11,610,448		N/A		11,453,917		4,682,527		40.88%		4,682,527		40.33%		
			Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85%		88,90 %		85%		89.40%		105.18%		89.40%		105.18%		-	
	2.1.2.01.15.0001	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa					2030 kali	10,150,171	1028 kali	4,377,391	50.64%	43.13%	50.64%	43.13%			Bagian Hubungan Masyarakat	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.01.15.0002	Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan					89 kali	512,246	33 kali	150,485	37.08%	29.38%	37.08%	29.38%			Bagian Hubungan Masyarakat	
	2.1.2.01.15.0003	Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi	Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun					9 dokumen	791,499	3 dokumen	154,652	33.33%	19.54%	33.33%	19.54%			Bagian Hubungan Masyarakat	
185	2.1.2.01.16	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan			4,862,954		N/A		9,278,080		3,900,672		42.04%		3,900,672		80.21%		
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarnya ≥ 76%	94.50%		N/A		94%		0.20%		0.21%		0.20%		0.21%		-	
	2.1.2.01.16.0001	Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun					16 dokumen	2,033,848	9 dokumen	897,201	56.25%	44.11%	56.25%	44.11%			Bagian Administrasi Pembangunan	
	2.1.2.01.16.0002	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya					72 lembaga	2,120,392	73 lembaga	889,329	101.39%	41.94%	101.39%	41.94%			Bagian Administrasi Pembangunan	
	2.1.2.01.16.0003	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara					6 sistem	2,099,609	6 sistem	880,921	100.00%	41.96%	100.00%	41.96%			Bagian Administrasi Pembangunan	
	2.1.2.01.16.0004	Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun					6 dokumen	3,024,232	3 dokumen	1,233,221	50.00%	40.78%	50.00%	40.78%			Bagian Administrasi Pembangunan	
186	2.1.2.01.17	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset			44,496,499		N/A		79,873,922		24,314,333		30.44%		24,314,333		54.64%		
			Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	90%		92,15 %		88%		90.56%		102.91%		90.56%		100.62%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase pemanfaatan aset	97%		99,82 %		96%		100%		104.17%		100%		103.09%		-	
			Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	100%		60,00 %		80%		80%		100%		80%		80.00%		-	
	2.1.2.01.17.0001	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah					6 Berkas	3,118,540	1 Berkas	1,272,220	16.67%	40.80%	16.67%	40.80%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	
	2.1.2.01.17.0002	Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor					72 lembaga	2,186,386	72 lembaga	476,870	100.00%	21.81%	100.00%	21.81%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	
	2.1.2.01.17.0003	Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan					900 dokumen	5,746,510	283 dokumen	2,501,997	31.44%	43.54%	31.44%	43.54%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	
	2.1.2.01.17.0004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya					2346 unit	7,291,561	1102 unit	1,946,240	46.97%	26.69%	46.97%	26.69%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	
	2.1.2.01.17.0005	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan					10091 stel	3,843,228	1955 stel	544,893	19.37%	14.18%	19.37%	14.18%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	
	2.1.2.01.17.0006	Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan					45615 unit	57,687,697	2700 unit	17,572,113	5.92%	30.46%	5.92%	30.46%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	
187	2.1.2.01.18	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian			732,265		N/A		536,177		137,491		25.64%		137,491		18.78%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang memanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100%		40,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.1.2.01.18.0001	Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah					12 laporan	318,838	6 laporan	73,192	50.00%	22.96%	50.00%	22.96%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	
	2.1.2.01.18.0002	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro					4 dokumen	217,338	1 dokumen	64,299	25.00%	29.58%	25.00%	29.58%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	
188	2.1.2.01.19	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja			344,572		N/A		334,427		112,021		33.50%		112,021		32.51%		
			Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB	100%		N/A		84.72%		0%		0%		0%		0.00%		-	
	2.1.2.01.19.0001	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun					2 dokumen	334,427	1 dokumen	112,021	50.00%	33.50%	50.00%	33.50%			Bagian Organisasi	
189	2.1.2.01.20	Program Peningkatan Kerjasama Daerah			8,483,922		N/A		19,447,081		816,547		4.20%		816,547		9.62%		
			Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	100%		N/A		95%		94.25%		99.21%		94.25%		94.25%		-	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	100%		N/A		87.50%		22.22%		25.40%		22.22%		22.22%		-	
			Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi	100%		N/A		85%		114.29%		134.45%		114.29%		114.29%		-	
	2.1.2.01.20.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang difasilitasi					20 lembaga	820,971	14 lembaga	209,681	70.00%	25.54%	70.00%	25.54%			Bagian Administrasi Kerjasama	
	2.1.2.01.20.0002	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi					10 lembaga	12,022,843	3 lembaga	200,444	30.00%	1.67%	30.00%	1.67%			Bagian Administrasi Kerjasama	
	2.1.2.01.20.0003	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi					63 orang	5,383,580	63 orang	72,855	100.00%	1.35%	100.00%	1.35%			Bagian Administrasi Kerjasama	
	2.1.2.01.20.0004	Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi					29 lembaga	1,219,687	9 lembaga	333,568	31.03%	27.35%	31.03%	27.35%			Bagian Administrasi Kerjasama	
	2.1.2.04	Pengawasan																	
190	2.1.2.03.01	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			699,114		N/A		1,033,999		268,970		26.01%		268,970		38.47%		
			Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	100%		N/A		100%		121.43%		121.43%		121.43%		121.43%		-	
	2.1.2.03.01.0001	Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan					12 dokumen	257,606	6 dokumen	90,720	50.00%	35.22%	50.00%	35.22%			Inspektorat	
	2.1.2.03.01.0002	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP					50 kali	555,638	36 kali	158,634	72.00%	28.55%	72.00%	28.55%			Inspektorat	
	2.1.2.03.01.0003	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI)					1 Laporan	220,755	0 Laporan	19,616	0.00%	8.89%	0.00%	8.89%			Inspektorat	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
191	2.1.2.03.02	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I			825,459		N/A		852,389		199,274		23.38%		199,274		24.14%		
			Persentase penanganan disiplin aparat wilayah I	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.1.2.03.02.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan					35 lembaga	427,195	25 lembaga	78,761	71.43%	18.44%	71.43%	18.44%			Inspektorat	
	2.1.2.03.02.0002	Reviu Penggangan dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja					18 lembaga	425,194	18 lembaga	120,513	100.00%	28.34%	100.00%	28.34%			Inspektorat	
192	2.1.2.03.03	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II			750,867		N/A		683,005		154,241		22.58%		154,241		20.54%		
			Persentase penanganan disiplin aparat wilayah II	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.1.2.03.03.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan					35 lembaga	343,719	28 lembaga	52,485	80.00%	15.27%	80.00%	15.27%			Inspektorat	
	2.1.2.03.03.0002	Reviu Penggangan dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja					18 lembaga	339,286	32 lembaga	101,757	177.78%	29.99%	177.78%	29.99%			Inspektorat	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
193	2.1.2.03.04	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III			796,045		N/A		768,096		0		0.00%		0		0.00%		
			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100%		100,00 %		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.1.2.03.04.0001	Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan					35 lembaga	394,789	23 lembaga	0	65.71%	0.00%	65.71%	0.00%			Inspektorat	
	2.1.2.03.04.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja					18 lembaga	373,307	19 lembaga	0	105.56%	0.00%	105.56%	0.00%			Inspektorat	
194	2.1.2.03.05	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV			722,275		N/A		616,693		84,089		13.64%		84,089		11.64%		
			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah IV	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.1.2.03.05.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan					35 lembaga	309,347	19 lembaga	44,812	54.29%	14.49%	54.29%	14.49%			Inspektorat	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.1.2.03.05.0002	Reviu Panganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja					18 lembaga	307,346	18 lembaga	39,278	100.00%	12.78%	100.00%	12.78%			Inspektorat	
	2.2	Unsur Manajemen																	
	2.2.2	Non Pelayanan Dasar																	
	2.2.2.01	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																	
195	2.2.2.02.01	Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai			4,236,650		N/A		5,962,103		1,451,105		24.34%		1,451,105		34.25%		
			Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja	100%		N/A		100%		100%		100%		100%		100.00%		-	
	2.2.2.02.01.0001	Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah data pegawai yang dikelola					8326 data	544,160	3297 data	0	39.60%	0.00%	39.60%	0.00%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.02.01.0002	Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya					268 orang	1,591,467	221 orang	763,357	82.46%	47.97%	82.46%	47.97%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.02.01.0003	Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya					7226 orang	583,670	6220 orang	0	86.08%	0.00%	86.08%	0.00%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.02.01.0004	Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN					4 tahap	3,242,806	1 tahap	687,748	25.00%	21.21%	25.00%	21.21%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
196	2.2.2.02.02	Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM			6,374,461		N/A		6,380,454		1,008,235		15.80%		1,008,235		15.82%		
			Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	52.03%		80,18 %		50.03%		68.54%		137%		68.54%		131.73%		-	
			Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	65.06%		74,30 %		65.06%		21.42%		32.93%		21.42%		32.92%		-	
	2.2.2.02.02.0001	Pelaksanaan Asesmen Pegawai	Jumlah pelaksanaan asesmen pegawai					5 kali	450,617	3 kali	0	60.00%	0.00%	60.00%	0.00%			Badan Kepegawaian dan Diklat	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.02.02.0002	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural					2 jenis	911,606	2 jenis	98,078	100.00%	10.76%	100.00%	10.76%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.02.02.0003	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial					2 jenis	2,647,304	0 jenis	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.02.02.0004	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis					2 jenis	2,054,027	2 jenis	910,157	100.00%	44.31%	100.00%	44.31%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.02.02.0005	Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)					3 materi	316,900	0 materi	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
197	2.2.2.02.03	Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai			2,526,050		N/A		2,430,370		822,063		33.82%		822,063		32.54%		
			Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan	100%		N/A		100%		124.70%		124.70%		124.70%		124.70%		-	
	2.2.2.02.03.0001	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaian					500 orang	225,378	0 orang	59,766	0.00%	26.52%	0.00%	26.52%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.02.03.0002	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian					8326 berkas	669,375	3818 berkas	232,246	45.86%	34.70%	45.86%	34.70%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.02.03.0003	Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan					118 berkas	977,074	40 berkas	340,605	33.90%	34.86%	33.90%	34.86%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.02.03.0004	Pengelolaan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai					296 orang	558,543	26 orang	189,445	8.78%	33.92%	8.78%	33.92%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.02	Sarana dan Prasarana Perkantoran																	
198	2.2.2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			530,459,990		463,904,827		551,904,777		191,620,876		34.72%		191,620,876		36.12%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%		88,92 %		87%		89.15%		102.47%		89.15%		101.31%		-	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran			117%		-								117.00%			
	2.2.2.01.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,449,505	7%	570,916	7.00%	39.39%	7.00%	39.39%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.01.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,381,174	6%	621,037	6.00%	44.96%	6.00%	44.96%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	2.2.2.01.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,112,946	6%	780,399	6.00%	36.93%	6.00%	36.93%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
	2.2.2.01.01.0004	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	7,459,922	7%	2,995,216	7.00%	40.15%	7.00%	40.15%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
	2.2.2.01.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,663,415	6%	0	6.00%	0.00%	6.00%	0.00%			Badan Perencanaan Pembangunan	
	2.2.2.01.01.0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,137,114	6%	482,021	6.00%	42.39%	6.00%	42.39%			Bagian Administrasi Kerjasama	
	2.2.2.01.01.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	856,135	7%	378,981	7.00%	44.27%	7.00%	44.27%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
	2.2.2.01.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	926,547	5%	0	5.00%	0.00%	5.00%	0.00%			Bagian Administrasi Pembangunan	
	2.2.2.01.01.0009	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	591,398	5%	0	5.00%	0.00%	5.00%	0.00%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	843,374	8%	0	8.00%	0.00%	8.00%	0.00%			Bagian Administrasi Perencanaan Dan Usaha Daerah	
	2.2.2.01.01.0011	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,578,334	8%	0	8.00%	0.00%	8.00%	0.00%			Bagian Hubungan Masyarakat	
	2.2.2.01.01.0012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	666,349	6%	0	6.00%	0.00%	6.00%	0.00%			Bagian Hukum	
	2.2.2.01.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,571,029	6%	0	6.00%	0.00%	6.00%	0.00%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	
	2.2.2.01.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	242,100	3%	0	3.00%	0.00%	3.00%	0.00%			Bagian Organisasi	
	2.2.2.01.01.0015	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	88,685,623	8%	25,376,191	8.00%	28.61%	8.00%	28.61%			Bagian Umum Dan Protokol	
	2.2.2.01.01.0016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	9,673,259	7%	3,613,643	7.00%	37.36%	7.00%	37.36%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	2.2.2.01.01.0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	10,176,919	8%	4,492,213	8.00%	44.14%	8.00%	44.14%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.2.2.01.01.0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,844,831	8%	1,104,466	8.00%	38.82%	8.00%	38.82%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	2.2.2.01.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,706,235	6%	1,473,001	6.00%	39.74%	6.00%	39.74%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.2.2.01.01.0020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	103,646,401	7%	46,263,095	7.00%	44.64%	7.00%	44.64%			Dinas Kesehatan	
	2.2.2.01.01.0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,632,426	6%	1,567,369	6.00%	43.15%	6.00%	43.15%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.01.0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,268,830	8%	956,128	8.00%	42.14%	8.00%	42.14%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.2.2.01.01.0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,964,505	8%	778,687	8.00%	39.64%	8.00%	39.64%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.2.2.01.01.0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,392,230	8%	644,912	8.00%	46.32%	8.00%	46.32%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.2.2.01.01.0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	31,382,522	5%	17,925,036	5.00%	57.12%	5.00%	57.12%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	2.2.2.01.01.0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,774,263	7%	1,427,903	7.00%	37.83%	7.00%	37.83%			Dinas Pemadam Kebakaran	
	2.2.2.01.01.0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,994,540	8%	690,809	8.00%	34.64%	8.00%	34.64%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.2.2.01.01.0028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	21,622,238	6%	2,881,316	6.00%	13.33%	6.00%	13.33%			Dinas Pendidikan	
	2.2.2.01.01.0029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	5,690,211	7%	1,645,698	7.00%	28.92%	7.00%	28.92%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
	2.2.2.01.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,951,126	6%	1,619,349	6.00%	40.98%	6.00%	40.98%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.2.2.01.01.0031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,780,228	8%	1,793,027	8.00%	47.43%	8.00%	47.43%			Dinas Perdagangan	
	2.2.2.01.01.0032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	13,069,610	7%	4,954,581	7.00%	37.91%	7.00%	37.91%			Dinas Perhubungan	
	2.2.2.01.01.0033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,612,189	7%	1,174,237	7.00%	44.95%	7.00%	44.95%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.01.0034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	8,574,027	7%	2,637,908	7.00%	30.77%	7.00%	30.77%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	2.2.2.01.01.0035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	4,517,009	7%	2,117,647	7.00%	46.88%	7.00%	46.88%			Dinas Sosial	
	2.2.2.01.01.0036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,082,784	8%	1,008,304	8.00%	48.41%	8.00%	48.41%			Dinas Tenaga Kerja	
	2.2.2.01.01.0037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,342,524	8%	583,555	8.00%	43.47%	8.00%	43.47%			Inspektorat	
	2.2.2.01.01.0038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,184,300	7%	300,091	7.00%	25.34%	7.00%	25.34%			Kec. Asemrowo	
	2.2.2.01.01.0039	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,522,971	7%	352,989	7.00%	23.18%	7.00%	23.18%			Kec. Benowo	
	2.2.2.01.01.0040	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,760,289	8%	422,485	8.00%	24.00%	8.00%	24.00%			Kec. Bubutan	
	2.2.2.01.01.0041	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,663,683	7%	519,364	7.00%	31.22%	7.00%	31.22%			Kec. Bulak	
	2.2.2.01.01.0042	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,384,669	7%	360,789	7.00%	26.06%	7.00%	26.06%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.2.2.01.01.0043	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,718,401	6%	550,733	6.00%	32.05%	6.00%	32.05%			Kec. Gayungan	
	2.2.2.01.01.0044	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,652,028	6%	476,914	6.00%	28.87%	6.00%	28.87%			Kec. Genteng	
	2.2.2.01.01.0045	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,139,019	7%	505,262	7.00%	23.62%	7.00%	23.62%			Kec. Gubeng	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.01.0046	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,347,795	7%	375,131	7.00%	27.83%	7.00%	27.83%			Kec. Gunung Anyar	
	2.2.2.01.01.0047	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,427,329	7%	481,814	7.00%	33.76%	7.00%	33.76%			Kec. Jambangan	
	2.2.2.01.01.0048	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,352,193	7%	294,993	7.00%	21.82%	7.00%	21.82%			Kec. Karangpilang	
	2.2.2.01.01.0049	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,666,459	7%	465,036	7.00%	27.91%	7.00%	27.91%			Kec. Kenjeran	
	2.2.2.01.01.0050	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,079,757	7%	577,563	7.00%	27.77%	7.00%	27.77%			Kec. Krembangan	
	2.2.2.01.01.0051	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,633,051	7%	333,860	7.00%	20.44%	7.00%	20.44%			Kec. Lakarsantri	
	2.2.2.01.01.0052	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,276,436	5%	497,447	5.00%	21.85%	5.00%	21.85%			Kec. Mulyorejo	
	2.2.2.01.01.0053	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,884,208	7%	544,029	7.00%	28.87%	7.00%	28.87%			Kec. Pabean Cantian	
	2.2.2.01.01.0054	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,588,787	7%	472,044	7.00%	29.71%	7.00%	29.71%			Kec. Pakal	
	2.2.2.01.01.0055	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,082,672	7%	639,224	7.00%	30.69%	7.00%	30.69%			Kec. Rungkut	
	2.2.2.01.01.0056	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,460,934	7%	426,386	7.00%	29.19%	7.00%	29.19%			Kec. Sambikerep	
	2.2.2.01.01.0057	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,760,830	8%	814,898	8.00%	29.52%	8.00%	29.52%			Kec. Sawahan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.01.0058	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,394,517	7%	606,144	7.00%	25.31%	7.00%	25.31%			Kec. Semampir	
	2.2.2.01.01.0059	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,651,795	7%	369,053	7.00%	22.34%	7.00%	22.34%			Kec. Simokerto	
	2.2.2.01.01.0060	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,400,948	8%	717,551	8.00%	29.89%	8.00%	29.89%			Kec. Sukolilo	
	2.2.2.01.01.0061	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,998,376	6%	555,614	6.00%	27.80%	6.00%	27.80%			Kec. Sukomanunggal	
	2.2.2.01.01.0062	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,588,264	6%	693,641	6.00%	26.80%	6.00%	26.80%			Kec. Tambaksari	
	2.2.2.01.01.0063	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,892,746	7%	453,038	7.00%	23.94%	7.00%	23.94%			Kec. Tandes	
	2.2.2.01.01.0064	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,567,615	7%	486,477	7.00%	18.95%	7.00%	18.95%			Kec. Tegalsari	
	2.2.2.01.01.0065	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,775,947	5%	372,351	5.00%	20.97%	5.00%	20.97%			Kec. Tenggilis Mejoyo	
	2.2.2.01.01.0066	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,687,780	7%	493,447	7.00%	29.24%	7.00%	29.24%			Kec. Wiyung	
	2.2.2.01.01.0067	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,778,253	6%	389,331	6.00%	21.89%	6.00%	21.89%			Kec. Wonocolo	
	2.2.2.01.01.0068	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,050,008	6%	515,072	6.00%	25.13%	6.00%	25.13%			Kec. Wonokromo	
	2.2.2.01.01.0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	40,202,448	6%	13,278,061	6.00%	33.03%	6.00%	33.03%			RSUD Bhakti Dharma Husada	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.01.0070	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	65,557,904	8%	19,478,356	8.00%	29.71%	8.00%	29.71%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	2.2.2.01.01.0071	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,148,143	8%	928,610	8.00%	43.23%	8.00%	43.23%			Satuan Polisi Pamong Praja	
	2.2.2.01.01.0072	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	29,760,353	8%	10,315,432	8.00%	34.66%	8.00%	34.66%			Sekretariat DPRD	
	2.2.2.01.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan			95,269,436		N/A		104,291,980		20,199,272		19.37%		20,199,272		21.20%		
			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		99,30 %		100%		68.97%		68.97%		68.97%		68.97%		-	
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,35 %		100%		99.36%		99.36%		99.36%		99.36%		-	
	2.2.2.01.02.0001	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	441,545	2%	99,771	2.00%	22.60%	2.00%	22.60%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
	2.2.2.01.02.0002	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	336,971	2%	47,416	2.00%	14.07%	2.00%	14.07%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	2.2.2.01.02.0003	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,158,170	1%	484,971	1.00%	41.87%	1.00%	41.87%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
	2.2.2.01.02.0004	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	5,342,168	3%	2,113,307	3.00%	39.56%	3.00%	39.56%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
	2.2.2.01.02.0005	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	487,583	3%	145,329	3.00%	29.81%	3.00%	29.81%			Badan Perencanaan Pembangunan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.02.0006	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	265,687	2%	75,173	2.00%	28.29%	2.00%	28.29%			Bagian Administrasi Kerjasama	
	2.2.2.01.02.0007	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	153,936	2%	35,082	2.00%	22.79%	2.00%	22.79%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
	2.2.2.01.02.0008	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,947,303	3%	618,575	3.00%	31.77%	3.00%	31.77%			Bagian Administrasi Pembangunan	
	2.2.2.01.02.0009	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	239,621	2%	36,060	2.00%	15.05%	2.00%	15.05%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
	2.2.2.01.02.0010	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	178,490	2%	46,571	2.00%	26.09%	2.00%	26.09%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	
	2.2.2.01.02.0011	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	516,627	2%	116,697	2.00%	22.59%	2.00%	22.59%			Bagian Hubungan Masyarakat	
	2.2.2.01.02.0012	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	288,589	2%	75,004	2.00%	25.99%	2.00%	25.99%			Bagian Hukum	
	2.2.2.01.02.0013	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,670,053	1%	68,511	1.00%	4.10%	1.00%	4.10%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	
	2.2.2.01.02.0014	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	132,148	2%	30,555	2.00%	23.12%	2.00%	23.12%			Bagian Organisasi	
	2.2.2.01.02.0015	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran					100%	4,685,376	2%	1,300,884	2.00%	27.76%	2.00%	27.76%			Bagian Umum Dan Protokol	
	2.2.2.01.02.0016	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	2,305,936	2%	605,199	2.00%	26.25%	2.00%	26.25%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
	2.2.2.01.02.0017	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	654,875	3%	154,436	3.00%	23.58%	3.00%	23.58%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.02.0018	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	671,287	1%	90,435	1.00%	13.47%	1.00%	13.47%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	2.2.2.01.02.0019	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	674,569	2%	120,838	2.00%	17.91%	2.00%	17.91%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.2.2.01.02.0020	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	6,046,080	4%	1,466,398	4.00%	24.25%	4.00%	24.25%			Dinas Kesehatan	
	2.2.2.01.02.0021	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,843,515	3%	332,229	3.00%	18.02%	3.00%	18.02%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.2.2.01.02.0022	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,379,691	3%	317,804	3.00%	23.03%	3.00%	23.03%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.2.2.01.02.0023	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	598,192	3%	164,870	3.00%	27.56%	3.00%	27.56%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.2.2.01.02.0024	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	468,333	2%	111,992	2.00%	23.91%	2.00%	23.91%			Dinas Lingkungan Hidup	
	2.2.2.01.02.0025	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	4,633,175	2%	944,497	2.00%	20.39%	2.00%	20.39%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
	2.2.2.01.02.0026	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,635,298	3%	345,451	3.00%	21.12%	3.00%	21.12%			Dinas Pemadam Kebakaran	
	2.2.2.01.02.0027	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	536,224	2%	89,648	2.00%	16.72%	2.00%	16.72%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.2.2.01.02.0028	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	3,029,155	4%	372,615	4.00%	12.30%	4.00%	12.30%			Dinas Pendidikan	
	2.2.2.01.02.0029	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	2,176,099	3%	286,094	3.00%	13.15%	3.00%	13.15%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.02.0030	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	892,996	3%	182,838	3.00%	20.47%	3.00%	20.47%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.2.2.01.02.0031	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,562,842	4%	410,262	4.00%	26.25%	4.00%	26.25%			Dinas Perdagangan	
	2.2.2.01.02.0032	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	4,740,355	4%	2,112,098	4.00%	44.56%	4.00%	44.56%			Dinas Perhubungan	
	2.2.2.01.02.0033	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	790,306	3%	183,606	3.00%	23.23%	3.00%	23.23%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.2.2.01.02.0034	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,807,210	3%	519,585	3.00%	28.75%	3.00%	28.75%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
	2.2.2.01.02.0035	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,002,970	3%	330,233	3.00%	32.93%	3.00%	32.93%			Dinas Sosial	
	2.2.2.01.02.0036	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	497,737	2%	105,476	2.00%	21.19%	2.00%	21.19%			Dinas Tenaga Kerja	
	2.2.2.01.02.0037	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	498,822	3%	145,901	3.00%	29.25%	3.00%	29.25%			Inspektorat	
	2.2.2.01.02.0038	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	314,733	2%	67,552	2.00%	21.46%	2.00%	21.46%			Kec. Asemrowo	
	2.2.2.01.02.0039	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	284,717	2%	63,416	2.00%	22.27%	2.00%	22.27%			Kec. Benowo	
	2.2.2.01.02.0040	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	287,452	2%	64,494	2.00%	22.44%	2.00%	22.44%			Kec. Bubutan	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.02.0041	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	373,663	2%	88,178	2.00%	23.60%	2.00%	23.60%			Kec. Bulak	
	2.2.2.01.02.0042	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	302,982	2%	74,707	2.00%	24.66%	2.00%	24.66%			Kec. Dukuh Pakis	
	2.2.2.01.02.0043	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	313,563	2%	69,859	2.00%	22.28%	2.00%	22.28%			Kec. Gayungan	
	2.2.2.01.02.0044	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	322,567	2%	80,139	2.00%	24.84%	2.00%	24.84%			Kec. Genteng	
	2.2.2.01.02.0045	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	642,252	2%	110,995	2.00%	17.28%	2.00%	17.28%			Kec. Gubeng	
	2.2.2.01.02.0046	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	326,766	2%	70,406	2.00%	21.55%	2.00%	21.55%			Kec. Gunung Anyar	
	2.2.2.01.02.0047	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	393,093	2%	82,082	2.00%	20.88%	2.00%	20.88%			Kec. Jambangan	
	2.2.2.01.02.0048	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	289,333	2%	54,964	2.00%	19.00%	2.00%	19.00%			Kec. Karangpilang	
	2.2.2.01.02.0049	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	294,503	2%	70,139	2.00%	23.82%	2.00%	23.82%			Kec. Kenjeran	
	2.2.2.01.02.0050	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	607,357	2%	104,930	2.00%	17.28%	2.00%	17.28%			Kec. Krembangan	
	2.2.2.01.02.0051	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	298,990	2%	67,363	2.00%	22.53%	2.00%	22.53%			Kec. Lakarsantri	
	2.2.2.01.02.0052	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	378,195	2%	68,461	2.00%	18.10%	2.00%	18.10%			Kec. Mulyorejo	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.02.0053	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	327,073	2%	77,545	2.00%	23.71%	2.00%	23.71%			Kec. Pabean Cantian	
	2.2.2.01.02.0054	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	299,391	2%	73,641	2.00%	24.60%	2.00%	24.60%			Kec. Pakal	
	2.2.2.01.02.0055	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	289,214	2%	58,992	2.00%	20.40%	2.00%	20.40%			Kec. Rungkut	
	2.2.2.01.02.0056	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	281,901	2%	66,315	2.00%	23.52%	2.00%	23.52%			Kec. Sambikerep	
	2.2.2.01.02.0057	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	305,857	2%	78,017	2.00%	25.51%	2.00%	25.51%			Kec. Sawahan	
	2.2.2.01.02.0058	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	395,709	2%	98,288	2.00%	24.84%	2.00%	24.84%			Kec. Semampir	
	2.2.2.01.02.0059	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	273,432	2%	62,734	2.00%	22.94%	2.00%	22.94%			Kec. Simokerto	
	2.2.2.01.02.0060	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	392,179	2%	105,385	2.00%	26.87%	2.00%	26.87%			Kec. Sukolilo	
	2.2.2.01.02.0061	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	273,416	2%	59,033	2.00%	21.59%	2.00%	21.59%			Kec. Sukomanunggal	
	2.2.2.01.02.0062	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	413,675	2%	95,005	2.00%	22.97%	2.00%	22.97%			Kec. Tambaksari	
	2.2.2.01.02.0063	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	358,175	2%	55,455	2.00%	15.48%	2.00%	15.48%			Kec. Tandes	
	2.2.2.01.02.0064	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	380,289	2%	73,881	2.00%	19.43%	2.00%	19.43%			Kec. Tegalsari	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13
	2.2.2.01.02.0065	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	302,734	2%	46,978	2.00%	15.52%	2.00%	15.52%			Kec. Tenggilis Mejoyo	
	2.2.2.01.02.0066	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	292,429	2%	69,570	2.00%	23.79%	2.00%	23.79%			Kec. Wiyung	
	2.2.2.01.02.0067	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	335,575	2%	70,024	2.00%	20.87%	2.00%	20.87%			Kec. Wonocolo	
	2.2.2.01.02.0068	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	380,203	2%	76,363	2.00%	20.08%	2.00%	20.08%			Kec. Wonokromo	
	2.2.2.01.02.0069	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	6,800,292	4%	1,286,401	4.00%	18.92%	4.00%	18.92%			RSUD Bhakti Dharma Husada	
	2.2.2.01.02.0070	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	15,789,738	4%	515,928	4.00%	3.27%	4.00%	3.27%			RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	2.2.2.01.02.0071	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	2,614,746	3%	714,474	3.00%	27.32%	3.00%	27.32%			Satuan Polisi Pamong Praja	
	2.2.2.01.02.0072	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	12,065,852	2%	691,149	2.00%	5.73%	2.00%	5.73%			Sekretariat DPRD	

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2020 dan mempertimbangkan kondisi bencana nasional pandemi Covid-19 yang terjadi di Tahun 2020 serta sesuai dengan amanat Permendagri 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka dilakukan penyesuaian terhadap anggaran dengan dilakukannya Revisi Anggaran. Dengan perubahan alokasi anggaran membutuhkan penyesuaian terhadap target Output

Beberapa urusan yang menjadi fokus atau prioritas Pemerintah Kota Surabaya terutama dalam upaya penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19 antara lain peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada sisi *preventif, kuratif, rehabilitative* dan *promotif* untuk penanggulangan serta pemutusan rantai penularan Covid-19, peningkatan kualitas data dan pelayanan jaring pengaman sosial, penanggulangan penanganan dampak ekonomi untuk menjaga dunia usaha tetap berkembang serta penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya.

Upaya pencapaian target program yang telah dicantumkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 tetap dioptimalkan melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dalam pencapaian target program tersebut.

Beberapa jenis kegiatan dapat disesuaikan targetnya untuk efisiensi dan rasionalisasi anggaran dengan mempertimbangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, setidaknya antara lain :

- Kegiatan yang tidak menunjang urusan yang menjadi fokus atau prioritas dalam penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19, antara lain pengadaan tanah, renovasi atau pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda.
- Kegiatan yang tidak berhubungan langsung dalam pencapaian program.
- Kegiatan yang masih dapat dilaksanakan dengan non budgeter.

- Kegiatan yang realisasinya terkendala karena adanya pandemi Covid-19.
- Kegiatan yang menyesuaikan alokasi dan reallisasi dana transfer atau dana perimbangan.
- Kegiatan penyediaan sarana prasarana perkantoran yang dapat dilakukan efisiensi antara lain Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja BBM, Belanja Makan Minum, Belanja Pakai Habis, cetak dan penggandaan, pakaian/atribut dinas dll;
- Kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya atau diubah sistem pelaksanaannya dengan metode daring, antara lain perjalanan dinas, event internasional, lokakarya, seminar, sosialisasi dll.
- Kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan yang dapat dikurangi atau tidak dilaksanakan, antara lain sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa rumah/gedung, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana perkantoran dan kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap RKPD dalam hal refocusing dan penjadwalan ulang program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp580.756.010,68 juta, meningkat dibanding tahun 2018 mencapai Rp538.954.457,78 juta. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi seluruh lapangan usaha di Kota Surabaya. Khususnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi yang lebih dominan dibanding sektor ekonomi lainnya. Pada tahun 2019 lapangan usaha tersebut menghasilkan nilai tambah sebesar Rp161.141.233,33 juta yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp149.167.327,31 juta. Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan memberikan nilai tambah sebesar Rp109.245.937,20 juta dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp95.537.038,24 juta. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kota Surabaya terangkum dalam Tabel III.1 berikut:

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2018- 2019 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2018	2019*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	913.363,56	928.398,16
B	Pertambangan dan Penggalian	32.568,38	33.531,33
C	Industri Pengolahan	101.196.564,52	109.245.937,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.311.134,20	2.362.300,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	771.856,00	791.147,83
F	Konstruksi	52.920.129,31	54.649.310,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.167.327,31	161.141.233,33
H	Transportasi dan Pergudangan	28.811.194,17	31.240.415,60

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Kategori	Uraian	2018	2019*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.056.324,46	95.537.038,24
J	Informasi dan Komunikasi	28.390.748,22	30.770.585,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.140.646,05	29.413.339,89
L	Real Estate	13.775.255,11	14.947.568,30
M,N	Jasa Perusahaan	13.571.273,11	14.930.184,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.345.115,74	8.154.990,77
P	Jasa Pendidikan	12.897.475,91	14.007.607,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.053.612,67	4.443.228,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.599.869,06	8.159.192,66
PDRB		538.954.457,78	580.756.010,68

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2020

*) Data Sementara

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB ADHK pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp387.340.042,93 juta meningkat menjadi sebesar Rp410.969.893,88 juta di tahun 2019. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2019 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp116.343.590,22 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp77.312.368,81 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp62.898.688,76 juta.

Tabel III.2
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018– 2019(dalam juta)

Kategori	Uraian	2018	2019*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	581.426,57	576.221,53
B	Pertambangan dan Penggalian	20.762,58	20.782,09
C	Industri Pengolahan	73.328.747,38	77.312.368,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.540.006,38	1.546.272,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	583.121,24	605.979,60
F	Konstruksi	38.480.421,60	40.576.452,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109.870.324,37	116.343.590,22

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Kategori	Uraian	2018	2019*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
H	Transportasi dan Pergudangan	19.046.861,58	20.497.977,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.419.739,39	62.898.688,76
J	Informasi dan Komunikasi	25.613.455,86	27.531.903,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.541.116,14	19.187.832,54
L	Real Estate	10.165.858,67	10.784.959,46
M,N	Jasa Perusahaan	8.867.969,79	9.474.538,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.697.025,94	4.867.861,44
P	Jasa Pendidikan	9.064.164,83	9.668.100,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.023.591,50	3.254.593,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.495.449,09	5.821.770,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		387.340.042,93	410.969.893,88

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2020

*) Data Sementara

b. Sumbangan Sektoral

Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan kategori lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kota Surabaya. Tabel III.3 menunjukkan struktur PDRB Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi tertinggi pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi pada kisaran 28 persen dari total PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya. Adapun sektor tertinggi kedua dengan kontribusi yaitu industri pengolahan dengan nilai kontribusi pada kisaran sebesar 18 persen. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur ekonomi selengkapnya terangkum dalam Tabel III.3 berikut:

Tabel III.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018 – 2019 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2018	2019*
		(%)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	18,93	18,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Kategori	Uraian	2018	2019*
		(%)	(%)
F	Konstruksi	9,93	9,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,37	28,31
H	Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,08	15,30
J	Informasi dan Komunikasi	6,61	6,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	4,67
L	Real Estate	2,62	2,62
M,N	Jasa Perusahaan	2,29	2,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,21	1,18
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,42

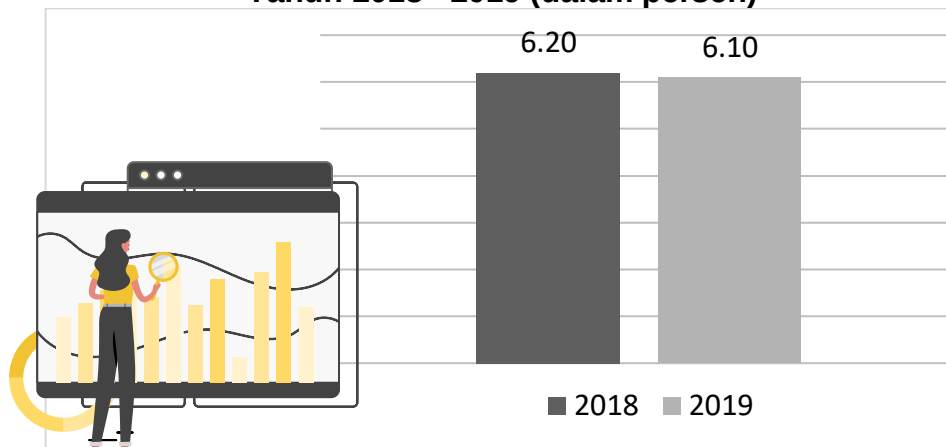
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2020

*) Data Sementara

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terus menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun pada tahun 2019 mengalami sedikit perlambatan, produktivitas ekonomi Kota Surabaya masih tetap tumbuh diatas angka 6 persen. Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2019 utamanya dipengaruhi oleh faktor eksternal pada sisi perdagangan luar negeri. Seperti yang diketahui, perekonomian dunia sepanjang tahun 2019 tidak cukup kondusif, tak terkecuali terjadi pada negara-negara mitra dagang Kota Surabaya, yang akhirnya berpengaruh terhadap menurunnya permintaan dari luar negeri yang tercatat pada sisi ekspor. Begitu pula pada sisi permintaan dalam negeri mengalami perlambatan sebagai imbas penundaan konsumsi masyarakat.

Gambar III.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2018– 2019 (dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2020
*) Data Sementara

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2018– 2019 (dalam persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi(%)
2018	6,20
2019*	6,10

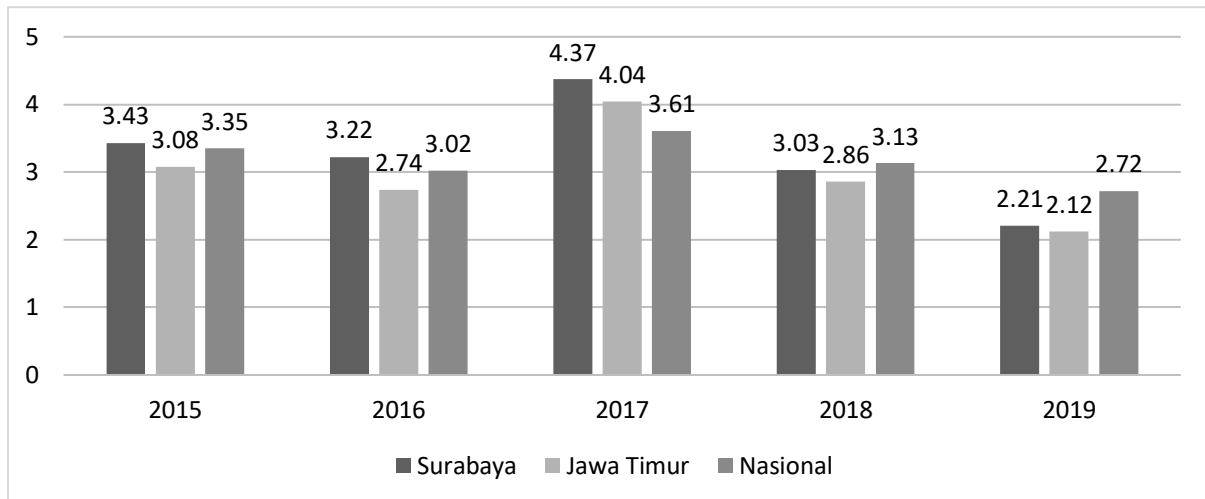
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2020
*) Data Sementara

d. Tingkat Inflasi

Untuk mengetahui fluktuasi harga barang dan jasa di Kota Surabaya dari tahun 2015-2019 dapat ditunjukkan oleh Gambar III.5 Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar grafik, pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional. Bahkan capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 cukup baik yakni 2,21 persen lebih rendah dibandingkan Nasional yakni sebesar 2,72 persen, walaupun lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,12 persen.

Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2019 antara lain: telur ayam ras, bawang merah, tarif kereta api, mujair, kontrak rumah, angkutan udara, tomat sayur, sewa rumah, semangka, dan melon.

Gambar III.2
Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 - Tahun 2019 (dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

e. Tingkat Investasi (PMA & PMDN)

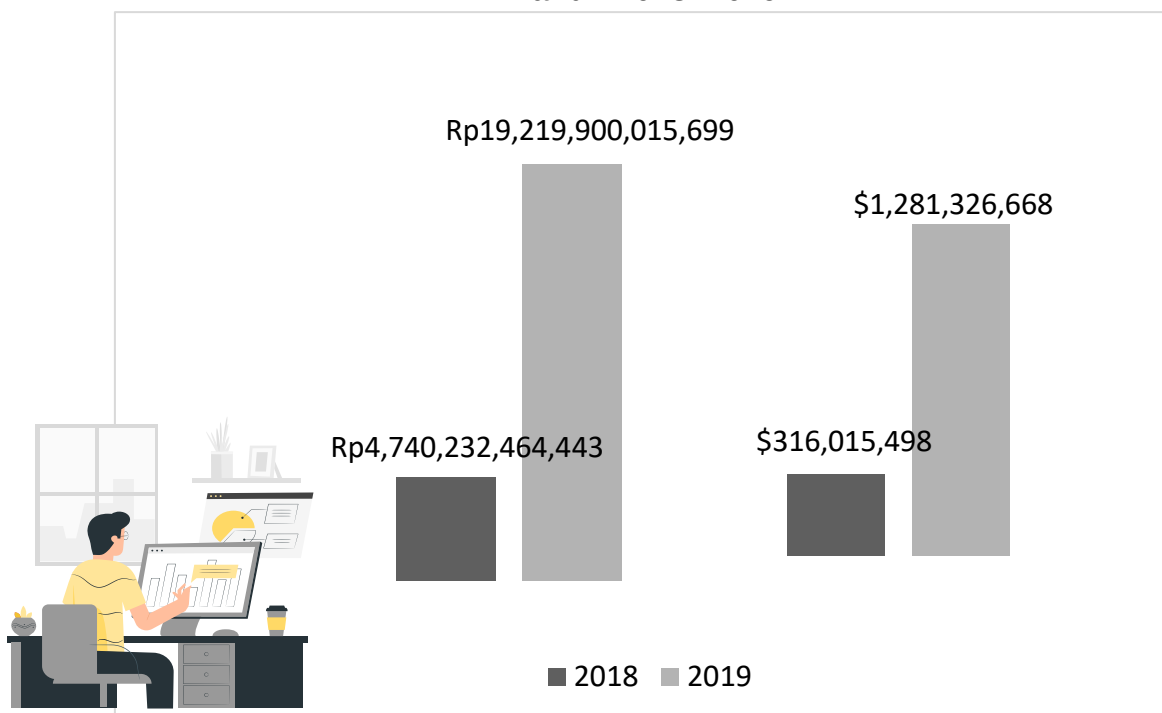
Kota Surabaya berkembang menjadi Kota Bisnis yang berkembang sangat pesat. Dengan segala daya dukung baik sarana dan prasarana yang memadai menjadikan Kota Surabaya bukan hanya menjadi tempat hunian, melainkan juga menjadi target pasar para pelaku usaha seperti investor. Daya tarik yang kuat sebagai imbas dari semakin pesatnya perkembangan Kota Surabaya dari berbagai aspek baik aspek ekonomi maupun non ekonomi juga menjadi pertimbangan para investor memutuskan untuk memilih Kota Surabaya sebagai sasaran target investasinya.

Investasi yang ditanamkan di Surabaya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Kota Surabaya. Keberadaan investasi tersebut tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap sektor lainnya sebagai hasil dari keterkaitan antar sektor dari aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Pada tahun 2019 investasi Kota Surabaya yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp19.219.900.015.699. Sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) sebesar USD1.281.326.668. Peningkatan realisasi nilai investasi pada tahun 2019 di kota Surabaya merupakan dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menggunakan sistem aplikasi OSS (One Single Submission) untuk mendukung kemudahan berusaha diseluruh Indonesia yang telah

dicanangkan Presiden RI dalam Peraturan Presiden RI No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dengan sistem aplikasi OSS (One Single Submission) maka orang yang akan membuka usaha di Surabaya tidak perlu datang ke Surabaya karena sudah bisa mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) secara online. Untuk mendapatkan NIB persyaratan yang dibutuhkan hanya KTP bagi WNI dan Passport untuk WNA kemudian akte pendirian badan usaha yang dimiliki. Setelah mendapat NIB kemudian baru melengkapi persyaratan–persyaratan untuk berusaha di kota Surabaya seperti IMB, TDUP, dsb. Persyaratan–persyaratan tersebut bisa diupload ke aplikasi OSS sehingga calon investor tidak perlu datang berkali–kali ke kota Surabaya.

Gambar III.3
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2018- 2019



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Tabel III.5
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2018- 2019

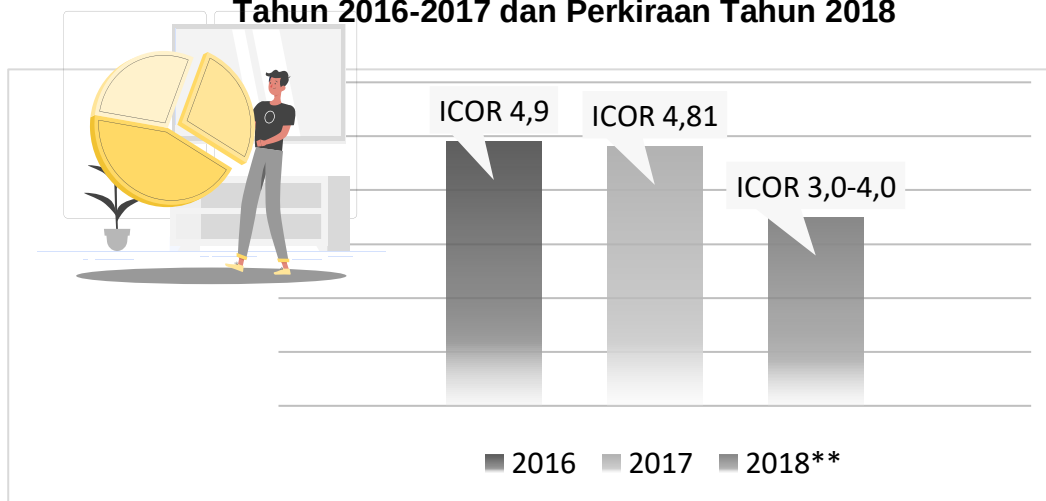
Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2018	Rp 4.740.232.464.443	USD 316.015.498
2019	Rp 19.219.900.015.699	USD 1.281.326.668

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Untuk mengetahui seberapa besar peran investasi terhadap suatu perekonomian maka perlu diperkaya dengan indikator tambahan yang dapat menjelaskan seberapa baik kinerja investasi yang sudah ditanamkan tersebut, yakni seperti indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR selain dapat digunakan untuk mengevaluasi dan investasi, melainkan juga dapat digunakan untuk melihat produktivitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan.

Besaran ICOR menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit usaha. Oleh karena itu besaran ICOR digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang. Semakin kecil nilai ICOR semakin besar pula efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari Investasi yang ditanamkan.

Gambar III.4
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya
Tahun 2016-2017 dan Perkiraan Tahun 2018



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

**) data angka proyeksi Bappeko

Tabel III.6
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya
Tahun 2016-2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Uraian	2016	2017	2018**
ICOR	4,90	4,81	3,0-4,0

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

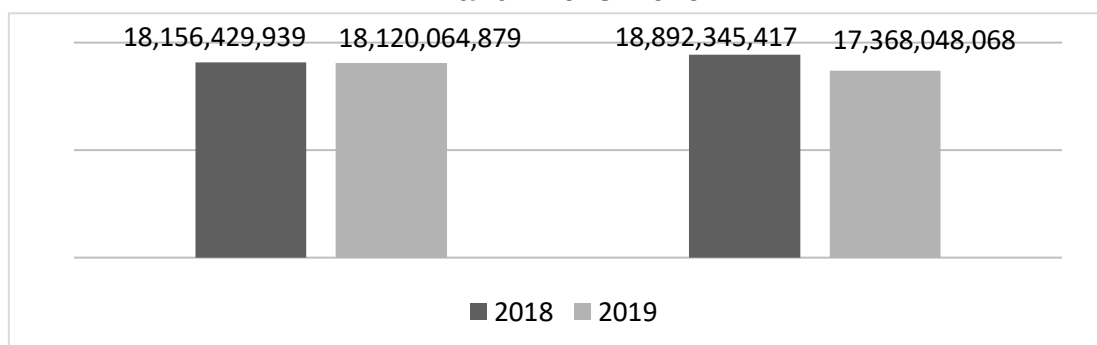
**) data angka proyeksi Bappeko

Rata-rata nilai ICOR Kota Surabaya sejak tahun 2013 sampai pada 2017 berada pada kisaran angka 4. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya sudah cukup efisien. Investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas ekonomi di Kota Surabaya, sehingga dapat mendorong peningkatan PDRB dan dapat memberikan multiplier effect yaitu membantu dalam perluasan lapangan pekerjaan.

f. Ekspor

Aktivitas perdagangan baik Kota Surabaya pada tahun 2019 sedikit mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2018. Hal itu dapat dilihat dari kinerja ekspor yang sedikit lebih rendah dibandingkan kinerja ekspor di tahun sebelumnya. Penurunan yang lebih dalam juga terjadi pada sisi impor sebagaimana terangkum dalam tabel dibawah. Kondisi kinerja perdagangan Kota Surabaya tahun 2019 diakibatkan oleh menurunnya permintaan dari mitra dagang. Begitu pula dengan kinerja impor Kota Surabaya yang mengalami penurunan dipengaruhi oleh menurunnya permintaan komoditas dari Kota Surabaya dan wilayah-wilayah sekitar Kota Surabaya.

Gambar III.5
Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2018–2019



Sumber data: BPS Jawa Timur dan Bappeko Kota Surabaya, diolah, 2020

Tabel III.7
Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2018–2019

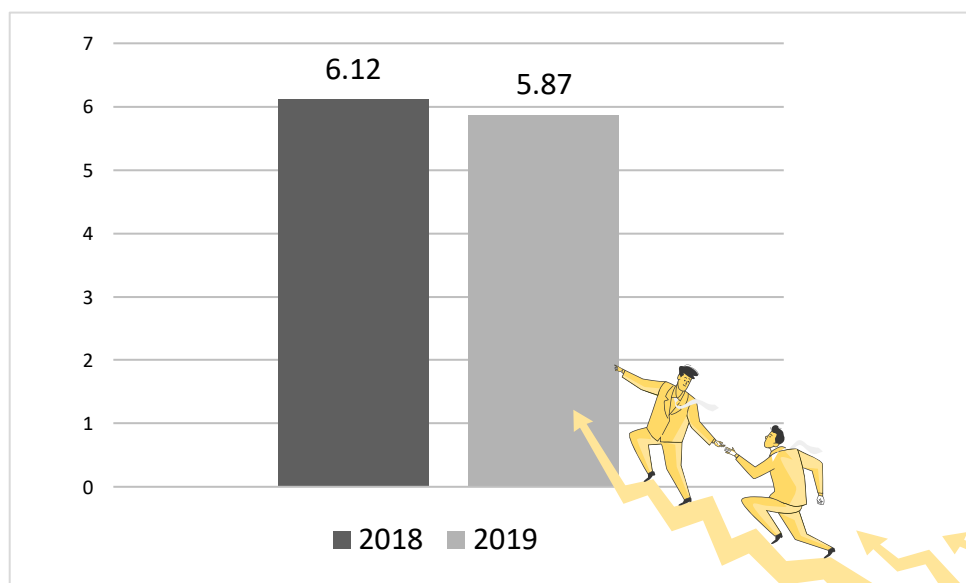
	Tahun	2018	2019
Ekspor	Nilai (US \$)	18.156.429.939	18.120.064.879
Impor	Nilai (US \$)	18.892.345.417	17.368.048.068

Sumber data: BPS Jawa Timur dan Bappeko Kota Surabaya, diolah, 2020

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 6,12 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,25 persen sehingga TPT Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 5,87 persen. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya gencar memberikan bursa kerja lapangan pekerjaan, dalam satu tahun Dinas Tenaga Kerja mengadakan 7 bursa kerja, 2 Grand Job Fair, dan 5 Mini Job Fair yang diadakan di gedung-gedung milik Pemerintah Kota dan juga kecamatan-kecamatan yang mudah dijangkau masyarakat pencari kerja. Dinas Tenaga Kerja juga memberikan pelatihan dan sertifikasi sehingga pencari kerja mempunyai kompetensi dan lebih mudah terserap di pasar tenaga kerja.

Gambar III.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

Tabel III.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2018	6,12
2019	5,87

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

Indikator lain yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan dapat diukur dari pengukuran ILOR. ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*) menggambarkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja pada suatu wilayah. ILOR dapat dilihat sebagai perbandingan antara perubahan jumlah penduduk usia kerja yang terserap dalam aktivitas ekonomi dengan penambahan output perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan data BPS, nilai perhitungan ILOR Kota Surabaya selama kurun waktu 2 tahun besaran angkanya sama yakni 0,02.

Tabel III.9
***Incremental Labour Output Ratio* (ILOR) Kota Surabaya**
Tahun 2013- 2017 dan Perkiraan 2018

Uraian	2016	2017	2018**
ILOR	0,02	0,02	0,01-0,03

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2020

**) data angka proyeksi Bappeko

3.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi ekonomi pada tahun 2018 dan tahun 2019, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek ekonomi ke depannya, maka prediksi atau perkiraan perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp421.655.111,12 juta. Mempertimbangkan pantauan perkembangan terkini terkait kondisi ekonomi global maupun domestik, produktivitas Kota

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Surabaya diperkirakan menghasilkan penambahan yang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan ekonomi yang cukup dalam akibat adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak semester awal di tahun 2020. Tekanan yang terjadi akibat pandemi tersebut diperkirakan berimbas terhadap seluruh lapangan sektor usaha di Kota Surabaya. Sehingga di tahun 2020 lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan memberikan nilai tambah sebesar Rp119.368.523,57 juta terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya. Selengkapnya terkait penambahan nilai dari masing-masing lapangan usaha terangkum dalam tabel berikut.

Tabel III.10
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Juta)

Kategori	Uraian	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	576.221,53	591.203,29
B	Pertambangan dan Penggalian	20.782,09	21.322,42
C	Industri Pengolahan	77.312.368,81	78.643.811,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.546.272,08	1.586.475,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	605.979,60	748.231,60
F	Konstruksi	40.576.452,62	41.715.771,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	116.343.590,22	119.010.116,73
H	Transportasi dan Pergudangan	20.497.977,43	21.115.255,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.898.688,76	63.142.592,80
J	Informasi dan Komunikasi	27.531.903,71	32.464.284,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.187.832,54	20.319.198,86
L	Real Estate	10.784.959,46	11.107.533,92
M,N	Jasa Perusahaan	9.474.538,92	9.720.876,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.867.861,44	5.458.246,46
P	Jasa Pendidikan	9.668.100,19	9.286.988,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.254.593,89	6.712.454,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.821.770,58	5.973.136,62
PDRB		410.969.893,88	421.655.111,12

Sumber data: *} Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2020

2) Peranan Sektoral

Struktur ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih didominasi oleh kategori lapangan usaha yang berbasis perdagangan dan jasa. Pada tahun 2020 kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan menjadi penyumbang terbesar terhadap terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya dengan kontribusi sebesar 28,22 persen. Sementara industri pengolahan pada tahun 2020 diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 18,65 persen. Untuk gambaran perkembangan peranan kategori lapangan usaha di Kota Surabaya pada tahun 2019 dan 2020 terangkum dalam Tabel berikut:

Tabel III.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 ADHK (dalam Persen)

Kategori	Uraian	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	18,81	18,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,18
F	Konstruksi	9,87	9,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,31	28,22
H	Transportasi dan Pergudangan	4,99	5,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,30	14,97
J	Informasi dan Komunikasi	6,70	7,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,67	4,83
L	Real Estate	2,62	2,63
M,N	Jasa Perusahaan	2,31	2,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	1,29
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	1,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,42
PDRB		100,00	100,00

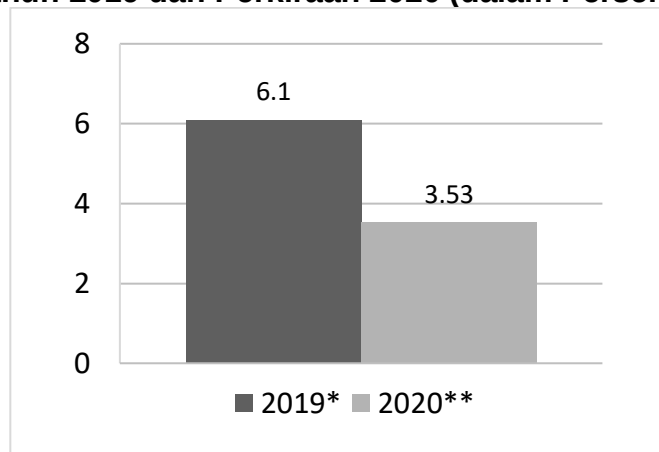
Sumber data: *} Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2020

3) Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian dunia yang tumbuh melamban ditahun 2019 diperkirakan masih berlangsung hingga 2020. Kondisi tersebut turut memberi pengaruh terhadap perekonomian Kota Surabaya pada sisi kinerja investasi dan kinerja perdagangan luar negeri atau ekspor impor. Perekonomian mitra bisnis yang kurang baik, turut mendorong keputusan para investor untuk menanamkan modalnya. Kondisi seperti ini dikenal dengan dengan *wait and see*, dimana para investor menunggu waktu yang tepat merealisasikan investasinya. Yang selanjutnya secara langsung berimbas terhadap *supply* dan *demand* terhadap suatu produk yang tercermin dari aktivitas perdagangan. Disamping itu, adanya pandemi covid-19 yang dialami hampir seluruh negara berpengaruh signifikan terhadap kinerja perekonomian nasional begitu juga perekonomian Kota Surabaya selama tahun 2020. Pandemi yang berlangsung di awal tahun 2020 tersebut memberikan tekanan terhadap seluruh sektor perekonomian, utamanya sektor terbesar Kota Surabaya seperti perdagangan, industri pengolahan, penyedia akomodasi, makanan dan minuman, jasa hiburan. Seperti yang diketahui adanya kebijakan physical distancing dan pembatasan berskala besar berdampak terhadap berkurangnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha pada sektor-sektor tersebut. Meskipun demikian, kinerja perekonomian Kota Surabaya tersebut masih tetap diperkirakan tumbuh positif di tahun 2020.

Gambar III.7
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

Tabel III.12
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Persen)

Uraian	2019*	2020**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,10%	1,71%-3,53%

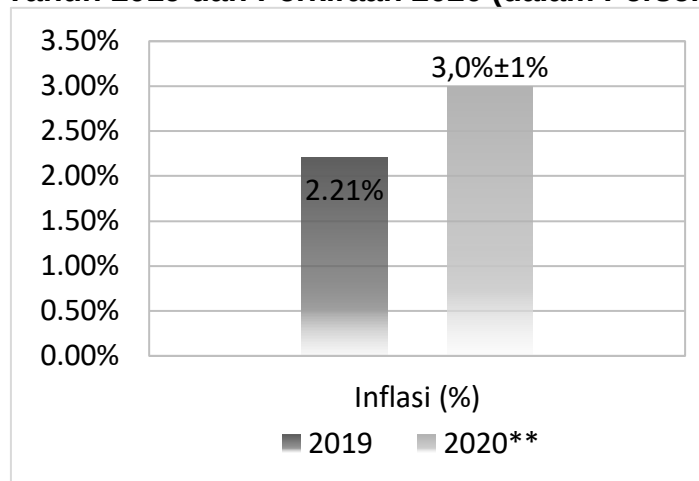
Sumber data: *) Angka Sangat Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2020

4) Tingkat Inflasi

Realisasi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 2,21 persen. Berdasarkan perkembangan indikator harga dari data BPS, capaian inflasi Kota Surabaya hingga Juni 2020, dimana capaian tersebut dikatakan cukup memuaskan karena inflasi Kota Surabaya terkendali rendah. Mencermati perkembangan tersebut maka inflasi Kota Surabaya ke depan pada tahun 2020 diperkirakan masih dalam kisaran 3,0 persen ± 1 persen.

Gambar III.8
Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Persen)



Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2020

Tabel III.13
Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Persen)

Uraian	2019	2020**
Inflasi (%)	2,21%	3,0% $\pm$ 1%

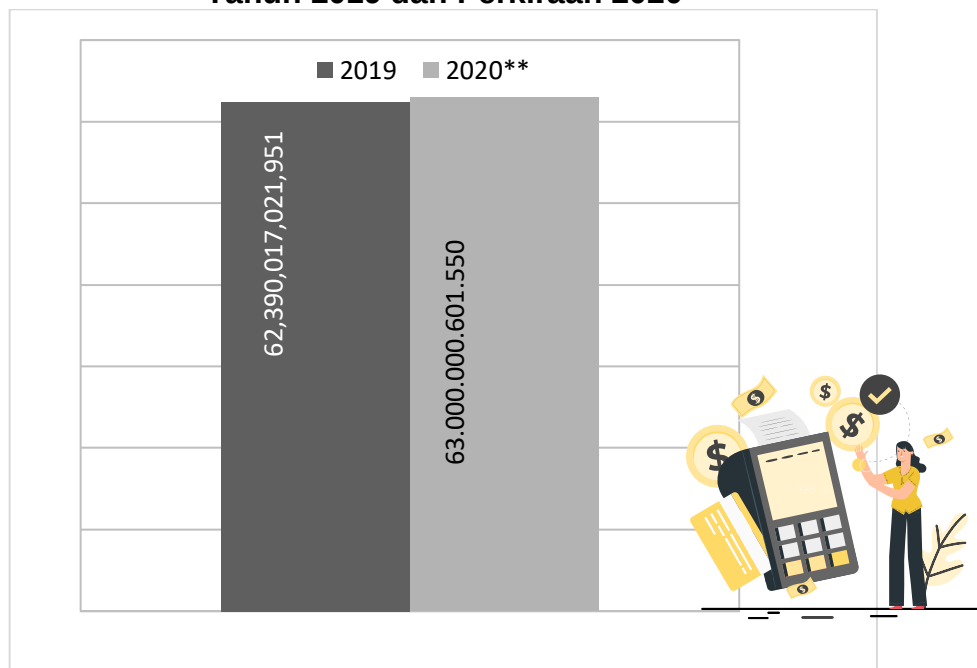
Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2020

5) Tingkat Investasi (PMA dan PMDN)

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Peran investasi dalam pembangunan di Kota Surabaya cukup tinggi. Hal itu ditunjukkan oleh nilai investasi Kota Surabaya pada tahun 2019 yang terangkum dalam tabel dibawah. Pada tahun 2019 realisasi investasi secara total sebesar Rp62.390.017.021.951. Angka tersebut merupakan akumulasi dari invetasi yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing fasilitas serta penanaman modal dalam negeri non fasilitas. Mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini serta realisasi investasi Kota Surabaya pada tahun 2019 maka nilai total investasi tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp63.000.000.601.550.

Gambar III.9
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020



Sumber data: **) Angka Proyeksi, 2020

Tabel III.14
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020

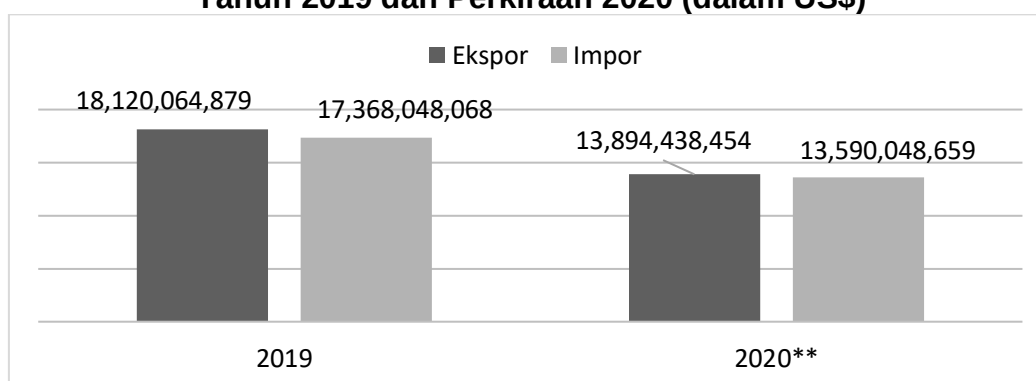
Tahun	Nilai Investasi
2019	62.390.017.021.951
2020**	63.000.000.601.550

Sumber data: **) Angka Proyeksi, 2020

6) Ekspor dan Impor

Sejalan dengan perekonomian global terkini maka pada tahun 2020 kinerja ekspor Kota Surabaya diperkirakan mencapai US\$13.894.438.454 sementara kinerja impor diperkirakan sebesar US\$13.590.048.659. Perkiraan tersebut tentunya dipengaruhi oleh kinerja ekonomi global dan mitra dagang Kota Surabaya yang akhirnya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran komoditi ekspor impor Kota Surabaya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.15.

Gambar III.10
Ekspor – Impor Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam US\$)



Sumber data: Bappeko Kota Surabaya, diolah 2020

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

Tabel III.15
Ekspor – Impor Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam US\$)

Tahun	2019	2020**
Ekspor	18.120.064.879	13.894.438.454
Impor	17.368.048.068	13.590.048.659

Sumber data: Bappeko Kota Surabaya, diolah 2020

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka TPT di Kota Surabaya pada tahun 2020 diperkirakan masih dalam kisaran angka 6,4-5,95 persen. Hal tersebut mempertimbangkan daya tarik Kota Surabaya sebagai pasar tenaga kerja bagi para pencari kerja disekitar wilayah

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Kota Surabaya yang menjadi faktor yang memengaruhi angka pengangguran kedepan. Perkiraan angka TPT tersebut terangkum dalam Tabel III.16.

Gambar III.11
Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2019 dan 2020 (dalam persen)



Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya dlm RPJMD Kota Surabaya

Tabel III.16
Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2019 dan 2020 (dalam persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2019*	5,87
2020**	6,40-5,95

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya dlm RPJMD Kota Surabaya

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan masih mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2020, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Penyebaran COVID-19 yang telah melanda di hampir seluruh wilayah Indonesia tentunya Kota Surabaya juga merasakan dampaknya pada beberapa aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk mempercepat penanganan COVID-19 perlu dilakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat terutama dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam memprioritaskan anggaran untuk penanganan dampak penularan COVID-19 agar perekonomian Kota Surabaya bisa stabil kembali dan bisa mensejahterakan masyarakat Surabaya.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Surabaya Tahun 2017 - 2020 dituangkan kedalam tabel III.17 sebagai berikut

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Tabel III.17
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2017 - 2020

No	Uraian	Realisasi			Target	
		APBD Tahun 2017	APBD Tahun 2018	APBD Tahun 2019	APBD Tahun 2020	RKPD Perubahan Tahun 2020
1	Pendapatan Asli Daerah					
1.1	Pajak Daerah	3.595.670.492.734	3.817.402.592.324	4.018.722.251.948	4.313.465.165.227	3.770.223.284.323
1.2	Retribusi Daerah	557.966.574.670	346.798.583.545	396.244.802.736	370.797.682.018	370.797.682.018
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	134.668.941.612	140.036.260.033	268.575.571.841	167.501.717.512	167.501.717.512
1.4	Lain-lain PAD yang sah	873.538.562.156	668.793.568.826	698.377.627.285	732.862.558.222	732.862.558.222
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.161.844.571.172	4.973.031.004.727	5.381.920.253.810	5.584.627.122.979	5.041.385.242.075
2	Dana Perimbangan					
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	375.422.942.034	478.358.706.741	366.599.677.176	499.291.555.130	440.503.214.603
2.2	Dana Alokasi Umum	1.211.713.876.000	1.211.713.876.000	1.254.344.402.000	1.330.442.744.000	1.209.468.472.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	378.498.806.664	398.797.386.102	380.383.564.271	436.592.082.000	405.034.183.539
	Jumlah Dana Perimbangan	1.965.635.624.698	2.088.869.968.843	2.001.327.643.447	2.266.326.381.130	2.055.005.870.142

Sumber data: OPD penghasil

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Uraian	Realisasi			Target	
		APBD Tahun 2017	APBD Tahun 2018	APBD Tahun 2019	APBD Tahun 2020	RKPD Perubahan Tahun 2020
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
3.1	Hibah	0	181.544.145.050	193.272.300.435	183.711.200.000	207.145.000.000
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	853.167.802.800	880.120.602.049	1.099.625.542.091	950.443.102.605	538.783.274.496
3.3	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.903.400.000	2.903.400.000	3.371.400.000	4.020.429.000	3.705.400.000
3.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.021.765.000	48.750.000.000	85.635.881.000	93.958.618.000	90.634.775.000
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		906.092.967.800	1.113.318.147.099	1.381.905.123.526	1.232.133.349.605	840.268.449.496
Jumlah Pendapatan Daerah		8.033.573.163.670	8.175.219.120.669	8.765.153.020.783	9.083.086.853.714	7.936.659.561.713

Sumber data: OPD penghasil

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2020 dikarenakan:

1. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemi COVID -19;
2. Pengembangan efisiensi dan transparan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalitas;
4. Dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
5. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan Retribusi Daerah;
6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Realisasi dan proyeksi belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2017 - 2020 yang dituangkan kedalam tabel III. 18 berikut ini:

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Tabel III.18
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Surabaya Tahun 2017 - 2020

No	Uraian	Realisasi			Target	
		APBD Tahun 2017	APBD Tahun 2018	APBD Tahun 2019	APBD Tahun 2020	RKPD Perubahan Tahun 2020
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.2	Belanja Pegawai	1.960.289.143.905	1.857.794.385.641	2.067.878.541.557	2.245.785.024.378	2.121.008.459.307
2.1.3	Belanja Bunga	-			-	-
2.1.4	Belanja Subsidi				-	-
2.1.5	Belanja Hibah	111.504.410.055	81.167.517.434	95.832.553.683	378.514.602.241	337.910.500.236
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial				-	-
2.1.7	Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota		9.254.742.990	2.218.293.630	750.000.000	750.000.000
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota	1.376.863.000	2.158.290.000	1.774.968.000	8.677.850.000	8.677.850.000
2.1.9	Belanja Tidak Terduga		6.085.899.644	1.574.969.146	15.000.000.000	15.000.000.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.073.170.416.960	1.956.460.835.709	2.169.279.326.016	2.648.727.476.619	2.483.346.809.543

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Uraian	Realisasi			Target	
		APBD Tahun 2017	APBD Tahun 2018	APBD Tahun 2019	APBD Tahun 2020	RKPD Perubahan Tahun 2020
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	435.954.095.330	483.644.287.890	490.676.214.454	470.104.960.728	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.885.392.981.721	3.306.763.333.391	3.748.395.575.280	4.121.863.608.160	
2.2.3	Belanja Modal	2.517.891.658.246	2.430.061.039.309	2.754.304.824.082	3.081.529.510.506	
Jumlah Belanja Langsung		5.839.238.735.298	6.220.468.660.590	6.993.376.613.816	7.673.498.079.394	6.246.127.805.810
Total Jumlah Belanja		7.912.409.152.257	8.176.929.496.299	9.162.655.939.832	10.322.225.556.013	8.729.474.615.353

Sumber data : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Berdasarkan visi Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 yaitu **“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”**, Belanja Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2020 disesuaikan dengan tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 yaitu **“Percepatan Peningkatan Daya saing Melalui Sumber Daya manusia yang Berkualitas dan Infrastruktur Ekologis berkelanjutan”** diarahkan untuk :

1. Penyesuaian belanja untuk penanganan pandemi COVID -19;
2. Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, Kesehatan, sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan;
4. Pemanfaatan Belanja Daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung;
5. Transparansi pengelolaan Belanja Daerah dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, kapitasi dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
7. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil guru maupun non guru;
8. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;
9. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan biaya operasional kepada SD/MI dan SMP/MTs Negeri/Swasta, serta tambahan perbaikan penghasilan bagi guru di Sekolah Negeri/Swasta;

10. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sesuai penerimaan dan target, penerimaan perkiraan pembiayaan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang dicantumkan pada APBD Murni Tahun 2019 sebesar Rp1.249.138.702.299,- sedangkan realisasi Silpa tahun 2019 sebesar Rp802.815.053.640,- maka terjadi penyesuaian sebesar Rp 446.323.648.659,-

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 tidak ada perubahan yaitu sebesar Rp10.000.000.000,-.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kota Surabaya Tahun 2017 - 2020 yang kemudian dituangkan ke dalam tabel III.19 berikut:

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Tabel III.19
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2017 - 2020

No	Uraian	Realisasi			Target	
		APBD Tahun 2017	APBD Tahun 2018	APBD Tahun 2019	APBD Tahun 2020	RKPD Perubahan Tahun 2020
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	1.068.140.827.993	1.201.993.194.680	1.200.284.819.051	1.249.138.702.299	802.815.053.640
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.300.000	2.000.000	33.153.638		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		1.068.144.127.993	1.201.995.194.680	1.200.317.972.689	1.249.138.702.299	802.815.053.640
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Penyertaan Modal	0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000

Sumber data : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Tema pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2020 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2020 dan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Tema pembangunan nasional tahun 2020 adalah *"Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas"*, sedangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 adalah *"Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing"*, sehingga tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 adalah :

***" Percepatan Peningkatan Daya Saing Melalui Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Infrastruktur Ekologis Berkelanjutan "***

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Surabaya

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan
		Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan
		Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi
		Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pendidikan memenuhi standar
		Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Indeks prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional
		Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Penurunan Penduduk Miskin	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani
	Mengurangi pengangguran	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketertiban umum	Rasio pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
		Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai-nilai keagamaan

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
		Meningkatkan perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per 1.000 penduduk
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks Penanggulangan Bencana
		Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Persentase ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)
		Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur	Persentase pengamanan aset tanah dan saluran untuk pembangunan infrastruktur
		Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
		Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset
		Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum
		Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi
		Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks Genangan
		Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio $\leq 0,95$
		Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Persentase tingkat Keandalan Jaringan Jalan
		Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
	Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota		Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)
		Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara
		Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Air Permukaan
			Indeks Kualitas Udara Ambien
			Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban
		Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS
		Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah
4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan
		Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Persentase budaya yang dapat dilestarikan
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa	Meningkatkan sistem logistik perdagangan dan produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai ekonomi	PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Meningkatkan realisasi investasi	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi
			Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni bagi MBR	Nilai Realisasi Investasi
			Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
dan permukiman yang ramah lingkungan	permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya
		Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP
		Meningkatkan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat
			Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program
		Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK
			Persentase kontribusi pajak terhadap PAD
		Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi
		Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Rasio Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai
			Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan kota dalam dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kota Surabaya juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Sasaran pembangunan kota tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Perangkat Daerah.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kota Surabaya yang telah tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 tersebut masih relevan, untuk Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global
2. Terpeliharanya stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerukunan tata kehidupan bermasyarakat
3. Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi
4. Melestarikan budaya lokal untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat
5. Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional
6. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing kota surabaya dalam menghadapi persaingan global
7. Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam Tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	ISU STRATEGIS KOTA SURABAYA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020
1. Pembangunan Manusiadan Pegentasan Kemiskinan	1. Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global 4. Melestarikan budaya lokal untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat	1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	2. Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	6. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing kota surabaya dalam menghadapi persaingan global	2. Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Ril, Industrialsasi dan Kesempatan Kerja	3. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan, serta perluasan kesempatan kerja	5. Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional	3. Peningkatan peran sector perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidp	4. Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air. Energy, dan pelestarian lingkungan	3. Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi	4. Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan energi alternatif
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban	2. Terpeliharanya stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerukunan tata	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	ISU STRATEGIS KOTA SURABAYA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020
		kehidupan bermasyarakat	
		7. Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik	

Isu strategis pembangunan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel IV.3
Penjabaran Isu Strategis Berdasarkan Urusan

No	Urusan	Isu Strategis
1	PENDIDIKAN	Aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan bagi jenjang pendidikan dasar
		Kualitas layanan pendidikan
		Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kualifikasi akademik serta kompeten di semua jenjang pendidikan
		Aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal bagi seluruh masyarakat
		Perwujudan kerjasama di bidang pendidikan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat
2	KESEHATAN	Perwujudan lingkungan sehat di masyarakat
		Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi warga miskin dan semua segmen masyarakat (ibu, anak, bayi, balita, lansia, dll)
		Ketersediaan, standarisasi, kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		Kualitas layanan kesehatan masyarakat baik ibu, anak, bayi, balita, lansia, maupun segmen masyarakat lainnya
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Ketersediaan dan kualitas sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas
		Rencana tata ruang yang dapat diterapkan sebagai pedoman pembangunan kota
		Sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Urusan	Isu Strategis
		Infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien Sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien Pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat Pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang memadai dan ramah lingkungan
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum untuk menciptakan situasi yang aman, tentram, dan kondusif
6	SOSIAL	Peningkatan upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan memberdayakan keluarga miskin dan kelompok usia produktif
7	TENAGA KERJA	Peningkatan kualitas angkatan kerja sehingga mampu bersaing dan dapat diterima di dunia kerja Perluasan lapangan kerja bagi warga kota Penciptaan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis Peningkatan volume usaha UMKM serta kualitas kelembagaan koperasi
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9	PANGAN	Peningkatan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
10	PERTANAHAN	Perwujudan keabsahan kepemilikan aset untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan umum
11	LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan secara efektif dan efisien Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas Peningkatan potensi masyarakat untuk partisipasi pembangunan
12	ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok usia produktif
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana Peningkatan pengendalian arus urbanisasi Perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Urusan	Isu Strategis
15	PERHUBUNGAN	Pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda
		Penyediaan dan penuntasan pembangunan jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan yang memadai
		Penyediaan sistem manajemen lalu lintas yang berkualitas dan angkutan umum massal yang nyaman, aman dan cepat serta ramah lingkungan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat
		Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas
		Peningkatan volume usaha UMKM serta kualitas kelembagaan koperasi
18	PENANAMAN MODAL	Peningkatan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
		Peningkatan kinerja investasi / akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
		Peningkatan akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Peningkatan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
		Peningkatan dan pertahanan prestasi olahraga
20	STATISTIK DAN PERSANDIAN	Perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat
21	KEBUDAYAAN	Perwujudan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
22	PERPUSTAKAAN	Perwujudan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
23	KEARSIPAN	Perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan produktivitas pertanian perkotaan dan perikanan
		Pengembangan teknologi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan
25	PARIWISATA	Pengembangan dan pengoptimalan wisata religi, heritage, kuliner, belanja, kesehatan, dan wisata lainnya
		Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kota Surabaya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar
		Perwujudan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat
		Penyediaan infrastruktur dan utilitas yang memudahkan investor
26	PERTANIAN	Peningkatan produktivitas pertanian perkotaan
27	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Peningkatan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan
28	PERDAGANGAN	Perwujudan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional
		Pengembangan dan penerapan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional

No	Urusan	Isu Strategis
		Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
29	PERINDUSTRIAN	Peningkatan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2020 serta Provinsi Jawa Timur dalam RKPD 2020. Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kota Surabaya Tahun 2020



TEMA RKP 2020

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas



TEMA RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2020

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing



TEMA RKPD KOTA SURABAYA 2020

Percepatan Peningkatan Daya Saing Melalui Sumber Daya Berkualitas dan Infrastruktur Ekologis Berkelanjutan

Tabel IV.4

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Surabaya Tahun 2020

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
1	Pembangunan Manusia dan Pegentasan Kemiskinan	1. Meningkatkan keterjangkauan perlinungan social bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan 2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta 3. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk 4. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan 5. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	1. Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian khusus 2. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan PK-PLK, kompetensi guru dan sarana prasarana 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih 4. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh 5. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender 6. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dan mengurangi kawasan kumuh	Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta penguatan nilai kebangsaan, budaya lokal dan minat baca	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal melalui penyediaan sarana prasarana, tenaga pendidik berkualitas serta penunjang operasional 2. Meningkatkan kualitas layanan baca 3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan masyarakat 4. Mempertahankan prestasi olahraga serta Meningkatkan potensi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja 5. Meningkatkan pelayanan, keterampilan, pemberdayaan dan perlindungan bagi PMKS serta ibu dan anak 6. Meningkatkan penguatan nilai kebangsaan dan budaya lokal
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	1. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau 2. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah,	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	1. Memperkuat konektivitas dengan meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara dalam mendukung keadilan akses bagi masyarakat daerah marjinal 2. Mengoptimalkan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika	Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dengan sistem transportasi berkelanjutan dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah didukung	1. Meningkatkan system manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah 2. Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan dan jembatan regional dan nasional

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
		keterpadua multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju 3. Meningkatkan standard bangunan dan memperkuat rantai paskan konstruksi melalui inovasi kebencanaan 4. Membangun infrastruktur transportasi yag mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan system jaringan utama logistic 5. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan 6. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital		3. Meningkatkan manajemen penanganan kebencanaan	dengan sistem logistik dan hub yang optimal	3. Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarana
3	Nilai Tambah Sektor Ril, Industrialsasi dan	1. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM	Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai	1. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kerakyatan pada kategori pangan dan pertanian, kemaritiman dan	Peningkatan peran perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota dengan mendorong keterlibatan dunia	1. Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
	Kesempatan Kerja	2. Mempercepat transformasi structural 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing 4. Menurunkan deficit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi 5. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan, serta perluasan kesempatan kerja	perikanan, energy dan mineral serta K-UKM 2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi pada sumber daya air dan sumber daya energy 3. Akselerasi kepariwisataan melalui optimalisasi aksesibilitas, amenitas, dan atraksi 4. Meningkatkan produktivitas SDM Pertanian, industry, dan pariwisata melalui penguatan vokasi dan kompetensi 5. Mengembangkan industrialisasi berbasis digital utamanya pada ekonomi kreatif	usaha dalam pembangunan	2. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro 3. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian, kelautan dan perikanan 4. Memperkuat permodalan usaha mikro 5. Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha 6. Meningkatkan daya saing usaha mikro melalui pengembangan desiminasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas SDM
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidp	1. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energy 2. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas 3. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air 4. Meningkatkan daya dukung, daya tamping serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim 5. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi, dan pelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatkan manajemen pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan 2. Melestarikan lingkungan hidup melalui peningkatan peran serta masyarakat secara partisipatif 3. Meningkatkan ketahanan energy melalui pengembangan energi alternatif	Pemantapan kualitas lingkungan hidup, kawasan permukiman dan pengembangan energi alternatif	1. Menerapkan system manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU Hemat Energi secara berkala 2. Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan 3. Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	1. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan 2. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional 3. Menegakkan hukum dan anti korupsi 4. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas 5. Meningkatkan keamanan siber	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi 3. Mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah 2. Meningkatkan pengendalian keamanan dan ketenteraman lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat 3. Meningkatkan pengendalian kenyamanan lingkungan 4. Meningkatkan kualitas utilitas teknologi informasi

4.2.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Sasaran Pembangunan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.5

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 dengan Sasaran Pembangunan Kota Surabaya

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	(1) Dinas Kesehatan (2) RSUD Bhakti Dharma Husada (3) RSUD dr. Mohammad Soewandhie
	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Dinas Sosial
	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pendidikan memenuhi standar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Indeks prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan	Dinas Sosial
	Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks Penanggulangan Bencana	(1) Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (2) Dinas Pemadam Kebakaran
2. Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah	Pengembangan sistem penanggulangan bencana alam yang antisipatif dan tanggap		
	Pengembangan sistem penanggulangan bencana kebakaran yang antisipatif dan tanggap		
	Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Persentase ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur	Persentase pengamanan aset tanah dan saluran untuk pembangunan infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah	Badan Perencanaan Pembangunan

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
	dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	
	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (2) Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks Genangan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio $\leq 0,95$	Dinas Perhubungan
	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Persentase tingkat Keandalan Jaringan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)	Dinas Perhubungan
		Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Air Permukaan	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara Ambien	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase wilayah dengan	Dinas Lingkungan Hidup

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
		rumah yang dilengkapi jamban	
	Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	PDRB	(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (3) Dinas Perdagangan
3. Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota	Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	(1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (2) Dinas Perdagangan
	Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan energi alternatif	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni bagi MBR	Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya	Dinas Sosial
	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Persentase jumlah kegiatan usaha yang mengalami peningkatan efisiensi energi	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam	Persentase peran serta	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
	pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	
	Meningkatkan upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif di gedung milik pemerintah kota	Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif di gedung milik pemerintah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketertiban umum	Rasio pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai-nilai keagamaan	Dinas Sosial
	Meningkatkan perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per 1.000 penduduk	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Bagian Organisasi
	Meningkatkan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	Badan Kepegawaian dan Diklat
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat	(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2) Dinas Tenaga Kerja (3) Dinas Perdagangan (4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (7) Dinas Perhubungan (8) Dinas Lingkungan Hidup (9) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
			(10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan
	Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Rasio Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai	Inspektorat
		Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	Inspektorat
		Persentase pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti	Inspektorat

Terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan daerah serta perlunya dilakukan penyesuaian belanja dan perubahan alokasi belanja untuk kebutuhan penanganan Covid-19 sesuai dengan amanat Permendagri 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penyesuaian alokasi belanja Covid-19 mengakibatkan diperlukannya penjadwalan serta penyesuaian target indicator pada sasaran serta target program. Sebagai berikut :

Table IV.6

Perubahan Target Sasaran dan Program Akibat Pandemi Covid-19

No	Indikator Sasaran/Program	Target	
		Semula	Menjadi
	Sasaran		
1	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	55,00%	45,00%
2	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi	31,00%	15,63%
3	Nilai Realisasi Investasi	Rp71.161.699.310.450	Rp63.637.817.362.390
	Program		
1	Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	70,00%	32%
2	Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	45,16%	32,26%
3	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	50,01%	10,60%
4	Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	142	140
5	Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	15,00%	2,00%
6	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	10,00%	6,82%
7	Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15,00%	6,67%
8	Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	85,00%	70,00%
9	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	65,00%	50,00%
10	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	67,50%	50,00%
11	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	15,00%	10,00%

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

No	Indikator Sasaran/Program	Target	
		Semula	Menjadi
12	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	79,00%	55,00%
13	Persentase jaringan jalan yang terbangun	0,68%	0,33%
14	Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	28,64%	12,70%
15	Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional	0,15%	0,03%
16	Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	1,70%	0,96%
17	Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	4,00%	2,21%
18	Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0,12%	0,08%
19	Persentase peserta KB baru	97,92%	53,25%
20	Persentase penambahan koleksi buku	94,41%	90,41%
21	Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	50,00%	32%
22	Persentase pemulangan PMKS	30,00%	20%
23	Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100,00%	66,50%
24	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	60,00%	51%
25	Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	85,00%	46%
26	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5,10%	0,50%
27	Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	60,00%	55,00%

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Surabaya merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2020

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Selain disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, dengan terjadinya Pandemi Covid-19 pada semester pertama tahun 2020 serta sesuai dengan amanat Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan refocusing dan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel V.1 sebagai berikut:

Tabel V.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
1. Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	1. Pembangunan Manusiadan Pegentasan Kemiskinan	1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Program Partisipasi Kepahlawanan	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	62 kali	40 kali	31 kecamatan	Dinas Sosial
					Pemeliharaan TMP dan MPN	7 lokasi	7 lokasi	TMP Kusuma Bangsa, TMP Ngagel, TMP 10 Nopember, MPN WR. Soepratman, MPN Dr. Soetomo, MPN Bung Tomo, MPN KH. Mas Mansyur	Dinas Sosial
			Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	10 bangunan	7 bangunan	Puskesmas/Puskesmas Pembantu serta RSUD yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak / Multiyears)	1 bangunan	1 bangunan	RSUD milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru (Tahun Jamak / Multiyears)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	29 bangunan	80 bangunan	Fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	160 bangunan	160 bangunan	Gedung Pendidikan milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	27 dokumen	27 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	11 unit	12 unit	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	57 unit	21 unit	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Penyediaan Sarana Olahraga	6 jenis	6 jenis	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	58 dokumen	58 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Perbaikan Prasarana Olahraga	133 unit	90 unit	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Program Pembinaan dan Pemasarakat n Olahraga	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	41 kali	4 kali	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	14 kali	2 kali	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	26 kali	4 kali	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	10 kali	2 kali	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	29 kali	2 kali	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	512 kali	119 kali	Balai Budaya Surabaya, Balai Pemuda Surabaya, Ruang publik (taman, Jalan Tunjungan, dan Balai Pemuda)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	3 kali	1 kali	Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	14 lokasi	14 lokasi	Taman - taman milik Pemerintah Kota Surabaya dan tempat - tempat usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Perlindungan Budaya Lokal	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	250 lokasi	250 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	9 kali	1 kali	Jl. Tunjungan, Tempat Tempat Yang Berhubungan dengan Histori Kepahlawanan Arek Surabaya, Obyek Obyek Bersejarah di Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatkan derajat kesehatan	Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	4 jenis	3 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	200 orang	86 orang	Eksternal dan Internal	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	3 jenis	3 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	1 jenis	1 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	90 jenis	72 jenis	63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	17 jenis	16 jenis	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2 jenis	2 jenis	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	154 lembaga	154 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	154 lembaga	154 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Surveilans dan Imunisasi	63 lembaga	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	64 lembaga	64 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas dan UPTD Gudang Farmasi	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	63 lembaga	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 lembaga	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	63 lembaga	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit	75 kali	56 kali	RSUD BDH	RSUD Bhakti Dharma Husada

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Promosi Kesehatan Rumah Sakit	115 kali	98 kali	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	5442 sampel	2000 sampel	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	11751 orang	11751 orang	RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pelayanan Medik Rumah Sakit	2218 orang	2494 orang	RSUD Bhakti Dharma Husada dan domisili pasien RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pelayanan Gizi Rumah Sakit	28340 orang	23343 orang	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	180 kali	180 kali	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	155 kali	99 kali	RSUD dr. Moahamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	1 jenis	1 jenis	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	1 aplikasi	1 aplikasi	Seluruh Layanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
					Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	63 Lembaga	63 Lembaga	Seluruh Wilayah Kerja Puskesmas Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	3 jenis	3 jenis	rsud bhakti dharma husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1 jenis	1 jenis	RSUD BDH	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	40 lembaga	40 lembaga	40 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Primer	64 lembaga	64 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	134 lembaga	32 lembaga	Rumah Sakit, Klinik Utama di Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
					Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	900 lokasi	900 lokasi	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	64 lembaga	46 lembaga	Rumah ABK dan Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan
				Program Sumber Daya Kesehatan	Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	5 dokumen	4 dokumen	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	27 kali	9 kali	Kantor Dinas Kesehatan dan Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	46 jenis	38 jenis	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	4 item	2 item	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1 Jenis	1 Jenis	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pengadaan bahan habis pakai penanggulangan TBC (DAK bidang kesehatan)	3 Item	3 Item	Surabaya	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan)	3 item	3 item	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2 jenis	2 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Program Jaminan Kesehatan	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	366751 orang	466673 orang	Puskesmas dan Jaringannya se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	182210 orang	182210 orang	Puskesmas dan Jaringannya se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	691 kunjungan	691 kunjungan	Puskesmas/Puskesmas POKED/RS Pemerintah/ RS TNI/POLRI	Dinas Kesehatan
					Pelayanan kesehatan keluarga	64 Lembaga	64 Lembaga	Wilayah Kerja Puskesmas di Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	366 orang	331 orang	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan ketahanan pangan	Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	15 laporan	15 laporan	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	8 kali	4 kali	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	6 jenis	6 jenis	Sentra Pertanian Terpadu Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	300 orang	300 orang	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pembibitan	13 jenis	12 jenis	Miniagrowisata, STA Karah dan Jambangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	125 orang	100 orang	DKPP, Taman Surya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	30 kali	18 kali	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar	2060 sampel	2060 sampel	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengelolaan Sentra Olahan Pangan	11 kali	11 kali	Putat Jaya Lebar B/27 dan Putat Jaya 2A/19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengembangan Diversifikasi Pangan	28 kali	28 kali	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan	Promosi Pemasaran Produk Pertanian	72 kali	59 kali	Taman Kota dan ruang publik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pembinaan Pemeliharaan Lahan Pekarangan	485 orang	184 orang	31 Kecamatan di Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	5 Jenis	5 Jenis	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	534 unit	464 unit	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	172 unit	47 unit	Kawasan pesisir Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	12 laporan	12 laporan	Kawasan Pesisir di Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis	1562 kali	1562 kali	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatkan kualitas pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	13000 orang	13000 orang	TPA/TPQ hasil verifikasi dari Kemenag	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	2 kali	2 kali	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	31 lembaga	31 lembaga	PKBM yang ditunjuk	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	234 lembaga	209 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	12 kali	5 kali	Seluruh lembaga sekolah di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1368 lembaga	1368 lembaga	Pos Paud Terpadu (PPT) di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	12010 orang	12010 orang	Lembaga PAUD di Kota Surabaya dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	18 kali	14 kali	Kota Surabaya dan Luar Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	3 kali	2 kali	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	2 lembaga	2 lembaga	Lembaga PAUD penerima DAK PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Sarana Belajar PKBM yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	4 lembaga	4 lembaga	PKBM Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik	2 lembaga	2 lembaga	Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
				Program Pengembangan Sekolah Dasar	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	302 lembaga	302 lembaga	SD Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	90799 orang	45724 orang	Semua sekolah Dasar di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan Ujian Sekolah	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	302 lembaga	302 lembaga	SD Negeri dan SD Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Facilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	73 lembaga	55 lembaga	Sekolah Dasar Negeri penyelenggara Kelas Layanan khusus dan Sekolah Inklusi serta Pusat Layanan Disabilitas	Dinas Pendidikan
					Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	259 lembaga	217 lembaga	Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang mengikuti proses akreditasi	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	658 lembaga	658 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	302 lembaga	285 lembaga	SD Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	5 kali	1 kali	SD Negeri dan SD Swasta di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	17 lembaga	17 lembaga	Lembaga SD Negeri Penerima DAK Fisik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
				Program Pengembangan Sekolah Menengah	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	63 lembaga	63 lembaga	SMP Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Facilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	40993 orang	40993 orang	Semua Sekolah Menengah di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan Ujian Nasional	Dinas Pendidikan
					Facilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	63 lembaga	63 lembaga	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA	Dinas Pendidikan
					Facilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	37 lembaga	37 lembaga	Seluruh Lembaga Sekolah dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	294 lembaga	294 lembaga	Sekolah Menengah Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang mengikuti proses akreditasi/reakreditasi dan Lomba Budaya Mutu	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	245 lembaga	245 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	63 lembaga	63 lembaga	SMP Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	1 kali	1 kali	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	6 lembaga	6 lembaga	Lembaga SMP Negeri Penerima DAK Fisik Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Manajemen Sekolah	Facilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	2 kali	2 kali	Dinas Pendidikan dan lembaga SD Negeri dan SMP Negeri pelaksana PPDB	Dinas Pendidikan
					Facilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	2567 lembaga	942 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	365 lembaga	365 lembaga	Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	1 kali	1 kali	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Facilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	2031 orang	2031 orang	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	957 lembaga	957 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	2 dokumen	2 dokumen	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
			Meningkatkan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Layanan Baca	Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	500 lembaga	500 lembaga	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Gedung di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Perpustakaan Binaan, Yayasan, Perpustakaan Non Pemerintah dan Balai Pemuda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan	Pengelolaan Layanan Baca	1494 lokasi	1494 lokasi	Perpustakaan Umum Kota Surabaya (Rungkut dan Balai Pemuda), Sekolah, Taman di Kota Surabaya, Balai RW, Kelurahan dan Kecamatan, Yayasan, Panti Asuhan, TK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pengembangan Minat dan Budaya Baca	239 kali	17 kali	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya, Taman Flora, Balai Pemuda, dan Lokasi pameran oleh Pemerintah Kota di wilayah Kota Surabaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat	Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	8084 Buku	1581 Buku	Perpustakaan Umum Kota Surabaya (Rungkut dan Balai Pemuda) serta Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Program Peningkatan Prestasi Pemuda	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	670 orang	210 orang	Rumah Kreatif Studio Musik Gelanggang Remaja	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	1050 Orang	1050 Orang	Gedung Fasilitas Umum/Publik	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	4565 peserta	1520 peserta	Gedung Fasilitas Umum / Publik dan Gedung Milik Pemerintah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	30 kali	30 kali	Gedung Instansi Pemerintah dan Gedung Fasilitas Umum / Publik	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	100 orang	22 orang	Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	15 lembaga	5 lembaga	Surabaya, Luar Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pembinaan Keluarga Sejahtera	1240 orang	180 orang	seluruh Kecamatan dan/atau tempat lain di Kota Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	1350 orang	978 orang	seluruh Kecamatan dan/atau tempat lain di Kota Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	1 bangunan	1 bangunan	Jl. Klakah Rejo Gang Sampurna No.21 Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	2 lembaga	2 lembaga	Mall Pelayanan Publik, Jin. Tunjungan No. 1-3, Lantai 2, Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	926 orang	926 orang	Gedung Siola	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	431 lembaga	279 lembaga	Kota Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	154 kampung	154 kampung	154 Kelurahan yang ada di kota Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200 kasus	200 kasus	Kota Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyelenggaraan Operasional Shelter	2 lembaga	2 lembaga	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. Gayungsari Barat XII GA-GB 15	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	29 kali	20 kali	Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289 lembaga	72 lembaga	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	2 dokumen	2 dokumen	Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Keluarga Berencana	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	31 lembaga	31 Kecamatan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2028 orang	1566 orang	31 Kecamatan dan Gedung milik Pemkot Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	650 orang	290 orang	Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas dan Bakti Sosial Kecamatan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	80 Paket	62 Paket	DP5A, ULP, BKKBN	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	4 unit	4 unit	Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Fasilitasi Pemakaman	960 Orang	300 Orang	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	24 Kali	22 Kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis	4416 Kali	4416 Kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
				Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial	Pembinaan dan Pemulangan PMKS	1420 orang	1025 orang	Kantor Dinas Sosial, UPTD Dinas Sosial dan Luar Kota Surabaya	Dinas Sosial
					Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi anak	12 Kali	12 Kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi lanjut usia	12 Kali	12 Kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	12 Kali	12 Kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	93 orang	93 orang	Kantor UPTD Babat Jerawat Jalan Raya Babat Jerawat Nomor 139 Surabaya	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	150 orang	Kantor UPTD Griya Werdha Jalan Jambangan Baru Tol Nomor 15 A Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	45 orang	45 orang	Kantor UPTD Kampung Anak Negeri Jalan Wonorejo Timur Nomor 130 Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1100 orang	1100 orang	Kantor UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih Jalan Keputih tegal No.32 Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	65 orang	65 orang	Kantor UPTD Pondok Sosial Kalijudan Jalan Villa Kavling 2-4 Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan peran serta lanjut usia	34 kali	10 kali	Kota Surabaya	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	17 lembaga	17 lembaga	Kota Surabaya	Dinas Sosial
					Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	45 kali	31 kali	Kantor Dinas Sosial dan Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Sosial
				Program Pengendalian Layanan Sosial	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	4 kali	4 kali	31 kecamatan	Dinas Sosial
					Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	154 Kelurahan	154 Kelurahan	31 Kecamatan	Dinas Sosial
			Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	300 orang	160 orang	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	110 Kasus	110 Kasus	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	300 lembaga	200 lembaga	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	1 dokumen	1 dokumen	Pasar Sopenyono, Pasar Balongsari, Pasar Wonokromo dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Bimtek bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	60 lembaga	60 lembaga	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja	1050 orang	735 orang	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja	50 orang	25 orang	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	500 orang	200 orang	Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja bagi Wirausaha Baru	150 orang	150 orang	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Penyebarnya Informasi Pasar Kerja	7 kali	4 kali	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan Gedung yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	150 orang	75 orang	Kecamatan	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Fasilitasi Magang bagi Pencari Kerja	120 orang	120 orang	Perusahaan di wilayah Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja	604 orang	604 orang	Tempat Uji Kompetensi yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi Profesi	Dinas Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	976 orang	704 orang	Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	1 dokumen	1 dokumen	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
2. Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	2. Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	10 izin	10 izin	Menyebar di 31 Kecamatan Wilayah Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Program Penataan Ruang	Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	2 dokumen	2 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	12250 Persil	12250 Persil	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota	2 dokumen	2 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	9 Dokumen	9 Dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pengendalian Bidang Bangunan	Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	6517 data	6517 data	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pengawasan Bangunan	240 lokasi	240 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	4 dokumen	4 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur	Program Pengamanan Aset Infrastruktur	Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	40 bidang	40 bidang	Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Program Perencanaan Kota	Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	1 dokumen	1 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	1 dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
			Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	12 Kasus	12 Kasus	Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	18 obyek	18 obyek	Wilayah Tanah Aset yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	8 kali	7 kali	Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
				Program Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	100 bidang	100 bidang	Aset Tanah dan/atau Bangunan Milik Kota Surabaya baik yang berada di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya (Gresik, Pasuruan dan Sidoarjo)	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	4 dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	75 dokumen	75 dokumen	Aset Tanah dan/atau Bangunan Milik Kota Surabaya baik yang berada di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya (Gresik, Pasuruan dan Sidoarjo)	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
				Program Pengelolaan Aset Tanah	Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	7000 izin	7000 izin	Seluruh tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	1 dokumen	1 dokumen	Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	8000 lokasi	8000 lokasi	Di Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
				Program Pengelolaan Bangunan Gedung	Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	24 lokasi	24 lokasi	Bangunan sewa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, antara lain : Gedung Serba Guna	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	4600 titik	4200 titik	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	6674 rekening	6674 rekening	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	73680 titik	73680 titik	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	2 dokumen	2 dokumen	di wilayah Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	220 unit	220 unit	Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	1 lokasi	0 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	24 lokasi	24 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	1 lokasi	1 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	1222 lokasi	1222 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
				Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	12 dokumen	10 dokumen	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	1 dokumen	1 dokumen	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	35 dokumen	28 dokumen	Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	6 lokasi	5 lokasi	JLLB, JLLT, Akses Jembatan Joyoboyo, Akses Lapangan Tembak dan Jl. Prof. Dr. Moestopo, Gunungsari	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	4 dokumen	2 dokumen	Seluruh Wilayah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	4 lokasi	2 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Program Penanggulangan Bencana Alam	Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	8 jenis	8 jenis	Kantor BPB Linmas	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana	10 Jenis	10 Jenis	Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, Gedung pertemuan lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	100%	100%	31 Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
				Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	Operasional Pemadaman Kebakaran	756 orang	756 orang	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d Rayon V	Dinas Pemadam Kebakaran
					Pengendalian Bahaya Kebakaran	180 kali	120 kali	Sekolah, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Pemadam Kebakaran
					Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	60 kali	10 kali	Gedung Diklat / Instansi, Sentra Wisata Kuliner dan Pasar	Dinas Pemadam Kebakaran
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	1650 orang	232 orang	Gedung Pemerintah Kota Surabaya	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	500 orang	40 orang	Gedung Pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya dan Kelurahan di Kota Surabaya	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
				Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	210 unit	250 unit	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d Rayon V	Dinas Pemadam Kebakaran
					Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	264 bangunan	264 bangunan	Bangunan gedung di Kota Surabaya	Dinas Pemadam Kebakaran
					Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	947 unit	579 unit	Kantor Dinas Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d Rayon V	Dinas Pemadam Kebakaran
			Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Pembangunan Prasarana Transportasi	1 bangunan	1 bangunan	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pemeliharaan Prasarana Transportasi	36 lokasi	30 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	14 Lokasi	14 Lokasi	Terminal Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	8 Paket	2 Paket	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
				Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan	Pengelolaan Transportasi Umum	20 Unit	20 Unit	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	5 Kali	2 Kali	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	2 kali	2 kali	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	8 unit	8 unit	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	365 kali	365 kali	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	10 Dokumen	7 Dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
			Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	56 unit	56 unit	Rumah pompa yang menyebar di Saluran primer dan sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	25 lokasi	17 lokasi	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	2 lokasi	2 lokasi	Saluran Banyu Urip diversi Gunungsari	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	1025 lokasi	1025 lokasi	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
				Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	20 dokumen	12 dokumen	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	2 dokumen	2 dokumen	Saluran Banyu Urip diversi Gunungsari	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	50 dokumen	35 dokumen	Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	149069 unit	147069 unit	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	365 Kali	365 Kali	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan	7 Jenis	7 Jenis	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	48 kali	48 kali	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5 Jenis	5 Jenis	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengadaan Perlengkapan Jalan	1200 unit	1037 unit	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	13 dokumen	5 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Penyelenggaraan Perparkiran	1821 Lokasi	1821 Lokasi	Titik Parkir TJU dan TKP di Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pemasangan Alat Keselamatan Jalan (DAK)	1 jenis	0 jenis	Surabaya	Dinas Perhubungan
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Raya	12 lokasi	12 lokasi	Tahura Balas Klumprik, Tahura Pakal 1, Tahura Pakal 2, Tahura Sumurwelut 1, Tahura Sumurwelut 2, Tahura Sambikerep 1, Tahura Sambikerep 2, Tahura Lempung (Herbal), SPT Jeruk, Kebun Raya Mangrove Wonorejo, Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Tahura Anggrek Sememi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau	Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau	425 lokasi	425 lokasi	Taman dan jalur hijau yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pengembangan Dekorasi Kota	15 lokasi	15 lokasi	Seluruh Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota	39 lokasi	39 lokasi	Taman Kota yang Tersebar dan dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	3 Lingkungan	3 Lingkungan	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	7 unit	6 unit	Gedung Milik pemerintah kota Surabaya yang dilakukan konservasi energi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	4 dokumen	4 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Upaya Konservasi Energi	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	120 lembaga	120 lembaga	Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya dan Usaha dan/atau Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatkan kualitas udara dan air	Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	600 Unit	250 Unit	Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	96 lokasi	96 lokasi	Lokasi IPAL Milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
					Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	365 data	365 data	2 Lokasi Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yakni Kebun Bibit Wonorejo dan Kantor Kelurahan Kebonsari	Dinas Lingkungan Hidup
					Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	778 data	754 data	Perairan Pesisir di Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
					Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	50 obyek	50 obyek	Lokasi sumber dampak dan yang terdampak	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	254 lembaga	254 lembaga	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	224 sampel	224 sampel	31 Titik/lokasi air badan air (184 Sampel) , 40 Titik/lokasi lokasi pengujian udara ambien di Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Car Free Day	113 kali	65 kali	Jl. Raya Darmo; Jl. Tunjungan ; Jl. Jimerto, Jl. Jemur Andayani, Jl. Kertajaya; Jl. Kembang Jepun	Dinas Lingkungan Hidup
					Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	12 kali	6 kali	Ruang/gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya serta sekolah adiwiyata, pondok pesantren dan kamous	Dinas Lingkungan Hidup
					Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	5 dokumen	5 dokumen	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
			Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Program Kebersihan	Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	104 Kegiatan	104 Kegiatan	9 wilayah rayon kebersihan Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Selatan 1, Rayon Selatan 2, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Barat	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	364 lokasi	364 lokasi	9 Wilayah Rayon Kebersihan: Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Barat, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Selatan 1 dan Rayon Selatan 2	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	450 lokasi	450 lokasi	saluran primer, sekunder, tersier dan rumah pompa di kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional Pengangkutan Sampah	267 lokasi	267 lokasi	5 Wilayah pengangkutan sampah di Kota Surabaya: Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri	Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	3 kali	3 kali	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pengelolaan Sampah dan Limbah	Penanganan Limbah B3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	21 unit	21 unit	Workshop alat berat/ kendaraan DKRTH dan ATPM alat berat/ kendaraan	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	1688 unit	1528 unit	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	1 rekening	1 rekening	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	183 lokasi	183 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	14 lokasi	14 lokasi	14 Lokasi Pemakaman Yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Program Pengelolaan Air Limbah Kota	Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah	96 lokasi	96 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	34 lokasi	34 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni	Program Pengelolaan Rusunawa	Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	3981 lokasi	3977 lokasi	Rumah Ber-SIP dan Rumah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah memiliki Izin Pemakaian Rumah serta pengawasan dan pemanfaatan rumah susun	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pengelolaan Rumah Susun	105 blok	101 blok	Rusunawa Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
3. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan, serta perluasan kesempatan kerja	3. Nilai Tambah Sektor Rili, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	3. Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota	Mendorong pematapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Program Pemasaran Produk Usaha Mikro	Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro	330 Orang	330 Orang	Surabaya, Jawa Timur, Jakarta dan Luar Jawa	Dinas Perdagangan
					Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro	12 lokasi	12 lokasi	Sentra Usaha Mikro Jahit Bukit Barisan, Sentra Usaha Alas Kaki dan Sleeper eks lokasi Dolly, Sentra Usaha Design and Fashion Batik eks Lokasi Dolly, Sentra Usaha Mikro Merr, Sentra Usaha Mikro Tunjungan, Stand Usaha Mikro KBS, Stand Usaha Mikro JMP, Stand Usaha Park and Ride, Surabaya North Quay, Stand Usaha Delta, Stand Usaha Bandara 2 Juanda dan Stand Usaha ITC	Dinas Perdagangan
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	11 Jenis	11 Jenis	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Perdagangan
				Program Pengembangan Produk Usaha Mikro	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	708 orang	587 orang	Kantor Dinas Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Program Pengembangan Sentra Usaha	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	60 sentra usaha	21 sentra usaha	di lokasi sentra sentra usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	49 sentra usaha	49 sentra usaha	Sentra usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Program Pengembangan Usaha Koperasi	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi	175 koperasi	125 koperasi	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	178 Orang	210 Orang	Kota Surabaya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	50 kelompok	44 kelompok	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Pengawasan Koperasi	629 koperasi	629 koperasi	Lokasi koperasi yang dimonitoring	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Penilaian Kinerja Koperasi	35 koperasi	35 koperasi	Lokasi koperasi yang akan ditingkatkan dan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	179 orang/kelompok	179 orang/kelompok	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Meningkatkan realisasi investasi	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal	Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3500 perusahaan	2100 perusahaan	Tempat usaha penanam modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pengelolaan Data Investasi	41751 data	41751 data	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	4 dokumen	2 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Penyelenggaraan Promosi Investasi	3 kali	1 kali	Wilayah Jawa serta luar Jawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	Program Distribusi Perdagangan	Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	250 lokasi	250 lokasi	Gudang di kota Surabaya	Dinas Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	31 Kelompok	31 Kelompok	Kota Surabaya	Dinas Perdagangan
					Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	142 kali	200 kali	31 wilayah Kecamatan di Kota Surabaya	Dinas Perdagangan
				Program Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi promosi wisata	246 kali	67 kali	Dalam dan luar propinsi Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	93 kali	51 kali	THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	41 kali	24 kali	Gedung Balai Pemuda, Museum Sepuluh Nopember dan Tugu Pahlawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	66 kali	22 kali	Gedung pertemuan di Kota Surabaya; regional dan nasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Destinasi Wisata	Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan di Destinasi Wisata	770 kali	150 kali	Balai Pemuda Surabaya, Jl. Gubernur Suryo No.15 Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	3 kali	1 kali	Convention Hall Lt. 4 Gedung Siola	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	3 lokasi	2 lokasi	THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	2 lokasi	2 lokasi	Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Peningkatan Destinasi Wisata	6 kali	1 kali	Jl. Pahlawan s/d Taman Bungkul, Kawasan Kota Lama, sepanjang Jl. Tunjungan, Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)	6 lokasi	6 lokasi	museum yang dikelola Pemkot Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata (DAK)	280 orang	85 orang	Convention Hall Lt. 4 Gedung Siola	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	12 kali	12 kali	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	6 lokasi	6 lokasi	Tempat - tempat usaha jasa dan sarana pariwisata di kota Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4. Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, Energy, dan pelestarian lingkungan	4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	4. Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan energi alternatif	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	39 lokasi	39 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	7 bangunan	5 bangunan	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	200 Lokasi	200 Lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	99 dokumen	83 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	15 dokumen	5 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1000 Unit	684 Unit	31 Kecamatan	Dinas Sosial
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban	5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketertiban umum	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	480 kali	389 kali	31 Kecamatan Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	192 Kali	164 Kali	31 Kecamatan Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	84 Kali	65 Kali	Gedung Instansi Pemerintah dan 31 Kecamatan Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial	Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1368 kali	1368 kali	31 Kecamatan Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	1368 Kali	1368 Kali	31 Kecamatan Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	96 kali	44 kali	Taman Surya dan fasilitas olahraga di wilayah Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
					Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	132 Kali	58 Kali	Taman Surya dan fasilitas olahraga di wilayah Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Program Kesatuan Bangsa	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1250 orang	150 orang	Kota Surabaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik	31 lembaga	10 lembaga	Kota Surabaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	72 kali	17 kali	Kota Surabaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
				Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum	Kerjasama pengendalian keamanan kota	194 kali	140 kali	Kota Surabaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Ketenteraman Kota	67 kali	15 kali	Kota Surabaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	kantor BPKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah	5 dokumen	5 dokumen	kantor BPKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Bagian Umum Dan Protokol
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor Inspektorat	Inspektorat
					Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	2 dokumen	2 dokumen	Inspektorat Kota Surabaya	Inspektorat
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	9 dokumen	9 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	6 dokumen	6 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	2 dokumen	2 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	2 dokumen	2 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
				Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	1 dokumen	1 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	12 kali	12 kali	Kecamatan, Puskesmas, lokasi tertentu terkait Forum Kota Sehat di Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	1 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / Ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
				Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	72 PD	72 PD	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Badan Perencanaan Pembangunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	4 dokumen	4 dokumen	Bappeko	Badan Perencanaan Pembangunan
				Program Pengembangan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	17 data urusan	17 data urusan	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
			Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	34900 objek pajak	34900 objek pajak	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	6555 objek pajak	5138 objek pajak	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	695022 objek pajak	695022 objek pajak	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
				Program Perencanaan Anggaran Daerah	Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	5 Laporan	5 Laporan	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
				Program Penagihan Pajak Daerah	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	7201 berkas	7201 berkas	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	11224 berkas	10756 berkas	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	196762 berkas	195752 berkas	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	72000 berkas	72000 berkas	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	245 dokumen	245 dokumen	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	22 dokumen	22 dokumen	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	6 Berkas	3 Berkas	Kota Surabaya	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	72 lembaga	72 lembaga	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	900 dokumen	500 dokumen	Kantor Unit Layanan Pengadaan	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2346 unit	2346 unit	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	10091 stel	7684 stel	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Pengadaan Sarana Kedinasan	45615 unit	45615 unit	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian	Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	12 laporan	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
					Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	4 dokumen	3 dokumen	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	2 dokumen	2 dokumen	Kantor Bagian Organisasi dan PD terkait	Bagian Organisasi
				Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	20 lembaga	20 lembaga	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama dan/atau di Kota lokasi mitra kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, serta lokasi lain yang dirancang oleh pengurus Asosiasi Kerjasama Pemerintah Daerah	Bagian Administrasi Kerjasama
					Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	10 lembaga	10 lembaga	di wilayah Indonesia dan di wilayah mitra kerja sama luar negeri	Bagian Administrasi Kerjasama
					Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	63 orang	63 orang	kota/lembaga di luar negeri	Bagian Administrasi Kerjasama
					Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	29 lembaga	29 lembaga	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Bagian Administrasi Kerjasama
				Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	139 Lembaga	139 Lembaga	Kecamatan Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	40 Kali	Kecamatan Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	183 Lembaga	188 Lembaga	Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Pengembangan Kampung Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)	3 kali	3 kali	Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	414 Lembaga	414 Lembaga	Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	36 Kali	Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	157 Lembaga	158 Lembaga	Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	195 Lembaga	195 Lembaga	Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	40 Kali	Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	197 Lembaga	197 Lembaga	Kecamatan Gayungan	Kec. Gayungan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Gayungan	Kec. Gayungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	364 Lembaga	364 Lembaga	Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	33 Kali	Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	488 Lembaga	480 Lembaga	Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	215 Lembaga	217 Lembaga	Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	24 Kali	Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	168 Lembaga	168 Lembaga	Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	40 Kali	Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	220 Lembaga	220 Lembaga	Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	456 Lembaga	456 Lembaga	Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	40 Kali	Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	430 Lembaga	431 Lembaga	Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	199 Lembaga	200 Lembaga	Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	347 Lembaga	346 Lembaga	Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	377 Lembaga	376 Lembaga	Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	226 Lembaga	229 Lembaga	Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	40 Kali	Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	488 Lembaga	488 Lembaga	Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	250 Lembaga	259 Lembaga	Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	627 Lembaga	627 Lembaga	Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	40 Kali	Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	636 Lembaga	636 Lembaga	Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	356 Lembaga	356 Lembaga	Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	36 Kali	Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	439 Lembaga	439 Lembaga	Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	30 Kali	Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	323 Lembaga	323 Lembaga	Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	749 Lembaga	749 Lembaga	Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	371 Lembaga	371 Lembaga	Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	40 Kali	Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	366 Lembaga	365 Lembaga	Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	36 Kali	Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	176 Lembaga	185 Lembaga	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	40 Kali	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	210 Lembaga	210 Lembaga	Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	40 Kali	Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	278 Lembaga	280 Lembaga	Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	574 Lembaga	568 Lembaga	Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	48 Kali	Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
				Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	70 Kali	Kecamatan Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	28 Kali	Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	90 Kali	Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	75 Kali	Kecamatan Bulak	Kec. Bulak

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	80 Kali	Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	76 Kali	Kecamatan Gayungan	Kec. Gayungan
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	69 Kali	Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	19 Kali	Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	64 Kali	Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	109 Kali	Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	116 Kali	Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	74 Kali	Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	116 Kali	5 Kelurahan	Kec. Krembangan
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	115 Kali	Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	116 Kali	Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	116 Kali	Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	72 Kali	Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	83 Kali	Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	113 Kali	Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	53 Kali	Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	116 Kali	Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	116 Kali	Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	72 Kali	Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	54 Kali	Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	116 Kali	Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	71 Kali	Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	92 Kali	Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	116 Kali	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	115 Kali	Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	116 Kali	Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	94 Kali	Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	kecamatan asemrowo	Kec. Asemrowo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	50 Kali	Kantor Kecamatan Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	45 Kali	Kantor Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	Kantor Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	54 Kali	Kantor Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Gayungan	Kec. Gayungan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 kali	50 kali	Kantor Kecamatan Gayungan	Kec. Gayungan
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kota Surabaya	Kec. Gayungan
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	38 Kali	Kantor Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	408 kali	Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	30 Kali	Kantor Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	50 Kali	Kantor Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 kali	60 kali	Wilayah Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Krembangan dan Kelurahan se Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	408 kali	Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	50 Kali	Kantor Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	408 kali	Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	50 Kali	Kantor Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	312 kali	Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	408 kali	Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	45 Kali	Kantor Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	15 Kali	Kantor Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	48 Kali	Kantor Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	50 Kali	Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	50 Kali	Kantor Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Wilayah Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	Kantor Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360 kali	Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	60 Kali	Kantor Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	4 lembaga	Kantor Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Bagian Administrasi Kerjasama
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Bagian Administrasi Perencanaan Dan Usaha Daerah	Bagian Administrasi Perencanaan Dan Usaha Daerah
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Bagian Hukum	Bagian Hukum
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Bagian Umum Dan Protokol
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Sosial	Dinas Sosial
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Inspektorat	Inspektorat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Bulak	Kec. Bulak
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Genteng	Kec. Genteng
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Jambangan	Kec. Jambangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	kantor kecamatan krembangan	Kec. Krembangan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Pakal	Kec. Pakal
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Semampir	Kec. Semampir
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Tandes	Kec. Tandes
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
				Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat	Badan Kepegawaian dan Diklat

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Bagian Administrasi Kerjasama
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Bagian Hukum	Bagian Hukum
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Bagian Umum Dan Protokol
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Sosial	Dinas Sosial
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Inspektorat	Inspektorat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Benowo	Kec. Benowo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Bulak	Kec. Bulak
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Genteng	Kec. Genteng
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Pakal	Kec. Pakal
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Semampir	Kec. Semampir
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Tandes	Kec. Tandes
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Wiyung	Kec. Wiyung

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
				Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9 BUMD	9 BUMD	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah serta Kantor 9 BUMD	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
				Program Penataan Daerah Otonom	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta 31 kecamatan	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Evaluasi Perkembangan Kelurahan	1 kali	1 kali	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kelurahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Kota Surabaya	720 kali	200 kali	Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	115 objek	30 objek	Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	16 kali	16 kali	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gedung pertemuan di Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	185 lembaga	185 lembaga	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kecamatan dan kelurahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kecamatan dan kelurahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	254 lembaga	254 lembaga	Kantor Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah terkait	Bagian Organisasi
					Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar Kompetensi	1 dokumen	1 dokumen	Kantor Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
					Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	1 dokumen	1 dokumen	Kantor Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
					Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	155 POS	155 POS	Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Organisasi
					Survey Kepuasan Masyarakat	254 lembaga	254 lembaga	Unit Pelayanan di Kota Surabaya, Gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya atau gedung pertemuan lainnya	Bagian Organisasi
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Evaluasi Produk Hukum Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Bagian Hukum
					Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	65 permasalahan hukum	65 permasalahan hukum	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Bagian Hukum
					Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	70 rancangan produk hukum	70 rancangan produk hukum	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Bagian Hukum
					Publikasi Produk Hukum	70 produk hukum	70 produk hukum	Kantor Bagian Hukum, Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Hukum
				Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	Lokasi Aktivitas Walikota dan Wakil Walikota	Bagian Umum Dan Protokol

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	Kota Surabaya	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
					Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
					Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa	2030 kali	2030 kali	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat
					Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	89 kali	82 kali	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat
					Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi	9 dokumen	7 dokumen	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan	Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	16 dokumen	16 dokumen	Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pembangunan
					Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	72 lembaga	72 lembaga	Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pembangunan
					Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	6 sistem	6 sistem	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pembangunan
					Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	6 dokumen	6 dokumen	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pembangunan
				Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Asem Rowo	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Asem Rowo	Kec. Asemrowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Genting Kalianak	Kec. Asemrowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Tambak Sarioso	Kec. Asemrowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Kandangan	Kec. Benowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Romokalisari	3 Lembaga	3 Lembaga	Kelurahan Romokalisari	Kec. Benowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sememi	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Sememi	Kec. Benowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangon	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Tambak Oso Wilangon	Kec. Benowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Alun-alun Contong	Kec. Bubutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bubutan	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Bubutan	Kec. Bubutan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundih	11 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Gundih	Kec. Bubutan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jepara	8 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Jepara	Kec. Bubutan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembok Dukuh	12 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Tembok Dukuh	Kec. Bubutan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Bulak	Kec. Bulak
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek	3 Lembaga	3 Lembaga	Kelurahan Kedung Cowek	Kec. Bulak
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran	3 Lembaga	3 Lembaga	Kelurahan Kenjeran	Kec. Bulak
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Sukolilo Baru	Kec. Bulak
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Dukuh Kupang	Kec. Dukuh Pakis
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Gunung Sari	Kec. Dukuh Pakis
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Pradah Kalikendal	Kec. Dukuh Pakis
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Dukuh Menanggal	Kec. Gayungan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayungan	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Gayungan	Kec. Gayungan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketintang	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Ketintang	Kec. Gayungan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menanggal	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Menanggal	Kec. Gayungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin	4 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Embong Kaliasin	Kec. Genteng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genteng	11 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Genteng	Kec. Genteng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasari	12 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Kapasari	Kec. Genteng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketabang	8 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Ketabang	Kec. Genteng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peneleh	15 Lembaga	15 Lembaga	Kelurahan Peneleh	Kec. Genteng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airlangga	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Airlangga	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baratajaya	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Baratajaya	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gubeng	3 Lembaga	3 Lembaga	Kelurahan Gubeng	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertajaya	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Kertajaya	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo	12 Lembaga	12 Lembaga	Kelurahan Mojo	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Pucang Sewu	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Kec. Gunung Anyar
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Rungkut Menanggal	Kec. Gunung Anyar
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Rungkut Tengah	Kec. Gunung Anyar
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambangan	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Jambangan	Kec. Jambangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karah	12 Lembaga	12 Lembaga	Kelurahan Karah	Kec. Jambangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	3 Lembaga	3 Lembaga	Kelurahan Kebonsari	Kec. Jambangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Pagesangan	Kec. Jambangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Pilang	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Karang Pilang	Kec. Karangpilang
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebraon	12 Lembaga	12 Lembaga	Kelurahan Kebraon	Kec. Karangpilang
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedurus	11 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Kedurus	Kec. Karangpilang
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Waru Gunung	3 Lembaga	3 Lembaga	Kelurahan Waru Gunung	Kec. Karangpilang
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Bulak Banteng	Kec. Kenjeran
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan	2 Lembaga	13 Lembaga	Kelurahan Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi	5 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Tambak Wedi	Kec. Kenjeran
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Kec. Kenjeran
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dupak	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Dupak	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemayoran	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Kemayoran	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan	13 Lembaga	13 Lembaga	Kelurahan Krembangan Selatan	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan	8 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Morokrembangan	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Barat	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Perak Barat	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkingan	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Bangkingan	Kec. Lakarsantri

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jeruk	3 Lembaga	3 Lembaga	Kelurahan Jeruk	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakarsantri	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumurwelut	3 Lembaga	3 Lembaga	Kelurahan Sumurwelut	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalijudan	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Kalijudan	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisari	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Kalisari	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejawan Putih Tambak	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan	13 Lembaga	13 Lembaga	Kelurahan Manyar Sabrangan	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Bongkaran	Kec. Pabean Cantian
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Krembangan Utara	Kec. Pabean Cantian
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyamplungan	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Perak Timur	Kec. Pabean Cantian
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Utara	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Perak Utara	Kec. Pabean Cantian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Babat Jerawat	Kec. Pakal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benowo	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Benowo	Kec. Pakal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakal	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Pakal	Kec. Pakal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Sumber Rejo	Kec. Pakal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirungkut	13 Lembaga	13 Lembaga	Kelurahan Kalirungkut	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Kedung Baruk	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu	15 Lembaga	15 Lembaga	Kelurahan Medokan Ayu	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penjaringan Sari	15 Lembaga	15 Lembaga	Kelurahan Penjaringan Sari	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul	12 Lembaga	12 Lembaga	Kelurahan Rungkut Kidul	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	11 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Wonorejo	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bringin	4 Lembaga	3 Lembaga	Kelurahan Bringin	Kec. Sambikerep
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar	12 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Lontar	Kec. Sambikerep
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Made	7 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Made	Kec. Sambikerep
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambikerep	7 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyu Urip	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Banyu Urip	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Kupang Krajan	Kec. Sawahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakis	12 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Pakis	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petemon	18 Lembaga	18 Lembaga	Kelurahan Petemon	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Jaya	14 Lembaga	15 Lembaga	Kelurahan Putat Jaya	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Sawahan	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel	17 Lembaga	17 Lembaga	Kelurahan Ampel	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Pegirian	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Sidotopo	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung	14 Lembaga	14 Lembaga	Kelurahan Ujung	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo	16 Lembaga	16 Lembaga	Kelurahan Wonokusumo	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasan	10 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Kapasan	Kec. Simokerto
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Sidodadi	Kec. Simokerto
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto	14 Lembaga	14 Lembaga	Kelurahan Simokerto	Kec. Simokerto
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simolawang	10 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Simolawang	Kec. Simokerto
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo	11 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Tambakrejo	Kec. Simokerto
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gebang Putih	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Gebang Putih	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputih	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Keputih	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Klampis Ngasem	Kec. Sukolilo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Medokan Semampir	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Menur Pumpungan	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Nginden Jangkungan	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru	13 Lembaga	13 Lembaga	Kelurahan Semolowaru	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Gede	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Putat Gede	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Simomulyo	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Simomulyo Baru	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Tanjungsari	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Dukuh Setro	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gading	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Gading	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Kapasmadya Baru	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkeling	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Pacarkeling	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkembang	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Pacarkembang	Kec. Tambaksari

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ploso	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Ploso	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rangkah	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Rangkah	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaksari	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balongsari	7 Lembaga	7 Lembaga	Kelurahan Balongsari	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan	4 Lembaga	4 Lembaga	Kelurahan Banjar Sugihan	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Poh	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Karang Poh	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon	14 Lembaga	14 Lembaga	Kelurahan Manukan Kulon	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan wetan	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Manukan wetan	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tandes	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Tandes	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo	14 Lembaga	14 Lembaga	Kelurahan Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungdoro	10 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Kedungdoro	Kec. Tegalsari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputran	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Keputran	Kec. Tegalsari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Wonorejo	Kec. Tegalsari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendangsari	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Kendangsari	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutisari	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Kutisari	Kec. Tenggilis Mejoyo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Panjang Jiwo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babatan	8 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Babatan	Kec. Wiyung
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Balas Klumprik	Kec. Wiyung
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Jajar Tunggal	Kec. Wiyung
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiyung	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Wiyung	Kec. Wiyung
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi	13 Lembaga	12 Lembaga	Kelurahan Bendul Merisi	Kec. Wonocolo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari	9 Lembaga	9 Lembaga	Kelurahan Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo	10 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Margorejo	Kec. Wonocolo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosermo	6 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Sidosermo	Kec. Wonocolo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto	7 Lembaga	6 Lembaga	Kelurahan Siwalankerto	Kec. Wonocolo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Darmo	11 Lembaga	10 Lembaga	Kelurahan Darmo	Kec. Wonokromo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagir	11 Lembaga	11 Lembaga	Kelurahan Jagir	Kec. Wonokromo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel	5 Lembaga	5 Lembaga	Kelurahan Ngagel	Kec. Wonokromo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo	12 Lembaga	12 Lembaga	Kelurahan Ngagel Rejo	Kec. Wonokromo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawunggaling	12 Lembaga	12 Lembaga	Kelurahan Sawunggaling	Kec. Wonokromo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokromo	9 Lembaga	8 Lembaga	Kelurahan Wonokromo	Kec. Wonokromo
			Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	1 bangunan	1 bangunan	Gedung Pemerintah milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	45 Bangunan	75 Bangunan	Bangunan Kantor Pemerintahan serta Pelayanan Publik yang merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	300 bangunan	300 bangunan	Gedung Pemerintah yang perlu dilakukan pemeliharaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	39 Dokumen	38 Dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan	Layanan Informasi Kearsipan	40 kali	40 kali	Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Taman dan Gedung Kota Surabaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	2 kali	2 kali	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	11000 pelaku usaha	11000 pelaku usaha	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	60000 berkas	60000 berkas	Kantor pelayanan perizinan terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	2 kali	2 kali	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	4 kali	4 kali	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	52 kali	52 kali	Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	15 item	13 item	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Depo Arsip Balas Klumprik dan Dukuh Kumpang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	255 berkas	250 berkas	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Operasional UPTD Metrologi legal	16 Jenis	16 Jenis	Kantor UPTD Metrologi Legal	Dinas Perdagangan
					Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	23855 unit	20879 unit	Lokasi UTTP, Kantor UPTD Metrologi Legal, dan Pasar/Kecamatan	Dinas Perdagangan
					Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	4500 unit	4500 unit	Tempat usaha yang menggunakan peralatan UTTP	Dinas Perdagangan
				Program Pelayanan Perizinan Konstruksi	Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	700 berkas	700 berkas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	104682 berkas	101011 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	3250 berkas	3250 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	200000 berkas	200000 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	398986 berkas	398986 berkas	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen	40930 berkas	34930 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	6517 berkas	6517 berkas	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	50 berkas	50 berkas	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	1000 berkas	1000 berkas	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	100 izin	100 izin	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
					Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	2000 berkas	2000 berkas	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
					Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	100 izin	100 izin	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	400 berkas	400 berkas	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Tempat-tempat usaha jasa dan sarana pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	169 berkas	169 berkas	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Tempat-tempat usaha rekreasi dan hiburan umum	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan	Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	400 berkas	350 berkas	Dinas Perdagangan Kota Surabaya	Dinas Perdagangan
					Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	1552 Lembaga	1552 Lembaga	Wilayah-wilayah perdagangan di Kota Surabaya	Dinas Perdagangan
				Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur	Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	180 rekomendasi	180 rekomendasi	Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman
				Program Pemanfaatan Data Kependudukan	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	2 kali	2 kali	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 dokumen	3 dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pembinaan Penataan Kearsipan	Pembinaan Sistem Kearsipan	130 lembaga	130 lembaga	Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	396 lokasi	396 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	72 lokasi	72 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	15 aplikasi	15 aplikasi	Kotaa Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	150 Aplikasi	150 Aplikasi	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Pemutakhiran Data Kependudukan	146684 data	146684 data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8 sistem	8 sistem	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Data Statistik Daerah	Penyusunan Data Statistik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	3000 berkas	3000 berkas	Wilayah pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengelolaan Saluran Komunikasi	19 Saluran	19 Saluran	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	11 kali	6 kali	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	5 dokumen	1 dokumen	Masyarakat Kota Surabaya yang pernah mengetahui program pemkot/menggunakan layanan pemkot sesuai dengan topik kajian ; 72 perangkat daerah pemkot surabaya dan instansi vertikal di Kota Surabaya seperti Kantor Metereologi, PT Pos, PT KAI, dll	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	4 Jenis	3 Jenis	instansi pemerintah penyelenggara event, OPD Pemerintah Kota Surabaya penyelenggara event, Studio Radio di wilayah administratif Kota Surabaya, Studio Televisi yang memiliki jangkauan bisa diakses masyarakat surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	1289 unit	1289 unit	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pembangunan Sarana Prasarana TIK	136 lokasi	4 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	4 Jenis	4 Jenis	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	100 persen	100 persen	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengelolaan Pusat Data	2 Lokasi	2 Lokasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	3 Jenis	3 Jenis	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
			Meningkatkan kompetensi ASN	Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM	Pelaksanaan Asesmen Pegawai	5 kali	5 kali	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	2 jenis	2 jenis	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	2 jenis	1 jenis	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	2 jenis	2 jenis	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	3 materi	3 materi	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
				Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	500 orang	500 orang	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Penataan Administrasi Kepegawaian	8326 berkas	8326 berkas	Badan Kepegawaian dan Diklat	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	118 berkas	84 berkas	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pengelolaan Disiplin Pegawai	296 orang	286 orang	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
				Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pengelolaan Data Pegawai	8326 data	8326 data	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pengembangan Wawasan Aparatur	268 orang	225 orang	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Penilaian Kinerja Pegawai	7226 orang	7226 orang	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Seleksi Penerimaan ASN	4 tahap	2 tahap	surabaya	Badan Kepegawaian dan Diklat
			Meningkatkan perlindungan masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat	Pelatihan kader perlindungan masyarakat	100 orang	100 orang	Tempat pelatihan militer	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Pembinaan Potensi Masyarakat	81 kali	44 kali	Balai Kota Surabaya, Taman Makam Pahlawan	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Pengendalian Perlindungan Masyarakat	793 orang	793 orang	Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat serta seluruh wilayah Kota Surabaya	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
			Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD	Fasilitasi Reses DPRD	3 kali	3 kali	Daerah Pemilihan masing masing anggota DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
					Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	185 kali	185 kali	Lokasi Tujuan Kunjungan Kerja di Jawa Timur, luar Jawa Timur, luar negeri	Sekretariat DPRD
					Penerimaan Studi Banding	240 kali	240 kali	Gedung DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
					Pengendalian Keamanan	264 kali	264 kali	Kantor DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
					Publikasi Kegiatan DPRD	5 media	5 media	Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya, media cetak, media on line, media radio, media televisi dan media majalah	Sekretariat DPRD
				Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38 kali	38 kali	Wilayah Provinsi Jawa Timur dan luar Provinsi Jawa Timur	Sekretariat DPRD
				Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD	Pembahasan dan Penyusunan Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah	6 dokumen	6 dokumen	Kantor DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
					Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	930 kali	930 kali	Kantor DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
					Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	45 kali	45 kali	Kantor DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
			Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	12 dokumen	12 dokumen	Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Inspektorat
					Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	50 kali	50 kali	Inspektorat	Inspektorat

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Laporan	1 Laporan	Inspektorat	Inspektorat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	35 lembaga	35 lembaga	Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Inspektorat
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	18 lembaga	18 lembaga	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irbn I	Inspektorat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah II	35 lembaga	35 lembaga	Perangkat Daerah / Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah kerja Irbn II	Inspektorat
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	18 lembaga	18 lembaga	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irbn II	Inspektorat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III	Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	35 lembaga	35 lembaga	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irbn III	Inspektorat
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	18 lembaga	18 lembaga	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irbn III	Inspektorat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	35 lembaga	35 lembaga	Perangkat Daerah/Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan Wilayah Kerja Irbn 4	Inspektorat
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	18 lembaga	18 lembaga	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah kerja Irbn IV	Inspektorat
			Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Program Partisipasi Keagamaan	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	102 kali	83 kali	Gedung milik Pemerintah Kota, Gedung Tempat Ibadah, dan 31 Kecamatan	Dinas Sosial

5.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2020

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2020 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada semester I tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan serta terjadinya Pandemi Covid-19 serta sesuai dengan amanat Permendagri 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran untuk dapat lebih difokuskan pada penanganan Covid-19. Dengan adanya perubahan alokasi anggaran tersebut dibutuhkan penyesuaian terhadap target Output. Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan RKPD Tahun 2020 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel V.2 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 sebagaimana berikut:

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Tabel V.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
Badan Kepegawaian dan Diklat			16.663.977.667	Badan Kepegawaian dan Diklat			10.217.956.594	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.891.050.266	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.879.449.512	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.449.505.059	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.506.634.816	
2.2.2.01.01.0001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.449.505.059	2.2.2.01.01.0001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.506.634.816	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	441.545.207	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	372.814.696	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0001 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	441.545.207	2.2.2.01.02.0001 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	372.814.696	
2.2.2.2. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			14.772.927.401	2.2.2.2. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			8.338.507.082	
2.2.2.02.01 Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja	100,00%	5.962.103.471	2.2.2.02.01 Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja	100,00%	3.824.970.810	
2.2.2.02.01.0001 Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah data pegawai yang dikelola	8326 data	544.160.310	2.2.2.02.01.0001 Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah data pegawai yang dikelola	8326 data	528.420.019	
2.2.2.02.01.0002 Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya	268 orang	1.591.467.222	2.2.2.02.01.0002 Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya	225 orang	1.122.039.000	
2.2.2.02.01.0003 Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	7226 orang	583.670.000	2.2.2.02.01.0003 Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	7226 orang	587.620.610	
2.2.2.02.01.0004 Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN	4 tahap	3.242.805.939	2.2.2.02.01.0004 Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN	2 tahap	1.586.891.181	
2.2.2.02.02 Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	50,03%	6.380.453.623	2.2.2.02.02 Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	50,03%	2.239.933.771	
	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	65,06%			Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	65,06%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.02.02.0001 Pelaksanaan Asesmen Pegawai	Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai	5 kali	450.616.513	2.2.2.02.02.0001 Pelaksanaan Asesmen Pegawai	Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai	5 kali	402.392.400	
2.2.2.02.02.0002 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural	2 jenis	911.606.339	2.2.2.02.02.0002 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural	2 jenis	224.655.090	
2.2.2.02.02.0003 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial	2 jenis	2.647.303.930	2.2.2.02.02.0003 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial	1 jenis	228.873.800	
2.2.2.02.02.0004 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis	2 jenis	2.054.026.728	2.2.2.02.02.0004 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis	2 jenis	1.105.284.750	
2.2.2.02.02.0005 Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)	3 materi	316.900.113	2.2.2.02.02.0005 Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)	3 materi	278.727.731	
2.2.2.02.03 Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai	Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan	100,00%	2.430.370.307	2.2.2.02.03 Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai	Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan	100,00%	2.273.602.501	
2.2.2.02.03.0001 Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaian	500 orang	225.377.886	2.2.2.02.03.0001 Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaian	500 orang	208.138.443	
2.2.2.02.03.0002 Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	8326 berkas	669.375.362	2.2.2.02.03.0002 Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	8326 berkas	619.413.862	
2.2.2.02.03.0003 Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan	118 berkas	977.074.437	2.2.2.02.03.0003 Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan	84 berkas	925.276.896	
2.2.2.02.03.0004 Pengelolaan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai	296 orang	558.542.622	2.2.2.02.03.0004 Pengelolaan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai	286 orang	520.773.300	
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			9.217.216.822	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			7.780.692.657	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			7.499.071.792	1.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			6.154.245.420	
1.1.1.05.01 Program Kesatuan Bangsa	Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	70,00%	3.476.459.359	1.1.1.05.01 Program Kesatuan Bangsa	Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	32,00%	2.358.605.667	
1.1.1.05.01.0001 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan	1250 orang	1.460.381.539	1.1.1.05.01.0001 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan	150 orang	1.294.230.380	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.05.01.0002 Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan	31 lembaga	359.389.194	1.1.1.05.01.0002 Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan	10 lembaga	208.477.020	
1.1.1.05.01.0003 Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	72 kali	1.656.688.626	1.1.1.05.01.0003 Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	17 kali	855.898.267	
1.1.1.05.02 Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum	Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani	100,00%	4.022.612.433	1.1.1.05.02 Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum	Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani	100,00%	3.795.639.753	
1.1.1.05.02.0001 Kerjasama pengendalian keamanan kota	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota	194 kali	3.057.105.358	1.1.1.05.02.0001 Kerjasama pengendalian keamanan kota	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota	140 kali	2.995.258.843	
1.1.1.05.02.0002 Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Ketenteraman Kota	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota	67 kali	965.507.075	1.1.1.05.02.0002 Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Ketenteraman Kota	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota	15 kali	800.380.910	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0002 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.01.01.0002 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				
2.2.2.01.02.0002 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				2.2.2.01.02.0002 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat				Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat				
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				45.421.463.222	1.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				49.331.046.843	
1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana Alam		Persentase penanggulangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	100,00%	4.581.968.334	1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana Alam		Persentase penanggulangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	100,00%	6.017.978.828	
1.1.1.05.03.0001 Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana		Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	8 jenis	379.787.671	1.1.1.05.03.0001 Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana		Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	8 jenis	1.630.682.125	
1.1.1.05.03.0002 Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana		Jenis kejadian yang manajemen tanggap bencanaanya dikembangkan	10 Jenis	2.855.759.542	1.1.1.05.03.0002 Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana		Jenis kejadian yang manajemen tanggap bencanaanya dikembangkan	10 Jenis	3.075.286.653	
1.1.1.05.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana		Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	100%	1.346.421.121	1.1.1.05.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana		Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	100%	1.312.010.050	
1.1.1.05.05 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Persentase kelurahan tangguh bencana	88,00%	2.147.905.542	1.1.1.05.05 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Persentase kelurahan tangguh bencana	88,00%	1.319.934.381	
1.1.1.05.05.0001 Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana		Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	1650 orang	1.608.090.461	1.1.1.05.05.0001 Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana		Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	232 orang	1.106.880.881	
1.1.1.05.05.0002 Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana		Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	500 orang	539.815.081	1.1.1.05.05.0002 Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana		Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	40 orang	213.053.500	
1.1.1.05.10 Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat		Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	76,85%	38.691.589.346	1.1.1.05.10 Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat		Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	76,85%	41.993.133.634	
1.1.1.05.10.0001 Pelatihan kader perlindungan masyarakat		Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat	100 orang	334.181.971	1.1.1.05.10.0001 Pelatihan kader perlindungan masyarakat		Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat	100 orang	240.354.000	
1.1.1.05.10.0002 Pembinaan Potensi Masyarakat		Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat	81 kali	1.083.232.088	1.1.1.05.10.0002 Pembinaan Potensi Masyarakat		Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat	44 kali	586.887.680	
1.1.1.05.10.0003 Pengendalian Perlindungan Masyarakat		Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	793 orang	37.274.175.287	1.1.1.05.10.0003 Pengendalian Perlindungan Masyarakat		Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	793 orang	41.165.891.954	
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan					
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen					
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar					
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				3.271.115.925	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.865.805.596	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.112.946.068	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.825.375.296	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.112.946.068	2.2.2.01.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.825.375.296	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.158.169.857	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.040.430.300	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0003 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.158.169.857	2.2.2.01.02.0003 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.040.430.300	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			40.630.219.058	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			40.163.984.838	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.2. Keuangan			27.018.791.648	2.1.2.2. Keuangan			29.276.464.204	
2.1.2.02.01 Program Penagihan Pajak Daerah	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	84,50%	3.216.278.642	2.1.2.02.01 Program Penagihan Pajak Daerah	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	84,50%	3.589.591.144	
2.1.2.02.01.0001 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani	7201 berkas	798.577.330	2.1.2.02.01.0001 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani	7201 berkas	872.011.656	
2.1.2.02.01.0002 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani	11224 berkas	618.184.472	2.1.2.02.01.0002 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani	10756 berkas	655.772.069	
2.1.2.02.01.0003 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani	196762 berkas	1.799.516.840	2.1.2.02.01.0003 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani	195752 berkas	2.061.807.419	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan	90,00%	3.526.819.199	2.1.2.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan	90,00%	3.435.857.950	
2.1.2.02.02.0001 Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	72000 berkas	2.230.268.865	2.1.2.02.02.0001 Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	72000 berkas	2.005.859.628	DID
2.1.2.02.02.0002 Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	245 dokumen	318.906.650	2.1.2.02.02.0002 Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	245 dokumen	374.784.285	
2.1.2.02.02.0003 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 dokumen	977.643.684	2.1.2.02.02.0003 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 dokumen	1.055.214.037	DID
2.1.2.02.03 Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah	Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan	84,00%	18.899.077.296	2.1.2.02.03 Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah	Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan	84,00%	20.932.106.594	
2.1.2.02.03.0001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	34900 objek pajak	3.841.688.534	2.1.2.02.03.0001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	34900 objek pajak	4.380.633.089	DID
2.1.2.02.03.0002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	6555 objek pajak	6.046.040.747	2.1.2.02.03.0002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	5138 objek pajak	6.642.507.393	DID
2.1.2.02.03.0003 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	695022 objek pajak	9.011.348.015	2.1.2.02.03.0003 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	695022 objek pajak	9.908.966.112	DID
2.1.2.02.04 Program Perencanaan Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	75,00%	1.376.616.511	2.1.2.02.04 Program Perencanaan Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	75,00%	1.318.908.516	
2.1.2.02.04.0001 Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	279.041.615	2.1.2.02.04.0001 Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	225.782.467	
2.1.2.02.04.0002 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun	4 dokumen	313.019.890	2.1.2.02.04.0002 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun	4 dokumen	246.615.873	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.02.04.0003 Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun	5 Laporan	784.555.006	2.1.2.02.04.0003 Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun	5 Laporan	846.510.176	
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			809.338.210	2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			664.163.210	
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	809.338.210	2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	664.163.210	
2.1.2.04.03.0001 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	36.764.460	2.1.2.04.03.0001 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	5.564.460	
2.1.2.04.03.0002 Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun	5 dokumen	772.573.750	2.1.2.04.03.0002 Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun	5 dokumen	658.598.750	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			12.802.089.200	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			10.223.357.424	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	7.459.921.649	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	6.655.349.636	
2.2.2.01.01.0004 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	7.459.921.649	2.2.2.01.01.0004 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	6.655.349.636	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	5.342.167.551	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	3.568.007.788	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0004 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	5.342.167.551	2.2.2.01.02.0004 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	3.568.007.788	
Badan Perencanaan Pembangunan			15.818.097.050	Badan Perencanaan Pembangunan			15.635.571.495	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			12.667.099.576	2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			12.398.772.699	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.04.01 Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan	Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100,00%	1.448.211.810	2.1.2.04.01 Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan	Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100,00%	1.684.609.748	
	Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	99,00%			Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	99,00%		
2.1.2.04.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	72 PD	869.944.400	2.1.2.04.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	72 PD	1.039.917.666	
2.1.2.04.01.0002 Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi	4 dokumen	578.267.410	2.1.2.04.01.0002 Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi	4 dokumen	644.692.082	
2.1.2.04.02 Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100,00%	1.427.446.020	2.1.2.04.02 Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100,00%	1.779.885.933	
2.1.2.04.02.0001 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola	17 data urusan	1.427.446.020	2.1.2.04.02.0001 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola	17 data urusan	1.779.885.933	
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	236.918.783	2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	137.487.650	
2.1.2.04.03.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	236.918.783	2.1.2.04.03.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	137.487.650	
2.1.2.04.04 Program Perencanaan Kota	Persentase penyusunan rencana induk sektoral	92,86%	1.998.563.688	2.1.2.04.04 Program Perencanaan Kota	Persentase penyusunan rencana induk sektoral	92,86%	1.428.817.914	
2.1.2.04.04.0001 Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	1 dokumen	1.110.558.009	2.1.2.04.04.0001 Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	1 dokumen	732.726.662	
2.1.2.04.04.0002 Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan	1 dokumen	888.005.679	2.1.2.04.04.0002 Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan	1 dokumen	696.091.252	
2.1.2.04.05 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100,00%	1.418.704.248	2.1.2.04.05 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100,00%	1.605.656.644	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.04.05.0001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	9 dokumen	1.418.704.248		2.1.2.04.05.0001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	9 dokumen	1.605.656.644	
2.1.2.04.06 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	80,00%	2.513.618.635		2.1.2.04.06 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	80,00%	2.484.671.344	
2.1.2.04.06.0001 Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun	6 dokumen	734.861.527		2.1.2.04.06.0001 Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun	6 dokumen	598.069.830	
2.1.2.04.06.0002 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian yang disusun	2 dokumen	524.774.022		2.1.2.04.06.0002 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian yang disusun	2 dokumen	562.763.306	
2.1.2.04.06.0003 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun	2 dokumen	587.172.815		2.1.2.04.06.0003 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun	2 dokumen	631.242.457	
2.1.2.04.06.0004 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun	2 dokumen	666.810.271		2.1.2.04.06.0004 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun	2 dokumen	692.595.751	
2.1.2.04.07 Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan	80,00%	1.815.706.295		2.1.2.04.07 Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan	80,00%	1.447.910.211	
2.1.2.04.07.0001 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	1 dokumen	988.186.317		2.1.2.04.07.0001 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	1 dokumen	792.313.260	
2.1.2.04.07.0002 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	827.519.978		2.1.2.04.07.0002 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	655.596.951	
2.1.2.04.08 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	80,00%	1.807.930.097		2.1.2.04.08 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	80,00%	1.829.733.255	
2.1.2.04.08.0001 Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi	12 kali	643.816.068		2.1.2.04.08.0001 Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi	12 kali	660.269.223	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.04.08.0002 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat	1 dokumen	543.833.319	2.1.2.04.08.0002 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat	1 dokumen	570.696.705	
2.1.2.04.08.0003 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun	2 dokumen	620.280.710	2.1.2.04.08.0003 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun	2 dokumen	598.767.327	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
3.150.997.474				3.236.798.796				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.663.414.563	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.782.590.866	
2.2.2.01.01.0005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.663.414.563	2.2.2.01.01.0005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.782.590.866	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	487.582.911	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	454.207.930	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0005 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	487.582.911	2.2.2.01.02.0005 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	454.207.930	
Bagian Administrasi Kerjasama				Bagian Administrasi Kerjasama				
20.849.882.059				9.017.031.682				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
19.447.080.801				7.704.990.550				
2.1.2.01.20 Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	95,00%	19.447.080.801	2.1.2.01.20 Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	95,00%	7.704.990.550	
	Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	87,50%			Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	87,50%		
	Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi	85,00%			Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi	85,00%		
2.1.2.01.20.0001 Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 lembaga	820.971.382	2.1.2.01.20.0001 Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 lembaga	468.130.100	
2.1.2.01.20.0002 Fasilitas Kerjasama Luar Negeri	Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi	10 lembaga	12.022.842.804	2.1.2.01.20.0002 Fasilitas Kerjasama Luar Negeri	Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi	10 lembaga	6.195.622.450	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.20.0003 Fasilitas Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi	63 orang	5.383.579.754	2.1.2.01.20.0003 Fasilitas Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi	63 orang	334.318.000	
2.1.2.01.20.0004 Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	29 lembaga	1.219.686.861	2.1.2.01.20.0004 Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	29 lembaga	706.920.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.01.01.0006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				
2.2.2.01.02.0006 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				2.2.2.01.02.0006 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat				Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.14 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan				2.1.2.01.14 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan				
2.1.2.01.14.0001 Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat				2.1.2.01.14.0001 Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat				
2.1.2.01.14.0002 Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat				2.1.2.01.14.0002 Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.14.0003 Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun	1 dokumen	401.314.453	2.1.2.01.14.0003 Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun	1 dokumen	344.598.520	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
1.010.070.645				1.094.575.165				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	856.134.578	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	964.932.065	
2.2.2.01.01.0007 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	856.134.578	2.2.2.01.01.0007 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	964.932.065	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	153.936.067	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	129.643.100	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0007 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	153.936.067	2.2.2.01.02.0007 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	129.643.100	
Bagian Administrasi Pembangunan				Bagian Administrasi Pembangunan				
12.151.930.621				11.705.958.574				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
9.278.080.152				9.305.542.344				
2.1.2.01.16 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq$ 76%	94,00%	9.278.080.152	2.1.2.01.16 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq$ 76%	94,00%	9.305.542.344	
2.1.2.01.16.0001 Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16 dokumen	2.033.847.934	2.1.2.01.16.0001 Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16 dokumen	1.884.076.500	DID
2.1.2.01.16.0002 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	72 lembaga	2.120.391.629	2.1.2.01.16.0002 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	72 lembaga	2.147.308.220	
2.1.2.01.16.0003 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem	2.099.608.860	2.1.2.01.16.0003 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem	2.154.223.386	DID

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.16.0004 Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	3.024.231.729	2.1.2.01.16.0004 Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	3.119.934.238	DID
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	926.547.460		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	758.964.580	
2.2.2.01.01.0008 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	926.547.460	2.2.2.01.01.0008 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	758.964.580	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.947.303.009		Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.641.451.650	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0008 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.947.303.009	2.2.2.01.02.0008 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.641.451.650	
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah				Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.09 Program Penataan Daerah Otonom				2.1.2.01.09 Program Penataan Daerah Otonom				
	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100,00%	6.514.523.116		Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100,00%	3.918.585.799	
	Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	85,65%			Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	85,65%		
	Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	45,16%			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	32,26%		
	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	60,00%			Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	60,00%		
2.1.2.01.09.0001 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	761.847.280	2.1.2.01.09.0001 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	519.045.211	DID
2.1.2.01.09.0002 Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan	1 kali	1.830.680.803	2.1.2.01.09.0002 Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan	1 kali	866.403.099	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan												
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana		
			2.1.2.01.09.0003 Fasilitas Permasalahan Pertanahan Kota Surabaya	Jumlah fasilitas permasalahan pertanahan Kota Surabaya		720 kali	436.550.427				2.1.2.01.09.0003 Fasilitas Permasalahan Pertanahan Kota Surabaya	Jumlah fasilitas permasalahan pertanahan Kota Surabaya		200 kali	424.084.705			
			2.1.2.01.09.0004 Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan		115 objek	424.259.321				2.1.2.01.09.0004 Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan		30 objek	250.310.643			
			2.1.2.01.09.0005 Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan		16 kali	1.577.228.710				2.1.2.01.09.0005 Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan		16 kali	801.233.988			
			2.1.2.01.09.0006 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan		185 lembaga	564.612.864				2.1.2.01.09.0006 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan		185 lembaga	565.998.469			
			2.1.2.01.09.0007 Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan		1 dokumen	919.343.711				2.1.2.01.09.0007 Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan		1 dokumen	491.509.684			
2.2. Unsur Manajemen							2.2. Unsur Manajemen											
2.2.2. Non Pelayanan Dasar							2.2.2. Non Pelayanan Dasar											
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran							2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran									746.448.310		
			2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		87,00 %	591.397.717				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		87,00 %	555.284.710			
			2.2.2.01.01.0009 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran		100%	591.397.717				2.2.2.01.01.0009 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran		100%	555.284.710			
			2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		100,00%	239.621.303				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		100,00%	191.163.600			
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		100,00%						Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		100,00%				
			2.2.2.01.02.0009 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		100%	239.621.303				2.2.2.01.02.0009 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		100%	191.163.600			
Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah							Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah									2.441.360.537		
2. Fungsi Penunjang Urusan							2. Fungsi Penunjang Urusan											
2.1. Fungsi Manajemen							2.1. Fungsi Manajemen											
2.1.2. Non Pelayanan Dasar							2.1.2. Non Pelayanan Dasar											
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah							2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah									1.435.950.000		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
		2.1.2.01.08 Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD	Persentase BUMD yang berhasil dibina	67,00%	1.266.646.897			2.1.2.01.08 Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD	Persentase BUMD yang berhasil dibina	67,00%	1.027.680.000	
		2.1.2.01.08.0001 Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	9 BUMD	1.266.646.897			2.1.2.01.08.0001 Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	9 BUMD	1.027.680.000	
		2.1.2.01.18 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian	Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang memanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100,00%	536.176.550			2.1.2.01.18 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian	Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang memanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100,00%	408.270.000	
		2.1.2.01.18.0001 Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	318.838.275			2.1.2.01.18.0001 Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	227.120.000	
		2.1.2.01.18.0002 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	4 dokumen	217.338.275			2.1.2.01.18.0002 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	3 dokumen	181.150.000	
2.2. Unsur Manajemen						2.2. Unsur Manajemen						
2.2.2. Non Pelayanan Dasar						2.2.2. Non Pelayanan Dasar						
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					1.021.864.087	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					1.005.410.537	
		2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	843.373.612			2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	826.043.337	
		2.2.2.01.01.0010 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	843.373.612			2.2.2.01.01.0010 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	826.043.337	
		2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	178.490.475			2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	179.367.200	
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%					Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
		2.2.2.01.02.0010 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	178.490.475			2.2.2.01.02.0010 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	179.367.200	
Bagian Hubungan Masyarakat					14.548.877.777	Bagian Hubungan Masyarakat					13.894.718.517	
2. Fungsi Penunjang Urusan						2. Fungsi Penunjang Urusan						
2.1. Fungsi Manajemen						2.1. Fungsi Manajemen						
2.1.2. Non Pelayanan Dasar						2.1.2. Non Pelayanan Dasar						
		2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			11.453.916.515			2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			10.702.542.636	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.15 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85,00%	11.453.916.515	2.1.2.01.15 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85,00%	10.702.542.636	
2.1.2.01.15.0001 Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa	2030 kali	10.150.171.486	2.1.2.01.15.0001 Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa	2030 kali	9.734.263.136	
2.1.2.01.15.0002 Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	89 kali	512.245.651	2.1.2.01.15.0002 Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	82 kali	452.400.000	
2.1.2.01.15.0003 Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi	Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun	9 dokumen	791.499.378	2.1.2.01.15.0003 Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi	Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun	7 dokumen	515.879.500	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.578.334.374	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.805.672.172	
2.2.2.01.01.0011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.578.334.374	2.2.2.01.01.0011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.805.672.172	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	516.626.888	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	386.503.709	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0011 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	516.626.888	2.2.2.01.02.0011 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	386.503.709	
Bagian Hukum				Bagian Hukum				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.11 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100,00%	5.578.156.596	2.1.2.01.11 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100,00%	4.901.375.625	
	Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100,00%			Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100,00%		
	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100,00%			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100,00%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100,00%				Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100,00%		
2.1.2.01.11.0001 Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah	12 dokumen	290.311.419		2.1.2.01.11.0001 Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah	12 dokumen	221.043.600	
2.1.2.01.11.0002 Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	65 permasalahan hukum	2.706.814.866		2.1.2.01.11.0002 Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	65 permasalahan hukum	2.425.186.266	
2.1.2.01.11.0003 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	70 rancangan produk hukum	1.393.664.840		2.1.2.01.11.0003 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	70 rancangan produk hukum	1.345.034.871	
2.1.2.01.11.0004 Publikasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	70 produk hukum	1.187.365.471		2.1.2.01.11.0004 Publikasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	70 produk hukum	910.110.888	
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	666.349.490		2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	648.373.766	
2.2.2.01.01.0012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	666.349.490		2.2.2.01.01.0012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	648.373.766	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	288.588.689		2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	243.726.925	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0012 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	288.588.689		2.2.2.01.02.0012 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	243.726.925	
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset				
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah					2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.17 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	88,00%	79.873.921.662		2.1.2.01.17 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	88,00%	63.294.391.175	
	Persentase pemanfaatan aset	96,00%				Persentase pemanfaatan aset	96,00%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
			Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	80,00%					Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	80,00%		
		2.1.2.01.17.0001 Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah	6 Berkas	3.118.539.745				2.1.2.01.17.0001 Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah	3 Berkas	3.159.089.421
		2.1.2.01.17.0002 Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor	72 lembaga	2.186.385.513				2.1.2.01.17.0002 Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor	72 lembaga	1.524.374.859
		2.1.2.01.17.0003 Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	900 dokumen	5.746.510.144				2.1.2.01.17.0003 Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	500 dokumen	4.762.171.349
		2.1.2.01.17.0004 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2346 unit	7.291.560.818				2.1.2.01.17.0004 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2346 unit	7.219.757.944
		2.1.2.01.17.0005 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	10091 stel	3.843.228.326				2.1.2.01.17.0005 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	7684 stel	2.003.532.045
		2.1.2.01.17.0006 Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	45615 unit	57.687.697.116				2.1.2.01.17.0006 Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	45615 unit	44.625.465.557
2.2. Unsur Manajemen						2.2. Unsur Manajemen						
2.2.2. Non Pelayanan Dasar						2.2.2. Non Pelayanan Dasar						
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					3.241.082.191	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.247.045.737	
		2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.571.029.317				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.399.220.408
		2.2.2.01.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.571.029.317				2.2.2.01.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.399.220.408
		2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.670.052.874				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	847.825.329
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%						Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%	
		2.2.2.01.02.0013 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.670.052.874				2.2.2.01.02.0013 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	847.825.329
Bagian Organisasi					3.042.457.120	Bagian Organisasi					2.341.153.595	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.10 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				2.1.2.01.10 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				
	Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis	74,29%	2.333.782.303		Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis	74,29%	1.716.316.778	
	Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan keterhubungan antar proses	50,00%			Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan keterhubungan antar proses	50,00%		
	Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu pelayanannya kategori baik	70,00%			Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu pelayanannya kategori baik	70,00%		
	2.1.2.01.10.0001 Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring	254 lembaga	277.096.454	2.1.2.01.10.0001 Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring	254 lembaga	264.021.709
	2.1.2.01.10.0002 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar Kompetensi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun	1 dokumen	430.956.572	2.1.2.01.10.0002 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar Kompetensi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun	1 dokumen	405.283.416
	2.1.2.01.10.0003 Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun	1 dokumen	337.674.662	2.1.2.01.10.0003 Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun	1 dokumen	292.669.697
	2.1.2.01.10.0004 Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	155 POS	555.817.251	2.1.2.01.10.0004 Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	155 POS	565.951.956
	2.1.2.01.10.0005 Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat	254 lembaga	732.237.364	2.1.2.01.10.0005 Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat	254 lembaga	188.390.000
	2.1.2.01.19 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB	84,72%	334.426.801	2.1.2.01.19 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB	84,72%	304.243.416
	2.1.2.01.19.0001 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun	2 dokumen	334.426.801	2.1.2.01.19.0001 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun	2 dokumen	304.243.416
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	242.100.195		2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	214.387.901	
2.2.2.01.01.0014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	242.100.195		2.2.2.01.01.0014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	214.387.901	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	132.147.821		2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	106.205.500	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0014 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	132.147.821		2.2.2.01.02.0014 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	106.205.500	
Bagian Umum Dan Protokol			111.146.572.594		Bagian Umum Dan Protokol			91.553.675.772	
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			16.854.676.014		2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			15.066.009.581	
2.1.2.01.12 Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100,00%	16.854.676.014		2.1.2.01.12 Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100,00%	15.066.009.581	
2.1.2.01.12.0001 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	16.854.676.014		2.1.2.01.12.0001 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	15.066.009.581	
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			920.898.140		2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			520.796.880	
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	920.898.140		2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	520.796.880	
2.1.2.04.03.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	920.898.140		2.1.2.04.03.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	520.796.880	
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			93.370.998.440		2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			75.966.869.311	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	88.685.622.917	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	71.960.028.717	
2.2.2.01.01.0015 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	88.685.622.917	2.2.2.01.01.0015 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	71.960.028.717	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	4.685.375.523	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	4.006.840.594	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0015 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	4.685.375.523	2.2.2.01.02.0015 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	4.006.840.594	
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			886.368.662.388	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			761.572.048.996	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			276.917.279.041	1.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			273.994.934.033	
1.1.1.03.04 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Persentase titik pemasangan PJU hemat energi	83,39%	276.917.279.041	1.1.1.03.04 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Persentase titik pemasangan PJU hemat energi	83,39%	273.994.934.033	
1.1.1.03.04.0001 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	4600 titik	138.356.656.728	1.1.1.03.04.0001 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	4200 titik	136.290.802.501	
1.1.1.03.04.0002 Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	6674 rekening	120.219.603.620	1.1.1.03.04.0002 Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	6674 rekening	120.083.389.781	
1.1.1.03.04.0003 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang dipelihara	73680 titik	18.341.018.693	1.1.1.03.04.0003 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang dipelihara	73680 titik	17.620.741.751	
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.5. Lingkungan Hidup			597.164.729.716	1.1.2.5. Lingkungan Hidup			476.136.570.723	
1.1.2.05.01 Program Kebersihan	Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	84,86%	195.327.853.879	1.1.2.05.01 Program Kebersihan	Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	84,86%	200.590.575.043	
1.1.2.05.01.0001 Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan	104 Kegiatan	3.853.801.382	1.1.2.05.01.0001 Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan	104 Kegiatan	2.868.396.000	
1.1.2.05.01.0002 Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian	364 lokasi	96.443.756.452	1.1.2.05.01.0002 Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian	364 lokasi	105.352.183.830	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.05.01.0003 Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran	450 lokasi	19.334.367.792	1.1.2.05.01.0003 Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran	450 lokasi	21.465.546.672	
1.1.2.05.01.0004 Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267 lokasi	75.695.928.253	1.1.2.05.01.0004 Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267 lokasi	70.904.448.541	
1.1.2.05.03 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	8,75%	3.975.708.987	1.1.2.05.03 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	8,75%	3.812.334.252	
1.1.2.05.03.0001 Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan	3 kali	3.975.708.987	1.1.2.05.03.0001 Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan	3 kali	3.812.334.252	
1.1.2.05.05 Program Pengelolaan Air Limbah Kota	Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	100,00%	23.984.785.436	1.1.2.05.05 Program Pengelolaan Air Limbah Kota	Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	100,00%	17.400.358.486	
1.1.2.05.05.0001 Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah	Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	96 lokasi	7.443.205.478	1.1.2.05.05.0001 Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah	Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	96 lokasi	3.335.383.363	
1.1.2.05.05.0002 Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	34 lokasi	16.541.579.958	1.1.2.05.05.0002 Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	34 lokasi	14.064.975.123	
1.1.2.05.07 Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan	Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	8,68%	88.677.153.402	1.1.2.05.07 Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan	Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	8,68%	89.421.230.174	
1.1.2.05.07.0001 Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara	425 lokasi	58.811.197.778	1.1.2.05.07.0001 Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara	425 lokasi	58.000.067.514	DID
1.1.2.05.07.0002 Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	15 lokasi	10.552.719.093	1.1.2.05.07.0002 Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	15 lokasi	10.604.807.885	
1.1.2.05.07.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota	Jumlah taman yang dipelihara	39 lokasi	19.313.236.531	1.1.2.05.07.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota	Jumlah taman yang dipelihara	39 lokasi	20.816.354.775	
1.1.2.05.08 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik	30,77%	100.026.354.349	1.1.2.05.08 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik	30,77%	1.002.613.750	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.05.08.0001 Penanganan Limbah B3	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 Kegiatan	100.026.354.349		1.1.2.05.08.0001 Penanganan Limbah B3	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 Kegiatan	1.002.613.750	
1.1.2.05.11 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	30,77%	185.172.873.663		1.1.2.05.11 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	30,77%	163.909.459.018	
1.1.2.05.11.0002 Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola	21 unit	9.469.698.056		1.1.2.05.11.0002 Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola	21 unit	8.328.083.667	
1.1.2.05.11.0003 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan	1688 unit	26.906.970.244		1.1.2.05.11.0003 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan	1528 unit	10.533.339.777	
1.1.2.05.11.0004 Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar	1 rekening	122.737.825.297		1.1.2.05.11.0004 Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar	1 rekening	122.691.728.751	
1.1.2.05.11.0005 Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	183 lokasi	8.930.685.235		1.1.2.05.11.0005 Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	183 lokasi	6.411.481.441	
1.1.2.05.11.0006 Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara	14 lokasi	17.127.694.831		1.1.2.05.11.0006 Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara	14 lokasi	15.944.825.382	
1.2. Urusan Pilihan					1.2. Urusan Pilihan				
1.2.2. Non Pelayanan Dasar					1.2.2. Non Pelayanan Dasar				
1.2.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral					1.2.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral				
1.2.2.02.01 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	11 lingkungan	307.458.343		1.2.2.02.01 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	11 lingkungan	247.319.206	
1.2.2.02.01.0001 Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	3 Lingkungan	307.458.343		1.2.2.02.01.0001 Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	3 Lingkungan	247.319.206	
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	9.673.258.832		2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	9.146.460.034	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01.0016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	9.673.258.832	2.2.2.01.01.0016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	9.146.460.034	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	2.305.936.456	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	2.046.765.000	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0016 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.305.936.456	2.2.2.01.02.0016 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.046.765.000	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			36.535.833.214	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			25.697.094.789	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.12. Kebudayaan			9.104.779.908	1.1.2.12. Kebudayaan			5.577.713.685	
1.1.2.12.01 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	95,00%	7.079.554.757	1.1.2.12.01 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	95,00%	4.168.392.553	
	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	58,50%			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	58,50%		
1.1.2.12.01.0001 Fasilitas penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	512 kali	6.449.281.531	1.1.2.12.01.0001 Fasilitas penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	119 kali	3.611.088.301	
1.1.2.12.01.0002 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal	3 kali	395.936.801	1.1.2.12.01.0002 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal	1 kali	317.956.200	
1.1.2.12.01.0003 Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring	14 lokasi	234.336.425	1.1.2.12.01.0003 Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring	14 lokasi	239.348.052	
1.1.2.12.02 Program Perlindungan Budaya Lokal	Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,60%	2.025.225.151	1.1.2.12.02 Program Perlindungan Budaya Lokal	Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,60%	1.409.321.132	
1.1.2.12.02.0001 Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	250 lokasi	1.349.022.672	1.1.2.12.02.0001 Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	250 lokasi	1.297.156.632	
1.1.2.12.02.0002 Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah	9 kali	676.202.479	1.1.2.12.02.0002 Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah	1 kali	112.164.500	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan				
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar				
1.2.2.1. Pariwisata			16.599.259.008	1.2.2.1. Pariwisata			9.428.953.856	
1.2.2.01.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata	60,00%	633.556.805	1.2.2.01.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata	60,00%	567.538.556	
1.2.2.01.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses	400 berkas	331.071.751	1.2.2.01.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses	400 berkas	312.719.144	
1.2.2.01.01.0002 Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses	169 berkas	302.485.054	1.2.2.01.01.0002 Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses	169 berkas	254.819.412	
1.2.2.01.02 Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	50,01%	6.710.075.734	1.2.2.01.02 Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	10,60%	3.630.474.076	
1.2.2.01.02.0001 Fasilitas promosi wisata	Jumlah fasilitas promosi wisata	246 kali	3.122.157.189	1.2.2.01.02.0001 Fasilitas promosi wisata	Jumlah fasilitas promosi wisata	67 kali	1.510.007.224	
1.2.2.01.02.0002 Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	93 kali	1.145.623.140	1.2.2.01.02.0002 Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	51 kali	676.812.347	
1.2.2.01.02.0003 Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda	41 kali	1.423.166.883	1.2.2.01.02.0003 Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda	24 kali	1.192.500.695	
1.2.2.01.02.0004 Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti	66 kali	1.019.128.522	1.2.2.01.02.0004 Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti	22 kali	251.153.810	
1.2.2.01.03 Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	69,23%	8.671.948.560	1.2.2.01.03 Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	69,23%	4.786.593.216	
1.2.2.01.03.0001 Fasilitas Pelatihan dan Pertunjukan di Destinasi Wisata	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi	770 kali	620.051.413	1.2.2.01.03.0001 Fasilitas Pelatihan dan Pertunjukan di Destinasi Wisata	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi	150 kali	236.040.000	
1.2.2.01.03.0002 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan	3 kali	306.474.042	1.2.2.01.03.0002 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan	1 kali	264.832.542	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
			1.2.2.01.03.0003 Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	3 lokasi	2.354.240.553				1.2.2.01.03.0003 Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	2 lokasi	1.528.484.478	
			1.2.2.01.03.0004 Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	2 lokasi	2.138.284.326				1.2.2.01.03.0004 Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	2 lokasi	1.545.302.335	
			1.2.2.01.03.0005 Peningkatan Destinasi Wisata	Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata	6 kali	1.856.094.226				1.2.2.01.03.0005 Peningkatan Destinasi Wisata	Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata	1 kali	256.063.861	
			1.2.2.01.03.0006 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)	Jumlah museum yang dipelihara	6 lokasi	700.000.000				1.2.2.01.03.0006 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)	Jumlah museum yang dipelihara	6 lokasi	700.000.000	DAK
			1.2.2.01.03.0007 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata	280 orang	696.804.000				1.2.2.01.03.0007 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata	85 orang	255.870.000	DAK
			1.2.2.01.04 Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	80,00%	583.677.909				1.2.2.01.04 Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	80,00%	444.348.008	
			1.2.2.01.04.0001 Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	12 kali	432.989.677				1.2.2.01.04.0001 Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	12 kali	322.485.418	
			1.2.2.01.04.0002 Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi	6 lokasi	150.688.232				1.2.2.01.04.0002 Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi	6 lokasi	121.862.590	
2. Fungsi Penunjang Urusan							2. Fungsi Penunjang Urusan							
2.2. Unsur Manajemen							2.2. Unsur Manajemen							
2.2.2. Non Pelayanan Dasar							2.2.2. Non Pelayanan Dasar							
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran						10.831.794.298	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran							10.690.427.248

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	10.176.919.484	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	10.224.345.508	
2.2.2.01.01.0017 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	10.176.919.484	2.2.2.01.01.0017 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	10.224.345.508	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	654.874.814	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	466.081.740	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0017 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	654.874.814	2.2.2.01.02.0017 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	466.081.740	
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			96.414.037.692	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			55.003.304.249	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.11. Kepemudaan dan Olahraga			92.897.920.266	1.1.2.11. Kepemudaan dan Olahraga			51.431.384.581	
1.1.2.11.01 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	142 kelurahan	73.174.694.032	1.1.2.11.01 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	140 kelurahan	44.854.547.238	
1.1.2.11.01.0001 Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi	11 unit	9.409.375.344	1.1.2.11.01.0001 Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi	12 unit	9.393.029.266	
1.1.2.11.01.0002 Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan	57 unit	52.966.192.111	1.1.2.11.01.0002 Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan	21 unit	31.373.086.342	
1.1.2.11.01.0003 Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	6 jenis	580.826.479	1.1.2.11.01.0003 Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	6 jenis	559.175.500	
1.1.2.11.01.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun	58 dokumen	2.726.506.379	1.1.2.11.01.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun	58 dokumen	1.587.369.200	
1.1.2.11.01.0005 Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki	133 unit	7.491.793.719	1.1.2.11.01.0005 Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki	90 unit	1.941.886.930	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.11.02 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1.660 medali	13.851.894.599	1.1.2.11.02 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1.660 medali	2.408.421.463	
1.1.2.11.02.0001 Fasilitas Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi	41 kali	8.132.357.842	1.1.2.11.02.0001 Fasilitas Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi	4 kali	715.686.236	
1.1.2.11.02.0002 Fasilitas Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional	14 kali	1.050.454.753	1.1.2.11.02.0002 Fasilitas Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional	2 kali	410.622.776	
1.1.2.11.02.0003 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	26 kali	1.302.018.299	1.1.2.11.02.0003 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	4 kali	462.769.161	
1.1.2.11.02.0004 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan	10 kali	2.148.749.622	1.1.2.11.02.0004 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan	2 kali	503.604.120	
1.1.2.11.02.0005 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	29 kali	1.218.314.083	1.1.2.11.02.0005 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	2 kali	315.739.170	
1.1.2.11.03 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	15,00%	3.558.821.952	1.1.2.11.03 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	2,00%	2.877.239.630	
1.1.2.11.03.0001 Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja	4565 peserta	1.389.813.871	1.1.2.11.03.0001 Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja	1520 peserta	773.642.770	
1.1.2.11.03.0002 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan	30 kali	2.169.008.081	1.1.2.11.03.0002 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan	30 kali	2.103.596.860	
1.1.2.11.04 Program Peningkatan Prestasi Pemuda	Persentase individu/keompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	10,00%	2.312.509.683	1.1.2.11.04 Program Peningkatan Prestasi Pemuda	Persentase individu/keompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	6,82%	1.291.176.250	
	Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15,00%			Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	6,67%		
1.1.2.11.04.0001 Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif	670 orang	1.026.933.540	1.1.2.11.04.0001 Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif	210 orang	337.012.960	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.11.04.0002 Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan	1050 Orang	1.285.576.143	1.1.2.11.04.0002 Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan	1050 Orang	954.163.290	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0018 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.01.01.0018 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				
2.2.2.01.02.0018 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				2.2.2.01.02.0018 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.1.2.06.01 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil				1.1.2.06.01 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil				
1.1.2.06.01.0018 Penerbitan Akte Kelahiran dan Kematian				1.1.2.06.01.0018 Penerbitan Akte Kelahiran dan Kematian				
1.1.2.06.01.0018.0018.0018 Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)				1.1.2.06.01.0018.0018.0018 Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)				
1.1.2.06.01.0018.0018.0018.0018.0018 Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)				1.1.2.06.01.0018.0018.0018.0018.0018.0018 Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.06.01.0001 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani	104682 berkas	1.361.166.981	1.1.2.06.01.0001 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani	101011 berkas	1.484.986.656	
1.1.2.06.01.0002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani	3250 berkas	579.652.306	1.1.2.06.01.0002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani	3250 berkas	554.208.635	
1.1.2.06.02 Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP	92,00%	12.317.552.969	1.1.2.06.02 Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP	92,00%	12.131.987.931	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100,00%			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100,00%		
1.1.2.06.02.0001 Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan	200000 berkas	9.373.661.000	1.1.2.06.02.0001 Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan	200000 berkas	8.968.908.998	DAK, APBD
1.1.2.06.02.0002 Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani	398986 berkas	2.149.690.967	1.1.2.06.02.0002 Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani	398986 berkas	2.372.562.057	
1.1.2.06.02.0003 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk Non Permanen	40930 berkas	794.201.002	1.1.2.06.02.0003 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk Non Permanen	34930 berkas	790.516.876	
1.1.2.06.03 Program Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan inovasi pelayanan	33,33%	1.052.324.337	1.1.2.06.03 Program Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan inovasi pelayanan	33,33%	932.967.433	
	Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan	10,00%			Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan	10,00%		
1.1.2.06.03.0001 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan	2 kali	416.155.470	1.1.2.06.03.0001 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan	2 kali	407.930.496	
1.1.2.06.03.0002 Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 dokumen	636.168.867	1.1.2.06.03.0002 Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 dokumen	525.036.937	DID

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	1.1.2.06.04 Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	85,00%	1.788.339.263		1.1.2.06.04 Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	70,00%	1.826.500.879	
	1.1.2.06.04.0001 Pemutakhiran Data Kependudukan	data kependudukan yang di mutakhirkan	146684 data	532.952.196		1.1.2.06.04.0001 Pemutakhiran Data Kependudukan	data kependudukan yang di mutakhirkan	146684 data	510.778.674	
	1.1.2.06.04.0002 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara	8 sistem	1.255.387.067		1.1.2.06.04.0002 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara	8 sistem	1.315.722.205	DID
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan					
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen					
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar					
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				195.795.171	2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				158.490.680	
	2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	195.795.171		2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	158.490.680	
	2.1.2.04.03.0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	195.795.171		2.1.2.04.03.0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	158.490.680	
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen					
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar					
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				4.380.803.561	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				4.180.336.180	
	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	3.706.234.768		2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	3.692.685.360	
	2.2.2.01.01.0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.706.234.768		2.2.2.01.01.0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.692.685.360	
	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	674.568.793		2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	487.650.820	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
	2.2.2.01.02.0019 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	674.568.793		2.2.2.01.02.0019 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	487.650.820	
Dinas Kesehatan				610.241.118.680	Dinas Kesehatan				765.868.622.458	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.2. Kesehatan				1.1.1.2. Kesehatan				
500.337.827.895				642.752.243.581				
1.1.1.02.01 Program Jaminan Kesehatan	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100,00%	206.403.503.672	1.1.1.02.01 Program Jaminan Kesehatan	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100,00%	308.138.978.269	
1.1.1.02.01.0001 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	366751 orang	198.750.641.772	1.1.1.02.01.0001 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	466673 orang	292.989.801.526	DID
1.1.1.02.01.0002 Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	182210 orang	7.652.861.900	1.1.1.02.01.0002 Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	182210 orang	15.149.176.743	DBHCHT
1.1.1.02.02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	100,00%	17.480.110.964	1.1.1.02.02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	100,00%	23.833.687.134	
1.1.1.02.02.0001 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan	90 jenis	15.215.757.964	1.1.1.02.02.0001 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan	72 jenis	21.569.334.134	Kapitasi JKN, APBD, DID
1.1.1.02.02.0002 Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan	17 jenis	2.264.353.000	1.1.1.02.02.0002 Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan	16 jenis	2.264.353.000	DAK
1.1.1.02.05 Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	99,00%	21.636.914.109	1.1.1.02.05 Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	99,00%	22.142.904.637	
	Cakupan kunjungan neonatal lengkap	100,00%			Cakupan kunjungan neonatal lengkap	100,00%		
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	97,72%			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	97,72%		
	Prevalensi balita gizi buruk	0,11%			Prevalensi balita gizi buruk	0,11%		
	Prevalensi balita gizi kurang	8,24%			Prevalensi balita gizi kurang	8,24%		
	Prevalensi balita stunting	8,90%			Prevalensi balita stunting	8,90%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.02.05.0001 Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	691 kunjungan	3.433.898.000	1.1.1.02.05.0001 Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	691 kunjungan	3.433.898.000	DAK
1.1.1.02.05.0002 Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga	64 Lembaga	13.357.354.808	1.1.1.02.05.0002 Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga	64 Lembaga	13.898.119.944	
1.1.1.02.05.0003 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi	366 orang	4.845.661.301	1.1.1.02.05.0003 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi	331 orang	4.810.886.693	
1.1.1.02.06 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan imunisasi dasar lengkap	97,79%	31.180.204.674	1.1.1.02.06 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan imunisasi dasar lengkap	97,79%	30.918.496.850	
	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	100,00%			Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	100,00%		
	Cakupan kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100,00%			Cakupan kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100,00%		
1.1.1.02.06.0001 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154 lembaga	27.705.945.018	1.1.1.02.06.0001 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154 lembaga	27.621.722.410	DID
1.1.1.02.06.0002 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular	154 lembaga	2.795.244.728	1.1.1.02.06.0002 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular	154 lembaga	2.699.862.120	DID, APBD
1.1.1.02.06.0003 Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi	63 lembaga	679.014.928	1.1.1.02.06.0003 Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi	63 lembaga	596.912.320	DID
1.1.1.02.07 Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya	100,00%	68.408.169.874	1.1.1.02.07 Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya	100,00%	84.683.699.589	
	Persentase rumah sehat	86,42%			Persentase rumah sehat	86,42%		
	Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	84,88%			Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	84,88%		
1.1.1.02.07.0001 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan	64 lembaga	31.163.575.000	1.1.1.02.07.0001 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan	64 lembaga	46.562.428.539	DAK, APBD

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.02.07.0002 Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	63 lembaga	22.707.242.608		1.1.1.02.07.0002 Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	63 lembaga	22.675.948.000	
1.1.1.02.07.0003 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 lembaga	10.318.390.968		1.1.1.02.07.0003 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 lembaga	11.287.096.360	Kapitasi JKN, APBD
1.1.1.02.07.0004 Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	63 lembaga	4.218.961.298		1.1.1.02.07.0004 Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	63 lembaga	4.158.226.690	DID
1.1.1.02.11 Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	98,06%	1.779.352.368		1.1.1.02.11 Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	98,06%	1.735.337.760	
1.1.1.02.11.0001 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	5442 sampel	1.779.352.368		1.1.1.02.11.0001 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	2000 sampel	1.735.337.760	
1.1.1.02.14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	83,70%	23.623.301.811		1.1.1.02.14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	83,70%	27.061.987.359	
1.1.1.02.14.0001 Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan	1 jenis	3.190.000.000		1.1.1.02.14.0001 Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan	1 jenis	3.190.000.000	DAK
1.1.1.02.14.0002 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan	1 aplikasi	570.092.988		1.1.1.02.14.0002 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan	1 aplikasi	549.382.380	
1.1.1.02.14.0003 Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya	63 Lembaga	19.863.208.823		1.1.1.02.14.0003 Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya	63 Lembaga	23.322.604.979	Kapitasi JKN, APBD
1.1.1.02.17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	85,71%	90.050.677.279		1.1.1.02.17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	85,71%	104.607.682.663	
1.1.1.02.17.0001 Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi	40 lembaga	1.067.297.000		1.1.1.02.17.0001 Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi	40 lembaga	1.067.297.000	DAK
1.1.1.02.17.0002 Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	64 lembaga	86.520.943.782		1.1.1.02.17.0002 Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	64 lembaga	101.153.832.990	Kapitasi JKN, APBD

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.02.17.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi	134 lembaga	437.404.322	1.1.1.02.17.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi	32 lembaga	411.549.714	
1.1.1.02.17.0004 Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	900 lokasi	1.388.740.708	1.1.1.02.17.0004 Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	900 lokasi	1.369.446.100	
1.1.1.02.17.0005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	64 lembaga	636.291.467	1.1.1.02.17.0005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	46 lembaga	605.556.859	
1.1.1.02.18 Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standard	98,84%	39.775.593.144	1.1.1.02.18 Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standard	98,84%	39.629.469.320	
	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	98,17%			Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	98,17%		
1.1.1.02.18.0001 Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	5 dokumen	259.234.708	1.1.1.02.18.0001 Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	4 dokumen	210.580.100	
1.1.1.02.18.0002 Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan	27 kali	13.035.002.718	1.1.1.02.18.0002 Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan	9 kali	12.986.188.110	Kapitasi JKN, APBD
1.1.1.02.18.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	46 jenis	21.285.759.717	1.1.1.02.18.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	38 jenis	21.237.105.109	DID
1.1.1.02.18.0004 Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan	4 item	3.602.763.000	1.1.1.02.18.0004 Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan	2 item	3.602.763.000	DAK
1.1.1.02.18.0005 Penyediaan/Peningkatan/Pe meliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	1 Jenis	689.853.001	1.1.1.02.18.0005 Penyediaan/Peningkatan/Pe meliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	1 Jenis	689.853.001	DBHCHT, DBHCHT
1.1.1.02.18.0006 Pengadaan bahan habis pakai penanggulangan TBC (DAK bidang kesehatan)	Jumlah bahan habis pakai penanggulangan TBC	3 Item	297.361.000	1.1.1.02.18.0006 Pengadaan bahan habis pakai penanggulangan TBC (DAK bidang kesehatan)	Jumlah bahan habis pakai penanggulangan TBC	3 Item	297.361.000	DAK

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.02.18.0007 Pengadaan Alat Kesehatan penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	3 item	605.619.000	1.1.1.02.18.0007 Pengadaan Alat Kesehatan penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	3 item	605.619.000	DAK
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				
210.810.608				201.580.000				
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	210.810.608	2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	201.580.000	
2.1.2.04.03.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	210.810.608	2.1.2.04.03.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	201.580.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
109.692.480.177				122.914.798.877				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	103.646.400.567	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	116.882.389.875	
2.2.2.01.01.0020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	103.646.400.567	2.2.2.01.01.0020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	116.882.389.875	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	6.046.079.610	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	6.032.409.002	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0020 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6.046.079.610	2.2.2.01.02.0020 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6.032.409.002	
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
48.384.047.886				36.557.030.299				
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.3. Pangan				1.1.2.3. Pangan				
3.401.721.568				3.183.286.959				
1.1.2.03.01 Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan	Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal) komoditas pangan	36,40%	732.448.880	1.1.2.03.01 Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan	Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal) komoditas pangan	36,40%	701.229.687	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.03.01.0001 Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring	15 laporan	732.448.880	1.1.2.03.01.0001 Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring	15 laporan	701.229.687	
1.1.2.03.02 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	1,00	2.669.272.688	1.1.2.03.02 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	1,00	2.482.057.272	
	Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	89,50%			Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	89,50%		
	Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95,00%			Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95,00%		
1.1.2.03.02.0001 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar	Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa	2060 sampel	1.196.452.001	1.1.2.03.02.0001 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar	Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa	2060 sampel	1.072.409.103	
1.1.2.03.02.0002 Pengelolaan Sentra Olahan Pangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Yang Dilaksanakan	11 kali	974.696.973	1.1.2.03.02.0002 Pengelolaan Sentra Olahan Pangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Yang Dilaksanakan	11 kali	920.573.229	
1.1.2.03.02.0003 Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan	28 kali	498.123.714	1.1.2.03.02.0003 Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan	28 kali	489.074.940	
1.1.2.5. Lingkungan Hidup			23.788.989.572	1.1.2.5. Lingkungan Hidup			14.802.783.748	
1.1.2.05.06 Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan	Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan diawasi	54,76%	23.788.989.572	1.1.2.05.06 Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan	Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan diawasi	54,76%	14.802.783.748	
1.1.2.05.06.0001 Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Raya	Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan dipelihara	12 lokasi	23.788.989.572	1.1.2.05.06.0001 Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Raya	Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan dipelihara	12 lokasi	14.802.783.748	
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan				
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar				
1.2.2.4. Kelautan dan Perikanan			5.349.960.011	1.2.2.4. Kelautan dan Perikanan			4.679.944.873	
1.2.2.04.01 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	65,00%	435.307.622	1.2.2.04.01 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	50,00%	395.316.470	
1.2.2.04.01.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	30 kali	435.307.622	1.2.2.04.01.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	18 kali	395.316.470	
1.2.2.04.02 Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	15,00%	4.914.652.389	1.2.2.04.02 Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	10,00%	4.284.628.403	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.2.2.04.02.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dipelihara dan diadakan	534 unit	1.502.385.251	1.2.2.04.02.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dipelihara dan diadakan	464 unit	1.401.517.106	
1.2.2.04.02.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipelihara dan diadakan	172 unit	2.948.120.345	1.2.2.04.02.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipelihara dan diadakan	47 unit	2.500.170.097	
1.2.2.04.02.0003 Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kawasan pesisir	12 laporan	464.146.793	1.2.2.04.02.0003 Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kawasan pesisir	12 laporan	382.941.200	
1.2.2.5. Pertanian			10.367.435.805	1.2.2.5. Pertanian			9.468.632.776	
1.2.2.05.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pertanian	78,00%	295.847.418	1.2.2.05.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pertanian	78,00%	222.139.750	
1.2.2.05.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses	255 berkas	295.847.418	1.2.2.05.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses	250 berkas	222.139.750	
1.2.2.05.02 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	88,00%	1.013.744.893	1.2.2.05.02 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	88,00%	1.039.938.727	
1.2.2.05.02.0001 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis	1562 kali	1.013.744.893	1.2.2.05.02.0001 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis	1562 kali	1.039.938.727	
1.2.2.05.03 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	65,00%	787.660.829	1.2.2.05.03 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	65,00%	666.047.187	
1.2.2.05.03.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	8 kali	350.556.069	1.2.2.05.03.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	4 kali	249.517.155	
1.2.2.05.03.0002 Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 jenis	437.104.760	1.2.2.05.03.0002 Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 jenis	416.530.032	
1.2.2.05.04 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	65,00%	4.686.199.534	1.2.2.05.04 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	65,00%	4.827.495.731	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.2.2.05.04.0001 Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura	300 orang	438.508.006	1.2.2.05.04.0001 Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura	300 orang	422.699.281	
1.2.2.05.04.0002 Pembibitan	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan	13 jenis	3.150.036.196	1.2.2.05.04.0002 Pembibitan	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan	12 jenis	3.583.785.047	
1.2.2.05.04.0003 Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	125 orang	1.097.655.332	1.2.2.05.04.0003 Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	100 orang	821.011.403	
1.2.2.05.05 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	67,50%	827.688.432	1.2.2.05.05 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	50,00%	346.482.410	
1.2.2.05.05.0001 Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan	72 kali	827.688.432	1.2.2.05.05.0001 Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan	59 kali	346.482.410	
1.2.2.05.06 Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	16,00%	2.756.294.699	1.2.2.05.06 Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	16,00%	2.366.528.971	
1.2.2.05.06.0001 Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan	485 orang	1.200.801.139	1.2.2.05.06.0001 Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan	184 orang	913.172.480	
1.2.2.05.06.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disediakan dan dipelihara	5 Jenis	1.555.493.560	1.2.2.05.06.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disediakan dan dipelihara	5 Jenis	1.453.356.491	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	3.632.426.201	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	3.484.921.030	
2.2.2.01.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.632.426.201	2.2.2.01.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.484.921.030	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.843.514.729	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	937.460.913	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0021 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.843.514.729	2.2.2.01.02.0021 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	937.460.913	
Dinas Komunikasi dan Informatika			78.482.544.758	Dinas Komunikasi dan Informatika			55.945.637.052	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.16. Statistik				1.1.2.16. Statistik				
			291.869.817				178.747.807	
1.1.2.16.01 Program Pengelolaan Data Statistik Daerah	Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	100,00%	291.869.817	1.1.2.16.01 Program Pengelolaan Data Statistik Daerah	Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	100,00%	178.747.807	
1.1.2.16.01.0001 Penyusunan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun	1 dokumen	291.869.817	1.1.2.16.01.0001 Penyusunan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun	1 dokumen	178.747.807	
1.1.2.9. Komunikasi dan Informatika serta Persandian			74.542.153.615	1.1.2.9. Komunikasi dan Informatika serta Persandian			52.979.680.836	
1.1.2.09.01 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	53,85%	32.743.758.825	1.1.2.09.01 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	53,85%	29.616.371.488	
1.1.2.09.01.0001 Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan	396 lokasi	29.839.500.708	1.1.2.09.01.0001 Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan	396 lokasi	27.298.553.399	DID
1.1.2.09.01.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi yang dilaksanakan	72 lokasi	739.042.293	1.1.2.09.01.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi yang dilaksanakan	72 lokasi	481.745.423	
1.1.2.09.01.0003 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun	15 aplikasi	811.100.044	1.1.2.09.01.0003 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun	15 aplikasi	739.732.865	
1.1.2.09.01.0004 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan	150 Aplikasi	1.354.115.780	1.1.2.09.01.0004 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan	150 Aplikasi	1.096.339.801	
1.1.2.09.02 Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	32.000 Kunjungan	6.529.667.829	1.1.2.09.02 Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	32.000 Kunjungan	4.677.700.255	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.09.02.0001 Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani	3000 berkas	1.092.562.285	1.1.2.09.02.0001 Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani	3000 berkas	1.086.690.275	
1.1.2.09.02.0002 Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	19 Saluran	830.591.449	1.1.2.09.02.0002 Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	19 Saluran	643.119.347	
1.1.2.09.02.0003 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial	11 kali	1.408.546.316	1.1.2.09.02.0003 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial	6 kali	844.870.966	
1.1.2.09.02.0004 Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun	5 dokumen	682.603.580	1.1.2.09.02.0004 Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun	1 dokumen	438.927.570	
1.1.2.09.02.0005 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	4 Jenis	2.515.364.199	1.1.2.09.02.0005 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	3 Jenis	1.664.092.097	
1.1.2.09.03 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	100,00%	35.268.726.961	1.1.2.09.03 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	100,00%	18.685.609.093	
1.1.2.09.03.0001 Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian Perkotaan yang dikelola	1289 unit	2.329.392.940	1.1.2.09.03.0001 Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian Perkotaan yang dikelola	1289 unit	2.294.544.048	DID
1.1.2.09.03.0002 Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK	136 lokasi	17.748.853.061	1.1.2.09.03.0002 Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK	4 lokasi	1.610.515.234	
1.1.2.09.03.0003 Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	4 Jenis	9.017.079.013	1.1.2.09.03.0003 Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	4 Jenis	9.690.762.995	DID
1.1.2.09.03.0004 Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	100 persen	3.479.773.776	1.1.2.09.03.0004 Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	100 persen	3.453.027.879	DID
1.1.2.09.03.0005 Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola	2 Lokasi	2.693.628.171	1.1.2.09.03.0005 Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola	2 Lokasi	1.636.758.937	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.268.829.921		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.026.139.699	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01.0022 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.268.829.921	2.2.2.01.01.0022 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.026.139.699	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.379.691.405	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	761.068.710	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0022 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.379.691.405	2.2.2.01.02.0022 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	761.068.710	
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			15.304.025.249	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			12.317.607.067	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			12.741.328.497	1.1.2.15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			9.991.819.675	
1.1.2.15.02 Program Pengembangan Produk Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	35,11%	1.259.211.085	1.1.2.15.02 Program Pengembangan Produk Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	35,11%	802.668.534	
1.1.2.15.02.0002 Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	708 orang	1.259.211.085	1.1.2.15.02.0002 Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	587 orang	802.668.534	
1.1.2.15.03 Program Pengembangan Sentra Usaha	Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	58,00%	7.789.286.241	1.1.2.15.03 Program Pengembangan Sentra Usaha	Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	58,00%	6.015.429.748	
1.1.2.15.03.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang difasilitasi	60 sentra usaha	4.297.490.483	1.1.2.15.03.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang difasilitasi	21 sentra usaha	4.050.740.915	
1.1.2.15.03.0003 Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan	49 sentra usaha	3.491.795.758	1.1.2.15.03.0003 Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan	49 sentra usaha	1.964.688.833	
1.1.2.15.04 Program Pengembangan Usaha Koperasi	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	79,00%	1.077.298.756	1.1.2.15.04 Program Pengembangan Usaha Koperasi	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	55,00%	1.038.460.124	
1.1.2.15.04.0001 Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	175 koperasi	659.940.756	1.1.2.15.04.0001 Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	125 koperasi	621.102.124	
1.1.2.15.04.0003 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	178 Orang	417.358.000	1.1.2.15.04.0003 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	210 Orang	417.358.000	DAK

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.15.05 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	69,95%	2.085.433.478	1.1.2.15.05 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	69,95%	1.707.610.621	
1.1.2.15.05.0001 Fasilitas Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi	50 kelompok	661.770.327	1.1.2.15.05.0001 Fasilitas Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi	44 kelompok	352.605.216	
1.1.2.15.05.0002 Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	629 koperasi	1.167.216.292	1.1.2.15.05.0002 Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	629 koperasi	1.166.904.755	
1.1.2.15.05.0003 Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya	35 koperasi	256.446.859	1.1.2.15.05.0003 Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya	35 koperasi	188.100.650	
1.1.2.15.06 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	8,31%	530.098.937	1.1.2.15.06 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	8,31%	427.650.648	
1.1.2.15.06.0001 Fasilitas Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan	179 orang/kelompok	530.098.937	1.1.2.15.06.0001 Fasilitas Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan	179 orang/kelompok	427.650.648	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0023 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.01.01.0023 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				
2.2.2.01.02.0023 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				2.2.2.01.02.0023 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				
Dinas Lingkungan Hidup				Dinas Lingkungan Hidup				
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.5. Lingkungan Hidup				1.1.2.5. Lingkungan Hidup				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.05.02 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	78,00%	2.468.745.268	1.1.2.05.02 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	78,00%	2.584.030.812	
1.1.2.05.02.0001 Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	100 izin	423.280.293	1.1.2.05.02.0001 Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	100 izin	448.090.316	
1.1.2.05.02.0002 Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan	2000 berkas	1.489.272.332	1.1.2.05.02.0002 Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan	2000 berkas	1.566.491.148	
1.1.2.05.02.0003 Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	100 izin	556.192.643	1.1.2.05.02.0003 Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	100 izin	569.449.348	
1.1.2.05.04 Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	80,00%	3.308.708.680	1.1.2.05.04 Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	80,00%	1.733.736.487	
1.1.2.05.04.0001 Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban	600 Unit	3.308.708.680	1.1.2.05.04.0001 Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban	250 Unit	1.733.736.487	
1.1.2.05.09 Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	80,00%	3.901.438.584	1.1.2.05.09 Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	80,00%	3.698.457.233	
1.1.2.05.09.0001 Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	96 lokasi	422.434.337	1.1.2.05.09.0001 Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	96 lokasi	342.175.416	
1.1.2.05.09.0002 Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak	365 data	914.967.123	1.1.2.05.09.0002 Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak	365 data	895.602.429	
1.1.2.05.09.0003 Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat sebanyak	778 data	583.604.694	1.1.2.05.09.0003 Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah data air laut (dari 24 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat sebanyak	754 data	491.254.320	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.05.09.0004 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	50 obyek	566.374.462	1.1.2.05.09.0004 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	50 obyek	519.712.378	
1.1.2.05.09.0005 Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 lembaga	957.671.204	1.1.2.05.09.0005 Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 lembaga	993.300.759	
1.1.2.05.09.0006 Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	224 sampel	456.386.764	1.1.2.05.09.0006 Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	224 sampel	456.411.931	
1.1.2.05.10 Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	100,00%	3.754.489.587	1.1.2.05.10 Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	100,00%	3.264.826.088	
	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	70,00%			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	70,00%		
1.1.2.05.10.0001 Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	113 kali	1.465.660.985	1.1.2.05.10.0001 Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	65 kali	1.049.606.037	
1.1.2.05.10.0002 Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	12 kali	1.013.253.329	1.1.2.05.10.0002 Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	6 kali	945.332.477	
1.1.2.05.10.0003 Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	5 dokumen	1.275.575.273	1.1.2.05.10.0003 Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	5 dokumen	1.269.887.574	
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan				
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar				
1.2.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral				1.2.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral				
551.476.254				531.273.235				
1.2.2.02.03 Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	154 kegiatan dan /atau usaha	551.476.254	1.2.2.02.03 Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	154 kegiatan dan /atau usaha	531.273.235	
1.2.2.02.03.0001 Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi	120 lembaga	551.476.254	1.2.2.02.03.0001 Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi	120 lembaga	531.273.235	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
1.860.563.650				1.820.704.434				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.392.230.279	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.443.343.273	
2.2.2.01.01.0024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.392.230.279	2.2.2.01.01.0024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.443.343.273	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	468.333.371	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	377.361.161	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0024 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	468.333.371	2.2.2.01.02.0024 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	377.361.161	
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			1.243.261.765.746	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			915.687.675.848	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			927.562.230.808	1.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			655.621.555.068	
1.1.1.03.01 Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi syarat	100,00%	1.255.240.536	1.1.1.03.01 Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi syarat	100,00%	1.030.059.010	
1.1.1.03.01.0001 Fasilitas dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang ifrastruktur	180 rekomendasi	1.255.240.536	1.1.1.03.01.0001 Fasilitas dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang ifrastruktur	180 rekomendasi	1.030.059.010	
1.1.1.03.03 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	12,90%	391.718.456.527	1.1.1.03.03 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	12,90%	188.898.548.079	
	Persentase jaringan jalan yang terbangun	0,68%			Persentase jaringan jalan yang terbangun	0,33%		
	Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	28,64%			Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	12,70%		
1.1.1.03.03.0001 Fasilitas Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah dokumen fasilitas penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum	2 dokumen	356.093.659	1.1.1.03.03.0001 Fasilitas Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah dokumen fasilitas penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum	2 dokumen	208.035.750	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.03.03.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak	220 unit	18.984.476.699	1.1.1.03.03.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak	220 unit	19.012.595.792	
1.1.1.03.03.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	1 lokasi	10.838.357.000	1.1.1.03.03.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	0 lokasi	0	
1.1.1.03.03.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun	24 lokasi	285.062.617.671	1.1.1.03.03.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun	24 lokasi	110.242.449.441	DBH
1.1.1.03.03.0005 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun	1 lokasi	31.311.999.999	1.1.1.03.03.0005 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun	1 lokasi	24.398.076.061	
1.1.1.03.03.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi	1222 lokasi	45.164.911.499	1.1.1.03.03.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi	1222 lokasi	35.037.391.035	DID, APBD
1.1.1.03.05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Lama genangan	22,30 menit	493.843.675.192	1.1.1.03.05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Lama genangan	22,30 menit	435.323.627.849	
	Luas genangan	600 Ha			Luas genangan	600 Ha		
	Tinggi genangan	12,30 cm			Tinggi genangan	12,30 cm		
1.1.1.03.05.0001 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak	56 unit	31.274.989.985	1.1.1.03.05.0001 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak	56 unit	31.765.571.493	
1.1.1.03.05.0002 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	25 lokasi	224.162.521.787	1.1.1.03.05.0002 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	17 lokasi	159.809.587.301	
1.1.1.03.05.0003 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan	2 lokasi	122.980.781.145	1.1.1.03.05.0003 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan	2 lokasi	117.940.753.265	
1.1.1.03.05.0004 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	1025 lokasi	115.425.382.275	1.1.1.03.05.0004 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	1025 lokasi	125.807.715.790	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.03.07 Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu	100,00%	19.209.825.612	1.1.1.03.07 Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu	100,00%	12.006.832.732	
1.1.1.03.07.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	12 dokumen	11.271.864.025	1.1.1.03.07.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	10 dokumen	5.567.075.000	
1.1.1.03.07.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan yang disusun	1 dokumen	1.711.291.505	1.1.1.03.07.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan yang disusun	1 dokumen	1.711.291.505	
1.1.1.03.07.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun	35 dokumen	6.226.670.082	1.1.1.03.07.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun	28 dokumen	4.728.466.227	
1.1.1.03.08 Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan	Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang tepat waktu	100,00%	20.038.368.794	1.1.1.03.08 Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan	Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang tepat waktu	100,00%	16.878.018.721	
1.1.1.03.08.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	20 dokumen	8.758.191.761	1.1.1.03.08.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	12 dokumen	6.708.974.506	
1.1.1.03.08.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	2 dokumen	4.386.659.198	1.1.1.03.08.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	2 dokumen	4.386.659.198	
1.1.1.03.08.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun	50 dokumen	6.893.517.835	1.1.1.03.08.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun	35 dokumen	5.782.385.017	
1.1.1.03.09 Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100,00%	1.496.664.147	1.1.1.03.09 Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100,00%	1.484.468.677	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.03.09.0001 Fasilitas Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan	10 izin	1.496.664.147	1.1.1.03.09.0001 Fasilitas Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan	10 izin	1.484.468.677	
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.4. Pertanahan				1.1.2.4. Pertanahan				
279.302.580.868				221.116.995.635				
1.1.2.04.02 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	15,77 Ha	277.822.533.508	1.1.2.04.02 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	15,77 Ha	219.972.766.833	
1.1.2.04.02.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	6 lokasi	277.822.533.508	1.1.2.04.02.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	5 lokasi	219.972.766.833	
1.1.2.04.05 Program Pengamanan Aset Infrastruktur	Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya yang diamankan	2,50%	1.480.047.360	1.1.2.04.05 Program Pengamanan Aset Infrastruktur	Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya yang diamankan	2,50%	1.144.228.802	
1.1.2.04.05.0001 Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan	40 bidang	1.480.047.360	1.1.2.04.05.0001 Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan	40 bidang	1.144.228.802	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				
381.256.284				376.020.000				
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	381.256.284	2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	376.020.000	
2.1.2.04.03.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	381.256.284	2.1.2.04.03.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	376.020.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
36.015.697.786				38.573.105.145				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	31.382.522.432	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	34.564.949.503	
2.2.2.01.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	31.382.522.432	2.2.2.01.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	34.564.949.503	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	4.633.175.354	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	4.008.155.642	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0025 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	4.633.175.354	2.2.2.01.02.0025 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	4.008.155.642	
Dinas Pemadam Kebakaran			62.737.900.430	Dinas Pemadam Kebakaran			59.712.376.581	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			57.328.339.680	1.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			54.957.397.206	
1.1.1.05.04 Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	51	40.788.271.027	1.1.1.05.04 Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	51	40.988.911.961	
	Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100,00%			Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100,00%		
1.1.1.05.04.0001 Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya	756 orang	36.817.072.267	1.1.1.05.04.0001 Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya	756 orang	38.599.252.719	
1.1.1.05.04.0002 Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan	180 kali	1.698.335.094	1.1.1.05.04.0002 Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan	120 kali	1.024.548.500	
1.1.1.05.04.0003 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparaturnya dan peran serta masyarakat	60 kali	2.272.863.666	1.1.1.05.04.0003 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparaturnya dan peran serta masyarakat	10 kali	1.365.110.742	
1.1.1.05.11 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	80,00%	16.540.068.653	1.1.1.05.11 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	80,00%	13.968.485.245	
1.1.1.05.11.0001 Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara	210 unit	5.640.844.419	1.1.1.05.11.0001 Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara	250 unit	6.936.105.184	
1.1.1.05.11.0002 Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan	264 bangunan	1.035.399.256	1.1.1.05.11.0002 Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan	264 bangunan	805.225.102	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.05.11.0003 Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun	947 unit	9.863.824.978	1.1.1.05.11.0003 Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun	579 unit	6.227.154.959	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.01.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				
2.2.2.01.02.0026 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				2.2.2.01.02.0026 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.10. Penanaman Modal				1.1.2.10. Penanaman Modal				
1.1.2.10.01 Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal				1.1.2.10.01 Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal				
1.1.2.10.01.0001 Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				1.1.2.10.01.0001 Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
1.1.2.10.01.0003 Pengelolaan Data Investasi				1.1.2.10.01.0003 Pengelolaan Data Investasi				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.10.02 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	20,00%	1.255.231.994	1.1.2.10.02 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	20,00%	947.513.529	
1.1.2.10.02.0001 Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal	4 dokumen	637.547.294	1.1.2.10.02.0001 Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal	2 dokumen	527.999.725	DID
1.1.2.10.02.0002 Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3 kali	617.684.700	1.1.2.10.02.0002 Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	1 kali	419.513.804	DID
1.1.2.10.03 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal	Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	72,00%	5.621.297.605	1.1.2.10.03 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal	Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	72,00%	5.607.241.467	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	78,00%			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	78,00%		
1.1.2.10.03.0004 Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	2 kali	16.385.765	1.1.2.10.03.0004 Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	2 kali	16.385.765	DBHCHT
1.1.2.10.03.0005 Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000 pelaku usaha	826.018.859	1.1.2.10.03.0005 Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000 pelaku usaha	683.221.017	DID
1.1.2.10.03.0006 Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	60000 berkas	4.743.892.217	1.1.2.10.03.0006 Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	60000 berkas	4.872.633.921	DID, APBD
1.1.2.10.03.0007 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	2 kali	11.704.145	1.1.2.10.03.0007 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	2 kali	11.704.145	DBHCHT
1.1.2.10.03.0008 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	4 kali	23.296.619	1.1.2.10.03.0008 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	4 kali	23.296.619	DBHCHT
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.530.763.791				2.176.725.609				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.994.539.715				1.838.711.032				
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran				
87,00 %				87,00 %				
2.2.2.01.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.01.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				
1.994.539.715				1.838.711.032				
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				
100%				100%				
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				
536.224.076				338.014.577				
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran				Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran				
100,00%				100,00%				
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik				
100,00%				100,00%				
2.2.2.01.02.0027 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				2.2.2.01.02.0027 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				
536.224.076				338.014.577				
Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				
100%				100%				
Dinas Pendidikan				Dinas Pendidikan				
858.120.317.855				883.351.462.718				
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.1. Pendidikan				1.1.1.1. Pendidikan				
833.163.526.836				860.557.409.867				
1.1.1.01.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan				1.1.1.01.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan				
139.161.087.095				149.555.430.747				
Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A				
86,25%				86,25%				
Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B				
89,27%				89,27%				
Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C				
91,24%				91,24%				
Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan				Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan				
72,25%				72,25%				
Persentase ketuntasan pendidikan PAUD				Persentase ketuntasan pendidikan PAUD				
78,50%				78,50%				
Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional				Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional				
0,15%				0,03%				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
				Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	1,70%						Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0,96%		
				Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	4,00%						Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	2,21%		
				Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	45,71%						Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	45,71%		
			1.1.1.01.01.0001 Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu	13000 orang	53.130.262.392				1.1.1.01.01.0001 Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu	13000 orang	62.724.647.250	
			1.1.1.01.01.0002 Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	2 kali	967.168.772				1.1.1.01.01.0002 Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	2 kali	262.260.000	
			1.1.1.01.01.0003 Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan	31 lembaga	5.218.626.859				1.1.1.01.01.0003 Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan	31 lembaga	5.015.011.717	DID
			1.1.1.01.01.0004 Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	234 lembaga	815.214.032				1.1.1.01.01.0004 Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	209 lembaga	290.620.001	
			1.1.1.01.01.0005 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan	12 kali	1.766.848.242				1.1.1.01.01.0005 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan	5 kali	449.735.880	
			1.1.1.01.01.0006 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1368 lembaga	5.494.814.292				1.1.1.01.01.0006 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1368 lembaga	1.345.944.000	
			1.1.1.01.01.0007 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	12010 orang	37.966.894.742				1.1.1.01.01.0007 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	12010 orang	37.773.260.000	
			1.1.1.01.01.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan	18 kali	3.542.419.722				1.1.1.01.01.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan	14 kali	532.116.900	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.01.01.0009 Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	3 kali	29.110.495.042		1.1.1.01.01.0009 Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	2 kali	40.013.491.999	
1.1.1.01.01.0010 Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan	2 lembaga	118.800.000		1.1.1.01.01.0010 Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan	2 lembaga	118.800.000	DAK, APBD
1.1.1.01.01.0011 Pengadaan Sarana Belajar PKBM yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah PKBM yang mendapatkan peningkatan sarana	4 lembaga	802.729.000		1.1.1.01.01.0011 Pengadaan Sarana Belajar PKBM yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah PKBM yang mendapatkan peningkatan sarana	4 lembaga	802.729.000	DAK
1.1.1.01.01.0012 Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana	2 lembaga	226.814.000		1.1.1.01.01.0012 Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana	2 lembaga	226.814.000	DAK
1.1.1.01.02 Program Pengembangan Sekolah Dasar	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100,00%	308.134.436.570		1.1.1.01.02 Program Pengembangan Sekolah Dasar	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100,00%	318.789.829.626	
	Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	92,01%				Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	92,01%		
	Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0,12%				Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0,08%		
1.1.1.01.02.0001 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	302 lembaga	122.796.255.142		1.1.1.01.02.0001 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	302 lembaga	146.152.267.276	bos, APBD
1.1.1.01.02.0002 Fasilitas Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD	90799 orang	2.395.907.882		1.1.1.01.02.0002 Fasilitas Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD	45724 orang	844.616.218	DID
1.1.1.01.02.0003 Fasilitas Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	302 lembaga	151.384.816.605		1.1.1.01.02.0003 Fasilitas Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	302 lembaga	151.203.721.463	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.01.02.0004 Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	73 lembaga	15.134.930.224	1.1.1.01.02.0004 Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	55 lembaga	6.645.668.949	
1.1.1.01.02.0005 Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	259 lembaga	552.026.742	1.1.1.01.02.0005 Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	217 lembaga	177.110.000	
1.1.1.01.02.0006 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	658 lembaga	725.931.552	1.1.1.01.02.0006 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	658 lembaga	171.220.000	
1.1.1.01.02.0007 Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar	302 lembaga	10.613.904.931	1.1.1.01.02.0007 Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar	285 lembaga	10.136.361.860	DID
1.1.1.01.02.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	5 kali	1.470.306.492	1.1.1.01.02.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	1 kali	398.506.860	
1.1.1.01.02.0009 Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	17 lembaga	3.060.357.000	1.1.1.01.02.0009 Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	17 lembaga	3.060.357.000	DAK, APBD
1.1.1.01.03 Program Pengembangan Sekolah Menengah	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100,00%	149.265.860.248	1.1.1.01.03 Program Pengembangan Sekolah Menengah	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100,00%	160.262.820.889	
	Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	95,73%			Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	95,73%		
	Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	0,14%			Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	0,14%		
1.1.1.01.03.0001 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	63 lembaga	61.324.155.142	1.1.1.01.03.0001 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	63 lembaga	84.990.015.136	bos, APBD

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.01.03.0002 Fasilitas Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah	40993 orang	909.287.422		1.1.1.01.03.0002 Fasilitas Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah	40993 orang	342.904.160	
1.1.1.01.03.0003 Fasilitas Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	63 lembaga	65.012.121.080		1.1.1.01.03.0003 Fasilitas Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	63 lembaga	58.194.430.473	
1.1.1.01.03.0004 Fasilitas Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	37 lembaga	7.127.931.243		1.1.1.01.03.0004 Fasilitas Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	37 lembaga	5.113.513.690	
1.1.1.01.03.0005 Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah	294 lembaga	434.243.142		1.1.1.01.03.0005 Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah	294 lembaga	188.864.000	
1.1.1.01.03.0006 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	245 lembaga	568.003.181		1.1.1.01.03.0006 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	245 lembaga	117.600.000	
1.1.1.01.03.0007 Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah	63 lembaga	10.386.130.396		1.1.1.01.03.0007 Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah	63 lembaga	9.264.929.130	DID, APBD
1.1.1.01.03.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	1 kali	1.739.824.642		1.1.1.01.03.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	1 kali	286.400.300	
1.1.1.01.03.0009 Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	6 lembaga	1.764.164.000		1.1.1.01.03.0009 Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	6 lembaga	1.764.164.000	DAK
1.1.1.01.05 Program Peningkatan Manajemen Sekolah	Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	81,86%	85.467.427.052		1.1.1.01.05 Program Peningkatan Manajemen Sekolah	Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	81,86%	101.790.318.634	
	Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	87,38%				Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	87,38%		
1.1.1.01.05.0001 Fasilitas Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah kegiatan fasilitas penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan	2 kali	1.749.080.981		1.1.1.01.05.0001 Fasilitas Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah kegiatan fasilitas penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan	2 kali	924.722.000	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana	
1.1.1.01.05.0002 Fasilitas Pengelolaan Manajemen Sekolah	jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah	2567 lembaga	821.658.442	1.1.1.01.05.0002 Fasilitas Pengelolaan Manajemen Sekolah	jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah	942 lembaga	500.793.300		
1.1.1.01.05.0003 Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	365 lembaga	82.896.687.629	1.1.1.01.05.0003 Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	365 lembaga	100.364.803.334		
1.1.1.01.06 Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten	100,00%	151.134.715.871	1.1.1.01.06 Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten	100,00%	130.159.009.971		
	Persentase guru SD yang kompeten	100,00%			Persentase guru SD yang kompeten	100,00%			
	Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	100,00%			Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	100,00%			
	Persentase guru SMP yang kompeten	100,00%			Persentase guru SMP yang kompeten	100,00%			
	Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100,00%			Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100,00%			
	Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	85,00%			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	85,00%			
	Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	90,00%			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	90,00%			
	Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten	100,00%			Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten	100,00%			
1.1.1.01.06.0001 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan	1 kali	955.915.142	1.1.1.01.06.0001 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan	1 kali	385.230.000		
1.1.1.01.06.0002 Fasilitas Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	2031 orang	5.732.512.162	1.1.1.01.06.0002 Fasilitas Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	2031 orang	647.140.800		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.01.06.0003 Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan	957 lembaga	142.658.978.014	1.1.1.01.06.0003 Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan	957 lembaga	128.578.356.671	
1.1.1.01.06.0004 Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	2 dokumen	1.787.310.553	1.1.1.01.06.0004 Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	2 dokumen	548.282.500	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				
2.1.2.4.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				2.1.2.4.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				
2.1.2.04.03.0008 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	305.397.342	2.1.2.04.03.0008 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	134.979.720	
2.1.2.04.03.0008 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	305.397.342	2.1.2.04.03.0008 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	134.979.720	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	21.622.238.201	2.2.2.01.01.0028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	21.165.910.863	
2.2.2.01.01.0028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	21.622.238.201	2.2.2.01.01.0028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	21.165.910.863	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	3.029.155.476	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.493.162.268	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0028 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	3.029.155.476	2.2.2.01.02.0028 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.493.162.268	
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah				
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman			27.662.556.707	1.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman			24.709.314.002	
1.1.1.04.04 Program Pengelolaan Rusunawa	Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa	100,00%	27.662.556.707	1.1.1.04.04 Program Pengelolaan Rusunawa	Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa	100,00%	24.709.314.002	
1.1.1.04.04.0001 Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola	3981 lokasi	7.730.569.934	1.1.1.04.04.0001 Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola	3977 lokasi	6.203.871.482	DBH
1.1.1.04.04.0002 Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	105 blok	19.931.986.773	1.1.1.04.04.0002 Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	101 blok	18.505.442.520	
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.4. Pertanahan			321.599.890.221	1.1.2.4. Pertanahan			142.980.986.088	
1.1.2.04.01 Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan	Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100,00%	4.237.495.689	1.1.2.04.01 Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan	Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100,00%	4.162.204.301	
1.1.2.04.01.0001 Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	12 Kasus	1.381.143.417	1.1.2.04.01.0001 Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	12 Kasus	1.301.595.357	
1.1.2.04.01.0002 Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	18 obyek	1.391.233.321	1.1.2.04.01.0002 Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	18 obyek	1.384.226.082	
1.1.2.04.01.0003 Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	8 kali	1.465.118.951	1.1.2.04.01.0003 Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	7 kali	1.476.382.862	
1.1.2.04.03 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	44,90 Ha	302.702.598.397	1.1.2.04.03 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	44,90 Ha	128.088.152.237	
1.1.2.04.03.0001 Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	4 dokumen	5.017.531.752	1.1.2.04.03.0001 Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	2 dokumen	3.467.146.552	
1.1.2.04.03.0002 Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan	4 lokasi	297.685.066.645	1.1.2.04.03.0002 Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan	2 lokasi	124.621.005.685	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.04.04 Program Pengamanan Aset	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	36,80%	8.813.850.476	1.1.2.04.04 Program Pengamanan Aset	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	36,80%	5.320.089.104	
	Persentase tanah aset yang tersertifikasi	43,08%			Persentase tanah aset yang tersertifikasi	43,08%		
1.1.2.04.04.0001 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	100 bidang	4.896.263.144	1.1.2.04.04.0001 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	100 bidang	2.633.823.957	
1.1.2.04.04.0002 Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	4 dokumen	1.179.181.982	1.1.2.04.04.0002 Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	1 dokumen	717.316.745	
1.1.2.04.04.0003 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	75 dokumen	2.738.405.350	1.1.2.04.04.0003 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	75 dokumen	1.968.948.402	
1.1.2.04.06 Program Pengelolaan Aset Tanah	Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	81,30%	5.845.945.659	1.1.2.04.06 Program Pengelolaan Aset Tanah	Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	81,30%	5.410.540.446	
1.1.2.04.06.0001 Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	7000 izin	2.421.478.467	1.1.2.04.06.0001 Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	7000 izin	2.361.774.703	
1.1.2.04.06.0002 Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan	1 dokumen	1.984.607.696	1.1.2.04.06.0002 Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan	1 dokumen	1.950.235.833	
1.1.2.04.06.0003 Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan	8000 lokasi	1.439.859.496	1.1.2.04.06.0003 Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan	8000 lokasi	1.098.529.910	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.13 Program Pengelolaan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang dipelihara	100,00%	15.539.694.682	2.1.2.01.13 Program Pengelolaan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang dipelihara	100,00%	14.558.966.134	
2.1.2.01.13.0001 Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola	24 lokasi	15.539.694.682	2.1.2.01.13.0001 Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola	24 lokasi	14.558.966.134	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	5.690.210.736	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	4.178.250.055	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01.0029 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5.690.210.736	2.2.2.01.01.0029 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4.178.250.055	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	2.176.099.480	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.047.638.748	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0029 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.176.099.480	2.2.2.01.02.0029 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.047.638.748	
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			24.135.052.895	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			20.602.855.147	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			6.658.746.532	1.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			4.900.630.674	
1.1.2.02.01 Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan	Persentase kelurahan yang responsif gender	20,13%	2.310.110.357	1.1.2.02.01 Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan	Persentase kelurahan yang responsif gender	20,13%	1.406.371.213	
	Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100,00%			Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100,00%		
1.1.2.02.01.0001 Fasilitas Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitas pembinaan organisasi perempuan	29 kali	1.073.000.387	1.1.2.02.01.0001 Fasilitas Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitas pembinaan organisasi perempuan	20 kali	517.389.459	
1.1.2.02.01.0002 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289 lembaga	890.452.936	1.1.2.02.01.0002 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	72 lembaga	607.984.288	
1.1.2.02.01.0003 Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	346.657.034	1.1.2.02.01.0003 Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	280.997.466	
1.1.2.02.02 Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	73,84%	4.348.636.175	1.1.2.02.02 Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	73,84%	3.494.259.461	
	Persentase kelurahan ramah anak	84,42%			Persentase kelurahan ramah anak	84,42%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%		
1.1.2.02.02.0001 Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 orang	426.202.298	1.1.2.02.02.0001 Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 orang	354.646.600	
1.1.2.02.02.0002 Fasilitas Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 lembaga	1.039.113.254	1.1.2.02.02.0002 Fasilitas Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	279 lembaga	648.456.768	
1.1.2.02.02.0003 Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 kampung	694.388.412	1.1.2.02.02.0003 Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 kampung	361.197.400	
1.1.2.02.02.0004 Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200 kasus	818.531.268	1.1.2.02.02.0004 Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200 kasus	822.132.964	
1.1.2.02.02.0005 Penyelenggaraan Operasional Shelter	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	1.370.400.943	1.1.2.02.02.0005 Penyelenggaraan Operasional Shelter	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	1.307.825.729	
1.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			12.632.184.850	1.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			10.745.583.965	
1.1.2.07.01 Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,47%	8.493.807.577	1.1.2.07.01 Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,47%	7.945.990.400	
	Persentase peserta KB aktif	80,89%			Persentase peserta KB aktif	80,89%		
	Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2,99%			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2,99%		
	Persentase peserta KB baru	97,92%			Persentase peserta KB baru	53,25%		
1.1.2.07.01.0001 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	4.051.321.999	1.1.2.07.01.0001 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	3.961.731.999	DAK, APBD
1.1.2.07.01.0002 Fasilitas Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2028 orang	1.949.694.431	1.1.2.07.01.0002 Fasilitas Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	1566 orang	1.617.691.468	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.07.01.0003 Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	650 orang	1.405.444.149	1.1.2.07.01.0003 Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	290 orang	1.279.219.935	
1.1.2.07.01.0004 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	80 Paket	1.046.971.999	1.1.2.07.01.0004 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	62 Paket	1.046.971.999	DAK
1.1.2.07.01.0006 Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	4 unit	40.374.999	1.1.2.07.01.0006 Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	4 unit	40.374.999	DAK
1.1.2.07.02 Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100,00%	4.138.377.273	1.1.2.07.02 Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100,00%	2.799.593.565	
	Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	19,67%			Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	19,67%		
1.1.2.07.02.0001 Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	100 orang	1.083.639.906	1.1.2.07.02.0001 Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	22 orang	797.920.897	DID
1.1.2.07.02.0002 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	15 lembaga	977.460.424	1.1.2.07.02.0002 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	5 lembaga	436.686.301	DID
1.1.2.07.02.0003 Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	1240 orang	623.950.063	1.1.2.07.02.0003 Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	180 orang	437.853.191	
1.1.2.07.02.0004 Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	1350 orang	377.138.505	1.1.2.07.02.0004 Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	978 orang	277.028.100	
1.1.2.07.02.0005 Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1 bangunan	304.395.701	1.1.2.07.02.0005 Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1 bangunan	247.954.551	
1.1.2.07.02.0006 Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	771.792.674	1.1.2.07.02.0006 Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	602.150.525	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
4.844.121.513				4.956.640.508				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	3.951.125.919	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	4.171.665.651	
2.2.2.01.01.0030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.951.125.919	2.2.2.01.01.0030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4.171.665.651	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	892.995.594	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	784.974.857	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0030 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	892.995.594	2.2.2.01.02.0030 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	784.974.857	
Dinas Perdagangan				Dinas Perdagangan				
22.051.089.496				20.896.483.256				
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1.1.2.15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
9.288.729.170				9.863.990.135				
1.1.2.15.01 Program Pemasaran Produk Usaha Mikro	Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran produk	90,00%	9.288.729.170	1.1.2.15.01 Program Pemasaran Produk Usaha Mikro	Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran produk	90,00%	9.863.990.135	
1.1.2.15.01.0001 Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro	Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	330 Orang	3.989.371.608	1.1.2.15.01.0001 Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro	Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	330 Orang	4.974.423.531	DID
1.1.2.15.01.0003 Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro	Jumlah sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola	12 lokasi	4.990.320.562	1.1.2.15.01.0003 Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro	Jumlah sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola	12 lokasi	4.765.580.604	DID
1.1.2.15.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan	11 Jenis	309.037.000	1.1.2.15.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan	11 Jenis	123.986.000	DAK
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan				
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar				
1.2.2.3. Perdagangan				1.2.2.3. Perdagangan				
7.419.290.460				6.016.003.432				
1.2.2.03.01 Program Distribusi Perdagangan	Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan	17 kali	2.782.546.022	1.2.2.03.01 Program Distribusi Perdagangan	Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan	17 kali	2.196.718.045	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
			Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	31 kali/kejadian				Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	31 kali/kejadian		
			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	80,00%				Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	80,00%		
		1.2.2.03.01.0001 Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Jumlah gudang yang dimonitor	250 lokasi	477.508.602			1.2.2.03.01.0001 Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Jumlah gudang yang dimonitor	250 lokasi	435.192.765
		1.2.2.03.01.0002 Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina	31 Kelompok	797.862.016			1.2.2.03.01.0002 Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina	31 Kelompok	807.401.793
		1.2.2.03.01.0003 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	142 kali	1.507.175.404			1.2.2.03.01.0003 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	200 kali	954.123.487
		1.2.2.03.02 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan	78,00%	1.732.084.964			1.2.2.03.02 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan	78,00%	1.568.545.863
		1.2.2.03.02.0001 Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan	400 berkas	653.784.470			1.2.2.03.02.0001 Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan	350 berkas	535.402.375
		1.2.2.03.02.0002 Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya	1552 Lembaga	1.078.300.494			1.2.2.03.02.0002 Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya	1552 Lembaga	1.033.143.488
		1.2.2.03.03 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85,00%	2.904.659.474			1.2.2.03.03 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85,00%	2.250.739.524
		1.2.2.03.03.0001 Operasional UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan	16 Jenis	1.163.870.993			1.2.2.03.03.0001 Operasional UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan	16 Jenis	747.966.500
		1.2.2.03.03.0002 Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang dilayani	23855 unit	1.305.989.903			1.2.2.03.03.0002 Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang dilayani	20879 unit	1.066.585.767
		1.2.2.03.03.0003 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4500 unit	434.798.578			1.2.2.03.03.0003 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4500 unit	436.187.257
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan						
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen						
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar						
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					5.343.069.866	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					5.016.489.689

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	3.780.227.641	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	3.739.458.750	
2.2.2.01.01.0031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.780.227.641	2.2.2.01.01.0031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.739.458.750	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.562.842.225	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.277.030.939	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0031 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.562.842.225	2.2.2.01.02.0031 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.277.030.939	
Dinas Perhubungan			259.830.258.604	Dinas Perhubungan			200.146.963.214	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.8. Perhubungan			242.020.293.863	1.1.2.8. Perhubungan			183.184.474.004	
1.1.2.08.01 Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan	78,00%	6.234.527.477	1.1.2.08.01 Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan	78,00%	4.520.540.000	
1.1.2.08.01.0001 Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan	3 Jenis	6.234.527.477	1.1.2.08.01.0001 Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan	3 Jenis	4.520.540.000	
1.1.2.08.02 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik	100,00%	70.827.793.198	1.1.2.08.02 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik	100,00%	36.606.240.639	
1.1.2.08.02.0001 Pembangunan Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun	1 bangunan	30.027.463.407	1.1.2.08.02.0001 Pembangunan Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun	1 bangunan	332.558.133	
1.1.2.08.02.0002 Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara	36 lokasi	6.096.648.189	1.1.2.08.02.0002 Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara	30 lokasi	5.477.120.380	
1.1.2.08.02.0003 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	30.750.937.080	1.1.2.08.02.0003 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	28.397.254.933	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.08.02.0004 Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	8 Paket	3.952.744.522		1.1.2.08.02.0004 Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	2 Paket	2.399.307.193	
1.1.2.08.03 Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	93,00%	23.266.400.457		1.1.2.08.03 Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	93,00%	24.456.411.359	
1.1.2.08.03.0001 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR dilokasi pengujian kendaraan Bermotor	149069 unit	7.714.377.791		1.1.2.08.03.0001 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR dilokasi pengujian kendaraan Bermotor	147069 unit	8.215.708.755	
1.1.2.08.03.0002 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan	365 Kali	10.831.194.349		1.1.2.08.03.0002 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan	365 Kali	11.355.772.584	
1.1.2.08.03.0003 Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan	7 Jenis	3.586.361.205		1.1.2.08.03.0003 Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan	7 Jenis	3.892.161.374	
1.1.2.08.03.0004 Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan	48 kali	1.134.467.112		1.1.2.08.03.0004 Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan	48 kali	992.768.646	
1.1.2.08.04 Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan	Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus	100,00%	59.668.281.473		1.1.2.08.04 Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan	Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus	100,00%	53.651.525.608	
	Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	40,00%				Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	40,00%		
	Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	95,05 menit				Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	95,05 menit		
1.1.2.08.04.0001 Pengelolaan Transportasi Umum	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan	20 Unit	19.526.059.196		1.1.2.08.04.0001 Pengelolaan Transportasi Umum	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan	20 Unit	19.964.917.444	
1.1.2.08.04.0002 Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	5 Kali	6.750.517.728		1.1.2.08.04.0002 Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	2 Kali	4.830.670.294	
1.1.2.08.04.0003 Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang	2 kali	794.132.784		1.1.2.08.04.0003 Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang	2 kali	739.893.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.08.04.0004 Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan	8 unit	1.225.469.495		1.1.2.08.04.0004 Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan	8 unit	1.038.955.526	
1.1.2.08.04.0005 Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan	365 kali	28.781.140.592		1.1.2.08.04.0005 Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan	365 kali	25.028.528.223	
1.1.2.08.04.0006 Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan	10 Dokumen	2.590.961.678		1.1.2.08.04.0006 Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan	7 Dokumen	2.048.561.121	
1.1.2.08.05 Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	39,00 km/jam	82.023.291.258		1.1.2.08.05 Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	39,00 km/jam	63.949.756.398	
	Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2,00%				Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2,00%		
1.1.2.08.05.0001 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5 Jenis	31.944.564.527		1.1.2.08.05.0001 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5 Jenis	27.925.764.510	
1.1.2.08.05.0002 Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dladakan	1200 unit	20.300.796.817		1.1.2.08.05.0002 Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dladakan	1037 unit	11.886.826.728	
1.1.2.08.05.0003 Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tersusun	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	13 dokumen	3.569.981.591		1.1.2.08.05.0003 Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tersusun	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	5 dokumen	2.462.071.491	
1.1.2.08.05.0004 Penyelenggaraan Perparkiran	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan	1821 Lokasi	25.694.473.323		1.1.2.08.05.0004 Penyelenggaraan Perparkiran	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan	1821 Lokasi	21.675.093.669	
1.1.2.08.05.0005 Pemasangan Alat Keselamatan Jalan (DAK)	Jenis alat keselamatan jalan yang diadakan dalam satu tahun	1 jenis	513.475.000		1.1.2.08.05.0005 Pemasangan Alat Keselamatan Jalan (DAK)	Jenis alat keselamatan jalan yang diadakan dalam satu tahun	0 jenis	0	
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			17.809.964.741		2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			16.962.489.210	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	13.069.609.696		2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	12.619.572.674	
2.2.2.01.01.0032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	13.069.609.696		2.2.2.01.01.0032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	12.619.572.674	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	4.740.355.045	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	4.342.916.536	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	4.740.355.045	2.2.2.01.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	4.342.916.536	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			34.919.113.843	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			36.570.499.727	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.13. Perpustakaan			27.506.992.002	1.1.2.13. Perpustakaan			29.920.810.217	
1.1.2.13.01 Program Pembinaan Layanan Baca	Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	46,60%	841.610.197	1.1.2.13.01 Program Pembinaan Layanan Baca	Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	46,60%	756.116.634	
1.1.2.13.01.0001 Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan	500 lembaga	841.610.197	1.1.2.13.01.0001 Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan	500 lembaga	756.116.634	
1.1.2.13.02 Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	8,00%	24.033.382.971	1.1.2.13.02 Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	8,00%	28.505.469.529	
	Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10,00%			Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10,00%		
1.1.2.13.02.0001 Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola	1494 lokasi	23.445.836.619	1.1.2.13.02.0001 Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola	1494 lokasi	28.197.754.829	
1.1.2.13.02.0002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	239 kali	587.546.352	1.1.2.13.02.0002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	17 kali	307.714.700	
1.1.2.13.03 Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat	Persentase penambahan koleksi buku	94,41%	2.631.998.834	1.1.2.13.03 Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat	Persentase penambahan koleksi buku	90,41%	659.224.054	
1.1.2.13.03.0001 Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat	8084 Buku	2.631.998.834	1.1.2.13.03.0001 Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat	1581 Buku	659.224.054	
1.1.2.14. Kearsipan			4.009.626.382	1.1.2.14. Kearsipan			3.403.729.133	
1.1.2.14.01 Program Pembinaan Penataan Kearsipan	Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	79,90%	475.117.827	1.1.2.14.01 Program Pembinaan Penataan Kearsipan	Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	79,90%	425.746.009	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.14.01.0001 Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan	130 lembaga	475.117.827	1.1.2.14.01.0001 Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan	130 lembaga	425.746.009	
1.1.2.14.02 Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	81,00	330.890.476	1.1.2.14.02 Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	81,00	238.049.662	
1.1.2.14.02.0001 Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40 kali	330.890.476	1.1.2.14.02.0001 Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40 kali	238.049.662	
1.1.2.14.03 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi	85,19%	3.203.618.079	1.1.2.14.03 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi	85,19%	2.739.933.462	
	Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	80,00%			Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	80,00%		
1.1.2.14.03.0001 Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	52 kali	2.127.184.817	1.1.2.14.03.0001 Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	52 kali	2.069.431.122	
1.1.2.14.03.0002 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	15 item	1.076.433.262	1.1.2.14.03.0002 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	13 item	670.502.340	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			3.402.495.459	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			3.245.960.377	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.612.189.298	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.744.529.977	
2.2.2.01.01.0033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.612.189.298	2.2.2.01.01.0033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.744.529.977	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	790.306.161	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	501.430.400	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0033 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	790.306.161	2.2.2.01.02.0033 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	501.430.400	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata			912.937.210.809	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata			751.651.533.464	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.1. Pendidikan			129.781.832.826	1.1.1.1. Pendidikan			122.043.487.837	
1.1.1.01.04 Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan	Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik	88,94%	129.781.832.826	1.1.1.01.04 Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan	Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik	88,94%	122.043.487.837	
1.1.1.01.04.0001 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi	29 bangunan	87.821.203.635	1.1.1.01.04.0001 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi	80 bangunan	78.965.105.945	DBH
1.1.1.01.04.0002 Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara	160 bangunan	40.245.994.471	1.1.1.01.04.0002 Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara	160 bangunan	41.403.507.905	DID
1.1.1.01.04.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun	27 dokumen	1.714.634.720	1.1.1.01.04.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun	27 dokumen	1.674.873.987	
1.1.1.2. Kesehatan			299.438.932.537	1.1.1.2. Kesehatan			184.139.263.970	
1.1.1.02.10 Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan	Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik	88,17%	299.438.932.537	1.1.1.02.10 Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan	Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik	88,17%	184.139.263.970	
1.1.1.02.10.0001 Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi	10 bangunan	128.608.082.622	1.1.1.02.10.0001 Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi	7 bangunan	21.741.846.471	
1.1.1.02.10.0002 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah bangunan gedung RSUD berserta peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun Jamak / Multiyears)	1 bangunan	170.125.115.195	1.1.1.02.10.0002 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah bangunan gedung RSUD berserta peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun Jamak / Multiyears)	1 bangunan	161.720.148.510	
1.1.1.02.10.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	12 Dokumen	705.734.720	1.1.1.02.10.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	12 Dokumen	677.268.989	
1.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			19.777.045.637	1.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			19.568.991.325	
1.1.1.03.02 Program Penataan Ruang	Indeks Pelayanan Tata Ruang	94,00%	16.106.963.047	1.1.1.03.02 Program Penataan Ruang	Indeks Pelayanan Tata Ruang	94,00%	15.882.224.471	
1.1.1.03.02.0001 Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota	2 dokumen	2.315.564.346	1.1.1.03.02.0001 Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota	2 dokumen	2.645.815.514	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.03.02.0002 Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan	12250 Persil	10.015.790.374	1.1.1.03.02.0002 Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan	12250 Persil	9.419.996.522	
1.1.1.03.02.0003 Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat	2 dokumen	2.781.480.760	1.1.1.03.02.0003 Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat	2 dokumen	2.816.619.576	
1.1.1.03.02.0004 Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun	9 Dokumen	994.127.567	1.1.1.03.02.0004 Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun	9 Dokumen	999.792.859	
1.1.1.03.06 Program Pengendalian Bidang Bangunan	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	58,81%	3.670.082.590	1.1.1.03.06 Program Pengendalian Bidang Bangunan	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	58,81%	3.686.766.854	
	Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100,00%			Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100,00%		
1.1.1.03.06.0001 Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	6517 data	1.258.954.579	1.1.1.03.06.0001 Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	6517 data	1.308.200.933	
1.1.1.03.06.0002 Pengawasan Bangunan	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	240 lokasi	1.945.677.534	1.1.1.03.06.0002 Pengawasan Bangunan	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	240 lokasi	1.969.785.921	
1.1.1.03.06.0003 Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	4 dokumen	465.450.477	1.1.1.03.06.0003 Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	4 dokumen	408.780.000	
1.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman			450.853.471.101	1.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman			413.351.077.304	
1.1.1.04.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan	70,00%	4.249.487.209	1.1.1.04.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan	70,00%	4.555.874.085	
1.1.1.04.01.0001 Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	6517 berkas	4.054.806.732	1.1.1.04.01.0001 Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	6517 berkas	4.409.414.965	DID
1.1.1.04.01.0002 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	50 berkas	194.680.477	1.1.1.04.01.0002 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	50 berkas	146.459.120	
1.1.1.04.02 Program Pelayanan Perizinan Konstruksi	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi	90,00%	340.015.616	1.1.1.04.02 Program Pelayanan Perizinan Konstruksi	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi	90,00%	345.533.295	
1.1.1.04.02.0001 Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	700 berkas	340.015.616	1.1.1.04.02.0001 Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	700 berkas	345.533.295	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.04.03 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	90,59%	262.958.522.102	1.1.1.04.03 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	90,59%	258.493.834.948	
1.1.1.04.03.0001 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab	1 bangunan	63.168.459.534	1.1.1.04.03.0001 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab	1 bangunan	53.999.310.094	
1.1.1.04.03.0002 Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang prasarananya dibangun/direhabilitasi	45 Bangunan	167.942.360.637	1.1.1.04.03.0002 Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang prasarananya dibangun/direhabilitasi	75 Bangunan	162.788.063.720	DID
1.1.1.04.03.0003 Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara	300 bangunan	29.339.117.211	1.1.1.04.03.0003 Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara	300 bangunan	39.274.966.145	
1.1.1.04.03.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah	39 Dokumen	2.508.584.720	1.1.1.04.03.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah	38 Dokumen	2.431.494.989	
1.1.1.04.05 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya	67,65%	183.305.446.174	1.1.1.04.05 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya	67,65%	149.955.834.976	
	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	47,00%			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	47,00%		
1.1.1.04.05.0001 Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	39 lokasi	59.900.107.809	1.1.1.04.05.0001 Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	39 lokasi	49.642.994.208	DID
1.1.1.04.05.0002 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	2 Lokasi	683.462.967	1.1.1.04.05.0002 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	2 Lokasi	599.819.896	DAK, APBD
1.1.1.04.05.0003 Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah yang dibangun	7 bangunan	92.140.598.078	1.1.1.04.05.0003 Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah yang dibangun	5 bangunan	71.104.492.428	DBH
1.1.1.04.05.0004 Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi	200 Lokasi	21.392.832.758	1.1.1.04.05.0004 Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi	200 Lokasi	22.139.798.938	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
			1.1.1.04.05.0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	99 dokumen	6.989.106.674				1.1.1.04.05.0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	83 dokumen	5.559.422.011	
			1.1.1.04.05.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun	15 dokumen	2.199.337.888				1.1.1.04.05.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun	5 dokumen	909.307.495	
1.2. Urusan Pilihan							1.2. Urusan Pilihan							
1.2.2. Non Pelayanan Dasar							1.2.2. Non Pelayanan Dasar							
1.2.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral						2.429.532.939	1.2.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral						2.371.000.510	
			1.2.2.02.02 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbaru di gedung milik pemerintah kota	45 Unit	2.429.532.939				1.2.2.02.02 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbaru di gedung milik pemerintah kota	45 Unit	2.371.000.510	
			1.2.2.02.02.0001 Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan	7 unit	2.125.023.219				1.2.2.02.02.0001 Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan	6 unit	2.097.020.510	
			1.2.2.02.02.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	4 dokumen	304.509.720				1.2.2.02.02.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	4 dokumen	273.980.000	
2. Fungsi Penunjang Urusan							2. Fungsi Penunjang Urusan							
2.1. Fungsi Manajemen							2.1. Fungsi Manajemen							
2.1.2. Non Pelayanan Dasar							2.1.2. Non Pelayanan Dasar							
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan						275.158.813	2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan						223.745.750	
			2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	275.158.813				2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	223.745.750	
			2.1.2.04.03.0009 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	275.158.813				2.1.2.04.03.0009 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	223.745.750	
2.2. Unsur Manajemen							2.2. Unsur Manajemen							
2.2.2. Non Pelayanan Dasar							2.2.2. Non Pelayanan Dasar							
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran						10.381.236.956	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran						9.953.966.768	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	8.574.027.181	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	8.300.761.853	
2.2.2.01.01.0034 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	8.574.027.181	2.2.2.01.01.0034 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	8.300.761.853	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.807.209.775	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	1.653.204.915	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0034 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.807.209.775	2.2.2.01.02.0034 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.653.204.915	
Dinas Sosial			108.615.798.896	Dinas Sosial			80.618.466.579	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.6. Sosial			103.095.820.394	1.1.1.6. Sosial			74.843.999.766	
1.1.1.06.01 Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan	100,00%	4.838.315.513	1.1.1.06.01 Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan	100,00%	4.903.655.359	
	Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	50,00%			Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	32%		
1.1.1.06.01.0001 Fasilitas Pemakaman	Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitas Pemakaman	960 Orang	932.428.991	1.1.1.06.01.0001 Fasilitas Pemakaman	Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitas Pemakaman	300 Orang	338.228.687	
1.1.1.06.01.0002 Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan	24 Kali	1.245.855.351	1.1.1.06.01.0002 Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan	22 Kali	1.636.922.697	
1.1.1.06.01.0003 Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis	Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan	4416 Kali	2.660.031.171	1.1.1.06.01.0003 Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis	Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan	4416 Kali	2.928.503.975	
1.1.1.06.02 Program Partisipasi Keagamaan	Persentase lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	100,00%	15.479.709.780	1.1.1.06.02 Program Partisipasi Keagamaan	Persentase lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	100,00%	13.510.136.668	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.06.02.0001 Fasilitas Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan	102 kali	15.479.709.780	1.1.1.06.02.0001 Fasilitas Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan	83 kali	13.510.136.668	
1.1.1.06.03 Program Partisipasi Kepahlawanan	Persentase lembaga/organisasi/kelompok keahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan keahlawanan	100,00%	7.888.824.561	1.1.1.06.03 Program Partisipasi Kepahlawanan	Persentase lembaga/organisasi/kelompok keahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan keahlawanan	100,00%	5.301.019.616	
1.1.1.06.03.0001 Fasilitas kegiatan organisasi sosial keahlawanan	Jumlah fasilitas kegiatan organisasi sosial keahlawanan	62 kali	6.315.368.716	1.1.1.06.03.0001 Fasilitas kegiatan organisasi sosial keahlawanan	Jumlah fasilitas kegiatan organisasi sosial keahlawanan	40 kali	3.797.187.455	
1.1.1.06.03.0002 Pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	7 lokasi	1.573.455.845	1.1.1.06.03.0002 Pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	7 lokasi	1.503.832.161	
1.1.1.06.04 Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial	Persentase pemulangan PMKS	30,00%	34.995.437.039	1.1.1.06.04 Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial	Persentase pemulangan PMKS	20%	32.453.577.259	
	Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100,00%			Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	66,50%		
1.1.1.06.04.0001 Pembinaan dan Pemulangan PMKS	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan	1420 orang	2.525.743.312	1.1.1.06.04.0001 Pembinaan dan Pemulangan PMKS	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan	1025 orang	1.449.902.061	
1.1.1.06.04.0002 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 Kali	988.989.177	1.1.1.06.04.0002 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 Kali	918.513.680	
1.1.1.06.04.0003 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 Kali	1.100.276.050	1.1.1.06.04.0003 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 Kali	888.006.737	
1.1.1.06.04.0004 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 Kali	1.127.245.816	1.1.1.06.04.0004 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 Kali	821.348.366	
1.1.1.06.04.0005 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	93 orang	1.403.313.686	1.1.1.06.04.0005 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	93 orang	1.423.026.637	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.06.04.0006 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	5.204.923.675	1.1.1.06.04.0006 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	5.152.627.483	
1.1.1.06.04.0007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	45 orang	2.342.285.880	1.1.1.06.04.0007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	45 orang	2.391.135.266	
1.1.1.06.04.0008 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1100 orang	17.299.544.059	1.1.1.06.04.0008 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1100 orang	16.943.174.391	
1.1.1.06.04.0009 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	65 orang	2.332.116.255	1.1.1.06.04.0009 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	65 orang	2.305.655.288	
1.1.1.06.04.0010 Peningkatan peran serta lanjut usia	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia	34 kali	670.999.129	1.1.1.06.04.0010 Peningkatan peran serta lanjut usia	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia	10 kali	160.187.350	
1.1.1.06.05 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	60,00%	875.850.604	1.1.1.06.05 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	51%	645.802.152	
1.1.1.06.05.0001 Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan	17 lembaga	189.329.391	1.1.1.06.05.0001 Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan	17 lembaga	159.980.000	
1.1.1.06.05.0002 Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah kegiatan PSKS yang dibina	45 kali	686.521.213	1.1.1.06.05.0002 Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah kegiatan PSKS yang dibina	31 kali	485.822.152	
1.1.1.06.06 Program Pengendalian Layanan	Persentase data kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan	100,00%	2.266.491.991	1.1.1.06.06 Program Pengendalian Layanan	Persentase data kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan	100,00%	2.821.969.465	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.06.06.0001 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4 kali	750.786.921	1.1.1.06.06.0001 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4 kali	875.497.812	
1.1.1.06.06.0002 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS	154 Kelurahan	1.515.705.070	1.1.1.06.06.0002 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS	154 Kelurahan	1.946.471.653	
1.1.1.06.07 Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni	Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	85,00%	36.751.190.906	1.1.1.06.07 Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni	Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	46%	15.207.839.247	
1.1.1.06.07.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1000 Unit	36.751.190.906	1.1.1.06.07.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	684 Unit	15.207.839.247	DID
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0035 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.01.01.0035 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				
2.2.2.01.02.0035 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				2.2.2.01.02.0035 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				
Dinas Tenaga Kerja				Dinas Tenaga Kerja				
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.1. Tenaga Kerja				1.1.2.1. Tenaga Kerja				
1.1.2.01.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan				1.1.2.01.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan				

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.01.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses	1000 berkas	204.582.329		1.1.2.01.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses	1000 berkas	159.161.310	
1.1.2.01.02 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,77%	2.739.023.529		1.1.2.01.02 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,77%	2.474.580.201	
1.1.2.01.02.0001 Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial	300 orang	742.474.263		1.1.2.01.02.0001 Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial	160 orang	692.748.282	
1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus	395.526.396		1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus	285.235.106	
1.1.2.01.02.0003 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	300 lembaga	448.242.978		1.1.2.01.02.0003 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	200 lembaga	408.850.863	
1.1.2.01.02.0004 Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	1.152.779.892		1.1.2.01.02.0004 Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	1.087.745.950	
1.1.2.01.03 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5,10%	3.051.939.017		1.1.2.01.03 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	0,50%	2.743.793.217	
1.1.2.01.03.0001 Bimtek bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek	60 lembaga	141.067.305		1.1.2.01.03.0001 Bimtek bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek	60 lembaga	99.456.793	
1.1.2.01.03.0003 Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja	1050 orang	282.702.505		1.1.2.01.03.0003 Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja	735 orang	205.871.743	DID
1.1.2.01.03.0004 Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha	50 orang	143.701.675		1.1.2.01.03.0004 Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha	25 orang	113.150.199	
1.1.2.01.03.0005 Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja	500 orang	108.611.005		1.1.2.01.03.0005 Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja	200 orang	76.732.120	
1.1.2.01.03.0006 Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja bagi Wirausaha Baru	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja	150 orang	879.220.253		1.1.2.01.03.0006 Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja bagi Wirausaha Baru	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja	150 orang	883.281.412	DID
1.1.2.01.03.0007 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Jumlah even job fair yang diselenggarakan	7 kali	1.346.799.099		1.1.2.01.03.0007 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Jumlah even job fair yang diselenggarakan	4 kali	1.247.934.001	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.2.01.03.0008 Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri	150 orang	149.837.175	1.1.2.01.03.0008 Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri	75 orang	117.366.949	
1.1.2.01.04 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	75,00%	11.533.473.196	1.1.2.01.04 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	75,00%	7.959.737.045	
	Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	85,00%			Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	85,00%		
1.1.2.01.04.0002 Fasilitas Magang bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang	120 orang	558.256.007	1.1.2.01.04.0002 Fasilitas Magang bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang	120 orang	471.991.187	DID
1.1.2.01.04.0003 Fasilitas Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi	604 orang	2.932.942.720	1.1.2.01.04.0003 Fasilitas Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi	604 orang	3.254.721.452	DID
1.1.2.01.04.0004 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja	976 orang	7.810.140.770	1.1.2.01.04.0004 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja	704 orang	4.012.778.306	DBHCHT
1.1.2.01.04.0005 Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun	1 dokumen	232.133.699	1.1.2.01.04.0005 Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun	1 dokumen	220.246.100	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.082.784.307	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.296.706.710	
2.2.2.01.01.0036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.082.784.307	2.2.2.01.01.0036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.296.706.710	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	497.736.939	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	354.864.131	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0036 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	497.736.939	2.2.2.01.02.0036 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	354.864.131	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
Inspektorat			6.489.852.745	Inspektorat			5.147.090.567	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.3. Pengawasan			3.954.181.290	2.1.2.3. Pengawasan			3.021.491.590	
2.1.2.03.01 Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	100,00%	1.033.999.333	2.1.2.03.01 Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	100,00%	710.152.190	
2.1.2.03.01.0001 Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	12 dokumen	257.606.286	2.1.2.03.01.0001 Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	12 dokumen	224.870.280	
2.1.2.03.01.0002 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	50 kali	555.637.561	2.1.2.03.01.0002 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	50 kali	377.278.100	
2.1.2.03.01.0003 Survey Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Laporan	220.755.486	2.1.2.03.01.0003 Survey Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Laporan	108.003.810	
2.1.2.03.02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100,00%	852.388.582	2.1.2.03.02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100,00%	666.406.700	
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100,00%			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100,00%		
2.1.2.03.02.0001 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	427.194.506	2.1.2.03.02.0001 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	325.482.500	
2.1.2.03.02.0002 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	425.194.076	2.1.2.03.02.0002 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	340.924.200	
2.1.2.03.03 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100,00%	683.004.898	2.1.2.03.03 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100,00%	560.344.500	
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100,00%			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100,00%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.03.03.0001 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	343.718.714		2.1.2.03.03.0001 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	275.160.000	
2.1.2.03.03.0002 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	339.286.184		2.1.2.03.03.0002 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	285.184.500	
2.1.2.03.04 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100,00%	768.095.906		2.1.2.03.04 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100,00%	619.474.500	
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100,00%				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100,00%		
2.1.2.03.04.0001 Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	394.789.218		2.1.2.03.04.0001 Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	305.354.500	
2.1.2.03.04.0002 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	373.306.688		2.1.2.03.04.0002 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	314.120.000	
2.1.2.03.05 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah IV	100,00%	616.692.571		2.1.2.03.05 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah IV	100,00%	465.113.700	
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	100,00%				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	100,00%		
2.1.2.03.05.0001 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	309.346.501		2.1.2.03.05.0001 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	210.532.100	
2.1.2.03.05.0002 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	307.346.070		2.1.2.03.05.0002 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	254.581.600	
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			694.324.682		2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			340.540.300	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	694.324.682	2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	340.540.300	
2.1.2.04.03.0010 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	306.312.396	2.1.2.04.03.0010 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	254.139.400	
2.1.2.04.03.0011 Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu	2 dokumen	388.012.286	2.1.2.04.03.0011 Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu	2 dokumen	86.400.900	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.342.524.436	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.401.955.716	
2.2.2.01.01.0037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.342.524.436	2.2.2.01.01.0037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.401.955.716	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	498.822.337	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	383.102.961	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0037 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	498.822.337	2.2.2.01.02.0037 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	383.102.961	
Kec. Asemrowo				Kec. Asemrowo				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	9.428.441.912	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	4.655.578.167	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0001 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Asem Rowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.842.425.710	2.1.2.01.02.0001 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Asem Rowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.157.921.963	
2.1.2.01.02.0002 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.655.132.838	2.1.2.01.02.0002 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.310.097.669	
2.1.2.01.02.0003 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.930.883.364	2.1.2.01.02.0003 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.187.558.535	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.322.028.670	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.269.565.500	
2.1.2.01.03.0001 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	139 Lembaga	1.195.871.317	2.1.2.01.03.0001 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	139 Lembaga	1.165.285.500	
2.1.2.01.03.0002 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	126.157.353	2.1.2.01.03.0002 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	40 Kali	104.280.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	217.831.473	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	167.840.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0001 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	217.831.473	2.1.2.01.05.0001 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	70 Kali	167.840.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	521.833.225	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	459.089.200	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06.0001 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	375.642.213	2.1.2.01.06.0001 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	332.279.200	
2.1.2.01.06.0002 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	76.770.506	2.1.2.01.06.0002 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	50 Kali	67.080.000	
2.1.2.01.06.0004 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	69.420.506	2.1.2.01.06.0004 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	59.730.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.499.033.013	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.251.219.200	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.184.299.668	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	959.395.600	
2.2.2.01.01.0038 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.184.299.668	2.2.2.01.01.0038 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	959.395.600	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	314.733.345	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	291.823.600	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0038 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	314.733.345	2.2.2.01.02.0038 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	291.823.600	
Kec. Benowo			14.898.339.946	Kec. Benowo			10.047.628.043	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			13.090.651.573	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			8.501.150.348	
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	10.674.870.903	2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	6.324.173.648	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0004 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.173.887.427	2.1.2.01.02.0004 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.783.282.387	
2.1.2.01.02.0005 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Romokalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.603.503.576	2.1.2.01.02.0005 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Romokalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	998.819.606	
2.1.2.01.02.0006 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sememi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.040.791.197	2.1.2.01.02.0006 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sememi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.466.869.671	
2.1.2.01.02.0007 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.856.688.703	2.1.2.01.02.0007 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.075.201.984	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.660.122.858	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.533.897.500	
2.1.2.01.03.0003 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	183 Lembaga	1.412.548.993	2.1.2.01.03.0003 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	188 Lembaga	1.406.057.500	
2.1.2.01.03.0004 Pengembangan Kampung Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)	Pengembangan Kampung Edukasi	3 kali	75.037.319	2.1.2.01.03.0004 Pengembangan Kampung Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)	Pengembangan Kampung Edukasi	3 kali	62.960.000	
2.1.2.01.03.0005 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	172.536.546	2.1.2.01.03.0005 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	64.880.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	241.104.873	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	187.300.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.05.0004 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	241.104.873	2.1.2.01.05.0004 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	28 Kali	187.300.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	514.552.939	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	455.779.200	
2.1.2.01.06.0005 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	360.426.891	2.1.2.01.06.0005 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	323.159.200	
2.1.2.01.06.0006 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	83.828.729	2.1.2.01.06.0006 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	67.560.000	
2.1.2.01.06.0008 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	70.297.319	2.1.2.01.06.0008 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	65.060.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0039 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.522.970.951	2.2.2.01.01.0039 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.268.191.265	
2.2.2.01.01.0039 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.522.970.951	2.2.2.01.01.0039 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.268.191.265	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	284.717.422	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	278.286.430	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0039 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	284.717.422	2.2.2.01.02.0039 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	278.286.430	
Kec. Bubutan				Kec. Bubutan				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
23.872.884.730				15.593.315.482				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	19.936.775.985	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	11.799.665.282	
2.1.2.01.02.0008 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.781.575.882	2.1.2.01.02.0008 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.116.650.656	
2.1.2.01.02.0009 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bubutan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.049.576.260	2.1.2.01.02.0009 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bubutan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.989.946.536	
2.1.2.01.02.0010 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.441.517.363	2.1.2.01.02.0010 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.283.890.378	
2.1.2.01.02.0011 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jepara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.574.121.567	2.1.2.01.02.0011 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jepara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.454.840.584	
2.1.2.01.02.0012 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembok Duku	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	5.089.984.913	2.1.2.01.02.0012 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembok Duku	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.954.337.128	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.140.203.166	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.105.241.000	
2.1.2.01.03.0006 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	414 Lembaga	3.079.343.602	2.1.2.01.03.0006 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	414 Lembaga	3.051.481.000	
2.1.2.01.03.0007 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	60.859.564	2.1.2.01.03.0007 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	36 Kali	53.760.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	240.898.088	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	193.980.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0007 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	240.898.088	2.1.2.01.05.0007 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	90 Kali	193.980.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	555.007.491	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	494.429.200	
2.1.2.01.06.0009 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	436.108.363	2.1.2.01.06.0009 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	389.729.200	
2.1.2.01.06.0010 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	64.459.564	2.1.2.01.06.0010 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	45 Kali	57.360.000	
2.1.2.01.06.0012 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	54.439.564	2.1.2.01.06.0012 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	47.340.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.047.741.302	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.724.901.646	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.760.289.129	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.462.145.006	
2.2.2.01.01.0040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.760.289.129	2.2.2.01.01.0040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.462.145.006	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	287.452.173	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	262.756.640	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.02.0040 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	287.452.173	2.2.2.01.02.0040 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	262.756.640	
Kec. Bulak			24.776.621.074	Kec. Bulak			11.094.191.532	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			22.739.275.310	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			9.387.820.291	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	20.211.854.610	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	7.092.439.591	
2.1.2.01.02.0013 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	4.818.170.820	2.1.2.01.02.0013 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	1.832.660.373	
2.1.2.01.02.0014 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	4.562.785.026	2.1.2.01.02.0014 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.473.991.494	
2.1.2.01.02.0015 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	5.221.926.326	2.1.2.01.02.0015 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.760.430.947	
2.1.2.01.02.0016 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	5.608.972.438	2.1.2.01.02.0016 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.025.356.777	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.477.831.500	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.420.031.500	
2.1.2.01.03.0008 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	157 Lembaga	1.355.691.500	2.1.2.01.03.0008 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	158 Lembaga	1.315.311.500	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.03.0009 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	122.140.000	2.1.2.01.03.0009 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	104.720.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	228.500.000	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	204.880.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0010 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	228.500.000	2.1.2.01.05.0010 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	75 Kali	204.880.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	821.089.200	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	670.469.200	
2.1.2.01.06.0013 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	645.509.200	2.1.2.01.06.0013 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	535.169.200	
2.1.2.01.06.0014 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	92.860.000	2.1.2.01.06.0014 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	72.720.000	
2.1.2.01.06.0016 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan .	4 Lembaga	82.720.000	2.1.2.01.06.0016 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan .	4 Lembaga	62.580.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.037.345.764	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.706.371.241	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.663.682.964	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.400.368.441	
2.2.2.01.01.0041 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.663.682.964	2.2.2.01.01.0041 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.400.368.441	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	373.662.800	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	306.002.800	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0041 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	373.662.800	2.2.2.01.02.0041 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	306.002.800	
Kec. Dukuh Pakis			16.354.268.354	Kec. Dukuh Pakis			9.241.088.071	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			14.666.617.638	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			7.781.393.911	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	12.157.595.486	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	5.433.698.211	
2.1.2.01.02.0017 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	3.220.069.389	2.1.2.01.02.0017 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	954.792.936	
2.1.2.01.02.0018 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.960.376.899	2.1.2.01.02.0018 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.802.969.166	
2.1.2.01.02.0019 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.554.293.401	2.1.2.01.02.0019 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.540.745.019	
2.1.2.01.02.0020 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.422.855.797	2.1.2.01.02.0020 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	1.135.191.090	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.756.839.271	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.699.576.500	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.03.0010 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	195 Lembaga	1.625.600.742	2.1.2.01.03.0010 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	195 Lembaga	1.588.576.500	
2.1.2.01.03.0011 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	131.238.529	2.1.2.01.03.0011 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	40 Kali	111.000.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	236.740.433	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	195.200.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0013 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	236.740.433	2.1.2.01.05.0013 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	80 Kali	195.200.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	515.442.448	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	452.919.200	
2.1.2.01.06.0017 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	361.925.392	2.1.2.01.06.0017 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	322.089.200	
2.1.2.01.06.0018 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	81.063.528	2.1.2.01.06.0018 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	54 Kali	69.720.000	
2.1.2.01.06.0020 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	72.453.528	2.1.2.01.06.0020 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	61.110.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0042 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.01.01.0042 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				
	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.384.668.936		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.173.686.220	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	302.981.780	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	286.007.940	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0042 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	302.981.780	2.2.2.01.02.0042 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	286.007.940	
Kec. Gayungan			18.319.760.788	Kec. Gayungan			9.290.845.909	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			16.287.796.770	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			7.462.570.417	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	13.669.897.570	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	4.967.831.217	
2.1.2.01.02.0021 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.290.383.689	2.1.2.01.02.0021 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.604.644.265	
2.1.2.01.02.0022 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	3.640.096.743	2.1.2.01.02.0022 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.348.963.705	
2.1.2.01.02.0023 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketintang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.652.368.497	2.1.2.01.02.0023 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketintang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.006.992.387	
2.1.2.01.02.0024 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.087.048.641	2.1.2.01.02.0024 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.007.230.860	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.728.870.000	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.650.470.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
		2.1.2.01.03.0012 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	197 Lembaga	1.599.290.000			2.1.2.01.03.0012 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	197 Lembaga	1.539.390.000	
		2.1.2.01.03.0013 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	129.580.000			2.1.2.01.03.0013 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	111.080.000	
		2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	284.960.000			2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	279.860.000	
			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%					Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
		2.1.2.01.05.0016 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	284.960.000			2.1.2.01.05.0016 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	76 Kali	279.860.000	
		2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	604.069.200			2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	564.409.200	
		2.1.2.01.06.0021 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	464.789.200			2.1.2.01.06.0021 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	433.729.200	
		2.1.2.01.06.0022 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 kali	74.020.000			2.1.2.01.06.0022 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	50 kali	69.720.000	
		2.1.2.01.06.0024 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	65.260.000			2.1.2.01.06.0024 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	60.960.000	
2.2. Unsur Manajemen						2.2. Unsur Manajemen						
2.2.2. Non Pelayanan Dasar						2.2.2. Non Pelayanan Dasar						
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.031.964.018	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					1.828.275.492	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.718.401.018	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.541.092.492	
2.2.2.01.01.0043 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.718.401.018	2.2.2.01.01.0043 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.541.092.492	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	313.563.000	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	287.183.000	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0043 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	313.563.000	2.2.2.01.02.0043 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	287.183.000	
Kec. Genteng			27.304.152.752	Kec. Genteng			13.079.346.427	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			25.329.558.479	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			11.377.048.872	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	21.620.254.587	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	7.814.968.172	
2.1.2.01.02.0025 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.102.929.794	2.1.2.01.02.0025 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.824.369.041	
2.1.2.01.02.0026 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.214.817.555	2.1.2.01.02.0026 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	914.195.691	
2.1.2.01.02.0027 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	5.470.367.962	2.1.2.01.02.0027 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	1.979.199.243	
2.1.2.01.02.0028 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketabang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	5.104.789.218	2.1.2.01.02.0028 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketabang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.191.377.734	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0029 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peneleh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	4.727.350.058	2.1.2.01.02.0029 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peneleh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	1.905.826.463	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.823.348.808	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.789.051.500	
2.1.2.01.03.0014 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	364 Lembaga	2.749.169.446	2.1.2.01.03.0014 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	364 Lembaga	2.725.891.500	
2.1.2.01.03.0015 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	74.179.362	2.1.2.01.03.0015 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	33 Kali	63.160.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	224.557.946	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	200.440.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0019 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	224.557.946	2.1.2.01.05.0019 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	69 Kali	200.440.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	661.397.138	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	572.589.200	
2.1.2.01.06.0025 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	513.218.414	2.1.2.01.06.0025 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	446.449.200	
2.1.2.01.06.0026 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	77.779.362	2.1.2.01.06.0026 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	38 Kali	66.760.000	
2.1.2.01.06.0028 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	70.399.362	2.1.2.01.06.0028 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	59.380.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.974.594.273	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.702.297.555	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.652.027.663	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.414.067.955	
2.2.2.01.01.0044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.652.027.663	2.2.2.01.01.0044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.414.067.955	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	322.566.610	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	288.229.600	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0044 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	322.566.610	2.2.2.01.02.0044 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	288.229.600	
Kec. Gubeng			33.187.547.425	Kec. Gubeng			15.835.217.303	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			30.406.276.871	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			13.408.276.495	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	25.876.541.035	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	9.027.277.795	
2.1.2.01.02.0030 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airlangga	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	5.883.472.882	2.1.2.01.02.0030 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airlangga	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.312.047.398	
2.1.2.01.02.0031 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baratajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.380.774.625	2.1.2.01.02.0031 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baratajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.682.971.067	
2.1.2.01.02.0032 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gubeng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	2.435.027.089	2.1.2.01.02.0032 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gubeng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.397.290.380	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0033 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.877.054.673	2.1.2.01.02.0033 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	1.334.789.925	
2.1.2.01.02.0034 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	4.693.375.540	2.1.2.01.02.0034 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	1.625.661.876	
2.1.2.01.02.0035 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.606.836.226	2.1.2.01.02.0035 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.674.517.149	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.689.522.731	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.611.839.500	
2.1.2.01.03.0016 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	488 Lembaga	3.554.076.128	2.1.2.01.03.0016 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	480 Lembaga	3.496.719.500	
2.1.2.01.03.0017 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	135.446.603	2.1.2.01.03.0017 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	115.120.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	218.066.603	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	197.940.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0022 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	218.066.603	2.1.2.01.05.0022 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	19 Kali	197.940.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	622.146.502	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	571.219.200	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06.0029 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	473.559.888	2.1.2.01.06.0029 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	435.409.200	
2.1.2.01.06.0030 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	80.308.307	2.1.2.01.06.0030 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	73.920.000	
2.1.2.01.06.0032 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	68.278.307	2.1.2.01.06.0032 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	61.890.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.781.270.554	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.426.940.808	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.139.018.723	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.815.723.598	
2.2.2.01.01.0045 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.139.018.723	2.2.2.01.01.0045 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.815.723.598	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	642.251.831	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	611.217.210	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0045 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	642.251.831	2.2.2.01.02.0045 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	611.217.210	
Kec. Gunung Anyar			16.073.631.946	Kec. Gunung Anyar			8.959.328.642	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			14.399.070.879	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			7.566.215.679	
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	11.763.591.281	2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	5.098.440.979	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0036 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.530.818.769	2.1.2.01.02.0036 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.605.076.695	
2.1.2.01.02.0037 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.320.889.756	2.1.2.01.02.0037 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.164.790.919	
2.1.2.01.02.0038 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.937.886.265	2.1.2.01.02.0038 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.172.118.160	
2.1.2.01.02.0039 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.973.996.491	2.1.2.01.02.0039 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.156.455.205	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.858.991.095	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.805.323.500	
2.1.2.01.03.0018 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	215 Lembaga	1.683.606.338	2.1.2.01.03.0018 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	217 Lembaga	1.647.403.500	
2.1.2.01.03.0019 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	175.384.757	2.1.2.01.03.0019 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	24 Kali	157.920.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	253.100.071	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	200.500.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0025 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	253.100.071	2.1.2.01.05.0025 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	64 Kali	200.500.000	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	523.388.432	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	461.951.200	
2.1.2.01.06.0033 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	373.623.936	2.1.2.01.06.0033 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	339.911.200	
2.1.2.01.06.0034 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	80.222.248	2.1.2.01.06.0034 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	30 Kali	66.360.000	
2.1.2.01.06.0036 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	69.542.248	2.1.2.01.06.0036 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	55.680.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.347.794.644	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.101.084.563	
2.2.2.01.01.0046 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.347.794.644	2.2.2.01.01.0046 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.101.084.563	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	326.766.423	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	292.028.400	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0046 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	326.766.423	2.2.2.01.02.0046 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	292.028.400	
Kec. Jambangan				Kec. Jambangan				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	12.176.549.783	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	5.719.519.373	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0040 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.999.503.892	2.1.2.01.02.0040 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	1.008.678.131	
2.1.2.01.02.0041 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	4.590.666.350	2.1.2.01.02.0041 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	1.306.108.974	
2.1.2.01.02.0042 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	2.416.671.622	2.1.2.01.02.0042 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.600.979.988	
2.1.2.01.02.0043 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.169.707.919	2.1.2.01.02.0043 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.803.752.280	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.463.524.000	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.443.444.000	
2.1.2.01.03.0020 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	168 Lembaga	1.393.544.000	2.1.2.01.03.0020 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	168 Lembaga	1.379.924.000	
2.1.2.01.03.0021 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	69.980.000	2.1.2.01.03.0021 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	40 Kali	63.520.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	200.240.000	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	168.500.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0028 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	200.240.000	2.1.2.01.05.0028 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	109 Kali	168.500.000	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	565.629.200	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	471.089.200	
2.1.2.01.06.0037 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	429.269.200	2.1.2.01.06.0037 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	347.649.200	
2.1.2.01.06.0038 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	72.860.000	2.1.2.01.06.0038 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	66.400.000	
2.1.2.01.06.0040 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	63.500.000	2.1.2.01.06.0040 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	57.040.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.427.329.133	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.118.763.889	
2.2.2.01.01.0047 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.427.329.133	2.2.2.01.01.0047 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.118.763.889	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	393.093.300	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	342.473.300	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0047 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	393.093.300	2.2.2.01.02.0047 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	342.473.300	
Kec. Karangpilang 17.111.237.386				Kec. Karangpilang 9.849.803.496				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	12.689.979.538	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	5.923.756.704	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0044 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Pilang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.126.312.396	2.1.2.01.02.0044 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Pilang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.285.944.804	
2.1.2.01.02.0045 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebraon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	5.121.914.993	2.1.2.01.02.0045 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebraon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	1.578.787.480	
2.1.2.01.02.0046 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedurus	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.453.452.009	2.1.2.01.02.0046 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedurus	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.505.617.655	
2.1.2.01.02.0047 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Waru Gunung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.988.300.140	2.1.2.01.02.0047 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Waru Gunung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.553.406.765	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.906.843.500	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.853.803.500	
2.1.2.01.03.0022 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	220 Lembaga	1.777.263.500	2.1.2.01.03.0022 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	220 Lembaga	1.743.083.500	
2.1.2.01.03.0023 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	129.580.000	2.1.2.01.03.0023 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	110.720.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	201.140.000	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	180.560.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0031 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	201.140.000	2.1.2.01.05.0031 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	180.560.000	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	671.749.200	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	590.449.200	
2.1.2.01.06.0041 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	520.439.200	2.1.2.01.06.0041 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	459.979.200	
2.1.2.01.06.0042 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	80.140.000	2.1.2.01.06.0042 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	69.720.000	
2.1.2.01.06.0044 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	71.170.000	2.1.2.01.06.0044 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	60.750.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.352.192.548	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.053.481.492	
2.2.2.01.01.0048 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.352.192.548	2.2.2.01.01.0048 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.053.481.492	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	289.332.600	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	247.752.600	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0048 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	289.332.600	2.2.2.01.02.0048 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	247.752.600	
Kec. Kenjeran			23.079.450.556	Kec. Kenjeran			15.453.090.464	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	16.652.984.143	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	9.536.434.554	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0048 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.292.387.598	2.1.2.01.02.0048 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.204.649.610	
2.1.2.01.02.0049 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	2 Lembaga	3.665.798.904	2.1.2.01.02.0049 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	2.351.010.598	
2.1.2.01.02.0050 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.520.566.285	2.1.2.01.02.0050 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.793.436.098	
2.1.2.01.02.0051 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	6.174.231.356	2.1.2.01.02.0051 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.187.338.248	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.567.714.674	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.490.162.000	
2.1.2.01.03.0024 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	456 Lembaga	3.401.971.215	2.1.2.01.03.0024 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	456 Lembaga	3.351.402.000	
2.1.2.01.03.0025 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	165.743.459	2.1.2.01.03.0025 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	40 Kali	138.760.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	267.478.711	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	211.660.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0034 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	267.478.711	2.1.2.01.05.0034 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	74 Kali	211.660.000	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	630.311.578	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	566.599.200	
2.1.2.01.06.0045 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	476.981.442	2.1.2.01.06.0045 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	436.969.200	
2.1.2.01.06.0046 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	81.570.068	2.1.2.01.06.0046 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	50 Kali	69.720.000	
2.1.2.01.06.0048 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	71.760.068	2.1.2.01.06.0048 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	59.910.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.666.458.721	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.385.513.910	
2.2.2.01.01.0049 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.666.458.721	2.2.2.01.01.0049 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.385.513.910	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	294.502.729	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	262.720.800	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0049 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	294.502.729	2.2.2.01.02.0049 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	262.720.800	
Kec. Krembangan				Kec. Krembangan				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	22.323.256.727	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	10.079.976.946	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0052 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dupak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	3.424.995.908	2.1.2.01.02.0052 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dupak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.738.615.280	
2.1.2.01.02.0053 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemayoran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	5.223.511.855	2.1.2.01.02.0053 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemayoran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.251.962.702	
2.1.2.01.02.0054 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	6.046.784.196	2.1.2.01.02.0054 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	1.626.832.274	
2.1.2.01.02.0055 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.973.332.215	2.1.2.01.02.0055 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.282.548.838	
2.1.2.01.02.0056 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Barat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.654.632.553	2.1.2.01.02.0056 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Barat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	1.180.017.852	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.367.910.482	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.337.561.000	
2.1.2.01.03.0026 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	430 Lembaga	3.206.548.029	2.1.2.01.03.0026 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	431 Lembaga	3.200.161.000	
2.1.2.01.03.0027 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	161.362.453	2.1.2.01.03.0027 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	137.400.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	236.562.453	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	212.320.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0037 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	236.562.453	2.1.2.01.05.0037 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	212.320.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	483.161.691	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	459.529.200	
2.1.2.01.06.0049 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	327.672.229	2.1.2.01.06.0049 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	324.809.200	
2.1.2.01.06.0050 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 kali	82.784.731	2.1.2.01.06.0050 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 kali	72.400.000	
2.1.2.01.06.0052 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan	4 lembaga	72.704.731	2.1.2.01.06.0052 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan	4 lembaga	62.320.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0050 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.079.756.819	2.2.2.01.01.0050 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.806.850.896	
2.2.2.01.01.0050 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.079.756.819	2.2.2.01.01.0050 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.806.850.896	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	607.357.115	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	556.452.800	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0050 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	607.357.115	2.2.2.01.02.0050 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	556.452.800	
Kec. Lakarsantri				Kec. Lakarsantri				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
20.158.329.086				12.924.670.230				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			18.226.288.922	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			11.406.106.741	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	15.681.069.747	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	9.046.621.041	
2.1.2.01.02.0057 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkingan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.355.679.846	2.1.2.01.02.0057 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkingan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.228.672.252	
2.1.2.01.02.0058 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jeruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	2.176.888.995	2.1.2.01.02.0058 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jeruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.774.360.586	
2.1.2.01.02.0059 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakarsantri	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.548.155.275	2.1.2.01.02.0059 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakarsantri	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.496.571.419	
2.1.2.01.02.0060 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.866.207.011	2.1.2.01.02.0060 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.062.673.886	
2.1.2.01.02.0061 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.785.387.594	2.1.2.01.02.0061 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.041.011.235	
2.1.2.01.02.0062 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumurwelut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.948.751.026	2.1.2.01.02.0062 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumurwelut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.443.331.663	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.791.551.976	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.689.176.500	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.03.0028 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	199 Lembaga	1.622.199.425	2.1.2.01.03.0028 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	200 Lembaga	1.582.296.500	
2.1.2.01.03.0029 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	169.352.551	2.1.2.01.03.0029 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	106.880.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	258.835.525	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	198.360.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0040 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	258.835.525	2.1.2.01.05.0040 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	115 Kali	198.360.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	494.831.674	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	471.949.200	
2.1.2.01.06.0053 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	334.068.294	2.1.2.01.06.0053 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	323.589.200	
2.1.2.01.06.0054 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	88.121.690	2.1.2.01.06.0054 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	81.920.000	
2.1.2.01.06.0056 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	72.641.690	2.1.2.01.06.0056 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	66.440.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0051 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.01.01.0051 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				
	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.633.050.663		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.258.226.169	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	298.989.501	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	260.337.320	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0051 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	298.989.501	2.2.2.01.02.0051 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	260.337.320	
Kec. Mulyorejo			31.610.212.360	Kec. Mulyorejo			13.568.307.589	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			28.955.581.914	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			11.286.754.577	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	25.153.039.121	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	7.677.153.477	
2.1.2.01.02.0063 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.849.722.734	2.1.2.01.02.0063 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	1.102.444.905	
2.1.2.01.02.0064 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalijudan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	5.791.251.289	2.1.2.01.02.0064 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalijudan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	1.458.964.866	
2.1.2.01.02.0065 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.787.612.456	2.1.2.01.02.0065 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.074.513.775	
2.1.2.01.02.0066 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.914.524.486	2.1.2.01.02.0066 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	894.374.375	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0067 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	5.711.065.663	2.1.2.01.02.0067 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	1.663.587.561	
2.1.2.01.02.0068 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.098.862.493	2.1.2.01.02.0068 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	1.483.267.995	
2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.810.723.491	2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.753.399.500	
2.1.2.01.03.0030 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	347 Lembaga	2.673.233.032	2.1.2.01.03.0030 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	346 Lembaga	2.638.279.500	
2.1.2.01.03.0031 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	137.490.459	2.1.2.01.03.0031 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	115.120.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	220.110.459	2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	196.380.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0043 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	220.110.459	2.1.2.01.05.0043 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	196.380.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	771.708.843	2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	659.821.600	
2.1.2.01.06.0057 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	548.897.705	2.1.2.01.06.0057 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	473.421.600	
2.1.2.01.06.0058 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	119.205.569	2.1.2.01.06.0058 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	101.000.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06.0060 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	103.605.569	2.1.2.01.06.0060 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	85.400.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran				
87,00 %				87,00 %				
2.276.435.551				1.943.766.582				
2.2.2.01.01.0052 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.276.435.551	2.2.2.01.01.0052 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.943.766.582	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	378.194.895	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	337.786.430	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0052 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	378.194.895	2.2.2.01.02.0052 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	337.786.430	
Kec. Pabean Cantian				Kec. Pabean Cantian				
30.066.174.281				13.749.336.880				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
27.854.892.382				11.944.982.590				
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	24.157.663.078	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	8.364.880.390	
2.1.2.01.02.0069 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.176.412.133	2.1.2.01.02.0069 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	1.393.196.484	
2.1.2.01.02.0070 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	5.047.587.167	2.1.2.01.02.0070 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.870.632.493	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0071 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyamplungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	6.979.203.793	2.1.2.01.02.0071 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyamplungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.239.455.966	
2.1.2.01.02.0072 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.226.660.540	2.1.2.01.02.0072 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.418.958.551	
2.1.2.01.02.0073 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.727.799.445	2.1.2.01.02.0073 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	1.442.636.896	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.968.944.763	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.934.573.000	
2.1.2.01.03.0032 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	377 Lembaga	2.836.010.521	2.1.2.01.03.0032 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	376 Lembaga	2.808.293.000	
2.1.2.01.03.0033 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	132.934.242	2.1.2.01.03.0033 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	126.280.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	247.697.356	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	220.380.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0046 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	247.697.356	2.1.2.01.05.0046 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	220.380.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	480.587.185	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	425.149.200	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06.0061 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	289.142.499	2.1.2.01.06.0061 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	261.609.200	
2.1.2.01.06.0062 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	100.192.343	2.1.2.01.06.0062 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	86.240.000	
2.1.2.01.06.0064 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	91.252.343	2.1.2.01.06.0064 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	77.300.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0053 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.884.208.412	2.2.2.01.01.0053 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.527.294.540	
2.2.2.01.01.0053 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.884.208.412	2.2.2.01.01.0053 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.527.294.540	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	327.073.487	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	277.059.750	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0053 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	327.073.487	2.2.2.01.02.0053 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	277.059.750	
Kec. Pakal				Kec. Pakal				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	13.888.481.021	2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	5.851.321.984	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0074 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.733.249.535	2.1.2.01.02.0074 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	1.520.716.942	
2.1.2.01.02.0075 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.835.869.222	2.1.2.01.02.0075 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.310.376.988	
2.1.2.01.02.0076 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.656.056.891	2.1.2.01.02.0076 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.299.242.416	
2.1.2.01.02.0077 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.663.305.373	2.1.2.01.02.0077 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.720.985.638	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.926.640.256	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.880.456.000	
2.1.2.01.03.0034 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	226 Lembaga	1.804.701.533	2.1.2.01.03.0034 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	229 Lembaga	1.758.896.000	
2.1.2.01.03.0035 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	121.938.723	2.1.2.01.03.0035 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	40 Kali	121.560.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	189.598.723	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	188.780.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0049 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	189.598.723	2.1.2.01.05.0049 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	72 Kali	188.780.000	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	621.247.041	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	535.545.200	
2.1.2.01.06.0065 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	436.546.101	2.1.2.01.06.0065 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	376.425.200	
2.1.2.01.06.0066 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	96.430.470	2.1.2.01.06.0066 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	50 Kali	83.640.000	
2.1.2.01.06.0068 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	88.270.470	2.1.2.01.06.0068 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	75.480.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.588.786.541	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.356.649.265	
2.2.2.01.01.0054 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.588.786.541	2.2.2.01.01.0054 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.356.649.265	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	299.390.542	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	261.660.600	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0054 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	299.390.542	2.2.2.01.02.0054 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	261.660.600	
Kec. Rungkut			38.446.349.173	Kec. Rungkut			17.101.966.217	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	31.300.459.387	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	10.478.254.014	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0078 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirungkut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	6.861.210.949	2.1.2.01.02.0078 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirungkut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	1.627.000.214	
2.1.2.01.02.0079 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.113.540.054	2.1.2.01.02.0079 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.113.671.518	
2.1.2.01.02.0080 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	6.494.996.230	2.1.2.01.02.0080 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	2.031.764.107	
2.1.2.01.02.0081 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penjaringansari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	4.965.833.324	2.1.2.01.02.0081 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penjaringansari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	1.850.708.904	
2.1.2.01.02.0082 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	3.909.352.583	2.1.2.01.02.0082 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	1.307.372.302	
2.1.2.01.02.0083 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.955.526.247	2.1.2.01.02.0083 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	1.547.736.969	
2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.813.053.150	2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.755.246.000	
2.1.2.01.03.0036 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	488 Lembaga	3.646.649.575	2.1.2.01.03.0036 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	488 Lembaga	3.608.126.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.03.0037 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	166.403.575	2.1.2.01.03.0037 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	147.120.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	251.543.575	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	227.740.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0052 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	251.543.575	2.1.2.01.05.0052 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	83 Kali	227.740.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	709.406.692	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	579.391.200	
2.1.2.01.06.0069 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	464.198.586	2.1.2.01.06.0069 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	388.371.200	
2.1.2.01.06.0070 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	127.014.053	2.1.2.01.06.0070 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	99.920.000	
2.1.2.01.06.0072 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	118.194.053	2.1.2.01.06.0072 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	91.100.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.371.886.369	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.061.335.003	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.082.672.433	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.803.222.403	
2.2.2.01.01.0055 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.082.672.433	2.2.2.01.01.0055 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.803.222.403	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	289.213.936	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	258.112.600	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0055 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	289.213.936	2.2.2.01.02.0055 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	258.112.600	
Kec. Sambikerep			23.647.254.258	Kec. Sambikerep			9.034.004.065	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			21.904.419.057	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			7.625.652.654	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	18.909.593.776	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	4.739.127.954	
2.1.2.01.02.0084 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bringin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.018.528.113	2.1.2.01.02.0084 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bringin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	958.351.463	
2.1.2.01.02.0085 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	6.847.325.089	2.1.2.01.02.0085 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	1.195.829.037	
2.1.2.01.02.0086 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Made	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	4.300.052.382	2.1.2.01.02.0086 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Made	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.508.773.271	
2.1.2.01.02.0087 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambikerep	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	5.743.688.192	2.1.2.01.02.0087 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambikerep	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.076.174.183	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.113.617.686	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.068.975.500	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.03.0038 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	250 Lembaga	1.980.188.579		2.1.2.01.03.0038 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	259 Lembaga	1.941.295.500	
2.1.2.01.03.0039 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	133.429.107		2.1.2.01.03.0039 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	127.680.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	241.341.093		2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	228.800.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%				Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0055 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	241.341.093		2.1.2.01.05.0055 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	113 Kali	228.800.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	639.866.502		2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	588.749.200	
2.1.2.01.06.0073 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	449.027.878		2.1.2.01.06.0073 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	391.389.200	
2.1.2.01.06.0074 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	99.259.312		2.1.2.01.06.0074 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	102.520.000	
2.1.2.01.06.0076 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	91.579.312		2.1.2.01.06.0076 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	94.840.000	
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0056 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah					2.2.2.01.01.0056 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	281.900.990	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	202.425.720	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0056 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	281.900.990	2.2.2.01.02.0056 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	202.425.720	
Kec. Sawahan			38.966.503.458	Kec. Sawahan			21.524.345.175	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			35.899.817.304	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			18.767.939.037	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	30.068.501.043	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	13.198.186.837	
2.1.2.01.02.0088 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyu Urip	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.644.404.619	2.1.2.01.02.0088 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyu Urip	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.834.663.915	
2.1.2.01.02.0089 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.586.267.152	2.1.2.01.02.0089 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	1.967.754.040	
2.1.2.01.02.0090 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	4.411.590.586	2.1.2.01.02.0090 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.324.827.853	
2.1.2.01.02.0091 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petemon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	18 Lembaga	7.206.112.255	2.1.2.01.02.0091 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petemon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	18 Lembaga	1.681.135.595	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0092 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Jaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	6.099.561.018	2.1.2.01.02.0092 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Jaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	2.648.856.675	
2.1.2.01.02.0093 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.120.565.413	2.1.2.01.02.0093 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	1.740.948.759	
2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	4.974.070.623	2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	4.843.273.000	
2.1.2.01.03.0040 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	627 Lembaga	4.835.349.882	2.1.2.01.03.0040 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	627 Lembaga	4.728.113.000	
2.1.2.01.03.0041 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	138.720.741	2.1.2.01.03.0041 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	40 Kali	115.160.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	269.880.570	2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	239.500.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0058 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	269.880.570	2.1.2.01.05.0058 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	53 Kali	239.500.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	587.365.068	2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	486.979.200	
2.1.2.01.06.0077 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	419.846.766	2.1.2.01.06.0077 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	345.569.200	
2.1.2.01.06.0078 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	88.334.151	2.1.2.01.06.0078 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	50 Kali	75.280.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06.0080 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	79.184.151	2.1.2.01.06.0080 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	66.130.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0057 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.760.829.530	2.2.2.01.01.0057 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.472.438.288	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				
2.2.2.01.02.0057 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	305.856.624	2.2.2.01.02.0057 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	283.967.850	
Kec. Semampir				Kec. Semampir				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan				2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan				
2.1.2.01.02.0094 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	17 Lembaga	7.045.704.134	2.1.2.01.02.0094 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	17 Lembaga	1.684.499.312	
2.1.2.01.02.0095 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.644.574.007	2.1.2.01.02.0095 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	2.521.270.539	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0096 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	6.699.220.371	2.1.2.01.02.0096 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	2.295.565.278	
2.1.2.01.02.0097 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	5.991.977.088	2.1.2.01.02.0097 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	2.147.607.870	
2.1.2.01.02.0098 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	16 Lembaga	7.523.020.957	2.1.2.01.02.0098 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	16 Lembaga	3.110.762.195	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	4.772.395.384	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	4.751.700.000	
2.1.2.01.03.0042 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	636 Lembaga	4.640.967.692	2.1.2.01.03.0042 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	636 Lembaga	4.639.140.000	
2.1.2.01.03.0043 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	131.427.692	2.1.2.01.03.0043 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	112.560.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	181.127.692	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	179.660.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0061 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	181.127.692	2.1.2.01.05.0061 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	179.660.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	698.472.276	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	610.269.200	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06.0081 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	539.116.892		2.1.2.01.06.0081 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	472.089.200	
2.1.2.01.06.0082 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	82.707.692		2.1.2.01.06.0082 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	72.120.000	
2.1.2.01.06.0084 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	76.647.692		2.1.2.01.06.0084 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	66.060.000	
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0058 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.394.517.395		2.2.2.01.01.0058 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.003.954.829	
2.2.2.01.01.0058 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.394.517.395		2.2.2.01.01.0058 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.003.954.829	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	395.709.292		2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	343.761.600	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0058 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	395.709.292		2.2.2.01.02.0058 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	343.761.600	
Kec. Simokerto					Kec. Simokerto				
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah					2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	22.268.233.010		2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	10.508.336.267	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0099 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.909.204.318	2.1.2.01.02.0099 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.731.463.264	
2.1.2.01.02.0100 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.782.834.560	2.1.2.01.02.0100 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.581.280.681	
2.1.2.01.02.0101 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	5.781.898.240	2.1.2.01.02.0101 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	1.559.799.098	
2.1.2.01.02.0102 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simolawang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.424.564.531	2.1.2.01.02.0102 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simolawang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.678.051.020	
2.1.2.01.02.0103 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.369.731.361	2.1.2.01.02.0103 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	1.957.742.204	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.751.850.831	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.711.107.000	
2.1.2.01.03.0044 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	356 Lembaga	2.679.757.913	2.1.2.01.03.0044 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	356 Lembaga	2.657.267.000	
2.1.2.01.03.0045 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	72.092.918	2.1.2.01.03.0045 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	36 Kali	53.840.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	206.401.219	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	170.660.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0064 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	206.401.219	2.1.2.01.05.0064 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	170.660.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	612.404.952	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	557.789.200	
2.1.2.01.06.0085 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	470.439.116	2.1.2.01.06.0085 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	452.329.200	
2.1.2.01.06.0086 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	75.692.918	2.1.2.01.06.0086 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	57.440.000	
2.1.2.01.06.0088 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	66.272.918	2.1.2.01.06.0088 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	48.020.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.925.226.532	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.567.024.461	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.651.794.586	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.309.422.941	
2.2.2.01.01.0059 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.651.794.586	2.2.2.01.01.0059 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.309.422.941	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	273.431.946	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	257.601.520	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0059 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	273.431.946	2.2.2.01.02.0059 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	257.601.520	
Kec. Sukolilo			34.620.615.367	Kec. Sukolilo			16.568.701.202	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			31.827.489.150	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			14.202.256.833	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	27.412.212.650	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	9.958.676.333	
2.1.2.01.02.0104 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gebang Putih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.052.322.368	2.1.2.01.02.0104 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gebang Putih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	1.559.349.932	
2.1.2.01.02.0105 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	3.682.544.294	2.1.2.01.02.0105 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.295.680.183	
2.1.2.01.02.0106 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.375.762.077	2.1.2.01.02.0106 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.683.209.621	
2.1.2.01.02.0107 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.509.051.239	2.1.2.01.02.0107 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.340.514.639	
2.1.2.01.02.0108 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.973.092.766	2.1.2.01.02.0108 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.549.278.431	
2.1.2.01.02.0109 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.091.704.120	2.1.2.01.02.0109 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.396.791.689	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0110 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	4.727.735.786	2.1.2.01.02.0110 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	1.133.851.838	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.533.252.500	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.451.540.500	
2.1.2.01.03.0046 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	439 Lembaga	3.397.716.500	2.1.2.01.03.0046 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	439 Lembaga	3.334.180.500	
2.1.2.01.03.0047 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	135.536.000	2.1.2.01.03.0047 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	30 Kali	117.360.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	259.056.000	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	234.840.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0067 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	259.056.000	2.1.2.01.05.0067 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	72 Kali	234.840.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	622.968.000	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	557.200.000	
2.1.2.01.06.0089 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	462.206.000	2.1.2.01.06.0089 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	414.550.000	
2.1.2.01.06.0090 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	87.056.000	2.1.2.01.06.0090 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	45 Kali	78.000.000	
2.1.2.01.06.0092 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	73.706.000	2.1.2.01.06.0092 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	64.650.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.793.126.217	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.366.444.369	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.400.947.697	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.011.361.849	
2.2.2.01.01.0060 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.400.947.697	2.2.2.01.01.0060 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.011.361.849	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	392.178.520	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	355.082.520	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0060 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	392.178.520	2.2.2.01.02.0060 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	355.082.520	
Kec. Sukomanunggal			24.106.883.722	Kec. Sukomanunggal			14.324.982.683	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			21.835.091.851	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			12.333.415.464	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	18.353.463.760	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	9.063.277.264	
2.1.2.01.02.0111 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Gede	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.879.461.559	2.1.2.01.02.0111 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Gede	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.206.587.514	
2.1.2.01.02.0112 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.680.429.136	2.1.2.01.02.0112 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	1.274.009.861	
2.1.2.01.02.0113 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	5.259.181.001	2.1.2.01.02.0113 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.234.602.177	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0114 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.501.960.915	2.1.2.01.02.0114 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.184.558.572	
2.1.2.01.02.0115 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.688.199.156	2.1.2.01.02.0115 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.866.261.423	
2.1.2.01.02.0116 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.344.231.993	2.1.2.01.02.0116 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.297.257.717	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.552.293.517	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.507.909.000	
2.1.2.01.03.0048 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	323 Lembaga	2.425.327.501	2.1.2.01.03.0048 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	323 Lembaga	2.398.589.000	
2.1.2.01.03.0049 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	126.966.016	2.1.2.01.03.0049 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	109.320.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	213.306.016	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	177.020.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0070 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	213.306.016	2.1.2.01.05.0070 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	54 Kali	177.020.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	716.028.558	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	585.209.200	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06.0093 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	568.464.062	2.1.2.01.06.0093 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	458.729.200	
2.1.2.01.06.0094 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	81.342.248	2.1.2.01.06.0094 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	70.800.000	
2.1.2.01.06.0096 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	66.222.248	2.1.2.01.06.0096 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	55.680.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0061 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.998.375.834	2.2.2.01.01.0061 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.725.306.799	
2.2.2.01.01.0061 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.998.375.834	2.2.2.01.01.0061 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.725.306.799	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	273.416.037	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	266.260.420	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0061 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	273.416.037	2.2.2.01.02.0061 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	266.260.420	
Kec. Tambaksari				Kec. Tambaksari				
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	38.281.599.054	2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	18.627.690.479	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0117 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.616.093.652	2.1.2.01.02.0117 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.457.583.021	
2.1.2.01.02.0118 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gading	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.132.726.995	2.1.2.01.02.0118 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gading	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	2.333.875.888	
2.1.2.01.02.0119 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.547.660.355	2.1.2.01.02.0119 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.576.741.645	
2.1.2.01.02.0120 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkeling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.648.299.403	2.1.2.01.02.0120 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkeling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	1.918.901.343	
2.1.2.01.02.0121 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkembang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.485.870.762	2.1.2.01.02.0121 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkembang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	1.899.897.727	
2.1.2.01.02.0122 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ploso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.854.908.306	2.1.2.01.02.0122 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ploso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.446.542.219	
2.1.2.01.02.0123 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rangkah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.739.052.325	2.1.2.01.02.0123 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rangkah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.677.386.670	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0124 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaksari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	5.256.987.256	2.1.2.01.02.0124 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaksari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.316.761.966	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	5.590.002.000	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	5.564.552.000	
2.1.2.01.03.0050 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	749 Lembaga	5.452.257.000	2.1.2.01.03.0050 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	749 Lembaga	5.444.912.000	
2.1.2.01.03.0051 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	137.745.000	2.1.2.01.03.0051 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	119.640.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	236.045.000	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	217.940.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0073 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	236.045.000	2.1.2.01.05.0073 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	217.940.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	666.454.200	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	529.899.200	
2.1.2.01.06.0097 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	463.834.200	2.1.2.01.06.0097 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	382.529.200	
2.1.2.01.06.0098 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	108.825.000	2.1.2.01.06.0098 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	81.200.000	
2.1.2.01.06.0100 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	93.795.000	2.1.2.01.06.0100 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	66.170.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			3.001.939.212	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.538.308.278	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.588.263.812	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.153.457.878	
2.2.2.01.01.0062 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.588.263.812	2.2.2.01.01.0062 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.153.457.878	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	413.675.400	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	384.850.400	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0062 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	413.675.400	2.2.2.01.02.0062 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	384.850.400	
Kec. Tandes			28.529.813.732	Kec. Tandes			15.558.923.986	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			26.278.892.975	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			13.728.466.982	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	22.404.450.133	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	9.988.241.282	
2.1.2.01.02.0125 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balongsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.019.253.373	2.1.2.01.02.0125 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balongsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.099.365.478	
2.1.2.01.02.0126 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.265.438.277	2.1.2.01.02.0126 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.387.375.805	
2.1.2.01.02.0127 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Poh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.156.704.956	2.1.2.01.02.0127 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Poh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.676.584.085	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0128 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	5.791.570.982	2.1.2.01.02.0128 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	2.192.898.724	
2.1.2.01.02.0129 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	3.160.494.387	2.1.2.01.02.0129 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.316.509.187	
2.1.2.01.02.0130 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tandes	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.010.988.158	2.1.2.01.02.0130 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tandes	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.315.508.003	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	3.023.872.214	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.993.706.500	
2.1.2.01.03.0052 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	371 Lembaga	2.890.449.357	2.1.2.01.03.0052 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	371 Lembaga	2.879.186.500	
2.1.2.01.03.0053 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	133.422.857	2.1.2.01.03.0053 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	40 Kali	114.520.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	248.682.857	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	223.740.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0076 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	248.682.857	2.1.2.01.05.0076 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	71 Kali	223.740.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	601.887.771	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	522.779.200	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.06.0101 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	443.402.057		2.1.2.01.06.0101 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	372.899.200	
2.1.2.01.06.0102 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	85.422.857		2.1.2.01.06.0102 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	15 Kali	81.120.000	
2.1.2.01.06.0104 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	73.062.857		2.1.2.01.06.0104 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	68.760.000	
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.892.746.100		2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.528.225.204	
2.2.2.01.01.0063 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.892.746.100		2.2.2.01.01.0063 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.528.225.204	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	358.174.657		2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	302.231.800	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0063 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	358.174.657		2.2.2.01.02.0063 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	302.231.800	
Kec. Tegalsari					Kec. Tegalsari				
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah					2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	25.764.806.810		2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	9.485.270.509	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0131 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	6.588.068.812	2.1.2.01.02.0131 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	1.712.377.561	
2.1.2.01.02.0132 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungdoro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	5.740.630.980	2.1.2.01.02.0132 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungdoro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.034.619.679	
2.1.2.01.02.0133 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	3.547.426.686	2.1.2.01.02.0133 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.735.558.385	
2.1.2.01.02.0134 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	4.573.720.346	2.1.2.01.02.0134 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.182.863.818	
2.1.2.01.02.0135 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.314.959.986	2.1.2.01.02.0135 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	1.819.851.066	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.877.122.384	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.786.267.000	
2.1.2.01.03.0054 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	366 Lembaga	2.817.934.692	2.1.2.01.03.0054 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	365 Lembaga	2.734.387.000	
2.1.2.01.03.0055 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	59.187.692	2.1.2.01.03.0055 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	36 Kali	51.880.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	207.407.692	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	202.100.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0079 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	207.407.692	2.1.2.01.05.0079 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	92 Kali	202.100.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	589.752.276	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	514.869.200	
2.1.2.01.06.0105 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	473.596.892	2.1.2.01.06.0105 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	413.329.200	
2.1.2.01.06.0106 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	62.787.692	2.1.2.01.06.0106 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	55.480.000	
2.1.2.01.06.0108 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	53.367.692	2.1.2.01.06.0108 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	46.060.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.947.904.382	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.727.551.024	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.567.614.890	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.364.409.224	
2.2.2.01.01.0064 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.567.614.890	2.2.2.01.01.0064 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.364.409.224	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	380.289.492	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	363.141.800	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0064 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	380.289.492	2.2.2.01.02.0064 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	363.141.800	
Kec. Tenggilis Mejoyo			16.364.027.459	Kec. Tenggilis Mejoyo			10.628.522.086	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen					
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar					
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				14.285.346.232	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah					8.811.775.665
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan		Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	11.820.677.333	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan		Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	6.576.948.965	
2.1.2.01.02.0136 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendangsari		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.566.295.296	2.1.2.01.02.0136 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendangsari		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.780.491.664	
2.1.2.01.02.0137 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutisari		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.616.208.720	2.1.2.01.02.0137 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutisari		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.308.338.965	
2.1.2.01.02.0138 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.413.963.854	2.1.2.01.02.0138 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.539.000.123	
2.1.2.01.02.0139 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	3.224.209.463	2.1.2.01.02.0139 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.949.118.213	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.621.482.784	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.538.897.500	
2.1.2.01.03.0056 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT		Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	176 Lembaga	1.464.150.142	2.1.2.01.03.0056 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT		Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	185 Lembaga	1.432.977.500	
2.1.2.01.03.0057 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian		Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	157.332.642	2.1.2.01.03.0057 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian		Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	40 Kali	105.920.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	195.895.542	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	175.940.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0082 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	195.895.542	2.1.2.01.05.0082 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	175.940.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	647.290.573	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	519.989.200	
2.1.2.01.06.0109 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	468.827.993	2.1.2.01.06.0109 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	395.769.200	
2.1.2.01.06.0110 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	94.001.290	2.1.2.01.06.0110 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	50 Kali	66.880.000	
2.1.2.01.06.0112 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	84.461.290	2.1.2.01.06.0112 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	57.340.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.078.681.227	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.816.746.421	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.775.947.163	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.543.584.141	
2.2.2.01.01.0065 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.775.947.163	2.2.2.01.01.0065 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.543.584.141	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	302.734.064	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	273.162.280	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0065 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	302.734.064	2.2.2.01.02.0065 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	273.162.280	
Kec. Wiyung			19.799.999.860	Kec. Wiyung			11.573.271.637	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen					
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar					
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				17.819.791.024	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah					9.857.261.755
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan		Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	15.114.543.106	2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan		Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	7.362.606.555	
2.1.2.01.02.0140 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babatan		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.700.916.499	2.1.2.01.02.0140 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babatan		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.618.112.372	
2.1.2.01.02.0141 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.170.388.371	2.1.2.01.02.0141 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.602.797.587	
2.1.2.01.02.0142 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.702.979.824	2.1.2.01.02.0142 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.319.215.288	
2.1.2.01.02.0143 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiyung		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.540.258.412	2.1.2.01.02.0143 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiyung		Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	1.822.481.308	
2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.969.319.855	2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	1.846.976.000	
2.1.2.01.03.0058 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT		Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	210 Lembaga	1.837.347.096	2.1.2.01.03.0058 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT		Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	210 Lembaga	1.736.096.000	
2.1.2.01.03.0059 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian		Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	131.972.759	2.1.2.01.03.0059 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian		Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	40 Kali	110.880.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	199.632.759	2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	175.780.000	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0085 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	199.632.759	2.1.2.01.05.0085 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	115 Kali	175.780.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	536.295.304	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	471.899.200	
2.1.2.01.06.0113 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	347.964.168	2.1.2.01.06.0113 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	312.939.200	
2.1.2.01.06.0114 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	98.245.568	2.1.2.01.06.0114 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	50 Kali	83.560.000	
2.1.2.01.06.0116 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	90.085.568	2.1.2.01.06.0116 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	75.400.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.980.208.836	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1.716.009.882	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.687.780.126	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.458.476.982	
2.2.2.01.01.0066 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.687.780.126	2.2.2.01.01.0066 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.458.476.982	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	292.428.710	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	257.532.900	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0066 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	292.428.710	2.2.2.01.02.0066 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	257.532.900	
Kec. Wonocolo			26.342.397.342	Kec. Wonocolo			12.132.042.369	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			24.228.569.003	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			10.322.289.021	
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	21.066.855.614	2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	7.369.318.821	
2.1.2.01.02.0144 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	5.200.227.086	2.1.2.01.02.0144 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	2.112.972.531	
2.1.2.01.02.0145 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	5.292.538.393	2.1.2.01.02.0145 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	1.473.458.420	
2.1.2.01.02.0146 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.611.673.888	2.1.2.01.02.0146 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	1.167.328.246	
2.1.2.01.02.0147 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosermo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	3.741.617.093	2.1.2.01.02.0147 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosermo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.092.932.526	
2.1.2.01.02.0148 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.220.799.154	2.1.2.01.02.0148 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.522.627.098	
2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.285.045.778	2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	2.237.681.000	
2.1.2.01.03.0060 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	278 Lembaga	2.152.903.740	2.1.2.01.03.0060 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	280 Lembaga	2.124.801.000	

PERUBAHAN RKPd KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.03.0061 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	132.142.038	2.1.2.01.03.0061 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	112.880.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	214.362.038	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	195.060.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0088 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	214.362.038	2.1.2.01.05.0088 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	195.060.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	662.305.573	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	520.229.200	
2.1.2.01.06.0117 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	506.120.229	2.1.2.01.06.0117 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	385.929.200	
2.1.2.01.06.0118 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	83.102.672	2.1.2.01.06.0118 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	72.160.000	
2.1.2.01.06.0120 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Wonocolo	4 Lembaga	73.082.672	2.1.2.01.06.0120 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Wonocolo	4 Lembaga	62.140.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.2.2.01.01.0067 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.778.253.161	2.2.2.01.01.0067 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.496.402.948	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	335.575.178	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	313.350.400	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.02.0067 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	335.575.178	2.2.2.01.02.0067 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	313.350.400	
Kec. Wonokromo			36.548.016.933	Kec. Wonokromo			20.187.267.741	
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			34.117.805.823	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			18.184.909.957	
2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	28.583.657.470	2.1.2.01.02 Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	12.886.428.757	
2.1.2.01.02.0149 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Darmo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.308.763.046	2.1.2.01.02.0149 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Darmo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.072.130.336	
2.1.2.01.02.0150 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.302.960.944	2.1.2.01.02.0150 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	2.155.874.604	
2.1.2.01.02.0151 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.538.724.315	2.1.2.01.02.0151 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.459.786.199	
2.1.2.01.02.0152 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	6.906.671.054	2.1.2.01.02.0152 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	1.888.253.698	
2.1.2.01.02.0153 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawunggaling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	5.571.470.470	2.1.2.01.02.0153 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawunggaling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	1.962.408.339	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.1.2.01.02.0154 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokromo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.955.067.641	2.1.2.01.02.0154 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokromo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.347.975.581	
2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	4.425.793.446	2.1.2.01.03 Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	4.332.052.000	
2.1.2.01.03.0062 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	574 Lembaga	4.291.159.717	2.1.2.01.03.0062 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	568 Lembaga	4.217.372.000	
2.1.2.01.03.0063 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	134.633.729	2.1.2.01.03.0063 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	114.680.000	
2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	257.283.998	2.1.2.01.05 Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	232.420.000	
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.05.0091 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	257.283.998	2.1.2.01.05.0091 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	94 Kali	232.420.000	
2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	851.070.909	2.1.2.01.06 Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	734.009.200	
2.1.2.01.06.0121 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	690.174.397	2.1.2.01.06.0121 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	595.689.200	
2.1.2.01.06.0122 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	86.088.256	2.1.2.01.06.0122 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	74.800.000	
2.1.2.01.06.0124 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	74.808.256	2.1.2.01.06.0124 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	63.520.000	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.430.211.110	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.002.357.784	
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.050.008.427	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	1.673.226.884	
2.2.2.01.01.0068 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.050.008.427	2.2.2.01.01.0068 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.673.226.884	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	380.202.683	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	329.130.900	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0068 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	380.202.683	2.2.2.01.02.0068 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	329.130.900	
RSUD Bhakti Dharma Husada			145.094.692.030	RSUD Bhakti Dharma Husada			134.538.270.309	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.2. Kesehatan			98.066.951.999	1.1.1.2. Kesehatan			85.291.925.652	
1.1.1.02.03 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100,00%	34.174.798.660	1.1.1.02.03 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100,00%	43.334.798.660	
1.1.1.02.03.0001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan	2 jenis	34.174.798.660	1.1.1.02.03.0001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan	2 jenis	43.334.798.660	BLUD
1.1.1.02.08 Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar	80,00%	16.542.686.374	1.1.1.02.08 Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar	80,00%	16.542.686.374	
	Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	60,00%			Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	55%		
1.1.1.02.08.0001 Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan	75 kali	15.926.856.954	1.1.1.02.08.0001 Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan	56 kali	15.926.856.954	BLUD
1.1.1.02.08.0002 Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan	115 kali	615.829.420	1.1.1.02.08.0002 Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan	98 kali	615.829.420	BLUD

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
	1.1.1.02.12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Average Length of Stay (AvLOS)	4 Hari	5.182.688.887		1.1.1.02.12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Average Length of Stay (AvLOS)	4 Hari	6.522.688.887	
		Bed Turn Over Ratio (BTO)	45 Kali				Bed Turn Over Ratio (BTO)	45 Kali		
		Turn Over Interval (TOI)	3 Hari				Turn Over Interval (TOI)	3 Hari		
	1.1.1.02.12.0001 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan	11751 orang	3.126.010.372		1.1.1.02.12.0001 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan	11751 orang	3.966.010.372	BLUD
	1.1.1.02.12.0002 Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik	2218 orang	2.056.678.515		1.1.1.02.12.0002 Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik	2494 orang	2.556.678.515	BLUD
	1.1.1.02.16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90,00%	42.166.778.078		1.1.1.02.16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90,00%	18.891.751.731	
	1.1.1.02.16.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran	3 jenis	38.637.469.336		1.1.1.02.16.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran	3 jenis	15.362.442.989	BLUD, APBD
	1.1.1.02.16.0002 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1 jenis	3.529.308.742		1.1.1.02.16.0002 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1 jenis	3.529.308.742	
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan					
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen					
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar					
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				24.999.900	2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				24.999.900	
	2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	24.999.900		2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	24.999.900	
	2.1.2.04.03.0012 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	24.999.900		2.1.2.04.03.0012 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	24.999.900	BLUD
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen					
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar					
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				47.002.740.131	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				49.221.344.757	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	40.202.448.387	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	39.662.775.706	
2.2.2.01.01.0069 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	40.202.448.387	2.2.2.01.01.0069 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	39.662.775.706	BLUD, APBD
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	6.800.291.744	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	9.558.569.051	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0069 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6.800.291.744	2.2.2.01.02.0069 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	9.558.569.051	BLUD
RSUD Dr. Mohamad Soewandie			378.149.217.996	RSUD Dr. Mohamad Soewandie			234.336.208.029	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.2. Kesehatan			296.687.995.323	1.1.1.2. Kesehatan			142.085.730.936	
1.1.1.02.04 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohammad Soewandhie	100,00%	70.999.999.998	1.1.1.02.04 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohammad Soewandhie	100,00%	95.294.346.823	
1.1.1.02.04.0001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan	2 jenis	70.999.999.998	1.1.1.02.04.0001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan	2 jenis	95.294.346.823	BLUD
1.1.1.02.09 Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	50,00%	33.261.213.832	1.1.1.02.09 Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	50,00%	31.532.398.432	
1.1.1.02.09.0001 Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan	4 jenis	476.123.570	1.1.1.02.09.0001 Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan	3 jenis	227.306.670	BLUD
1.1.1.02.09.0002 Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja	200 orang	32.785.090.262	1.1.1.02.09.0002 Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja	86 orang	31.305.091.762	BLUD
1.1.1.02.13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	1,10%	8.267.473.170	1.1.1.02.13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	1,10%	7.333.509.970	
	Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi	1,25%			Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi	1,25%		

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.02.13.0001 Pelayanan Gizi Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit	28340 orang	7.044.510.770		1.1.1.02.13.0001 Pelayanan Gizi Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit	23343 orang	7.044.510.770	BLUD
1.1.1.02.13.0002 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan	180 kali	498.806.000		1.1.1.02.13.0002 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan	180 kali	118.678.000	BLUD
1.1.1.02.13.0003 Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan	155 kali	724.156.400		1.1.1.02.13.0003 Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan	99 kali	170.321.200	BLUD
1.1.1.02.15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	96,25%	184.159.308.323		1.1.1.02.15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	96,25%	7.925.475.711	
1.1.1.02.15.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara	3 jenis	182.974.618.323		1.1.1.02.15.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara	3 jenis	6.740.785.711	BLUD, APBD
1.1.1.02.15.0002 Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan	1 jenis	1.184.690.000		1.1.1.02.15.0002 Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan	1 jenis	1.184.690.000	DAK
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan					2.1.2.4. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	113.580.750		2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	106.701.950	
2.1.2.04.03.0013 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	113.580.750		2.1.2.04.03.0013 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	106.701.950	BLUD
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	65.557.903.627		2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	76.354.036.847	
2.2.2.01.01.0070 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	65.557.903.627		2.2.2.01.01.0070 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	76.354.036.847	BLUD, APBD

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	15.789.738.296	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	15.789.738.296	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0070 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	15.789.738.296	2.2.2.01.02.0070 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	15.789.738.296	BLUD, APBD
Satuan Polisi Pamong Praja			45.405.802.304	Satuan Polisi Pamong Praja			46.993.532.847	
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			40.642.913.135	1.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			42.724.946.213	
1.1.1.05.06 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi	Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	1.746.891.415	1.1.1.05.06 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi	Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	1.698.391.164	
1.1.1.05.06.0001 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	480 kali	1.746.891.415	1.1.1.05.06.0001 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	389 kali	1.698.391.164	
1.1.1.05.07 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	3.190.405.670	1.1.1.05.07 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	2.637.647.931	
1.1.1.05.07.0001 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	192 Kali	2.076.476.106	1.1.1.05.07.0001 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	164 Kali	1.771.896.431	
1.1.1.05.07.0002 Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah penindakan pelanggaran Perda	84 Kali	1.113.929.564	1.1.1.05.07.0002 Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah penindakan pelanggaran Perda	65 Kali	865.751.500	
1.1.1.05.08 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial	Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	33.728.811.867	1.1.1.05.08 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial	Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	36.817.363.753	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
1.1.1.05.08.0001 Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1368 kali	28.860.394.352		1.1.1.05.08.0001 Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1368 kali	32.851.210.607	
1.1.1.05.08.0002 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	1368 Kali	4.868.417.515		1.1.1.05.08.0002 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	1368 Kali	3.966.153.146	
1.1.1.05.09 Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong	Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	100,00%	1.976.804.183		1.1.1.05.09 Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong	Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	100,00%	1.571.543.365	
1.1.1.05.09.0001 Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	96 kali	505.126.547		1.1.1.05.09.0001 Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	44 kali	393.932.000	
1.1.1.05.09.0002 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	132 Kali	1.471.677.636		1.1.1.05.09.0002 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	58 Kali	1.177.611.365	
2. Fungsi Penunjang Urusan					2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.148.142.754		2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	2.103.975.810	
2.2.2.01.01.0071 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.148.142.754		2.2.2.01.01.0071 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.103.975.810	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	2.614.746.415		2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	2.164.610.824	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0071 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.614.746.415		2.2.2.01.02.0071 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.164.610.824	
Sekretariat DPRD			152.642.071.805		Sekretariat DPRD			128.457.129.169	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2. Fungsi Penunjang Urusan				2. Fungsi Penunjang Urusan				
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			110.815.866.736	2.1.2.1. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			86.219.054.768	
2.1.2.01.01 Program Fasilitas Informasi dan Protokol DPRD	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100,00%	97.729.064.688	2.1.2.01.01 Program Fasilitas Informasi dan Protokol DPRD	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100,00%	73.566.289.080	
2.1.2.01.01.0001 Fasilitas Reses DPRD	Jumlah Fasilitas Reses	3 kali	13.479.901.240	2.1.2.01.01.0001 Fasilitas Reses DPRD	Jumlah Fasilitas Reses	3 kali	13.461.504.150	
2.1.2.01.01.0002 Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	185 kali	61.520.111.388	2.1.2.01.01.0002 Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	185 kali	37.534.984.140	
2.1.2.01.01.0003 Penerimaan Studi Banding	Jumlah studi banding yang difasilitasi	240 kali	3.543.492.190	2.1.2.01.01.0003 Penerimaan Studi Banding	Jumlah studi banding yang difasilitasi	240 kali	3.511.095.100	
2.1.2.01.01.0004 Pengendalian Keamanan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan	264 kali	1.337.268.630	2.1.2.01.01.0004 Pengendalian Keamanan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan	264 kali	1.321.991.540	
2.1.2.01.01.0005 Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD	5 media	17.848.291.240	2.1.2.01.01.0005 Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD	5 media	17.736.714.150	
2.1.2.01.04 Program Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	100,00%	3.908.387.115	2.1.2.01.04 Program Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	100,00%	3.594.598.025	
2.1.2.01.04.0001 Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38 kali	3.908.387.115	2.1.2.01.04.0001 Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38 kali	3.594.598.025	
2.1.2.01.07 Program Fasilitas Rapat dan Perundang-Undangan DPRD	Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100,00%	9.178.414.933	2.1.2.01.07 Program Fasilitas Rapat dan Perundang-Undangan DPRD	Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100,00%	9.058.167.663	
2.1.2.01.07.0001 Pembahasan dan Penyusunan Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 dokumen	4.244.775.613	2.1.2.01.07.0001 Pembahasan dan Penyusunan Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 dokumen	4.163.466.523	
2.1.2.01.07.0002 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan	930 kali	2.774.429.050	2.1.2.01.07.0002 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan	930 kali	2.728.439.960	
2.1.2.01.07.0003 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan	45 kali	2.159.210.270	2.1.2.01.07.0003 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan	45 kali	2.166.261.180	
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			41.826.205.069	2.2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran			42.238.074.401	

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Sumber Dana
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	29.760.353.104	2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	32.019.594.771	
2.2.2.01.01.0072 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	29.760.353.104	2.2.2.01.01.0072 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	32.019.594.771	
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	12.065.851.965	2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	10.218.479.630	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0072 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	12.065.851.965	2.2.2.01.02.0072 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	10.218.479.630	
TOTAL			7.673.498.079.394	TOTAL			6.246.127.805.810	

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2020, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun kedua melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

PERUBAHAN RKPD KOTA SURABAYA

TAHUN 2020

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006